LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

TA. 2023

Audited

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu dalam hidup dan kehidupan ini, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang sejahtera adil dan makmur.

Sesuai misi utama dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk terus berusaha meningkatkan secara efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka semangat desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas selalu mewarnai proses penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada umumnya serta pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Kebutuhan akan adanya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah telah mensyaratkan Pemerintah untuk terus membenahi berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan daerah dan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi dan pelaporan keuangan.

Sesuai amanat pasal 31 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan, atas dasar hal tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna pelaporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan juga sebagai informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Disadari bahwa Laporan Keuangan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu Pemerintah sangat mengharapkan saran pendapatan dan kritik dari semua pihak dalam rangka pembenahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah kedepan. Semoga apa yang telah tersusun dan dihasilkan dalam Laporan Keuangan ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua.

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI i

3. DAFTAR TABEL iii

4. DAFTAR LAMPIRAN vii

5. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 1

6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2

7. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4

8. NERACA 5

9. LAPORAN OPERASIONAL 7

10. LAPORAN ARUS KAS 9

11. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 12

12. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN 13-18

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 15

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 16

1.3. Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 18

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 19-44

2.1. Ekonomi Makro 19

2.2. Kebijakan Keuangan 28

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 39

2.4. *Mandatory Spending* Dalam Postur Apbd 40

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 45-52

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 45

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 52

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 53-68

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 53

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 55

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 57

BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 69-213
A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Akun Laporan Keuangan.....69
5.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran 73
5.2. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....114
5.3. Penjelasan Akun-akun Neraca.....115
5.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional.....177
5.5. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas.....202
5.6. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas 210
B. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan 215
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN.....214-217
BAB VII PENUTUP.....220

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010 19
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010 20
Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010 20
Tabel 2.4 IHK Dan Tingkat Inflasi Gabungan Provinsi NTT Desember 2023 21
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao 23
Tabel 2.6 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao 23
Tabel 2.7 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao 23
Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao 24
Tabel 2.9 *Gini Ratio* Provinsi NTT 25
Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rote Ndao 25
Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao 26
Tabel 2.12 Tingkat Inflasi Kabupaten Rote Ndao 27
Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 27
Tabel 2.14 Siklus Penyusunan dan Penetapan APBD Sert Perubahan APBD 37
Tabel 2.15 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao 38
Tabel 2.16 Kategori Capaian Kinerja 39
Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 40
Tabel 2.18 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 41
Tabel 2.19 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 42
Tabel 2.20 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 43
Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 43
Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao 44
Tabel 3.1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi TA.2023 45
Tabel 3.2 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2023 45
Tabel 3.3 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA.2023 46
Tabel 3.4 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA.2023 47
Tabel 3.5 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Perangkat Daerah TA.2023 47
Tabel 3.6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja per Perangkat Daerah TA.2023 48
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 49
Tabel 4.1 Entitas Akuntansi TA.2023 54
Tabel 4.2 Kebijakan Akuntansi Presentase Penyisihan Piutang 59
Tabel 4.3 Kebijakan Akuntansi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap 62
Tabel 5.1 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2023 dan TA.2022 70
Tabel 5.2 Ringkasan Laporan Perubahan SAL TA.2023 70

Tabel 5.3 Ringkasan Neraca TA.2023 dan TA.2022 71
Tabel 5.4 Ringkasan Laporan Operasional (LO) TA.2023 dan TA.2022....71
Tabel 5.5 Ringkasan Arus Kas TA.2023 dan TA.2022....72
Tabel 5.6 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA.2023 dan TA.2022....72
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah....73
Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah....75
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah....75
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah....78
Tabel 5.11 Penyertaan Modal Pada PT.BPD Bank NTT....80
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah....81
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer....82
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan....83
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Bagi Hasil Pajak....84
Tabel 5.16 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022....86
Tabel 5.17 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022....87
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak....89
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS....91
Tabel 5.20 Penerimaan Dana Kapitasi JKN TA.2023 dan TA.2022 per Puskesmas....91
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja....92
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi....93
Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai....94
Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa....96
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah....98
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi....98
Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Partai Politik....103
Tabel 5.28 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal....106
Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan TA.2022....106
Tabel 5.30 Penetapan dan Realisasi Belanja Tak Terduga Untuk Bantuan Bencana TA.2023 dan TA. 2022....108
Tabel 5.31 Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa....110
Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan....112
Tabel 5.33 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran....113
Tabel 5.34 Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022....116
Tabel 5.35 Mutasi Kas 1 Januari 2020 S.D 31 Desember 2023....117
Tabel 5.36 Sisa kas berupa Uang Persediaan yang belum disetor TA.2023....118
Tabel 5.37 Sisa kas berupa Pengembalian Belanja Hibah TA. 2023....118
Tabel 5.38 Sisa kas berupa Pengembalian Belanja Barang dan Jasa TA. 2023....118
Tabel 5.39 Sisa Kas pada Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional....119
Tabel 5.40 Sisa Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan....120
Tabel 5.41 Sisa kas berupa pajak restoran yang belum disetor TA.2023....122
Tabel 5.42 Sisa kas bendahara pengeluaran berupa utang PFK per Perangkat Daerah....122
Tabel 5.43 Piutang Pendapatan....123
Tabel 5.44 Piutang Pajak....123
Tabel 5.45 Piutang Pajak Hotel....123
Tabel 5.46 Piutang Pajak Hotel Melati 3....124
Tabel 5.47 Piutang Pajak Hotel Melati 1....124

Tabel 5.48 Piutang Pajak Rumah Kos 124
Tabel 5.49 Piutang Pajak Restoran 125
Tabel 5.50 Piutang Pajak Hiburan 125
Tabel 5.51 Piutang Pajak Reklame 125
Tabel 5.52 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan....126
Tabel 5.53 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan....126
Tabel 5.54 Piutang PBB-P2....127
Tabel 5.55 Piutang Retribusi 128
Tabel 5.56 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 128
Tabel 5.57 Ringkasan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 130
Tabel 5.58 Rincian Piutang Lain-Lain TA.2023 dan TA.2022 132
Tabel 5.59 Piutang Denda Keterlambatan pada Perangkat Daerah Dinas PKO 133
Tabel 5.60 Penyisihan Piutang Pajak....136
Tabel 5.61 Penyisihan Piutang Retribusi 136
Tabel 5.62 Daftar Umur Piutang Lainnya....137
Tabel 5.63 Persediaan Perjenis Barang....140
Tabel 5.64 Persediaan Barang Yang Belum Memiliki Nilai 141
Tabel 5.65 Ringkasan Dana Bergulir Per Perangkat Daerah....143
Tabel 5.66 Penyisihan Dana Bergulir 144
Tabel 5.67 Nilai Investasi Permanen TA.2023 dan TA.2022 145
Tabel 5.68 Nilai Perolehan Investasi Permanen PDAM 147
Tabel 5.69 Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 147
Tabel 5.70 Hibah Tanah 149
Tabel 5.71 Mutasi Tambah Nilai Peralatan dan Mesin 150
Tabel 5.72 Mutasi Kurang Nilai Peralatan dan Mesin 152
Tabel 5.73 Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan 154
Tabel 5.74 Mutasi Tambah Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan 157
Tabel 5.75 Akumulasi Penyusutan 163
Tabel 5.76 Aset Lainnya....164
Tabel 5.77 Aset Lain-Lain....167
Tabel 5.78 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 171
Tabel 5.79 Utang PFK Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan BUD....172
Tabel 5.80 Pendapatan diterima dimuka....174
Tabel 5.81 Rincian Utang Belanja Pegawai....175
Tabel 5.82 Laporan Operasional....177
Tabel 5.83 Pendapatan-LO 177
Tabel 5.84 Pendapatan Asli Daerah-LO 178
Tabel 5.85 Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2022....178
Tabel 5.86 Pendapatan Pajak-LO yang diakui Bersamaan Penerimaan Kas 179
Tabel 5.87 Pendapatan Retribusi -LO....180
Tabel 5.88 Lain-Lain PAD yang Sah-LO 183
Tabel 5.89 Pendapatan Transfer-LO....184
Tabel 5.90 Pendapatan Hibah – LO....187
Tabel 5.91 Beban Operasi....188
Tabel 5.92 Beban Pegawai 189
Tabel 5.93 Beban Persediaan....190
Tabel 5.94 Beban Jasa 194
Tabel 5.95 Beban Pemeliharaan 195
Tabel 5.96 Beban Hibah 197
Tabel 5.97 Beban Bantuan Sosial 198

Tabel 5.98 Beban Penyusutan dan Amortisasi 199
Tabel 5.99 Beban Penyisihan Piutang 199
Tabel 5.100 Beban Lain-Lain 200
Tabel 5.101 Beban Transfer 201
Tabel 5.102 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 202
Tabel 5.103 Perbedaan Penerimaan Laporan Arus Kas Dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran 203
Tabel 5.104 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 204
Tabel 5.105 Perbedaan Pengeluaran Laporan Arus Kas dan Belanja Laporan Realisasi Anggaran 204
Tabel 5.106 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 205
Tabel 5.107 Perbedaan Pengeluaran Laporan Arus Kas dengan Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran 206
Tabel 5.108 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris 208
Tabel 6.1 Data Pegawai Tetap/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 215
Tabel 6.2 Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 216

DAFTAR LAMPIRAN CALK

Lampiran 1 Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per Perangkat Daerah

Lampiran 2 Tabel Rincian Sisa Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023

Lampiran 3 Tabel Nilai Persediaan 2022 dan 2021 Per Perangkat Daerah

Lampiran 4 Tabel Rekapan Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

Lampiran 5 Tabel Rekapan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

Lampiran 6 Tabel Rekapan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023

Lampiran 7 Tabel Rekapan Mutasi Aset tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

Lampiran 8 Tabel Rekapan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap Tahun 2023

Lampiran 9 Tabel Mutasi Aset Lain-lain Per Perangkat Daerah Tahun 2023

Lampiran 10 Tabel Beban Pegawai

Lampiran 11 Tabel Beban Persediaan

Lampiran 12 Tabel Beban Jasa

Lampiran 13 Tabel Beban Perjalanan Dinas

Lampiran Laporan Keuangan *Unaudited* PD.Ita Esa TA.2018

Lampiran Laporan Keuangan *Audited* PDAM TA.2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ba'a, 28 Maret 2024

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
1	2		3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**		**905.075.929.387,00**	**895.421.393.437,59**	**98,93**	**800.695.726.668,95**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**		**29.675.022.844,00**	**33.885.585.638,59**	**114,19**	**24.189.482.297,00**
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5 1 1 1 I 1	11.915.649.300,00	15.934.199.650,70	132,97	11.165.927.823,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5 1 1 1 I 2	8.002.986.400,00	7.612.877.375,00	95,13	5.486.843.025,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5 1 1 1 I 3	7.132.456.526,00	7.132.456.526,00	100,00	3.920.741.531,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5 1 1 1 I 4	2.623.930.618,00	3.206.052.086,89	122,19	3.615.969.918,00
7	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**		**868.598.706.543,00**	**854.349.477.695,00**	**98,36**	**744.438.850.855,00**
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA**		**716.130.823.531,00**	**708.357.093.249,00**	**98,91**	**623.618.977.040,00**
9	Dana Bagi Hasil	5 1 1 1 II 1 a	5.475.104.000,00	6.640.039.767,00	121,28	10.570.069.081,00
10	Dana Alokasi Umum	5 1 1 1 II 1 b	438.961.153.000,00	438.961.153.000,00	100,00	419.857.979.000,00
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	5 1 1 1 II 1 c	164.606.322.876,00	159.090.994.820,00	96,65	138.234.076.845,00
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5 1 1 1 II 1 d	107.088.243.655,00	103.664.905.662,00	96,80	54.956.852.114,00
13	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA**		**124.562.286.000,00**	**124.562.286.000,00**	100,00	**103.415.684.000,00**
14	Dana Insentif Daerah	5 1 1 1 II 2 a	16.751.396.000,00	16.751.396.000,00	100,00	4.837.632.000,00
15	Dana Desa	5 1 1 1 II 2 b	107.810.890.000,00	107.810.890.000,00	100,00	98.578.052.000,00
16	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**27.905.597.012,00**	**21.430.098.446,00**	76,79	**17.404.189.815,00**
17	Pendapatan Bagi Hasil	5 1 1 1 II 3 a	27.905.597.012,00	21.430.098.446,00	76,79	16.520.989.815,00
18	Bantuan Keuangan	5 1 1 1 II 3 b	0,00	0,00	0,00	883.200.000,00
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**		**6.802.200.000,00**	**7.186.330.104,00**	**105,65**	**32.067.393.516,95**
20	Pendapatan Hibah		0,00	28.605.877,00	0,00	20.628.091,95
21	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	5 1 1 1 III a	0,00	28.605.877,00	0,00	20.628.091,95
22	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		6.802.200.000,00	7.157.724.227,00	105,23	32.046.765.425,00
23	Lain-lain Pendapatan	5 1 1 1 III b	0,00	0,00	0,00	26.975.575.692,00
24	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5 1 1 1 III c	6.802.200.000,00	7.157.724.227,00	105,23	5.071.189.733,00

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
1	2		3	4	5	6
25	**BELANJA**		**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**92,84**	**813.429.616.328,05**
26	**BELANJA OPERASI**		**575.126.152.125,00**	**517.439.019.579,73**	**89,97**	**511.901.906.714,05**
27	Belanja Pegawai	5 1 1 2 I 1	325.494.786.576,00	290.635.690.990,00	89,29	286.229.161.198,00
28	Belanja Barang dan Jasa	5 1 1 2 I 2	223.130.688.749,00	203.443.748.164,73	91,23	216.805.591.727,05
29	Belanja Hibah	5 1 1 2 I 3	25.900.676.800,00	22.759.580.425,00	87,77	7.450.653.789,00
30	Belanja Bantuan Sosial	5 1 1 2 I 4	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.416.500.000,00
31	**BELANJA MODAL**		**190.643.870.709,00**	**182.700.144.208,00**	**95,83**	**156.236.433.484,00**
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5 1 1 2 II	34.584.519.202,00	28.662.841.889,00	82,88	31.035.410.792,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5 1 1 2 II	43.066.284.851,00	41.754.600.518,00	96,95	28.309.558.041,00
35	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 1 1 2 II	111.456.944.987,00	110.801.545.523,00	99,41	95.939.001.903,00
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5 1 1 2 II	1.536.121.669,00	1.481.156.278,00	96,42	952.462.748,00
37	**BELANJA TAK TERDUGA**		**1.058.969.525,00**	**886.938.096,00**	**83,75**	**524.831.500,00**
38	Belanja Tak Terduga	5 1 1 2 III	1.058.969.525,00	886.938.096,00	83,75	524.831.500,00
39	**BELANJA TRANSFER**		**154.817.772.370,00**	**154.621.155.794,00**	**99,87**	**144.766.444.630,00**
40	**Belanja Bagi Hasil**		**1.985.868.570,00**	**1.789.251.994,00**	**90,10**	**1.429.878.630,00**
41	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5 1 1 2 IV 1	1.188.562.590,00	1.144.499.136,00	96,29	942.220.150,00
42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5 1 1 2 IV 1	797.305.980,00	644.752.858,00	80,87	487.658.480,00
43	**Belanja Bantuan Keuangan**		**152.831.903.800,00**	**152.831.903.800,00**	**100,00**	**143.336.566.000,00**
44	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5 1 1 2 IV 2	0,00	0,00	0,00	43.658.514.000,00
45	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5 1 1 2 IV 2	152.831.903.800,00	152.831.903.800,00	100,00	99.678.052.000,00
46	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**5 1 1 3**	**(16.570.835.342,00)**	**39.774.135.759,86**	**(240,02)**	**(12.733.889.659,10)**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (Audited)	%	REALISASI 2022 (Audited)
1	2		3	4	5	6
47	**PEMBIAYAAN**					
48	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		**27.070.835.342,00**	**27.317.749.314,49**	**100,91**	**50.304.725.000,85**
49	Penggunaan SiLPA	5 1 1 4 I	27.070.835.342,00	27.070.835.341,75	100,00	50.207.842.591,10
50	Koreksi Saldo awal	5 1 1 4 I	0,00	246.913.972,74	0,00	96.882.409,75
52	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		**10.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	**100,00**	**10.500.000.000,00**
53	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5 1 1 4 II	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	10.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**5 1 1 4 III**	**16.570.835.342,00**	**16.817.749.314,49**	**101,49**	**39.804.725.000,85**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**5 1 1 5**	**0,00**	**56.591.885.074,35**	**0,00**	**27.070.835.341,75**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODERMAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2023 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5 1 2 1	**27.070.835.341,75**	**50.882.842.591,10**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5 1 2 2	27.317.749.314,49	50.304.725.000,85
3	**Sub Total**		**(246.913.972,74)**	**578.117.590,25**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5 1 2 3	56.591.885.074,35	27.070.835.341,75
5	**Sub Total**		**56.344.971.101,61**	**27.648.952.932,00**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5 1 2 4	246.913.972,74	96.882.409,75
7	Lain-lain	5 1 2 5	0,00	(675.000.000,00)
8	**Sub Total**		**246.913.972,74**	**(578.117.590,25)**
9	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**		**56.591.885.074,35**	**27.070.835.341,75**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)	Bertambah/ (Berkurang)
1	**ASET**	**5131**			
2	**ASET LANCAR**	**5131I**			
3	Kas di Kas Daerah	5131I1	52.933.505.110,96	26.313.711.797,24	26.123.428.621,72
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5131I3	299.382.885,49	44.285.491,00	591.288.245,49
5	Kas Di Bendahara FKTP	5131I4	2.903.224.016,00	452.339.235,00	2.450.884.781,00
6	Kas Di Bendahara BOS	5131I5	29.782.696,20	71.125.380,76	(42.896.356,83)
7	Kas Lainnya	5131I6	55.254.692,13	7.672.345.259,75	(7.183.960.029,58)
8	Piutang Pendapatan	5131I7	13.393.498.310,87	13.116.810.502,39	(7.865.770.522,52)
9	Piutang Pajak	5131I7a	5.403.549.254,11	4.888.463.444,11	145.467.728,00
10	Piutang Retribusi	5131I7b	2.672.817.450,00	787.634.950,00	(570.785.700,00)
11	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	5131I7c	5.217.150.924,00	6.770.805.602,00	(6.770.805.602,00)
12	Piutang Lain-lain PAD yang sah		99.980.682,76	669.906.506,28	(669.646.948,52)
13	Piutang Lainnya	5131I8	2.610.378.275,00	2.610.378.275,00	0,00
14	Penyisihan Piutang	5131I9	(6.819.185.449,69)	(6.482.010.013,84)	(333.213.595,15)
15	Penyisihan Piutang Pendapatan	5131I91	(4.208.807.174,69)	(3.871.631.738,84)	(333.213.595,15)
16	Penyisihan Piutang Pajak	5131I91a	(4.029.327.446,81)	(3.667.716.725,96)	(357.648.880,15)
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5131I91b	(179.466.750,00)	(203.902.035,00)	24.435.285,00
18	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah		(12.977,88)	(12.977,88)	0,00
19	Penyisihan Piutang Lainnya	5131I92	(2.610.378.275,00)	(2.610.378.275,00)	0,00
20	Persediaan	5131I10	14.835.529.834,40	14.122.633.085,15	2.772.117.647,72
21	**JUMLAH ASET LANCAR**		**80.241.370.371,36**	**57.921.619.012,45**	**16.511.878.791,85**
22	**INVESTASI JANGKA PANJANG**				
23	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Dana Bergulir	5131II1a	5.683.814.012,00	5.683.814.012,00	0,00
25	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	5131II1b	(5.683.814.012,00)	(5.683.814.012,00)	0,00
26	**Investasi Jangka Panjang Permanen**		**91.499.961.235,00**	**80.763.885.136,00**	**10.528.857.714,00**
27	Penyertaan Modal Pemda	5131II2	91.499.961.235,00	80.763.885.136,00	10.528.857.714,00
28	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**91.499.961.235,00**	**80.763.885.136,00**	**10.528.857.714,00**
29	**ASET TETAP**				
30	Tanah	5131III1	161.574.875.323,12	161.762.034.526,12	(187.159.203,00)
31	Peralatan dan Mesin	5131III2	384.747.446.716,35	357.932.771.679,51	23.875.499.549,00
32	Gedung dan Bangunan	5131III3	629.315.624.017,48	576.431.058.768,85	52.130.256.727,00
33	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5131III4	1.327.532.806.526,88	1.214.859.410.160,40	113.135.978.903,00
34	Aset Tetap Lainnya	5131III5	32.187.162.050,00	31.883.468.184,00	303.693.866,00
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5131III6	4.003.432.984,60	126.500.000,00	3.768.978.950,00
36	Akumulasi Penyusutan	5131III7	(994.665.429.583,14)	(887.852.787.067,92)	(106.391.567.928,43)
37	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.544.695.918.035,29**	**1.455.142.456.250,96**	**86.635.680.865,57**
38	**DANA CADANGAN**				
39	**JUMLAH DANA CADANGAN**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)	Bertambah/ (Berkurang)
40	**ASET LAINNYA**				
41	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5 1 3 1 IV 2	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
42	Aset Tidak Berwujud	5 1 3 1 IV 3	800.770.000,00	800.770.000,00	0,00
43	Akumulasi Amortisasi	5 1 3 1 IV 4	(736.770.000,00)	(704.770.000,00)	(32.000.000,00)
44	Aset Lain-lain	5 1 3 1 IV 5	65.603.320.173,44	68.227.637.749,39	(3.903.467.521,00)
45	Akumulasi Penyusutan		(11.781.062.913,21)	(14.067.678.144,08)	2.286.615.230,87
46	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**53.976.257.260,23**	**54.345.959.605,31**	**(1.648.852.290,13)**
47	**JUMLAH ASET**		**1.770.413.506.901,88**	**1.648.173.920.004,72**	**112.027.565.081,30**
48	**KEWAJIBAN**				
49	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
50	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 1 3 2 1	48.054.149,43	7.482.971.822,00	(7.445.375.733,00)
51	Pendapatan Diterima Dimuka	5 1 3 2 2	107.066.666,67	148.433.333,33	(41.366.666,67)
52	Utang Belanja	5 1 3 2 3	186.986.123,60	46.783.737,00	2.753.352,00
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	5 1 3 2 4	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
54	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**2.742.106.939,70**	**10.078.188.892,33**	**(7.483.989.047,67)**
55	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**				
56	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**2.742.106.939,70**	**10.078.188.892,33**	**(7.483.989.047,67)**
58	**EKUITAS**				
59	**EKUITAS**	**5 1 3 3**	1.767.671.399.962,18	1.638.095.731.112,39	119.511.554.128,96
60	**JUMLAH EKUITAS**		**1.767.671.399.962,18**	**1.638.095.731.112,39**	**119.511.554.128,96**
61	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**1.770.413.506.901,88**	**1.648.173.920.004,72**	**112.027.565.081,30**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REFF	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5 1 4 1 a 1	16.449.285.460,70	11.391.991.656,00	5.057.293.804,70
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5 1 4 1 a 2	9.539.426.541,66	5.482.346.141,67	4.057.080.399,99
5	Pendapatan Hasil PengeLOlaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	5 1 4 1 a 3	7.132.456.526,00	3.920.741.531,00	3.211.714.995,00
6	Lain-Lain Pad Yang Sah - LO	5 1 4 1 a 4	2.713.836.342,23	3.615.229.475,76	(901.393.133,53)
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (JUMLAH 3 S/D 6)**		**35.835.004.870,59**	**24.410.308.804,43**	**11.424.696.066,16**
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA**				
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO**				
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5 1 4 1 b	5.992.526.716,00	11.640.276.132,00	(5.647.749.416,00)
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5 1 4 1 b	438.961.153.000,00	419.857.979.000,00	19.103.174.000,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO	5 1 4 1 b	159.090.994.820,00	138.234.076.845,00	20.856.917.975,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	5 1 4 1 b	103.664.905.662,00	54.956.852.114,00	48.708.053.548,00
15	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO (JUMLAH 11 S/D 14)**		**707.709.580.198,00**	**624.689.184.091,00**	**83.020.396.107,00**
16	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO**		**16.751.396.000,00**	**4.837.632.000,00**	**11.913.764.000,00**
17	Dana Insentif Daerah-LO		16.751.396.000,00	4.837.632.000,00	11.913.764.000,00
18	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO (JUMLAH 17)**		**16.751.396.000,00**	**4.837.632.000,00**	**11.913.764.000,00**
19	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO**				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		19.876.443.768,00	18.706.814.292,00	1.169.629.476,00
21	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	5 1 4 1 b	0,00	100.743.200.000,00	(100.743.200.000,00)
22	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO (JUMLAH 20 + 21)**		**19.876.443.768,00**	**119.450.014.292,00**	**(99.573.570.524,00)**
23	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO (15+18+22)**		**744.337.419.966,00**	**748.976.830.383,00**	**(4.639.410.417,00)**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO**				
25	Sumbangan Pihak ketiga/sejenisnya		28.605.877,00	20.628.091,95	7.977.785,05
26	Pendapatan Hibah - LO	5 1 4 1 c	2.472.890.552,00	26.975.575.692,00	(24.502.685.140,00)
27	Pendapatan Lainnya - LO	5 1 4 1 c	7.157.724.227,00	5.071.189.733,00	2.086.534.494,00
28	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO (JUMLAH 25 S/D 27)**		**9.659.220.656,00**	**32.067.393.516,95**	**(22.408.172.860,95)**
29	**JUMLAH PENDAPATAN - LO (7+23+28)**		**789.831.645.492,59**	**805.454.532.704,38**	**(15.622.887.211,79)**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REFF	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
30	**BEBAN OPERASI**				
31	Beban Pegawai	5 1 4 2 I 1	290.634.216.438,00	286.220.013.860,00	4.414.202.578,00
32	Beban Persediaan	5 1 4 2 I 2	96.170.646.798,77	55.330.894.329,60	40.839.752.469,17
33	Beban Jasa	5 1 4 2 I 3	66.244.080.167,73	74.729.762.389,00	(8.485.682.221,27)
34	Beban Pemeliharaan	5 1 4 2 I 4	1.676.524.645,00	4.930.750.606,00	(3.254.225.961,00)
35	Beban Perjalanan Dinas	5 1 4 2 I 5	33.268.477.002,00	41.527.753.723,00	(8.259.276.721,00)
36	Beban Hibah	5 1 4 2 I 7	22.946.739.628,00	73.384.396.334,86	(50.437.656.706,86)
37	Beban Bantuan Sosial	5 1 4 2 I 8	4.839.783.896,00	101.522.500.000,00	(96.682.716.104,00)
38	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	5 1 4 2 I 9	108.575.001.841,59	93.280.614.649,76	15.294.387.191,83
39	Beban Penyisihan Piutang	5 1 4 2 I 10	414.885.514,70	153.662.094,78	261.223.419,92
40	Beban Lain-Lain	5 1 4 2 I 11	8.348.858.050,55	5.256.200.507,54	3.092.657.543,01
41	**JUMLAH BEBAN OPERASI (JUMLAH 31 S/D 40)**		**633.119.213.982,34**	**736.336.548.494,54**	**(103.217.334.512,20)**
42	**BEBAN TRANSFER**				
43	Beban Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	5 1 4 2 II	1.789.251.994,00	1.429.878.630,00	359.373.364,00
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5 1 4 2 II	45.021.013.800,00	44.758.514.000,00	262.499.800,00
45	**JUMLAH BEBAN TRANSFER (JUMLAH 43 + 44)**		**46.810.265.794,00**	**46.188.392.630,00**	**621.873.164,00**
46	**JUMLAH BEBAN (JUMLAH 41+ 45)**		**679.929.479.776,34**	**782.524.941.124,54**	**(102.595.461.348,20)**
47	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (29-46)**		**109.902.165.716,25**	**22.929.591.579,84**	**86.972.574.136,42**
48	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(23.500.000,00)	(736.364.577,00)	712.864.577,00
49	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**		**(23.500.000,00)**	**(736.364.577,00)**	**712.864.577,00**
50	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**		**(23.500.000,00)**	**(736.364.577,00)**	**712.864.577,00**
51	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (47+50)**		**109.878.665.716,25**	**22.193.227.002,84**	**87.685.438.713,42**
52	**POS LUAR BIASA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**SURPLUS/DEFISIT-LO (51+53)**	**5 1 4 5**	**109.878.665.716,25**	**22.193.227.002,84**	**87.685.438.713,42**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODERMAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
1	2	3	4	5
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**			
2	**Arus Kas Masuk:**			
3	Pendapatan Pajak Daerah	5 1 5 1 1	15.934.199.650,70	11.165.927.823,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5 1 5 1 1	7.612.877.375,00	5.486.843.025,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5 1 5 1 1	7.132.456.526,00	3.920.741.531,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5 1 5 1 1	1.740.887.705,89	3.615.969.918,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5 1 5 1 1	6.640.039.767,00	10.570.069.081,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	5 1 5 1 1	438.961.153.000,00	419.857.979.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5 1 5 1 1	159.090.994.820,00	138.234.076.845,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5 1 5 1 1	103.664.905.662,00	54.956.852.114,00
11	Pendapatan Hibah	5 1 5 1 1	28.605.877,00	20.628.091,95
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5 1 5 1 1	21.430.098.446,00	16.520.989.815,00
14	Pendapatan Lain-lain	5 1 5 1 1	0,00	26.975.575.692,00
15	Bantuan Keuangan	5 1 5 1 1	0,00	883.200.000,00
16	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5 1 5 1 1	16.751.396.000,00	4.837.632.000,00
17	Penerimaan Dana Desa	5 1 5 1 1	107.810.890.000,00	98.578.052.000,00
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5 1 5 1 1	7.157.724.227,00	5.071.189.733,00
19	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**893.956.229.056,59**	**800.695.726.668,95**
20	**Arus Kas Keluar:**			
21	Belanja Pegawai	5 1 5 1 2	290.635.690.990,00	286.229.161.198,00
22	Belanja Barang	5 1 5 1 2	203.443.748.164,73	216.805.591.727,05
24	Belanja Hibah	5 1 5 1 2	22.759.580.425,00	7.450.653.789,00
25	Belanja Bantuan Sosial	5 1 5 1 2	600.000.000,00	1.416.500.000,00
26	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5 1 5 1 2	1.789.251.994,00	1.429.878.630,00
27	Belanja Bantuan Keuangan	5 1 5 1 2	152.831.903.800,00	143.336.566.000,00
28	Belanja Tak Terduga	5 1 5 1 2	886.938.096,00	524.831.500,00
29	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**672.947.113.469,73**	**657.193.182.844,05**
30	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	5 1 5 1 3	**221.009.115.586,86**	**143.502.543.824,90**
31	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
32	**Arus Kas Masuk:**			
38	Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5 1 5 2 1	35.000.000,00	0,00
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5 1 5 2 1	1.430.164.381,00	0,00
41	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**1.465.164.381,00**	**0,00**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
1	2	3	4	5
42	**Arus Kas Keluar:**			
45	Belanja Peralatan dan Mesin	5 1 5 2 2	28.662.841.889,00	31.035.410.792,00
46	Belanja Bangunan dan Gedung	5 1 5 2 2	41.754.600.518,00	28.309.558.041,00
47	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 1 5 2 2	110.801.545.523,00	95.939.001.903,00
48	Belanja Aset Tetap Lainnya	5 1 5 2 2	1.481.156.278,00	952.462.748,00
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5 1 5 2 2	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
51	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**193.200.144.208,00**	**166.736.433.484,00**
52	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**	**5 1 5 2 3**	**(191.734.979.827,00)**	**(166.736.433.484,00)**
53	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**			
54	**Arus Kas Masuk:**			
58	**Jumlah Arus Kas Masuk**		0,00	0,00
59	**Arus Kas Keluar:**			
63	**Jumlah Arus Kas Keluar**		0,00	0,00
64	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**5 1 5 3 3**	0,00	0,00
65	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**			
66	**Arus Kas Masuk:**			
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 1 5 4 1	48.054.149,43	14.091.102,00
72	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**48.054.149,43**	**14.091.102,00**
73	**Arus Kas Keluar:**			
74	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5 1 5 4 2	7.482.971.822,00	4.084.952,00
77	Koreksi Kesalahan Pencatatan Bank	5 1 5 4 2	0,00	30.000,00
78	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**7.482.971.822,00**	**4.114.952,00**
79	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	**5 1 5 4 3**	**(7.434.917.672,57)**	**9.976.150,00**
80	**Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	**5 1 5 5**	**21.839.218.087,29**	**(23.223.913.509,10)**
81	**Saldo Awal Kas BUD**	**5 1 5 6**	**35.228.807.163,75**	**50.887.437.783,10**
82	**Koreksi Kas Tahun Lalu**	**5 1 5 7**	**(428.086.027,26)**	**96.912.409,75**
83	**Saldo Kas Akhir di BUD**		**56.639.939.223,78**	**27.760.436.683,75**
84	**Kas lainnya di bendahara (selain BUD)**	**5 1 5 8**	**0,00**	**7.468.370.480,00**
85	**Saldo Akhir Kas**	**5 1 5 9**	**56.639.939.223,78**	**35.228.807.163,75**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Plt. BUPATI ROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
1	**Ekuitas Awal**	**5 1 6 1**	**1.638.095.731.112,39**	**1.620.234.558.471,53**
2	**Surplus/Defisit - LO**	**5 1 6 2**	**109.878.665.716,25**	**22.193.227.002,84**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:**	**5 1 6 3**	**19.697.003.133,54**	**(4.332.054.361,98)**
	Koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS		5.359.146,00	79.105.338,00
	Koreksi saldo awal Kas di Bendahara FKTP		0,00	7.419.427,00
	Koreksi saldo awal Kas di Bendahara PAUD		(34.775.972,48)	10.387.644,75
	Koreksi saldo awal Kasda		276.330.799,22	(30.000,00)
	Koreksi Ekuitas atas Piutang lainnya yang telah disisihkan		0,00	1.000.000,00
	Koreksi Ekuitas atas Piutang Retribusi yang telah disisihkan		0,00	600.998.000,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap		25.317.987.935,00	0,00
	Koreksi Ekuitas atas saldo awal Aset Lainnya - Aset Lain-lain Rusak Berat		(50.920.350,00)	(4.657.338.487,06)
	Koreksi Nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(6.052.951.155,22)	(361.739.700,67)
	Koreksi Nilai Persediaan awal		(9.302.362,98)	125.303.360,00
	Koreksi Nilai Investasi Permanen		245.275.094,00	(137.159.944,00)
4	**Ekuitas Akhir**	**5 1 6 4**	**1.767.671.399.962,18**	**1.638.095.731.112,39**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODER MAKS SOMBU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD yang wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang disampaikan kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sebagai laporan keuangan *audited* sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Laporan Keuangan yang disampaikan kepada DPRD tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 telah menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 2 (dua) jenis laporan pelaksanaan anggaran, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan 5 (lima) jenis laporan finansial

yaitu Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang menunjukan ketaatan terhadap anggaran dan juga dapat memberikan gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, serta saldo anggaran lebih akhir. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan pos-pos untuk pendapatan–LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, dan surplus atau defisit-LO. Neraca daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos untuk ekuitas awal, surplus atau defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan lebih lanjut atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pembaca atau pengguna, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multi tafsir terhadap isi dan substansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya PP 71 tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan berbasis akrual membutuhkan dukungan SDM dan sistem aplikasi yang memadai dalam mengaplikasikan pemberlakuan *full* akrual. Dalam proses penatausahaan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah menggunakan aplikasi SIPD tetapi Aplikasi SIPD belum dapat menyajikan Laporan Keuangan yang Akurat menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya dapat dihasilkan dari aplikasi SIPD keuangan, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang seharusnya dihasilkan dari laporan hasil konsolidasi atas laporan keuangan seluruh entitas akuntansi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao hanya dapat disajikan berdasarkan berita acara rekonsiliasi per akun pada setiap jenis laporan keuangan namun penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang belum didasarkan pada konsolidasi laporan keuangan seluruh entitas

akuntansi tetap memberikan gambaran tentang posisi keuangan Tahun Anggaran 2023 secara akrual pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 menyediakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Laporan ini mempunyai tujuan umum untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna sebagai evaluasi dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi *(intergenerational equity)*.

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi *(intergenerational equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 meliputi :

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
8. Permendagri Nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 59 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V. PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN KEUANGAN
- A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Akun Laporan Keuangan
  - 5.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1. Pendapatan – LRA
    - 5.1.2. Belanja
    - 5.1.3. Transfer
    - 5.1.4. Pembiayaan
  - 5.2. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran
    - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
    - 5.2.2. Penerimaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
    - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
5.2.5. Lain-lain
5.3. Penjelasan Akun-akun Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas Dana
5.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
5.4.1. Pendapatan – LO
5.4.2. Beban Daerah
5.4.3. Pos Luar Biasa
5.4.4. Surplus/Defisit Non Operasional
5.5. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas
5.5.1. Ekuitas Awal
5.5.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)
5.5.3. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5.5.4. Ekuitas Akhir
5.6. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas
5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

B. Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII. PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
   a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tumbuh sebesar 3,52 persen (c-to-c) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh pengadaan listrik, gas yaitu sebesar 12,15 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,09 persen.

Struktur ekonomi NTT pada Tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,32 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67,48 persen.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010

No	LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan Kumulatif 2010 (c-to-c) (%)
		2023
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,65
3.	Industri Pengolahan	7,33
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	12,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,46
6.	Konstruksi	8,16
7.	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,66
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,71
10.	Informasi dan Komunikasi	3,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,87
12.	Real Estate	2,30
13.	Jasa Perusahaan	3,40
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00
15.	Jasa Pendidikan	2,66
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,06
17.	Jasa Lainnya	4,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**3,52**

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010

No	KOMPONEN PENGELUARAN	Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (c-to-c) (%)
		2023
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,25
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,29
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,83
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,39
5.	Perubahan Inventori	-
6.	Ekspor	20,09
7.	Impor	5,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**3,52**

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2023 mencapai Rp128,52 triliun.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Dasar 2010

No	KOMPONEN PENGELUARAN	PDRB ADHB (MILIAR RUPIAH)
		2023
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86.723
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.382
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27.434
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	59.071
5.	Perubahan Inventori	1.112
6.	Ekspor	8.367
7.	Impor	58.569
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**128.523**

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2023

b. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi NTT

Desember 2023, gabungan 3 kota Inflasi di Nusa Tenggara Timr mengalami Inflasi MtM sebesar 0,39 persen dengan IHK sebesar 115,53. Kota Kupang mengalami Inflasi MtM sebesar 0,37 persen, Kota Maumere mengalami Inflasi MtM sebesar 0,61 persen dan Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 0,31 persen. Untuk inflasi YoY Desember 2023, Gabungan 3 kota Inflasi adalah sebesar 2,42 persen, Kota Kupang sebesar 2,21 persen, Kota Maumere sebesar nilai 3,33 persen dan Kota Waingapu sebesar 3,27 persen.

Tabel 2.4
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan Provinsi NTT Desember 2023

No	KOMPONEN PENGELUARAN	I H K			Tingkat Inflasi Desember	Tingkat Inflasi Tahun Kalender	Tingkat Inflasi Tahun ke
		Desember 2022	November 2023	Desember 2023	2023*)	**)	Tahun***)
1.	Makanan, Minuman Dan Tembakau	116,34	119,11	120,04	0,78	3,18	3,18
2.	Pakian dan Alas Kaki	104,26	104,69	104,58	-0,11	0,30	0,30
3.	Perumahan, Air, Listrik dan Bhan Bakar Rumah Tangga	102,78	104,41	104,48	0,07	1,66	1,66
4.	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,54	110,36	110,30	-0,06	0,69	0,69
5.	Kesehatan	113,30	115,92	115,91	-0,01	2,31	2,31
6.	Transportasi	131,95	136,86	137,39	0,39	4,12	4,12
7.	Informasi Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,26	100,21	100,23	0,02	-0,02	-0,02
8.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	105,73	105,39	105,22	-0,16	-0,48	-0,48
9.	Pendidikan	106,55	106,78	106,78	0,00	0,22	0,22
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	104,79	107,59	108,46	0,81	3,50	3,50
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,91	120,22	120,49	0,23	2,19	2,19
Umum		**112,80**	**115,08**	**115,53**	**0,39**	**2,42**	**2,42**

**)Persentase perubahan IHK bulan Desember 2023 terhadap IHK bulan sebelumnya,*
***) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2023 terhadap IHK bulan Desember 2022,*
****) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2023 terhadap IHK bulan Desember 2022.*

c. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685 (23,20 persen).

Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498/rumah tangga miskin/bulan.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 75,72 persen, naik 0,49 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase

banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

2. Kabupaten Rote Ndao

Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao menunjukan bahwa sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana Transfer Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik itu dana transfer umum, dana transfer khusus dana insentif daerah maupun dana desa. Dengan demikian maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao sangat bergantung terhadap Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga kebijakan ekonomi dan fiscal nasional sangat berpengaruh pada kebijakan anggaran Pemerintah Daerah. Selain itu memperhitungkan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN dimaksudkan agar terwujud sinkronisasi kebijakan ekonomi makro antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Perubahan yang terjadi sampai semester pertama tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,59%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,65%
c. Gini Ratio Provinsi NTT sebesar 0,307%
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,00%
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 2,71%
f. Tingkat Inflasi Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 2,42%
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp3.746,67 miliar

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Kab/Kota (%)	27,45	27	0,45
2	Kab/Kota (Orang)	52.430	53,55	1,12
3	Provinsi (%)	20,70	19,96	0,74
4	Nasional (%)	9,57	9,36	0,21

Sumber Dokumen: BPS Kab. Rote Ndao

Persentase penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2022 sebesar 27,45% mengalami penurunan 0,45% pada Tahun 2023 menjadi 27%. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat agar kedepan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao semakin menurun bahkan tidak ada lagi.

Penduduk miskin ekstrim Provinsi NTT pada Tahun 2023 sebanyak 53.550 ribu jiwa, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut ini merupakan data Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 2.6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	5,31	4,97	0,34
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,63	3,33	0,30
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59		
4	Peringkat Provinsi	3		

Sumber Dokumen: BPS Kab. Rote Ndao

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Data dibawah ini merupakan data perbandingan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

Tabel 2.7
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	1,47	1,24	0,23
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,93	0,79	0,14
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,01
4	Peringkat Provinsi	3	4	1

Sumber Dokumen: BPS Kab. Rote Ndao

Sebagaimana diketahui bahwa indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dari data tersebut di atas menunjukan adanya peningkatan nilai indeks Tahun 2023 menjadi 4,97 artinya dalam kurun waktu Tahun 2022-2023 semakin menjauhnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sebesar 0,34%. Sedangkan keparahan kimiskinan yang menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin pada Tahun 2022-2023 menunjukan adanya penurunan indeks sebesar 0,01%, hal ini menunjukan bahwa dalam kurun waktu tersebut adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Disamping itu Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukan tingkatan Angkatan Kerja yang terserap dalam lapangan kerja, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka menunjukan bahwa banyak Angkatan Kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 adalah sebesar 3,65% sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rote Ndao

No.	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	3,64	3,65	0,01
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi	3,54	3,14	0,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	5,86	5,32	0,54

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kabupaten Rote Ndao

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 3,6 %, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,54% maka terjadi penurunan 0,40% artinya penurunan pengangguran terbuka di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 yang menunjukan adanya penurunan tenaga kerja yang tidak punya pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor antara lain ketersediaan lapangan kerja yang tersedia dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, tidak diperoleh angka *Gini Ratio* tingkat Kabupaten Rote Ndao sehingga tidak dapat disajikan data tersebut dan hanya diperoleh *Gini Ratio* tingkat Provinsi NTT seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.9
***Gini Ratio* Provinsi NTT**

No.	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,334	0,307	0,03
3	Tingkat Nasional	0,381	0,338	0,04

Sumber Dokumen: BPS Kab.Rote Ndao

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Tingkat Nasional yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,338%. Angka ini berkurang 0,04% dibandingkan *Gini Ratio* Tahun 2022. Dengan demikian pada kurun waktu tersebut rata-rata Tingkat Nasional terjadi perubahan peningkatan distribusi Pendapatan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart ofliving*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60<1PM<70)
c. Tinggi (70<IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, IPM Tahun 2022 sebesar 63,21% meningkat 0,79 bila dibandingkan dengan IPM Tahun 2022 sebesar 63,21. Dengan demikian IPM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sebesar 64,00% dikategorikan sedang. Untuk perbandingan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rote Ndao

No.	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kab/Kota	63,21	64,00	0,79
2	Tingkat Provinsi	65,90	66,68	0,78
3	Tingkat Nasional	72,91	73,75	0,84

Sumber Dokumen:BPS Kabupaten Kabupaten Rote Ndao

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Capaian kemajuan pembangunan manusia Kabupaten Rote Ndao dapat dikatakan terus mengalami

kemajuan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen dan *concern* dengan pembangunan pada 3 (tiga) komponen utama pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2021 sebesar 62,60 meningkat menjadi 63,21 pada tahun 2022 dan kemudian menjadi 64,00 di tahun 2023. Hal ini cukup menggembirakan meski perlu terus didorong lebih maksimal mengingat laju peningkatan IPM menunjukan tren penurunan.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan barang dan jasa. Sehubungan dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	1.974.993,60 miliar	2.045.283,03 miliar	3.746,67 miliar	128,52 triliun	20.892,4 triliun
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,24	3,56	2,71	4,14	5,05

Sumber Dokumen: BPS Kab. Rote Ndao

Struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 Atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 2,71 persen, sedangkan terkecil yaitu sektor jasa perusahaan sebesar 1,62 persen. Jika dicermati sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukan tren positif, sedangkan sektor pengadaan jasa perusahaan menunjukan tren stagnan. Meskipun dalam kondisi perekomian yang tertekan tetapi beberapa sektor justru menunjukan tren penguatan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi

merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao, tingkat inflasi Nasional dan Tingkat Provinsi tampak pada tabel di bawah ini, sedangkan tingkat inflasi Kabupaten Rote Ndao tidak diperoleh data.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Kabupaten Rote Ndao

No.	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kab/Kota	-	-	-
2	Tingkat Provinsi	6,65	2,42	4,23
3	Tingkat Nasional	5,51	2,61	2,90

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Rote Ndao

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Rote Ndao.

Struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan)

No.	Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Rote Ndao (Persen)		
		2021*	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,57	49,60	49,3
2	Pertambangan dan Penggalian	0,72	0,71	0,71
3	Industri Pengolahan	1,11	1,12	1,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	4,54	4,52	4,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,85	7,18	7,50
8	Transportasi dan Pergudangan	3,18	3,42	3,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,19	0,19
10	Informasi dan Komunikasi	4,09	3,93	3,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,74	0,72
12	Real Estate	1,00	1,05	1,05

No.	Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Rote Ndao (Persen)		
		2021*	2022**	2023**
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,74	11,95	11,65
15	Jasa Pendidikan	12,65	12,11	11,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,35	3,21	3,41
17	Jasa lainnya	0,10	0,09	0,09
	PDRB	100,00	100,00	

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahan – perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutahirannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian secara teknis pengelolaan APBD wajib menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir masih perlu ditindak lanjuti dengan perubahan regulasi pada aras daerah. Untuk mendukung perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dimaksud maka telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi.

Dalam hal Penyusunan APBD TA 2023, selain berpedoman pada ketentuan aturan di atas juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 sebelumnya didahului dengan pembahasan dan penetapan

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2022 yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggunakan pendekatan Anggaran Kinerja *(performance budgeting)*. Untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terukur, maka setiap pembiayaan terhadap program dan kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam APBD harus memenuhi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu masukan *(input)*, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)*.

Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan. Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerahyang Sah; (2) Pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan transfer antar daerah; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari lain – lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta produk hukum turunannya. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber pendapatan harus sebanding dengan rencana pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD merupakan sumber pendanaan dengan keleluasaan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada daerah sejalan dengan asas otonomi dalam koridor satu kesatuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembagian kewenangan/urusan. Karena itu, kepada daerah diberikan pula keleluasaan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri. Pendapatan transfer merupakan pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari (1) APBN yang terdiri atas dana perimbangan dan dana desa. Besaran dana transfer Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Selain pendapatan transfer transfer Pemerintah Pusat, penerimaan daerah juga berasal dari (2) APBD Provinsi NTT berupa Pendapatan Transfer antar Daerah, turut mendukung pembiayaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023, Pendapatan merupakan elemen yang memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

maupun penyediaan layanan publik. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Struktur Pendapatan daerah Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh dana perimbangan *(highly dependence)*. Oleh Karena itu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana transfer daerah (dana perimbangan dan dana desa) sangat berpengaruh terhadap kebijakan anggaran (*budget policy*) Pemerintah Daerah.

Adapun arah dan kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2023 yaitu:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
b. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, serta mitra kerja/Unit Kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan dalan undang-undang tersebut dan melakukan pemungutan jenis-jenis retribusi yang terkait dengan retribusi yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memungut pajak daerah dan memungut retribusi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdiri dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Rote Ndao;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan wajib (pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar), urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung dan unsur penunjang serta dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2023. Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu, penyediaan rumah layak huni melalui pendekatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) dan peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) dengan metode pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan mampu mengurangi secara signifikan angka rumah tidak layak huni sekaligus menekan angka kemiskinan. Pembiayaan terhadap sektor – sektor yang langsung (*direct*) berdampak pada hajat hidup orang banyak dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan peran serta masyarakat melalui pola padat karya. Alokasi belanja langsung menggunakan prinsip program prioritas (*Money Follow Program Prioritas*). Hal ini mengakibatkan tidak semua tugas dan fungsi dibiayai secara merata namun hanya yang bersifat prioritas yang dibiayai sesuai skala prioritas daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta diutamakan yang berorientasi manfaat untuk rakyat.

Struktur Belanja dalam APBD TA 2023 terdiri atas: (1) Belanja Operasi dengan rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, (2) Belanja Modal yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainny, (3) Belanja Tidak Terduga, dan (4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja operasi diarahkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal diarahkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga diarahkan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan Belanja Transfer diarahkan menganggarkan belanja Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa sesuai amanat aturan dan atau keadaan khusus tertentu.

Belanja pegawai digunakan untuk, (1) Menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2)

Menganggarkan Kompensasi kepada KepalaDaerah/wakil KepalaDaerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan ASN; dan (3) Belanja Pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk; (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD; (2) Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain; (3) Belanja Barang dan Jasa diuraikan dalam objek Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan (4) Belanja Barang dan Jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas.

Belanja Hibah digunakan untuk: (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (instansi vertikal), BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuankeuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; (4) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; (6) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk; (1) Menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; (2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; (4) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; (5) Memenuhi syarat penerima hibah sesuai ketentuan aturan; (6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakatyang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; (7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu; (8) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait; (9) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengadaan Aset Tetap memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:1) berwujud; 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset Tetap dianggarkan Belanja Modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap, dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: 1) dapat diidentifikasi; 2) tidak mempunyai wujud fisik; 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. Keperluan mendesak meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet; b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Selain itu, Belanja Tidak Terduga dapat pula digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Belanja Transfer, kelompok Belanja Transfer dirinci atas jenis: a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Transfer dianggarkan

oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah. Kebijakan belanja bagi hasil sebagai berikut: 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) jenis belanja bantuan keuangan bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Adapun ketentuannya sebagai berikut: a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus. d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Stuktur pembiayaan pada APBD TA 2023 terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sesuai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2022 *audited*. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan kinerja BUMD melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada PDAM, dan PT Bank Pembangunan Daerah NTT.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 masih diarahkan pada permasalahan utama daerah yakni masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, peningkatan pendapatan dan pemerataan ekonomi kemasyarakatan. Dengan demikian, maka perubahan kebijakan keuangan APBD mutlak diperlukan karena kondisi yang berkembang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan sebelumnya dan membutuhkan penanganan segera. Perubahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Berikut gambaran umum perubahan – perubahan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023:

1) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

Diterbitkan dalam rangka:

Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan penyesuaian kegiatan, sub kegiatan dan belanja dalam struktur penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

   Diterbitkan dalam rangka:

   a. Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan penyesuaian kegiatan, sub kegiatan dan belanja antar perangkat daerah dalam struktur Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
   b. Memperhatikan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/ I / 72 / V / 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Anwar Kiah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Pengangkatan Saudara Arfons Lau Sarjana Ekonomi Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan 2019-2024 yang mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran antar kegiatan, sub kegiatan dan belanja;
   c. Pergeseran dilakukan karena adanya mutasi dan promosi jabatan pada beberapa perangkat daerah sehingga perlu dilakukan pergeseran dan/atau penambahan anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

3) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

   Diterbitkan dalam rangka:

   a. Memperhatikan keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 51.a/KEP/HK/2023 tentang Penetapan Lokasi Bencana Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023 di Kab.Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
   b. Memperhatikan keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 189.a/KEP/HK/2023 tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 140.a/KEP/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

c. Memperhatikan keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 204.a/KEP/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
d. Pergeseran anggaran dilakukan untuk rehabilitasi bangunan gedung Auditorium dan bangunan gedung rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
e. Pergeseran anggaran dilakukan untuk kegiatan rehabilitasi infrastruktur KePU-an akibat bencana alam;
f. Pergeseran dilakukan untuk pembayaran jasa tenaga kontrak daerah (TKD) Tahun 2023 jabatan tenaga administrasi, operator computer, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran Kabupaten Rote Ndao TA 2023. Kemudian diterbitkan landasan operasionalnya melalui Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023. Sebagaimana kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 80 Tahun tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 dan untuk kepentingan pelaksanaan diatur lebih rinci dalam DPA SKPD/SKPKD dan DPPA SKPD/SKPKD.

Siklus penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Siklus Penyusunan dan Penetapan APBD serta Perubahan APBD TA. 2023

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	NOMOR PENETAPAN
1.	Kebijakan Umum APBD TA. 2023	21 September 2022	HK.008/ 3 / IX /2022 & 10/DPRD/RN/2022
2.	PPAS TA. 2023	21 September 2022	HK.008/ 4 / IX /2022 & 11/DPRD/RN/2022
3.	PERDA tentang APBD TA. 2023	31 Desember 2022	Nomor 4 tahun 2022
4.	PERBUB Tentang penjabaran APBD TA 2023	31 Desember 2022	Nomor 49 tahun 2022
5.	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor **56** Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2023	5 April 2023	Nomor 56 tahun 2023

NO	URAIAN	TANGGAL PENETAPAN	NOMOR PENETAPAN
6.	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2023	19 Juni 2023	Nomor 63 tahun 2023
7.	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Perubahan keTiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2023	15 September 2023	Nomor 70 tahun 2023
8.	Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2023	27 September 2023	HK.008/ 3 / IX /2023 & 13/DPRD/RN/2023
9.	Perubahan PPAS TA 2023	27 September 2023	HK.008/ 4 / IX /2023 & 14/DPRD/RN/2023
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD TA. 2023	26 Oktober 2023	Nomor 2 tahun 2023
11.	Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023	26 Oktober 2023	Nomor 80 tahun 2022

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao dan perubahannya yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2023 sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.15
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023

Kode	Uraian	Perda APBD No 4 Tahun 2022	Perda PAPBD No 2 Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6.802.200.000**	**6.802.200.000**	**6.802.200.000**
4.1.01	Pajak Daerah	11.885.649.300	11.915.649.300	30.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.972.986.400	8.002.986.400	30.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.500.000.000	7.132.456.526	632.456.526
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.244.399.925	2.623.930.618	379.530.693
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**851.026.032.410**	**868.598.706.543**	**17.572.674.133**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	829.891.241.000	840.693.109.531	10.801.868.531
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.134.791.410	27.905.597.012	6.770.805.602
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.802.200.000**	**6.802.200.000**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	6.802.200.000	6.802.200.000	0,00
	Jumlah Pendapatan	**886.431.268.035**	**905.075.929.387**	**18.644.661.352**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**591.460.953.006**	**575.126.152.125**	**(16.334.800.881)**
5.1.01	Belanja Pegawai	352.674.810.347	325.494.786.576	(27.180.023.771)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.579.674.659	223.130.688.749	2.551.014.090
5.1.05	Belanja Hibah	17.623.968.000	25.900.676.800	8.276.708.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	582.500.000	600.000.000	17.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**158.380.405.134**	**190.643.870.709**	**32.263.465.575**

Kode	Uraian	Perda APBD No 4 Tahun 2022	Perda PAPBD No 2 Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.443.323.872	34.584.519.202	(1.858.804.670)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.070.663.762	43.066.284.851	3.995.621.089
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.266.725.000	111.456.944.987	3.995.621.089
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.599.692.500	1.536.121.669	(63.570.831)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.764.969.525**	**1.058.969.525**	**(4.706.000.000))**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.764.969.525	1.058.969.525	(4.706.000.000)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**153.324.940.370**	**145,204,659,130**	**1.492.832.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.985.868.570	1.985.868.570	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.339.071.800	154.817.772.370	1.492.832.000
	Jumlah Belanja	**908.931.268.035**	**921.646.764.729**	**12.715.496.694**
	Total Surplus/(Defisit)	**(22.500.000.000)**	**(16.570.835.342)**	**5.929.164.658**
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.000.000.000**	**27.070.835.342**	**(5.929.164.658)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.000.000.000	27.070.835.342	(5.929.164.658)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**33.000.000.000**	**27.070.835.342**	**(5.929.164.658)**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000	10,500,000,000	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**22.500.000.000**	**16.570.835.342**	**(5.929.164.658)**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber :Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA. 2023

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator kinerja merupakan target yang ingin dicapai berdasarkan penetapan kinerja sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang perbedaan antara rencana dengan realisasi serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai program utama yang termuat di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019, untuk menentukan sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program berdasarkan sasaran dan penetapan kinerja maka dapat dilakukan pengukuran dengan menetapkan pencapaian kinerja didalam empat kategori.

Tabel 2.16
Kategori Capaian Kinerja

Tingkat	Persentase Pencapaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85 %	Sangat baik
II	70 % sampai dengan 85 %	Baik
III	55 % sampai dengan 69 %	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

2.4 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja m*andatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Rote Ndao meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Rote Ndao adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD, 12 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp141.906.767.777,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp583.436.481.459 atau sebesar 24,32%%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp159.601.093.935,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp596.151.978.153,00 atau sebesar 26,77%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan
Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	**141.906.767.777,00**	**159.601.093.935,00**
1) BELANJA OPERASI	101.920.990.918 ,00	118.807.099.837,00
a) Belanja Pegawai	54.235.675.304,00	56.163.943.562,00
b) Belanja Barang dan Jasa	47.560.315.614,00	62.518.156.275,00
c) Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00
2) BELANJA MODAL	39.985.776.859,00	40.793.994.098,00
b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain:	**0,00**	**0,00**
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	**141.906.767.777,00**	**159.601.093.935,00**
Total Belanja Daerah	**908.931.268.035,00**	**921.646.764.729,00**
Gaji ASN	**325.494.786.576,00**	**325.494.786.576,00**
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	**583.436.481.459,00**	**596.151.978.153,00**
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	**24,32%**	**26,77%**

b) *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 155 PAUD Negeri, 123 SD Negeri/Inpres dan 40 SMP Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp238.895.050.662,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp908.931.268.035,00 atau sebesar 26,28%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp267.620.911.628 dari nilai belanja daerah senilai Rp921.646.764.729 atau sebesar 29,04%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.18
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan
Dalam APBD dan APBD-P TA. 2023 Kabupaten Rote Ndao

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	**235.131.245.020,00**	**266.411.146.228,00**
	1) BELANJA OPERASI	212.973.185.720,00	237.508.191.735,00
	a) Belanja Pegawai	163.559.116.220,00	173.703.209.004,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	39.024.209.500,00	52.644.732.731,00
	c) Belanja Hibah	10.389.860.000,00	11.160.250.000,00
	2) BELANJA MODAL	22.158.059.300,00	28.902.954.493,00
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pendidikan antara lain:	**3.763.805.642,00**	**1.209.765.400,00**
	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	**238.895.050.662,00**	**267.620.911.628,00**
	Total Belanja Daerah	**908.931.268.035,00**	**921.646.764.729,00**
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	**26,28%**	**29,04%**

c) *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah adanya pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari DAU dan DBH yang tidak ditentukan penggunaanya, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Adapun pada Kabupaten Rote Ndao terdapat 56 ruas jalan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 62/KEP/HK/2013 Tanggal 30 Januari 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan

Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Rote Ndao

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp353.351.971.343,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp908.931.268.035,00 atau sebesar 38,88 %.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp383.095.855.045,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp921.646.764.729,00 atau sebesar 41,57 %.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.19
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Insfrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao

No	Komponen Perhitungan		APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah		908.931.268.035,00	921.646.764.729,00
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa		153.324.940.370,00	154.817.772.370,00
	a.	Belanja Bagi Hasil	1.985.868.570,00	1.985.868.570,00
	b.	Bantuan Keuangan	151.339.071.800,00	152.831.903.800,00
		Jumlah (a+b)	153.324.940.370,00	154.817.772.370,00
3	Selisih (1-2)		755.606.327.665,00	766.828.992.359,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)			
5	a)	Belanja Modal:	158.380.405.134,00	190.643.870.709,00
		1) Tanah;	-	-
		2) Peralatan Dan Mesin;	36.443.323.872,00	34.584.519.202,00
		3) Bangunan Dan Gedung;	39.070.663.762,00	43.066.284.851,00
		4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	81.266.725.000,00	111.456.944.987,00
		5) Aset Tetap Lainnya;	1.599.692.500,00	1.536.121.669,00
		6) Aset Lainnya.	-	-
	b)	Belanja Pemeliharaan	3.726.883.484,00	3.567.816.747,00
6		1) Belanja Hibah		
		2) Belanja Bantuan Sosial		
		3) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	37.919.742.355,00	34.066.395.219,00
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		353.351.971.343,00	383.095.855.045,00
Presentase Belanja Infrastruktur Daerah			38,88%	41,57%

d) Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan

tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Rote Ndao, alokasi *mandatory spending* ADD membantu kelancaran operasional 112 desa yang berada di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Sedangkan perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp44.436.013.800,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp399.855.641.200 atau sebesar 11,15 %.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa
Dalam APBD dan APBD-P TA 2023 Kabupaten Rote Ndao

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Alokasi Dana Desa	44.436.013.800,00	44.436.013.800,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	399.924.124.200,00	399.855.641.200,00
3	**Persentase Alokasi ADD**	**11,11**	**11,11**

e) Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023. Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao memiliki 1 Inspektur, 4 Inspektur Pembantu dan 15 auditor yang melakukan tugas pengawasan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pegawasan Dalam APBD Induk TA.2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp4.034.768.350,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp908.931.268.035,00 atau sebesar 0,44%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp3.331.409.000,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp921.646.764.729,00 atau sebesar 0,36%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan
Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Kabupaten Rote Ndao

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	**Inspektorat**		
2	Belanja Operasi	4.012.714.350,00	3.315.755.000,00
3	Belanja Pegawai	2.999.490.000,00	2.615.638.000,00
4	Belanja Barang dan Jasa	1.013.224.350,00	700.117.000,00

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
5	Belanja Modal	22.054.000,00	15.654.000,00
6	Total Alokasi Pengawasan	4.034.768.350,00	3.331.409.000,00
7	Total Belanja Daerah	908.931.268.035,00	921.646.764.729,00
8	Persentase Alokasi Pengawasan	0,44	0,36

f) Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 67/PMK /2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah mengurangi masalah ketimpangan ekonomi dan ekonomi daerah.

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan dampak Inflasi TA 2023 Kabupaten Rote Ndao dialokasikan senilai Rp20.702.516.139,00 Dari nilai belanja daerah senilai Rp921.646.764.729,00 atau sebesar 2,25%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.22
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi
Dalam APBD Perubahan TA 2023 Kabupaten Rote Ndao

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran		
			Sumber Pendanaan		Jumlah
			DAU	DBH	
1	Bantuan Sosial		20.702.516.139,00	0,00	20.702.516.139,00
		Bantuan Sosial	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
		Barang dan Jasa	20.102.516.139,00	0,00	20.102.516.139,00
2	Penciptaan Lapangan Kerja				
		Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3	Subsidi sektor tranportasi				
		Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi		20.702.516.139,00	0,00	20.702.516.139,00
5	DAU bulan Oktober s.d. Desember 2023 dan DBH triwulan IV TA 2023		115.388.520.960,00	4.106.069.553,00	119.494.590.513,00
6	Persentase *Mandatory Spending*		17,94	0,00	17,33

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pencapaian realisasi anggaran TA.2023 atas alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi TA.2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Bertambah/ (berkurang)
Pendapatan Daerah	905.075.929.387,00	895.421.393.437,59	98,93	9.654.535.949,41
Belanja dan Transfer	921.646.764.729,00	855.647.257.677,73	92,84	65.999.507.051,27
Surplus/Defisit	(16.570.835.342,00)	39.774.135.759,86	(240,02)	(56.344.971.101,86)
Penerimaan Pembiayaan	27.070.835.342,00	27.317.749.314,49	100,91	(246.913.972,49)
Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto	16.570.835.342,00	16.817.749.314,49	101,49	(246.913.972,49)
SILPA	0,00	56.591.885.074,35	0,00	(56.591.885.074,35)

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dinyatakan dalam total penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi TA.2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah/ (berkurang)
Pendapatan Daerah	**905.075.929.387,00**	**895.421.393.437,59**	**98,93**	**9.654.535.949,41**
Pendapatan Asli Daerah	29.675.022.844,00	33.885.585.638,59	114,19	(4.210.562.794,59)
Pendapatan Transfer	868.598.706.543,00	854.349.477.695,00	98,36	14.249.228.848,00
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	6.802.200.000,00	7.186.330.104,00	105,65	(384.130.104,00)

Sesuai ringkasan pendapatan daerah tersebut, pendapatan masih didominasi oleh pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, dimana hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Jika diamati dari target dan realisasi atas pendapatan daerah secara umum, terlihat bahwa pencapaian target sangat baik yaitu sebesar 98,92%.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang konsisten dengan

perencanaan pembangunan. Untuk mengamati gambaran realisasi belanja yang konsisten dengan perencanaan pembangunan secara ringkas dapat dilihat pada ringkasan pengelompokan belanja daerah menurut klasifikasi belanja ekonomi maupun klasifikasi belanja fungsi. Klasifikasi belanja ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Ringkasan belanja daerah menurut klasifikasi belanja ekonomi TA.2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA.2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
BELANJA	**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**92,84**	**65.999.507.051,27**
BELANJA OPERASI	**575.126.152.125,00**	**517.439.019.579,73**	**89,97**	**57.687.132.545,27**
Belanja Pegawai	325.494.786.576,00	290.635.690.990,00	89,29	34.859.095.586,00
Belanja Barang dan Jasa	223.130.688.749,00	203.443.748.164,73	91,18	19.686.940.584,27
Belanja Hibah	25.900.676.800,00	22.759.580.425,00	87,87	3.141.096.375,00
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	**190.643.870.709,00**	**182.700.144.208,00**	**95,83**	**7.943.726.501,00**
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.584.519.202,00	28.662.841.889,00	82,88	5.921.677.313,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.066.284.851,00	41.754.600.518,00	96,95	1.311.684.333,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.456.944.987,00	110.801.545.523,00	99,41	655.399.464,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.536.121.669,00	1.481.156.278,00	96,42	54.965.391,00
BELANJA TAK TERDUGA	**1.058.969.525,00**	**886.938.096,00**	**83,75**	**172.031.429,00**
Belanja Tak Terduga	1.058.969.525,00	886.938.096,00	83,75	172.031.429,00
TRANSFER	**154.817.772.370,00**	**154.621.155.794,00**	**99,87**	**196.616.576,00**
Belanja Bagi Hasil	1.985.868.570,00	1.789.251.994,00	90,10	196.616.576,00
Belanja Bantuan Keuangan	152.831.903.800,00	152.831.903.800,00	100,00	0,00

Belanja Daerah pada TA.2023 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 perangkat daerah dengan mengacu pada tujuan pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sesuai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan analisis pencapaian kinerja perangkat daerah yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebagai laporan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah TA.2023.

3. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Netto TA.2023 sebesar Rp16.817.749.314,49 berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.317.749.314,49 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.500.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan SiLPA TA.2022 sesuai LRA *audited* sebesar Rp27.070.835.341,75 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan

berupa Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah kepada PT. BPD NTT dan PDAM Rote Ndao sebesar Rp10.500.000.000,00.

Tabel 3.4
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA.2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
Penerimaan Pembiayaan	**27.070.835.342,00**	**27.317.749.314,49**	100,91	**(246.913.972,49)**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	27.070.835.342,00	27.070.835.341,75	100,00	0,25
Koreksi Saldo Awal	0,00	246.913.972,74	0,00	(246.913.972,74)
Pengeluaran Pembiayaan	**10.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	100,00	**0,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	**16.570.835.342,00**	**16.817.749.314,49**	101,49	**(246.913.972,49)**

Capaian kinerja keuangan perangkat daerah yang diukur berdasarkan presentase realisasi keuangan (Pendapatan Daerah dan Belanja) per perangkat daerah sesuai target anggaran tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Capain kinerja pendapatan

Tabel 3.5
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Perangkat Daerah TA.2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	DINAS KESEHATAN	5.169.553.800,00	6.170.929.555,00	119,37	(1.001.375.755,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.214.981.225,00	228.450.787,00	18,80	986.530.438,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	450.009.000,00	160.185.000,00	35,60	289.824.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	84.273.600,00	80.859.200,00	95,95	3.414.400,00
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.500.000,00	7.854.250,00	104,72	(354.250,00)
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	230.000.000,00	254.706.675,00	110,74	(24.706.675,00)
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	45.000.000,00	49.147.480,00	109,22	(4.147.480,00)
8	DINAS PETERNAKAN	300.000.000,00	248.407.460,00	82,80	51.592.540,00
9	DINAS PERIKANAN	150.000.000,00	9.928.292,00	6,62	140.071.708,00
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET	884.932.972.462,00	871.741.276.893,89	98,51	13.183.739.545,95
11	BADAN PENDAPATAN	12.491.639.300,00	16.469.647.844,70	131,80	(3.971.879.644,70)
JUMLAH		**905.075.929.387,00**	**895.421.393.437,59**	**98,93**	**9.654.535.949,41**

b. Capaian kinerja belanja

Tabel 3.6
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja per Perangkat Daerah TA.2023

NO	NAMA DINAS	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	266.411.146.228,00	246.583.877.752,00	92,56	19.827.268.476,00
2	DINAS KESEHATAN	159.601.093.935,00	127.710.812.590,73	80,02	31.890.281.344,27
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.446.682.164,00	117.618.015.889,00	99,30	828.666.275,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	8.650.648.700,00	8.428.494.243,00	97,43	222.154.457,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.538.869.278,00	3.502.307.372,00	98,97	36.561.906,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.791.573.992,00	1.768.779.356,00	98,73	22.794.636,00
7	DINAS SOSIAL	2.260.219.850,00	2.195.094.726,00	97,12	65.125.124,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.077.061.700,00	10.628.227.116,00	75,50	3.448.834.584,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.208.044.600,00	2.165.907.856,00	98,09	42.136.744,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.509.535.000,00	2.489.312.324,00	99,19	20.222.676,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.756.990.650,00	2.695.362.849,00	97,76	61.627.801,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	4.141.113.000,00	4.125.866.228,00	99,63	15.246.772,00
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.351.643.315,00	2.317.727.584,00	98,56	33.915.731,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.599.217.166,00	6.657.981.504,00	87,61	941.235.662,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	98,75	31.974.510,00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.354.556.925,00	5.272.966.140,00	98,48	81.590.785,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.553.536.804,00	1.522.284.465,00	97,99	31.252.339,00
18	DINAS PERIKANAN	8.869.060.508,00	8.680.869.687,00	97,88	188.190.821,00
19	DINAS PERTANIAN	20.057.177.179,00	19.869.260.466,00	99,06	187.916.713,00
20	DINAS PETERNAKAN	13.000.854.000,00	12.950.450.976,00	99,61	50.403.024,00
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.394.571.148,00	2.330.284.139,00	97,32	64.287.009,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	22.305.885.701,00	22.078.990.862,00	98,98	226.894.839,00
23	SEKRETARIAT DPRD	23.726.553.971,00	23.559.188.179,00	99,29	167.365.792,00
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.506.112.333,00	5.405.360.975,00	98,17	100.751.358,00
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET	173.485.446.996,00	169.944.443.999,00	97,96	3.541.002.997,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.515.488.144,00	4.431.829.495,00	98,15	83.658.649,00
27	SEKRETARIAT KORPRI	657.353.000,00	643.944.981,00	97,96	13.408.019,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.988.646.130,00	3.548.202.179,00	88,96	440.443.951,00
29	INSPEKTORAT	3.331.409.000,00	3.279.969.450,00	98,46	51.439.550,00
30	KECAMATAN LOBALAIN	4.033.065.090,00	3.985.133.350,00	98,81	47.931.740,00

NO	NAMA DINAS	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
31	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT	2.405.271.768,00	2.343.532.272,00	97,43	61.739.496,00
32	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	1.304.689.734,00	1.275.121.625,00	97,73	29.568.109,00
33	KECAMATAN ROTE BARAT	1.499.945.730,00	1.474.648.010,00	98,31	25.297.720,00
34	KECAMATAN ROTE SELATAN	1.305.257.000,00	1.287.921.681,00	98,67	17.335.319,00
35	KECAMATAN ROTE TENGAH	2.130.445.000,00	2.099.873.340,00	98,57	30.571.660,00
36	KECAMATAN PANTAI BARU	2.164.256.996,00	2.135.230.175,00	98,66	29.026.821,00
37	KECAMATAN ROTE TIMUR	1.593.329.000,00	1.576.361.542,00	98,94	16.967.458,00
38	KECAMATAN NDAO NUSE	660.208.936,00	640.401.266,00	97,00	19.807.670,00
39	KECAMATAN LANDU LEKO	823.621.921,00	804.688.366,00	97,70	18.933.555,00
40	KECAMATAN LOAHOLU	1.348.592.001,00	1.302.094.865,00	96,55	46.497.136,00
41	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.730.995.800,00	11.791.817.977,00	80,05	2.939.177.823,00
JUMLAH		**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**92,84**	**65.999.507.051,27**

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 sesuai LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA. 2023

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING							**31,13**	**SANGAT RENDAH**
1.	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia**	1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,54	64,00	93,38	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,71	13,22	89,87	Tinggi
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	2	3	50,00	Rendah
		4.	Prevalensi Stunting	%	18,00	20,50	86,11	Tinggi
		Rata-Rata Capaian Sasaran					**68,06**	Sedang
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	Poin	93,03	49,01	52,68	Rendah
		6.	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	<35	<35 (75)	-47,14	Sangat Rendah
		Rata-Rata Capaian Sasaran					**2,77**	Sangat Rendah
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	7.	Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,50	1,65	-107	Sangat Rendah

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
MISI 2 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN							**72,17**	**SEDANG**
2.	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing**	**8.**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Rp**	**25.959.000**	**24.709.926**	**95,19**	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	9.	*Kemiskinan Ekstrem	%	5,41	2,85	-41,86	Sangat Rendah
	Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian	10.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	8,99	7,18	80	Tinggi
3.	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan**	**11.**	**PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**Miliar Rupiah**	**1.916**	**1.745**	**91,06**	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	12.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	156.013	161.768,59	103,69	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah	13.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	21.000	16.215	77,21	Tinggi
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	14.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	89,10	89,13	100,03	Sangat Tinggi
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN							**116,64**	**SANGAT TINGGI**
4.	**Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air dan Permukiman Yang Layak**	**15.**	**Cakupan Kualitas Infrastruktur**	**%**	**82,40**	**76,02**	**92,26**	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Konektivitas	16.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,84	60,35	91,66	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air	17.	Rasio Jaringan Irigasi	%	65,24	72,18	110,64	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	9.414	6.310	67,03	Sedang
5.	**Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**	**19.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**71,39**	**69,59**	**97,48**	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	20.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	27,00	71,66	265,41	Sangat Tinggi
		21.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	100,00	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Sasaran					**182,70**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22.	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,05	97,31	100,27	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	23.	Desa Tangguh Bencana	Desa	20	25	125,00	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA							**90,29**	**SANGAT TINGGI**
6.	**Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**	**24.**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)**	**Predikat**	**B**	**CC**	**91,80**	**Sangat Tinggi**
		25.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**71**	**50,77**	**71,51**	**Sedang**
		Rata-Rata Capaian Tujuan					**81,65**	**Tinggi**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	26.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	27.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	90	88,08	97,87	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI							**75,56**	**TINGGI**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA							**79,04**	**TINGGI**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TUJUAN							**90,38**	**SANGAT TINGGI**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA SASARAN							**75,07**	**SEDANG**

Hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2023 yang terdiri dari 6 (enam) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja

menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 79,04% atau dikategorikan " Tinggi", dengan rata-rata capaian kinerja Misi sebesar 75,56% atau dikategorikan "Tinggi" yakni Misi 1 sebesar 31,13% (*Sangat Rendah*), Misi 2 sebesar 72,17% (*Sedang*), Misi 3 sebesar 116,64% (*Sangat Tinggi*) dan Misi 4 sebesar 90,29% (*Sangat Tinggi*).

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 yang mencakup 106 program dan 587 kegiatan untuk mendukung terwujudnya 7 prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam laporan kinerja pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dalam tataran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD, pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalami berbagai permasalahan secara umum dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kemampuan SDM aparatur yang masih belum profesional dan kreatif dalam pengelolaan keuangan daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, infrastruktur dan teknologi dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan;
3. Sistem pengendalian internal yang belum diterapkan secara optimal;
4. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kegiatan pembangunan;
5. Terdapat kegiatan yang belum diilaksanakan sesuai *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas masih kurang optimal;
6. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola;

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 mengacu pada kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, dengan tetap memperhatikan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan konsolidasi data dari semua entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Entitas akuntansi adalah unit Pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas Akuntansi di Kabupaten Rote Ndao adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan semua perangkat daerah. Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao di bentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao sehingga nama unit Organisasi Perangkat Daerah berubah menjadi Perangkat Daerah /entitas akuntansi sejumlah 41 Satuan Kerja, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi TA.2023

NO	ENTITAS AKUNTANSI PD TAHUN 2023
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12	DINAS PERHUBUNGAN
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	DINAS PERIKANAN
19	DINAS PERTANIAN
20	DINAS PETERNAKAN
21	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
22	SEKRETARIAT DAERAH
23	SEKRETARIAT DPRD
24	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH
27	SEKRETARIAT KORPRI
28	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
29	INSPEKTORAT
30	KECAMATAN LOBALAIN
31	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
32	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
33	KECAMATAN ROTE BARAT
34	KECAMATAN ROTE SELATAN
35	KECAMATAN ROTE TENGAH
36	KECAMATAN PANTAI BARU
37	KECAMATAN ROTE TIMUR

NO	ENTITAS AKUNTANSI PD TAHUN 2023
38	KECAMATAN NDAO NUSE
39	KECAMATAN LANDULEKO
40	KECAMATAN LOAHOLU
41	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1) Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 adalah Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Basis Akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2) Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Daerah atau dikeluarkan dari Kas Daerah, ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca, penyajian pendapatan-LO, beban dalam Laporan Operasional, dan perubahan ekuitas dalam Laporan perubahan ekuitas berdasarkan Basis Akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.
3) Masa Pembukuan atau periode akuntansi adalah satu tahun anggaran yang dimulai 01 Januari dan berakhir 31 Desember.
4) Mata uang yang digunakan adalah rupiah.
5) Pelaksanaan Pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
6) Seluruh laporan keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun pada posisi 31 Desember 2023. Oleh karena itu semua penerimaan yang menjadi hak daerah sebagai penambah aset daerah demikian pula pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang diterima/dikeluarkan ke dan dari kas daerah di atas tanggal 31 Desember 2023 adalah menjadi penerimaan dan pengeluaran tahun anggaran berikutnya.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka komposisi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1) **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan selama suatu periode pelaporan serta membandingkan realisasi tersebut dengan anggarannya dalam periode pelaporan yang sama. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari akun :

a) Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a) pendapatan termasuk penerimaan pada kas bendahara tunai maupun rekening entitas akuntansi yang telah disahkan oleh BUD.
c) Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat transaksi barang dan jasa tersebut diterima.
d) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
e) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin d) belanja termasuk seluruh pengeluaran kas pada entitas akuntansi yang telah disahkan oleh BUD.
f) Pengukuran belanja dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.
g) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
h) Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.
i) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran.

j) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
k) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan penerimaan).
l) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja APBD ditambah dengan realisasi pembiayaan netto selama satu periode pelaporan.

2) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat pembandingan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2023 dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) tahun sebelumnya.

3) **Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana (non aset) pada tanggal tertentu.

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
   1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
   2. Berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

(1) <u>Kas dan setara kas</u>

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah dan Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dan setara kas terdiri dari:

a) Saldo Kas di rekening kas daerah;
b) Saldo Kas di bendahara penerimaan baik tunai maupun pada rekening bank;

c) Saldo Kas di bendahara pengeluaran baik tunai maupun pada rekening bank.

(2) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
b) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* untuk piutang yang tidak diatur dalam Undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Piutang dari Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Piutang dari Perjanjian Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang dari Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang Ganti Rugi

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

(3) Penyisihan Piutang Tak tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain, yang diukur

berdasarkan presentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya yang dilakukan pemerintah.

Tabel 4.2
Kebijakan Akuntansi Presentase Penyisihan Piutang

KUALITAS PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG		
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Lain2
Piutang Lancar	5%	5%	5%
Piutang Kurang Lancar	10%	10%	10%
Piutang diragukan	50%	50%	50%
Piutang Macet	100%	100%	100%

(4) <u>Persediaan</u>

a) Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi
b) Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (Neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
c) Persediaan disajikan sebesar:
   (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
   (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
   (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (First In First Out/FIFO)

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah atau masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

(5) Investasi jangka panjang

(a) Investasi Permanen

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya
   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
   Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Atas dasar kebijakan diatas nilai investasi pada BPD Bank NTT dinilai dengan metode biaya dan pada PD Ita Esa dan PDAM dengan menggunakan metode ekuitas.

(b) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa dana bergulir dinilai berdasarkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Penyisihan atas dana bergulir merupakan estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Kebijakan penyisihan dana bergulir yang diterapkan pada LKPD TA.2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir pada Pemerintah Daerah.

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:

a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(6) <u>Aset tetap</u>

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

a) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
b) Perolehan tanah yang berasal dari hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai aset tanah dan sebagai pendapatan-LO dengan cara menaksir nilai wajar tanah tersebut pada tanggal transaksi.
c) Penetapan taksiran nilai wajar tanah yang diperoleh dari hibah/donasi menggunakan nilai jual objek pajak pada tahun anggaran berkenaan.
d) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
e) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

f) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

g) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

j) Terhadap belanja modal yang belum menghasilkan aset tetap berwujud sesuai definisi aset tetap dicatat pada aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, transaksi ini dapat berupa belanja modal perencanaan belanja pendukung lainnya yang belum menghasilkan aset tetap berwujud lainnya.

k) Terhadap belanja modal dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap tidak dicatat pada lembar muka laporan keuangan atau dicatat secara ekstra kompitable. Nilai satuan minimal kapitalisasi aset tetap terdiri dari:

Tabel 4.3

Kebijakan Akuntansi Batasan Minimal kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai per satuan
1.	Peralatan dan mesin	
1.1	Alat-alat berat	5,000,000,00
1.2	Alat-alat angkutan	2.500,000,00
1.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	500,000,00
1.4	Alat-alat pertanian dan peternakan	500,000,00
1.5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	
	- Alat-alat kantor	300,000,00
	- Alat rumah tangga	300,000,00
1.6	Alat studio dan alat komunikasi	300,000,00

No.	Uraian	Nilai per satuan
1.7	Alat-alat kedokteran	300,000,00
1.8	Alat-alat laboratorium	300,000,00
1.9	Alat keamanan	300,000,00
2.	Gedung dan bangunan	
2.1	Bangunan Gedung	20,000,000,00
2.2	Bangunan monument	10,000,000,00
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	
3.1	Jalan dan jembatan	20,000,000,00
3.2	Bangunan air dan irigasi	20,000,000,00
3.3	Instalasi	2,000,000,00
3.4	Jaringan	2,000,000,00
4.	Aset tetap lainnya	
4.1	Buku dan perpustakaan	100,000,00
4.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga	
	- Barang bercorak kesenian/ kebudayaan	500,000,00
	- Alat olahraga	300,000,00

l) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

m) Atas aset tetap yang sudah tidak digunakan secara aktif dengan klasifikasi rusak berat oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao direklasifikasi ke aset lainnya aset yang tidak digunakan/rusak berat. Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya disesuaikan dengan berita acara atas pemeriksaan kondisi aset. Penetapan kondisi aset tetap diklasifikasikan kedalam kondisi baik, rusak ringan, rusak berat.

- Aset dalam kondisi baik apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- Aset dalam kondisi rusak ringan apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
- Aset dalam kondisi rusak berat apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

n) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
o) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada akhir tahun anggaran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
p) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak, dan tanaman.
q) Perhitungan penyusutan aset tetap untuk perolehan pada awal sampai dengan akhir bulan dianggap diperoleh pada awal bulan yang bersangkutan.
r) Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
s) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
t) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

(7) <u>Aset lainnya</u>

a) Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar. investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
b) Tagihan Piutang Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
c) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
d) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan pihak ketiga seperti bangun guna serah, bangun serah guna.

(a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

(c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

e) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal. Aset tak berwujud dapat berupa sistem informasi/ aplikasi.

f) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa informasi kerugian daerah sesuai LHP BPK RI dan APIP, piutang yang kadaluarsa.

g) Aset Tetap yang tidak digunakan merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan penambahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
c. Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

4. Laporan Operasional

a) Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
b) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian.
c) Beban diakui pada:
   (1) Saat timbulnya kewajiban;
   (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
d) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
e) Terhadap belanja modal dibawah batasan nilai kapitalisasi aset tetap dicatat sebagai beban lain-lain.
f) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
g) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
h) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam Laporan Arus Kas disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan Pemerintah Daerah yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok aktivitas yaitu:

1) Aktivitas Operasi
   Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2) Aktivitas investasi Aset Non Keuangan
   Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
3) Aktivitas Pendanaan
   Arus kas dari aktivitas pendanaan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
4) Aktivitas Transitoris
   Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan berbagai unsur ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

7. Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai standar

akuntansi pemerintahan serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Hal ini mengingat, tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan mengandung informasi yang dapat menimbulkan kesalah pahaman diantara pembaca/pengguna laporan. Untuk menghindari kesalahpahaman, setiap pos yang tercantum dalam setiap lembar muka (*on the face*) dibuat catatan berupa penjelasan sebagai referensi silang ke pos-pos laporan keuangan dimaksud melalui Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Akun Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2023 dan 2022 menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /APBD Kabupaten Rote Ndao TA.2023, dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2023.

Pendapatan Daerah pada TA.2023 dari anggaran sebesar Rp905.075.929.387,00 realisasi sebesar Rp895.421.393.437,59 atau mencapai 98,93%. Belanja Daerah pada TA.2023 dari anggaran sebesar Rp921.646.764.729,00 realisasi sebesar Rp855.647.257.677,73 atau mencapai 92,84%, dari total realisasi pendapatan daerah TA.2023 dan total realisasi belanja daerah TA.2023 menghasilkan surplus TA.2023 sebesar Rp39.774.135.759,86.

Pembiayaan Netto TA.2023 dari anggaran sebesar Rp16.570.835.342,00 realisasi sebesar Rp16.817.749.314,49 atau mencapai 101,49%, yang jika ditambahkan dengan surplus anggaran sebesar Rp39.774.135.759,86 maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA.2023 sebesar Rp56.591.885.074,35.

Secara ringkas anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2023 dan TA.2022

	TA.2023		TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(Rp)
Pendapatan Daerah	905.075.929.387,00	895.421.393.437,59	800.695.726.668,95
Belanja Daerah	921.646.764.729,00	855.647.257.677,73	813.429.616.328,05
Surplus/(Defisit) Anggaran	(16.570.835.342,00)	39.774.135.759,86	(12.733.889.659,10)
Pembiayaan Netto	16.570.835.342,00	16.817.749.314,49	39.804.725.000,85
SILPA	0,00	56.591.885.074,35	27.070.835.341,75

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah laporan yang menyajikan Informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan, tidak terdapat perbandingan LPSAL TA 2023 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL tahun 2023 terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SILPA/SIKDA, Koreksi SAL akhir tahun dan saldo anggaran lebih akhir tahun.

Secara ringkas Laporan Perubahan SAL TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Laporan Perubahan SAL TA.2023 dan TA. 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih awal	27.070.835.341,75	50.882.842.591,10
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	27.317.749.314,49	50.304.725.000,85
Subtotal	**(246.913.972,74)**	**578.117.590,25**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	56.591.885.074,35	27.070.835.341,75
Subtotal	**56.344.971.101,61**	**27.648.952.932,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	246.913.972,74	96.882.409,75
Lain-lain	0,00	(675.000.000,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**56.591.885.074,35**	**27.070.835.341,75**

Neraca Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode atau tanggal tertentu.

Secara ringkas Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Ringkasan Neraca TA.2023 dan TA.2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset	**1.770.413.506.901,88**	**1.648.173.920.004,72**
Aset Lancar	80.241.370.371,36	57.921.619.012,45
Investasi Jangka Panjang	91.499.961.235,00	80.763.885.136,00
Aset tetap	1.544.695.918.035,29	1.455.142.456.250,96
Aset lainnya	53.976.257.260,23	54.345.959.605,31
Kewajiban	**2.742.106.939,70**	**10.078.188.892,33**
Kewajiban jangka pendek	2.742.106.939,70	10.078.188.892,33
Ekuitas	**1.767.671.399.962,18**	**1.638.095.731.112,39**

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan laporan keuangan tahun 2022.

Secara ringkas Laporan Operasional (LO) TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Ringkasan Laporan Operasional (LO) TA.2023 dan TA.2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan – LO	**789.831.645.492,59**	**805.454.532.704,38**
Pendapatan Asli Daerah – LO	35.835.004.870,59	24.410.308.804,43
Pendapatan Transfer – LO	744.337.419.966,00	748.976.830.383,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LO	9.659.220.656,00	32.067.393.516,95
Surplus Non Operasional – LO	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00
Beban – LO	**679.929.479.776,34**	**782.524.941.124,54**
Beban Operasi	633.119.213.982,34	736.336.548.494,54
Beban Transfer	46.810.265.794,00	46.188.392.630,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	**109.902.165.716,25**	**22.929.591.579,84**
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(23.500.000,00)	(736.364.577,00)
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit – LO	**109.878.665.716,25**	**22.193.227.002,84**

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan serta diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris yang dicatat berdasarkan metode langsung.

Secara ringkas Arus kas TA 2023 dan arus kas TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Ringkasan Arus Kas TA.2023 dan TA.2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	221.009.115.586,86	143.502.543.824,90
Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(191.734.979.827,00)	(166.736.433.484,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	(7.434.917.672,57)	9.976.150,00
Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode	**21.839.218.087,29**	**(23.223.913.509,10)**
Saldo awal kas	35.228.807.163,75	50.887.437.783,10
Koreksi Kas Tahun Lalu	(428.086.027,26)	96.912.409,75
Saldo Kas Akhir di BUD	56.639.939.223,78	27.760.436.683,75
Kas lainnya di bendahara (selain BUD)	0,00	7.468.370.480,00
Saldo akhir kas	56.639.939.223,78	35.228.807.163,75

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Secara ringkas Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.6
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas TA.2023 dan TA.2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Dsember 2022
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	1.638.095.731.112,39	1.620.234.558.471,53
Surplus (LO)	109.878.665.716,25	22.193.227.002,84
Dampak Komulatif Perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	19.697.003.133,54	(4.332.054.361,98)
Ekuitas Akhir	1.767.671.399.962,18	1.638.095.731.112,39

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran:

5.1.1. Pendapatan – LRA

	2023	2022
Pendapatan – LRA	**Rp895.421.393.437,59**	**Rp800.695.726.668,95**

Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 terealisasi sebesar Rp895.421.393.437,59 atau 98,93% dari target yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebesar Rp905.075.929.387,00 atau kurang dari target sebesar Rp9.654.535.949,41 atau 1,07%.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA.2022 sebesar Rp800.695.726.668,95 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp94.725.666.768,64 atau 11,83%.

Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berkut:

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA.2023 dan TA.2022

	TA.2023		TA.2022
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(Rp)
Pendapatan – LRA	**905.075.929.387,00**	**895.421.393.437,59**	**800.695.726.668,95**
Pendapatan Asli Daerah– LRA	29.675.022.844,00	33.885.585.638,59	24.189.482.297,00
Pendapatan Transfer– LRA	868.598.706.543,00	854.349.477.695,00	744.438.850.855,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LRA	6.802.200.000,00	7.186.330.104,00	32.067.393.516,95

Pengakuan pendapatan daerah sebesar Rp895.421.393.437,59 berasal dari:

1. Pendapatan yang disetorkan ke kas daerah sesuai STS/slip penerimaan bank Rp736.810.175.790,72
2. Pendapatan yang masih berada pada kas di bendahara pengeluaran perangkat daerah Rp16.494.706,70
3. Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada rekening FKTP sesuai SP2B BUD Rp7.157.724.227,00

4.	Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada rekening BOK sesuai SP2B BUD	Rp10.861.463.200,00
5.	Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada rekening BOS sesuai SP2B BUD	Rp29.680.403.150,00
6.	Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada Rekening BOP PAUD dan kesetaraan sesuai SP2B BUD	Rp3.083.935.000,00
7.	Pendapatan Dana Desa	Rp107.810.890.000,00
8.	Pendapatan Jasa Giro BOS	Rp307.363,17
	Jumlah Pendapatan Daerah	**Rp895.421.393.437,59**

Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada rekening BOS sesuai SP2B BUD sebesar Rp29.680.403.150,00 terdiri dari :

1.	Pendapatan BOS Reguler	Rp28.185.403.150,00
2.	Pendapatan BOS Kinerja	Rp1.495.000.000,00
	Jumlah	**Rp 29.680.403.150,00**

Pendapatan yang disahkan oleh BUD pada rekening PAUD sesuai SP2B BUD sebesar Rp3.083.935.000,00 terdiri dari :

1.	Pendapatan BOP PAUD	Rp1.999.535.000,00
2.	Pendapatan BOP KESETARAAN	Rp1.084.400.000,00
		Rp3.083.935.000,00

Rincian sumber-sumber pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah – LRA

	2023	**2022**
Pendapatan Asli Daerah – LRA	**Rp33.885.585.638,59**	**Rp24.189.482.297,00**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar Rp33.885.585.638,59 atau 114,19% dari target yang dianggarkan sebesar Rp29.675.022.844,00 atau melebihi dari target sebesar Rp4.210.562.794,59 atau 14,19%.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp24.189.482.297,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.696.103.341,59 atau 40,08%.

Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realiasasi Pendapatan Asli Daerah TA.2023 dan TA.2022

	TA.2023			TA.2022
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Realisasi(Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LRA	**29.675.022.844,00**	**33.885.585.638,59**	**114,19**	**24.189.482.297,00**
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	11.915.649.300,00	15.934.199.650,70	133,72	11.165.927.823,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	8.002.986.400,00	7.612.877.375,00	95,13	5.486.843.025,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA	7.132.456.526,00	7.132.456.526,00	100,00	3.920.741.531,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	2.623.930.618,00	3.206.052.086,89	122,19	3.615.969.918,00

1) Pendapatan Pajak Daerah – LRA	**2023**	**2022**
	Rp15.934.199.650,70	**Rp11.165.927.823,00**

Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA.2023 sebesar Rp15.934.199.650,70 atau 133,72% dari target yang dianggarkan sebesar Rp11.915.649.300,00 atau melebihi dari target sebesar Rp4.018.550.350,70 atau 33,72 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp11.165.927.823,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.768.271.827,70 atau 42,70%. Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA.2023 dan TA.2022

	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	1.773.377.000,00	2.401.463.757,00	135,42	1.624.345.201,00
Pajak Restoran	1.573.655.400,00	2.156.062.329,70	137,01	1.563.487.745,00
Pajak Hiburan	30.500.000,00	172.223.270,00	564,67	14.654.000,00
Pajak Reklame	33.555.800,00	69.265.080,00	206,42	106.806.350,00

	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	2.300.000.000,00	2.954.563.979,00	128,46	2.625.250.376,00
Pajak Parkir	5.500.000,00	5.165.000,00	93,91	0,00
Pajak Air Tanah	1.500.000,00	2.815.000,00	187,67	2.985.900,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	2.959.562.968,00	155,77	786.335.262,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.197.561.100,00	2.338.532.009,00	106,41	2.169.107.251,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.100.000.000,00	2.874.546.258,00	136,88	2.272.955.738,00
Jumlah	**11.915.649.300,00**	**15.934.199.650,70**	**133,72**	**11.165.927.823,00**

a) Pajak daerah yang berasal dari pajak hotel adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari objek pajak jasa sewa penginapan hotel dan pajak rumah penginapan dan sejenisnya. Realisasi sebesar Rp2.409.107.178,00 terdiri dari:

- Pajak hotel Rp2.372.921.257,00
- Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya Rp28.542.500,00

Jumlah **Rp2.401.463.757,00**

b) Pajak restoran adalah jumlah pendapatan asli daerah yang berasal dari objek pajak restoran, rumah makan, warung dan jasa boga/katering. Realisasi sebesar Rp2.082.277.741,00 terdiri dari:

- Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp652.450.155,00
- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp426.159.288,00
- Pajak Warung dan Sejenisnya Rp250.488.402,00
- Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp826.964.484,70

Jumlah **Rp2.156.062.329,70**

c) Pajak Hiburan adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari objek pajak permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, mandi uap/spa, pajak hiburan/pertandingan olahraga dan TV kabel. Realisasi sebesar Rp172.223.270,00 terdiri dari:

- Tontonan Film Rp6.000.000,00
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp15.313.270,00
- Pajak Pertandingan Olahraga Rp150.910.000,00

Jumlah **Rp172.223.270,00**

d) Pajak Reklame adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari objek pajak pemilik papan/billboard, reklame kain, reklame melekat/stiker dan reklame berjalan. Realisasi sebesar Rp69.265.080,00 terdiri dari:

• Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	Rp22.611.830,00
• Pajak Reklame Kain	Rp39.786.250,00
• Pajak Reklame Berjalan	Rp6.867.000,00
Jumlah	**Rp69.265.080,00**

e) Pajak Penerangan Jalan adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari objek pajak konsumen listrik negara dengan nilai realisasi TA.2023 sebesar Rp2.954.563.979,00;

f) Pajak Parkir adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan nilai realisasi sebesar Rp5.165.000,00;

g) Pajak Air Tanah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan nilai realisasi TA.2023 sebesar Rp2.815.000,00;

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan akun pajak dengan objek galian golongan C adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak pihak ketiga pengguna ataupun pemilik tambang galian golongan C dengan nilai realisasi TA.2023 sebesar Rp2.959.562.968,00;

i) Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi TA.2023 sebesar Rp2.338.532.009,00 adalah jumlah pendapatan asli daerah yang berasal dari PBB sektor perkotaan dan PBB sektor perdesaan berupa objek pajak tanah dan bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

j) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berasal dari objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan nilai realisasi TA.2023 sebesar Rp2.874.546.258,00 yang berasal dari BPHTB-Hak Baru.

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2023	2022
	Rp7.612.877.375,00	**Rp5.486.843.025,00**

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA.2023 sebesar Rp7.612.877.375,00 atau 95,13% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.002.986.400,00 atau kurang dari target sebesar Rp390.109.025,00 atau 4,87%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA.2022 sebesar Rp5.486.843.025,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.126.034.350,00 atau 38,75%. Ringkasan anggaran dan realisasi retribusi TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA.2023 dan TA.2022

No	Uraian	TA.2023		%	TA.2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
I	**Retribusi Jasa Umum**	**6.017.251.400,00**	**6.793.118.200,00**	**112,89**	**4.891.556.600,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan– Puskesmas	200.000.000,00	567.801.000,00	283,90	97.956.500,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	4.969.553.800,00	5.590.788.000,00	112,50	3.974.777.200,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	0,00	0,00	163.876.500,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	188.784.000,00	58.100.000,00	30,78	93.800.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	160.000.000,00	149.750.000,00	93,59	122.550.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	260.506.000,00	211.968.000,00	81,37	242.906.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	149.634.000,00	129.852.000,00	86,78	120.160.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.500.000,00	4.000.000,00	88,89	3.052.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	84.273.600,00	80.859.200,00	95,95	72.478.400,00
II	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.755.735.000,00**	**565.052.500,00**	**32,18**	**433.777.000,00**
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	43.200.000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Retribusi Pemakaian Ruangan	40.000.000,00	25.200.000,00	63,00	0,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Retribusi Pemakaian Alat	1.011.510.000,00	174.850.000,00	17,29	237.750.000,00
13	Retribusi Terminal - Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.392.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14	Retribusi Tempat Khusus Parkir	111.648.000,00	1.500.000,00	1,34	8.800.000,00

No	Uraian	TA.2023		%	TA.2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
15	Retribusi Rumah Potong Hewan	245.000.000,00	207.436.500,00	84,67	26.065.000,00
16	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	142.185.000,00	100.585.000,00	70,74	106.515.000,00
17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00	11.161.000,00	111,61	10.197.000,00
18	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	150.000.000,00	6.320.000,00	4,21	0,00
18	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.050.000,00
III	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**230.000.000,00**	**254.706.675,00**	**110,74**	**161.509.425,00**
19	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	222.150.000,00	245.156.675,00	110,36	152.109.425,00
20	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.400.000,00	9.550.000,00	129,05	8.900.000,00
21	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Jumlah (I+II+III)	**8.002.986.400,00**	**7.612.877.375,00**	**95,13**	**5.486.843.025,00**

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	**2023**	**2022**
	Rp7.132.456.526,00	**Rp3.920.741.531,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA.2023 sebesar Rp7.132.456.526,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.132.456.526,00. Realisasi merupakan penerimaan dividen bagian laba PT.BPD NTT TA.2023 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan persentase kepemilikan saham. Nilai persentase kepemilikan saham Kabupaten Rote Ndao pada PT. BPD NTT dengan nilai penyertaan sampai dengan TA.2022 Rp70.272.610.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA.2022 sebesar Rp3.920.741.531,00, maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.211.714.995,00 atau 81,92%.

Berikut adalah penyertaan modal yang diberikan dalam bentuk kas melalui realisasi pembayaran Kas Umum Daerah dan dividen yang

dibagikan dari nominal saham yang dimiliki pada PT.BPD Bank NTT tahun 2008 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.11
Penyertaan Modal pada PT. BPD Bank NTT

Tahun Penyertaan Modal	Nilai Penyertaan modal (Rp)	Dividen dari Modal yang disertakan (Rp)	Jumlah saham (Lembar)
Tahun 2008	10.550.000.000,00	1.596.000.000,00	1.055.000
Tahun 2009	12.550.000.000,00	2.366.079.984,02	1.255.000
Tahun 2010	14.550.000.000,00	3.777.203.168,88	1.455.000
Tahun 2011	16.550.000.000,00	4.384.458.439,25	1.655.000
Tahun 2012	18.550.000.000,00	5.320.183.700,91	1.855.000
Tahun 2013	20.550.000.000,00	6.002.491.804,00	2.055.000
Tahun 2014	22.550.000.000,00	6.252.534.705,00	2.255.000
Tahun 2015	25.550.000.000,00	6.014.516.533,00	2.555.000
Tahun 2016	30.550.000.000,00	5.343.251.384,00	3.055.000
Tahun 2017	35.550.000.000,00	5.505.647.812,00	3.555.000
Tahun 2018	37.853.500.000,00	6.059.453.988,00	3.785.350
Tahun 2019	42.853.500.000,00	6.283.847.348,00	4.285.350
Tahun 2020	50.272.610.000,00	6.347.141.404,00	5.027.261
Tahun 2021	60.272.610.000,00	3.920.741.531,00	6.027.261
Tahun 2022	70.272.610.000,00	7.132.456.526,00	7.027.261
Tahun 2023	80.272.610.000,00	*)	8.027.261

*) Pembagian dividen atas kepemilikan saham TA.2023 baru dibagikan setelah RUPS PT.BPD NTT Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

4) Lain-lain	2023	2022
Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	**Rp3.206.052.086,89**	**Rp3.615.969.918,00**

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan TA.2023 sebesar Rp3.206.052.086,89 atau 122,19% dari anggaran pendapatan sebesar Rp2.623.930.618,00 atau melebihi target sebesar Rp582.121.468,89 atau 22,19%.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada TA.2022 sebesar Rp3.615.969.918,00 maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp409.917.831,11 atau 11,34%. Ringkasan anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA.2023 dan TA.2022

No	Uraian	TA.2023		%	TA.2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	865.257.720,00	1.465.164.381,00	169,33	99.721.125,00
3	Penerimaan Jasa Giro	1.514.351.673,00	760.753.577,42	50,24	1.422.875.565,37
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00	735.877.695,63	3679,39	1.217.354.395,00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	154.492.233,84	0,00	399.080.167,63
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.850.000,00	43.948.494,00	751,26	64.770.779,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	203.471.225,00	0,00	0,00	259.951.694,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian	15.000.000,00	45.815.705,00	305,44	132.216.192,00
	Jumlah	**2.623.930.618,00**	**3.206.052.086,89**	**122,19**	**3.615.969.918,00**

a) Realisasi penerimaan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan merupakan penerimaan daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari:

(1)	hasil penjualan hewan	Rp35.000.000,00
(2)	hasil penjualan aset lain-lain aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	Rp1.430.164.381,00
	Jumlah	**Rp1.465.164.381,00**

b) Realisasi penerimaan jasa giro sebesar Rp760.753.577,42 merupakan pendapatan jasa giro yang terdapat pada rekening kas umum daerah dan rekening bendaharawan;

c) Realisasi Penyetoran Kembali Kerugian Daerah/TGR sebesar Rp735.877.695,63 berasal dari kerugian uang yaitu setoran atas LHP BPK dan APIP;

d) Realisasi dari Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp154.492.233,84;

e) Realisasi dari pendapatan denda pajak sebesar Rp43.948.494,00 terdiri dari:

(1)	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp149.200,00
(2)	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp43.799.294,00
	Jumlah	**Rp43.948.494,00**

f) Realisasi Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp45.815.705,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

II. Pendapatan Transfer – LRA

	2023	2022
Pendapatan Transfer– LRA	**Rp854.349.477.695,00**	**Rp744.438.850.855,00**

Realisasi pendapatan transfer-LRA TA.2023 sebesar Rp854.349.477.695,00 atau 98,36% dari target yang dianggarkan sebesar Rp868.598.706.543,00, atau tidak mencapai target sebesar Rp14.249.228.848,00 atau 1,64 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi yang sama pada TA.2022 sebesar Rp744.438.850.855,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp109.910.626.840,00 atau 14,76%. Ringkasan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	**868.598.706.543,00**	**854.349.477.695,00**	**744.438.850.855,00**
Transfer Pemerintah Pusat	716.130.823.531,00	708.357.093.249,00	623.618.977.040,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	124.562.286.000,00	124.562.286.000,00	103.415.684.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.905.597.012,00	21.430.098.446,00	17.404.189.815,00

1) Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2023	2022
	Rp708.357.093.249,00	**Rp623.618.977.040,00**

Realisasi penerimaan transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp708.357.093.249,00 atau 98,91% dari target yang dianggarkan sebesar Rp716.130.823.531,00 target tidak terealisasi sebesar Rp7.773.730.282,00 atau 1,09 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi transfer Pemerintah Pusat TA.2022 sebesar Rp623.618.977.040,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp84.738.116.209,00 atau 13,59%.

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA.2023 dan TA.2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		Realisasi(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – LRA	**716.130.823.531,00**	**708.357.093.249,00**	**98,91**	**623.618.977.040,00**
Dana Bagi Hasil	5.475.104.000,00	6.640.039.767,00	121,28	10.570.069.081,00
Dana Alokasi Umum	438.961.153.000,00	438.961.153.000,00	100,00	419.857.979.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	164.606.322.876,00	159.090.994.820,00	96,65	138.234.076.845,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107.088.243.655,00	103.664.905.662,00	96,80	54.956.852.114,00

a) Dana Bagi Hasil

2023	2022
Rp6.640.039.767,00	**Rp10.570.069.081,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA.2023 sebesar Rp6.640.039.767,00 atau 121,28% dari target sebesar Rp5.475.104.000,00 atau melebihi target sebesar Rp1.164.935.767,00 atau 21,28 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi yang sama pada TA.2022 sebesar Rp10.570.069.081,00 maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.930.029.314,00 atau 37,18%. Anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Dana Bagi Hasil Pajak
TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	429.864.000,00	1.594.799.767,00	371,00	5.930.646.675,00
DBH Pajak Penghasilan Orang Pribadi Psl 21 dan Psl 29	1.631.956.000,00	1.631.956.000,00	100,00	2.399.312.812,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	144.602.000,00	144.602.000,00	100,00	114.742.294,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	38.040.000,00	38.040.000,00	100,00	117.514.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.272.000,00	1.272.000,00	100,00	49.486.300,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.229.370.000,00	3.229.370.000,00	100,00	1.958.311.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Jumlah	**5.475.104.000,00**	**6.640.039.767,00**	**121,28**	**10.570.069.081,00**

Realiasi dana bagi hasil pajak jika dibandingkan dengan alokasi sesuai peraturan menteri keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA.2023 sebesar Rp1.594.799.767,00 dari target anggaran sebesar Rp429.864.000,00 atau 371,00%. Realisasi transfer dari Pemerintah Pusat sesuai laporan dana transfer ke daerah (SIMTRADA) total yang ditransfer sebesar Rp1.594.799.767,00;
2. Dana Bagi Hasil PPh pasal 21 TA.2023 dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp1.881.839.000,00 dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp1.631.956.000,00;
3. Dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasi dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp155.061.000,00 dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp144.602.000,00;
4. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi yang dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp53.501.000,00 dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp38.040.000,00;

5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp1.272.000,00 dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp1.272.000,00;
6. Dana bagi hasil perikanan yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang perkiraan alokasi DBH SDA Perikanan TA.2023 sebesar Rp3.229.370.000,00 dan pada TA.2023 telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp3.229.370.000,00.

b) Dana Alokasi Umum	**2023**	**2022**
	Rp438.961.153.000,00	**Rp419.857.979.000,00**

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum TA.2023 sebesar Rp438.961.153.000,00 atau 100,00% dari Dana Alokasi Umum yang dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp438.961.153.000,00 dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah setiap bulannya sebesar satu per dua belas dari total alokasi dengan nilai total penyaluran sebesar Rp438.961.153.000,00 atau 100,00% dari alokasi Peraturan Presiden.

Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum pada TA.2022 sebesar Rp419.857.979.000,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp19.103.174.000,00 atau 4,55%.

c) Dana Alokasi Khusus Fisik	**2023**	**2022**
	Rp159.090.994.820,00	**Rp138.234.076.845,00**

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan program prioritas nasional sebesar Rp159.090.994.820,00 atau 96,65% dari anggaran pendapatan

sebesar Rp164.606.322.876,00. Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sama dengan alokasi pendapatan dan telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah sebesar Rp159.090.994.820,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA.2022 sebesar Rp138.234.076.845,00 maka realisasi TA.2023 terjadi peningkatan sebesar Rp20.856.917.975,00 atau15,09%.

Tabel 5.16
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	766.077.000,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.614.400.000,00	10.051.828.998,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.427.844.500,00	9.721.640.710,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.198.993.424,00	841.633.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	2.122.616.136,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	3.419.543.767,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.020.153.500,00	22.239.597.327,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	878.260.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	2.631.426.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.832.588.663,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	18.055.764.800,00	7.916.507.999,00
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.835.627.500,00	2.707.813.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.135.051.000,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	28.936.552.400,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	67.791.849.065,00	22.708.159.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.767.026.500,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.453.740.000,00	2.021.618.998,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.913.810.700,00	4.046.177.850,00
19	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	0,00	17.990.701.660,00
20	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	713.680.000,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	402.000.000,00	0,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	23.162.388.168,00	0,00
	Total	**159.090.994.820,00**	**138.234.076.845,00**

	2023	2022
d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	**Rp103.664.905.662,00**	**Rp54.956.852.114,00**

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan program prioritas nasional sebesar Rp103.664.905.662,00 atau 96,80% dari anggaran pendapatan sebesar Rp107.088.243.655,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA.2022 sebesar Rp54.956.852.114,00 maka realisasi TA.2023 terjadi peningkatan sebesar Rp48.708.053.548,00 atau 88,63%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA.2023 dan TA.2022 yang dialokasikan per bidang sebagai berikut:

Tabel 5.17
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	28.185.403.150,00	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.495.000.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.832.991.000,00	30.875.422.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.691.218.082,00	1.823.250.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.811.723.900,00	10.190.598.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.999.535.000,00	1.900.942.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.084.400.000,00	343.200.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.219.880.807,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	331.070.000,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.861.463.200,00	6.032.095.905,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.550.892.300,00	3.095.368.500,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.750.000.000,00	197.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.068.159.250,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	528.416.973,00	374.825.709,00
15	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.656.752.000,00	124.150.000,00
	Jumlah	**103.664.905.662,00**	**54.956.852.114,00**

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

Transfer	2023	2022
Pemerintah Pusat Lainnya– LRA	**Rp124.562.286.000,00**	**Rp103.415.684.000,00**

Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah sebesar Rp16.751.396.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi atas Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp107.810.890.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Dana Penyesuaian TA.2022 sebesar Rp103.415.684.000,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp21.146.602.000 atau 20,45%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp124.562.286.000,00 terdiri dari :

a) Pendapatan Dana Insentif Daerah – LRA	2023	2022
	Rp16.751.396.000,00	**Rp4.837.632.000,00**

Realisasi Dana Insentif Daerah TA.2023 sebesar Rp16.751.396.000,00 atau 100,00% sesuai Alokasi dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan.

b) Pendapatan Dana Desa – LRA	2023	2022
	Rp107.810.890.000,00	**Rp98.578.052.000,00**

Realisasi Dana Penyesuaian sebesar Rp107.810.890.000,00 merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa Pendapatan Dana Desa TA.2023 yang direalisasikan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Kas Desa dalam tiga tahap sebesar Rp107.810.890.000,00 atau 100,00% sesuai Alokasi dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Dana Desa TA.2022 sebesar Rp98.578.052.000,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.232.838.000 atau 9,37%.

3) Transfer Antar Daerah – LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	2023	2022
	Rp21.430.098.446,00	**Rp17.404.189.815,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah–LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp21.430.098.446,00 atau 76,79% dari target anggaran sebesar Rp27.905.597.012,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp6.475.498.566,00 atau 23,21%. Jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp17.404.189.815,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.025.908.631 atau 23,13%.

Ringkasan pendapatan transfer antar daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil-LRA

Pendapatan Bagi Hasil– LRA	2023	2022
	Rp21.430.098.446,00	**Rp16.520.989.815,00**

Pendapatan Bagi Hasil-LRA sebesar Rp21.430.098.446,00 atau 76,79% dari target anggaran sebesar Rp27.905.597.012,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp6.475.498.566,00 atau 23,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp16.520.989.815,00 maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.909.108.631,00 atau 29,71%. Rincian pendapatan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA.2022 dan TA.2021

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	5.705.493.103,00	2.611.321.658,00	45,77	2.437.088.817,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.344.771.272,00	2.611.338.893,00	78,07	3.731.063.776,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.084.797.050,00	6.619.748.961,00	81,88	712.869.989,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10.929.406,00	4.256.213,00	38,94	8.118.857,00
Pajak Rokok	10.759.606.181,00	9.583.432.721,00	89,07	9.631.848.376,00
Jumlah	**27.905.597.012,00**	**21.430.098.446,00**	**76,79**	**16.520.989.815,00**

b. Bantuan Keuangan – LRA

Bantuan	2023	2022
Keuangan– LRA	**Rp0,00**	**Rp883.200.000,00**

Bantuan Keuangan–LRA dengan Realisasi sebesar Rp0,00.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA	2023	2022
	Rp 7.186.330.104,00	**Rp32.067.393.516,95**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LRA TA.2023 sebesar Rp7.186.330.104,00 atau 105,65% dari target anggaran sebesar Rp6.802.200.000,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp384.130.104,00 atau 5,65%.

Jika di bandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp32.067.393.516,95 maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.881.063.412,95 atau 77,59%.

Ringkasan anggaran dan realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA.2023 adalah sebagai berikut:

a)

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis– LRA	2023	2022
	Rp28.605.877,00	**Rp20.628.091,95**

Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp28.605.877,00 berupa penerimaan berupa kelebihan setoran sisa TUP Dinas Kesehatan sebesar Rp2.670.506,00 dan penerimaan sebesar Rp25.935.371,00 tidak dapat terindentifikasi sumber dan jenis pendapatan.

b)

Pendapatan Hibah Dana BOS– LRA	2023	2022
	Rp0,00	**Rp26.975.575.692,00**

Pendapatan Hibah Dana BOS – LRA TA.2023 sebesar Rp0,00 dan realisasi TA.2022 sebesar Rp26.975.575.692,00.

Rincian Pendapatan Hibah Dana Bos TA.2023 sebagai berikut:

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS
TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hibah Dana BOS Sekolah Dasar	0,00	0,00	15.472.467.700,00
Hibah Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	11.503.107.992,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**26.975.575.692,00**

Pada tahun 2023 realisasi pendapatan BOS disajikan pada akun Pendapatan Transfer DAK-Non Fisik.

c)	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP**	**2023**	**2022**
		Rp7.157.724.227,00	**Rp5.071.189.733,00**

Realisasi pendapatan dari Dana kapitasi JKN TA.2023 sebesar Rp7.157.724.227,00 berasal dari transfer dana Kapitasi JKN TA.2023 untuk bulan Januari sampai dengan bulan desember 2023 yang ditransfer langsung ke rekening FKTP Puskesmas berdasarkan Pengakuan atas pendapatan pada rekening FKTP setelah disahkan oleh BUD dalam Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

Dana kapitasi JKN yang langsung diterima oleh FKTP Puskesmas bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5.20
Penerimaan Dana Kapitasi JKN TA.2023 dan TA.2022 per Puskesmas

No	Nama FKTP	Penerimaan TA.2023 (Rp)	Penerimaan TA.2022 (Rp)
1	Puskesmas Eahun	637.830.324,00	453.285.734,00
2	Puskesmas Sotimori	299.758.060,00	204.702.615,00
3	Puskesmas Korbafo	423.468.385,00	276.111.803,00
4	Puskesmas Sonimanu	276.809.041,00	174.300.302,00
5	Puskesmas Feapopi	406.916.669,00	298.511.174,00
6	Puskesmas Ba'a	1.472.306.264,00	1.025.249.905,00
7	Puskesmas Oele	406.461.378,00	235.514.279,00
8	Puskesmas Busalangga	734.393.379,00	495.045.851,00

No	Nama FKTP	Penerimaan TA.2023 (Rp)	Penerimaan TA.2022 (Rp)
9	Puskesmas Oelaba	562.034.115,00	402.740.029,00
10	Puskesmas Batutua	1.145.012.659,00	983.227.716,00
11	Puskesmas Delha	558.907.384,00	379.505.601,00
12	Puskesmas Ndao	233.826.569,00	142.994.724,00
	Jumlah	**7.157.724.227,00**	**5.071.189.733,00**

5.1.2. BELANJA

Belanja	2023	2022
	Rp855.647.257.677,73	**Rp813.429.616.328,05**

Total realisasi belanja daerah TA.2023 pada 41 Perangkat Daerah sebesar Rp855.647.257.677,73 atau 92,84% dari anggaran yang ditetapkan pada Peraturan Daerah 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023 sebesar Rp921.646.764.729,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp65.999.507.051,27 atau 7,16%.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada TA.2022 sebesar Rp813.429.616.328,05, maka realisasi TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp42.217.641.349,68 atau 5,19%. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja daerah TA.2023 dan realisasi TA.2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	575.126.152.125,00	517.439.019.579,73	89,97	511.901.906.714,05
Belanja Modal	190.643.870.709,00	182.700.144.208,00	95,83	156.236.433.484,00
Belanja Tidak Terduga	1.058.969.525,00	886.938.096,00	83,75	524.831.500,00
Belanja Transfer	154.817.772.370,00	154.621.155.794,00	99,87	144.766.444.630,00
Jumlah	**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**92,84**	**813.429.616.328,05**

Anggaran dan Realisasi belanja dan transfer dapat di lihat pada lampiran 1

I. Belanja Operasi	2023	2022
	Rp517.439.019.579,73	**Rp511.901.906.714,05**

Relisasi belanja operasi TA.2023 sebesar Rp517.439.019.579,73 atau 89,97% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar

Rp575.126.152.125,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp57.687.132.545,27 atau 10,03%.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA.2022 sebesar Rp511.901.906.714,05, maka realisasi TA.2023 terjadi peningkatan sebesar Rp5.537.112.865,68 atau 1,08%. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja operasi TA.2023 dan realisasi tahun anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	325.494.786.576,00	290.635.690.990,00	89,29	286.229.161.198,00
Belanja Barang dan Jasa	223.130.688.749,00	203.443.748.164,73	91,18	216.805.591.727,05
Belanja Hibah	25.900.676.800,00	22.759.580.425,00	87,87	7.450.653.789,00
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.416.500.000,00
Jumlah	**575.126.152.125,00**	**517.439.019.579,73**	**89,97**	**511.901.906.714,05**

1) Belanja	**2023**	**2022**
Pegawai	**Rp290.635.690.990,00**	**Rp286.229.161.198,00**

Realisasi belanja pegawai TA.2023 sebesar Rp290.635.690.990,00 atau 89,29% dari anggaran belanja yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp325.494.786.576,00 realisasi belanja pegawai terdiri dari:

a)	Belanja gaji dan tunjangan	Rp216.005.585.120,00
b)	Belanja tambahan penghasilan ASN	Rp13.226.828.840,00
c)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp50.707.998.275,00
d)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp10.119.431.103,00
e)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Rp164.967.652,00
f)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Rp410.880.000,00
	Jumlah	**Rp290.635.690.990,00**

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA.2022 sebesar Rp286.229.161.198,00 maka realisasi TA.2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.406.529.792,00 atau 1,54%.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1. Gaji dan Tunjangan	**248.782.275.213,00**	**216.005.585.120,00**	**86,83**	**202.303.428.672,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	187.949.934.226,00	165.485.289.498,00	88,05	154.323.643.272,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.742.844.576,00	14.405.836.353,00	86,04	13.712.231.551,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.396.817.256,00	4.245.116.354,00	96,55	4.179.000.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.447.052.214,00	9.792.471.066,00	72,82	9.885.447.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.890.739.751,00	3.854.770.000,00	78,82	3.071.441.200,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.722.176.113,00	9.722.256.459,00	90,67	9.241.733.460,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	350.376.454,00	280.743.132,00	80,13	268.940.517,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.223.580,00	2.502.504,00	10,78	2.330.882,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.520.000.000,00	6.845.006.480,00	91,02	6.351.426.328,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	830.404.159,00	342.499.413,00	41,24	316.801.394,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.908.706.884,00	1.029.093.861,00	53,92	950.433.068,00
2. Tambahan Penghasilan PNS	**14.671.520.114,00**	**13.226.828.840,00**	90,15	**31.823.512.632,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.101.520.114,00	11.578.603.840,00	95,68	30.640.262.632,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.091.000.000,00	1.183.125.000,00	56,58	1.183.250.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	479.000.000,00	465.100.000,00	97,10	0,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**51.254.699.104,00**	**50.707.998.275,00**	**98,93**	**42.339.942.653,00**
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	403.107.000,00	394.413.057,00	97,84	328.734.224,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	336.265.000,00	322.376.429,00	95,87	243.075.244,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.832.992.000,00	33.824.489.880,00	99,97	29.857.405.620,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.775.428.000,00	10.642.232.900,00	98,76	6.045.730.900,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.812.500.000,00	1.530.000.000,00	84,41	1.895.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	120.607.104,00	120.606.009,00	100,00	208.800.000,00
Belanja Honorarium	3.964.800.000,00	3.865.680.000,00	97,50	3.756.246.665,00

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	8.200.000,00	91,11	4.200.000,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	**10.199.976.145,00**	**10.119.431.103,00**	**99,21**	**9.186.245.463,00**
Belanja Uang Representasi DPRD	551.484.010,00	548.940.000,00	99,54	556.815.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	33.955.810,00	29.458.800,00	86,76	30.561.300,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	48.749.526,00	44.321.040,00	90,92	45.190.080,00
Belanja Uang Paket DPRD	53.754.000,00	47.187.000,00	87,78	47.659.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	804.233.010,00	795.963.000,00	98,97	807.381.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.244.100,00	74.145.750,00	84,02	74.998.350,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.411.875,00	13.839.525,00	71,29	13.778.625,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.877.400.000,00	1.852.200.000,00	98,66	1.871.100.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	466.200.000,00	98,67	466.200.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	257.810,00	235.200,00	91,23	235.200,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.634.836.004,00	2.631.790.788,00	99,88	2.140.325.658,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.612.000.000,00	3.612.000.000,00	100,00	3.132.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	0,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**175.436.000,00**	**164.967.652,00**	94,03	**165.151.778,00**
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.230.000,00	54.600.000,00	98,86	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.113.100,00	5.604.000,00	91,67	5.964.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.100,00	4.345.200,00	83,62	4.345.200,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	9.987.600,00	1.687.452,00	16,90	1.511.618,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	78.504,00	1.720,00	2,19	1.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	141.032,00	112.320,00	79,64	112.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	409.664,00	336.960,00	82,25	336.960,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	**410.880.000,00**	**410.880.000,00**	**100,00**	**410.880.000,00**
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	110.880.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00

Terhadap realisasi belanja pegawai sebesar Rp290.635.690.990,00, terdapat realisasi yang jauh dibawah target yakni Belanja Tunjangan Fungsional ASN,

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKD. Hal tersebut disebabkan oleh karena belanja tersebut adalah belanja wajib dan mengikat yang reallisasinya sesuai dengan kebutuhan riil.

2) Belanja Barang dan Jasa	2023	2022
	Rp203.443.748.164,73	**Rp216.805.591.727,05**

Realisasi belanja barang dan jasa TA.2023 sebesar Rp203.443.748.164,73 atau 91,18% dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp223.130.688.749,00 atau tidak mencapai target sebesar Rp19.686.940.584,27 atau 8,82%.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp216.805.591.727,05 maka realisasi TA.2023 terjadi penurunan sebesar Rp13.361.843.562,32 atau 6,16%. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja barang jasa TA.2023 dan realisasi TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA.2023 dan TA.2022

No	Uraian	TA.2023		%	TA.2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Belanja Barang dan Jasa :	**223.130.688.749,00**	**203.443.748.164,73**	**91,18**	**216.805.591.727,05**
	Belanja Barang	**81.219.623.242,00**	**74.191.986.607,00**	**91,35**	**69.908.165.298,00**
1	Belanja Bahan Pakai Habis	81.212.575.842,00	74.184.939.607,00	91,35	69.907.685.298,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.047.400,00	7.047.000,00	99,99	480.000,00
	Belanja Jasa	**73.447.008.359,00**	**65.823.020.167,73**	**89,62**	**74.729.762.389,00**
3	Belanja Jasa Kantor	62.468.727.939,00	56.348.874.985,73	90,20	60.115.482.237,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.287.389.040,00	4.870.670.832,00	92,12	4.159.467.550,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	557.226.380,00	420.818.700,00	75,52	433.701.780,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	694.700.000,00	598.072.000,00	86,09	344.780.000,00

No	Uraian	TA.2023		%	TA.2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.891.900,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.658.880.000,00	1.344.521.650,00	81,05	2.238.103.722,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	28.400.000,00	28.390.000,00	99,96	606.320.450,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.190.000.000,00	825.000.000,00	69,33	685.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.561.685.000,00	1.386.672.000,00	88,79	6.115.014.750,00
	Belanja Pemeliharaan	**3.567.816.747,00**	**3.425.681.645,00**	**96,02**	**4.275.101.406,00**
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523.747.000,00	476.269.437,00	90,94	1.582.427.406,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.544.169.947,00	2.452.162.408,00	96,38	2.499.046.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	499.899.800,00	497.249.800,00	99,47	169.878.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	**37.630.049.670,00**	**33.262.486.002,00**	**88,39**	**41.527.753.723,00**
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.630.049.670,00	33.262.486.002,00	88,39	41.527.753.723,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**4.832.884.000,00**	**4.310.843.896,00**	**89,20**	**3.330.205.000,00**
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.818.134.000,00	4.302.343.896,00	89,29	3.179.205.000,00
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00	8.500.000,00	57,63	151.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	**22.433.306.731,00**	**22.429.729.847,00**	**99,98**	**23.034.603.911,05**
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.433.306.731,00	22.429.729.847,00	99,98	23.034.603.911,05

3) Belanja Hibah	**2023**	**2022**
	Rp22.759.580.425,00	**Rp7.450.653.789,00**

Realisasi sebesar Rp22.759.580.425,00 merupakan realisasi hibah TA.2023 atau 87,87% dari anggaran sebesar Rp25.900.676.800,00. Ringkasan belanja hibah tahun 2023 terdiri atas:

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.836.318.800,00	9.945.162.000,00	77,48	200.000.000,00
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.596.010.000,00	9.416.101.536,00	98,13	6.701.700.000,00
3. Belanja Hibah Dana BOS	2.902.740.000,00	2.849.363.100,00	98,16	0,00
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	565.608.000,00	548.953.789,00	97,06	548.953.789,00
Jumlah	**25.900.676.800,00**	**22.759.580.425,00**	**87,87**	**7.450.653.789,00**

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
   a) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 105/KEP/HK/2023 Tentang Hibah Bantuan Keamanan Kepada Kepolisian Resor Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
   b) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp9.845.162.000,00 atau 77,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.736.318.800,00. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 210/KEP/HK/2023 Tentang Penerimaan dan Besaran Belanja Hibah Bagi Badan/Lembaga/Organisasi Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesi sebesar Rp9.416.101.536,00 atau 98,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.596.010.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan TA.2023

Penerima HIBAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1. Badan/Lembaga/Organisasi KONI	4.780.310.000,00	4.756.996.636,00	23.313.364,00
2. Badan/Lembaga/Organisasi KORMI	150.000.000,00	128.824.000,00	21.176.000,00
3. Badan/Lembaga/Organisasi Praja Muda Karana Kwartir	75.000.000,00	69.060.000,00	5.940.000,00

Penerima HIBAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4. Badan/Lembaga/Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5. Badan/Lembaga/Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6. Badan/Lembaga/Organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7. Badan/Lembaga/Organisasi Yayasan Pendidikan Kristen Sasando	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
8. Badan/Lembaga/Organisasi AIDS	233.500.000,00	233.500.000,00	0,00
9. Badan/Lembaga/Organisasi MUI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10. Badan/Lembaga/Organisasi Rumah Ibadah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
11. Badan/Lembaga/Organisasi Panitia GMIT KPWK	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
12. Badan/Lembaga/Organisasi Panitia GMIT KPWK (Sinode GMIT)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
13. Hibah Kepada APKASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
14. Badan/Lembaga/Organisas PMI	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
15. Badan/Lembaga/Organisas Dekranasda	500.000.000,00	388.785.900,00	111.214.100,00
16. Badan/Lembaga/Organisas PAUD	2.017.800.000,00	1.999.535.000,00	18.265.000,00
17. Badan/Lembaga/Organisas Pendidikan Kesetaraan Kinerja	1.084.400.000,00	1.084.400.000,00	0,00
Jumlah	**9.596.010.000,00**	**9.416.101.536,00**	**179.908.464,00**

(1) Belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasioanal Indonesia direalisasikan sebesar Rp4.756.996.636,00 sesuai dengan NPHD Nomor 420/493/PKO.4 dan Nomor 005/KONI RN/VI/2023 Pemberian Hibah Uang dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan olahraga khususnya pembinaan cabang-cabang olahraga berpestasi, pekan olahraga provinsi, peningkatan sumberdaya manusia pelatih, wasit/juri dan kegiatan pemasyarakatan olahraga dan kesekretariatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(2) Belanja hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia direalisasikan sebesar Rp128.824.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1574/PKO 4.2 dan Nomor 001/KORMI RN/VI/2023 tentang Pemberian Hibah Uang yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Rote Ndao TA. 2023;

(3) Belanja hibah kepada Praja Muda Karana Kwartir direalisasikan sebesar Rp69.060.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1328/PKO 4.2 dan Nomor 08-2415-A tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan Praja Muda Karana Kwartir Cabang Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(4) Belanja Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Rote Ndao direalisasikan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1627/PKO 4.2 dan Nomor 017/PKS/PGRI KAB/VI/2023 tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(5) Belanja Hibah Kepada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1704/PKO 4.2 dan Nomor 021006/SC/EXT/B/BAA/VII/2023 tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai Rencana Kegiatan Anggaran Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia TA.2023;

(6) Belanja Hibah kepada Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Rote Ndao direalisasikan sebesar Rp50.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1183/PKO 4.2 dan Nomor 002/GAMKI/KAB.RND/2023 tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran gerakan angkatan muda kristen Indonesia Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(7) Belanja Hibah kepada Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Kabupaten Rote Ndao direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 420/1183/PKO4.2 dan Nomor 30/YPK-S/XI/2023 tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana kegiatan Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(8) Belanja hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Rote Ndao direalisasikan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 266/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote

Ndao Nomor 18/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote TA.2023 sebesar Rp233.500.000,00;

(9) Belanja hibah kepada MUI Kabupaten Rote Ndao direalisasikan sesuai sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 266/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 18/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote TA.2023 sebesar Rp50.000.000,00;

(10) Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rumah Ibadah direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 266/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 18/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote TA.2023 sebesar Rp200.000.000,00 yang terdiri dari :

- GMIT Mata Jemaat Solavide Oenoh	Rp20.000.000,00
- GMIT Jemaat Landu Utara Mata Jemaat Ayalon 2 Rote Barat	Rp20.000.000,00
- GMIT Jemaat Landu Timur Mata Jemaat Gilgar Naulaor	Rp20.000.000,00
- Masjid Jamiyatul Islamiah	Rp50.000.000,00
- GMIT Imanuel Takai	Rp50.000.000,00
- GMIT Lole Utara Mata Jemaat Souktuanan	Rp20.000.000,00
- GMIT Eklesia Hailean	Rp20.000.000,00
Jumlah	**RP200.000.000,00**

(11) Belanja hibah kepada GMIT KPWK/Klasis Teritori Rote Ndao direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 266/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 18/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote TA.2023 sebesar Rp100.000.000,00;

(12) Belanja hibah kepada GMIT/KPWK (Sinode GMIT) direalisasikan sesuai sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 266/KEP/HK/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 18/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Rote TA.2023 sebesar Rp100.000.000,00;

(13) Belanja Hibah kepada APKASI direalisasikan sebesar Rp30.000.000,00 dipergunakn untuk membayar iuran tahunan anggota APKASI sesuai dengan Surat dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor 383/ADM/DIR-APKASI/XI/2022 perihal Permohonan iuran anggota APKASI Tahun 2023;

(14) Belanja hibah kepada Palang Merah Indonesia direalisasikan sebesar Rp125.000.000,00 sesuai NPHD Nomor 440/0590.e/DINKES 4.1 dan Nomor 08.a/ORG/03.03.06/III/2023 Tentang Pemberian Hibah Uang, yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Palang Merah Indonesia Kabupaten Rote Ndao TA.2023 yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran;

(15) Belanja hibah kepada DEKRANASDA direalisasikan sebesar Rp388.785.900,00 sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 95/KEP/HK/2023 tentang Penerima dan Besaran Dana Belanja Hibah Kabupaten Rote Ndao TA.2023;

(16) Belanja Hibah BOP PAUD direalisasikan sebesar Rp1.999.535.000,00 yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

(17) Belanja Hibah BOP KESETARAAN direalisasikan Rp1.084.400.000,00 yang diperuntukkan untuk operasional satuan Pendidikan dalam menyelengarakan Pendidikan kesetaraan.

3) Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp2.849.363.100,00 yang diperuntukkan untuk operasinal Satuan Pendidikan Swasta.

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp548.953.789,00 atau 97,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp565.608.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.27
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Penerima HIBAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Sisa anggaran (Rp)
1. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik NASDEM	103.740.547,00	103.740.547,00	0,00
2. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik PKB	37.973.207,00	37.973.207,00	0,00
3. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik PDIP	68.409.101,00	68.409.101,00	0,00
4. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik GOLKAR	87.455.716,00	87.455.716,00	0,00
5. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik GERINDRA	37.132.640,00	37.132.640,00	0,00
6. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik Demokrat	36.116.570,00	36.116.570,00	0,00
7. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik PPP	43.072.031,00	43.072.031,00	0,00
8. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik HANURA	52.299.794,00	52.299.794,00	0,00
9. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik PKS	16.654.211,00	0,00	16.654.211,00
10. Badan/Lembaga/Organisasi Partai Politik PERINDO	82.754.183,00	82.754.183,00	0,00
Jumlah	**565.608.000,00**	**548.953.789,00**	**16.654.211,00**

(1) Belanja hibah kepada Partai Politik NASDEM direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai NASDEM Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp103.740.547,00;

(2) Belanja hibah kepada Partai Politik PKB direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik PKB Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp 37.973.207,00;

(3) Belanja hibah kepada Partai Politik PDIP direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik PDIP Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp68.409.101,00;

(4) Belanja hibah kepada Partai Politik GOLKAR direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik GOLKAR Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp87.455.716,00;

(5) Belanja hibah kepada Partai Politik GERINDRA direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik GERINDRA Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp37.132.640,00;

(6) Belanja hibah kepada Partai Politik Demokrat direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik Demokrat Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp36.116.570,00;

(7) Belanja hibah kepada Partai Politik PPP direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik PPP Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp43.072.031,00;

(8) Belanja hibah kepada Partai Politik HANURA direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik HANURA Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp52.299.794,00;

(9) Belanja hibah kepada Partai Politik PERINDO direalisasikan sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 107/KEP/HK/2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Rote Ndao TA.2023, yang dipergunakan untuk pelaksanaan berbagai rencana kegiatan anggaran Partai Politik PERINDO Kabupaten Rote Ndao. Realisasi dari kas daerah sesuai NPHD sebesar Rp82.754.183,00.

5) Belanja Bantuan Sosial	2023	2022
	Rp600.000.000,00	**Rp1.416.500.000,00**

Realisasi Bantuan Sosial TA.2023 sebesar Rp600.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp600.000.000,00 yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp1.416.500.000,00 maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp816.500.000,00 atau 57,64%.

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp600.000.000,00, Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ndao direalisasikan sebesar Rp600.000.000,00 untuk 60 tempat ibadah sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 297/KEP/HK/2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 206/KEP/HK/2023 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Bagi Rumah Ibadah di Kabupaten Rote Ndao TA.2023.

II. Belanja Modal	2023	2022
	Rp182.700.144.208,00	**Rp156.236.433.484,00**

Jumlah sebesar Rp182.700.144.208,00 merupakan realisasi belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya TA.2023 dari anggaran sebesar Rp190.643.870.709,00 atau 95,83% dan tidak mencapai target anggaran sebesar Rp7.943.726.501,00 atau 4,17%.

Jika dibandingkan dengan reaslisasi TA.2022 sebesar Rp156.236.433.484,00 maka realisasi TA.2023 terjadi peningkatan sebesar Rp26.463.710.724,00 atau 16,94%. Ringkasan anggaran dan realisasi belanja modal TA.2023 dan realisasi TA.2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.28
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan TA.2022

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	34.584.519.202,00	28.662.841.889,00	82,88	31.035.410.792,00
Belanja Gedung dan Bangunan	43.066.284.851,00	41.754.600.518,00	96,95	28.309.558.041,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.456.944.987,00	110.801.545.523,00	99,41	95.939.001.903,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.536.121.669,00	1.481.156.278,00	96,42	952.462.748,00
Jumlah	**190.643.870.709,00**	**182.700.144.208,00**	**95,83**	**156.236.433.484,00**

Ringkasan realisasi belanja modal sesuai dengan kode akun dalam APBD Perubahan TA.2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Modal TA.2023 dan TA.2022

NO	Belanja Modal	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	116.494.500,00
2	Belanja Modal Peralatan Mesin Alat-alat Bantu	0,00	4.536.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.477.680.000,00	1.754.567.940,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin	105.894.000,00	10.317.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	11.800.000,00	13.698.000,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	8.585.000,00
7	Belanja Modal peralatan dan mesin - alat pengolahan	1.144.238.400,00	120.027.500,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	218.070.750,00	410.827.630,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	796.604.451,00	1.936.284.660,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.000.000,00	205.957.400,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	49.820.200,00	18.399.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	103.600.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	845.900,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	39.532.500,00	2.693.685.052,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan umum	18.501.491.998,00	10.386.527.186,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Unit Alat Laboratorium	0,00	2.370.223.889,00

NO	Belanja Modal	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000.000,00	4.311.141.000,00
18	Belanja peralatan dan Mesin - Komputer Unit	642.628.400,00	3.016.818.450,00
19	Belanja peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer	107.220.690,00	198.261.635,00
20	Belanja peralatan dan Mesin - Alat pelindung	0,00	1.235.500,00
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	214.968.000,00	118.201.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	829.085.900,00	0,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.007.806.600,00	3.235.176.050,00
24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.067.476.742,00	25.928.303.649,00
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.888.776,00	2.069.120.104,00
26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Tanda Batas	487.235.000,00	312.134.288,00
27	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Jalan	87.721.615.517,00	79.399.183.700,00
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Jembatan	1.268.562.534,00	1.601.000.000,00
29	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air Irigasi	14.835.058.472,00	6.845.296.400,00
30	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	424.957.000,00	1.167.149.200,00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Minum/Air Bersih/ Air Baku	14.020.000,00	51.600.000,00
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air kotor	3.058.800.000,00	273.322.603,00
33	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	8.250.000,00
34	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Instalasi Gardu Listrik	0,00	42.500.000,00
35	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.377.266.500,00	0,00
36	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Listrik	101.265.500,00	6.550.700.000,00
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Bahan Perpustakaan Tercetak	39.089.809,00	49.790.100,00
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Barang Bercorak Kesenian	0,00	65.500.000,00
39	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	1.442.066.469,00	837.172.648,00
	Jumlah	**182.700.144.208,00**	**156.236.433.484,00**

III. Belanja Tak Terduga	**2023**	**2022**
	Rp886.938.096,00	**Rp524.831.500,00**

Realisasi belanja tidak terduga TA.2023 sebesar Rp886.938.096,00 atau 83,75% dari target sebesar Rp1.058.969.525,00 dan tidak mencapai target sebesar Rp172.031.429,00 atau 16,25%. Jika di bandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp524.831.500,00, maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp362.106.596,00 atau 68,99%.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA.2023 direalisasikan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao untuk bantuan bagi korban yang terdampak bencana:

1. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp48.180.000,00 direalisasikan untuk membantu kelancaran proses pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan laut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 257/KEP/HK/2023 Tanggal 13 November 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tim Pencarian Dan Penyelamatan Korban Kecelakaan Laut dan Bantuan Perorangan Di Kabupaten Rote Ndao TA.2023;
2. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp413.000.000,00 direalisasikan untuk penanganan pasca bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 268.a/KEP/HK/2023 Tanggal 17 November 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Rehabilitasi Embung Lokobatu Desa Temas Kecamatan Rote Barat Laut dan Rehabilitasi Bendung Lekadik Desa Batulilok Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao TA.2023;
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp350.000.000,00 direalisasikan untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 307/KEP/HK/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penerima Bantuan Bencana Di Kabupaten Rote Ndao TA.2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Penetapan dan Reaslisai Belanja Tak Terduga Untuk Bantuan Bencana TA.2023 dan TA.2022

Kecamatan	Realisasi TA.2023		Realisasi TA.2022	
	Penetapan Penerima	Nilai Penetapan (Rp)	Penetapan Penerima	Nilai Penetapan (Rp)
1. Kecamatan Landu Leko	13 KK	44.500.000,00	1 KK	7.500.000,00
2. Kecamatan Rote Timur	9 KK	29.000.000,00	10 KK	17.500.000,00
3. Kecamatan Pantai Baru	19 KK	49.000.000,00	3 KK	22.500.000,00
4. Kecamatan Rote Tengah	42 KK	40.000.000,00	3 KK	20.500.000,00
5. Kecamatan Rote Selatan	-	0,00	2 KK	17.000.000,00
6. Kecamatan Lobalain	20 KK	46.000.000,00	14 KK	107.500.000,00
7. Kecamatan Rote Barat Laut	39 KK	42.500.000,00	-	0,00
8. Kecamatan Rote Barat Daya	51 KK	62.500.000,00	6 KK	30.000.000,00
9. Kecamatan Rote Barat	6 KK	13.500.000,00	-	0,00

Kecamatan	Realisasi TA.2023		Realisasi TA.2022	
	Penetapan Penerima	Nilai Penetapan (Rp)	Penetapan Penerima	Nilai Penetapan (Rp)
10. Kecamatan Ndao Nuse	2 KK	14.000.000,00	2 KK	15.000.000,00
11. Kecamatan Loaholu	3 KK	9.000.000,00	5 KK	8.500.000
Jumlah	**209 KK**	**350.000.000,00**	**616 KK**	**1.058.400.000,00**

4. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp74.990.000,00 direalisasikan untuk membantu kelancaran proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan korban kecelakaan laut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 306/KEP/HK/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Operasional Kecelakaan Laut Kapal Motor Garda Maritim 3 Di Perairan Pantai Baru Penerima Bantuan Bencana Di Kabupaten Rote Ndao TA.2023;
5. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp768.096,00 direalisasikan untuk hutang atas Premi Dewan Perwakilan rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 281/KEP/HK/2023 Tanggal 24 November 2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk pembayaran Hutang Premi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Progaram Jamian Kecelakaan dan Jaminan Kematian Tahun 2020, Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun 2020 dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023.

		2023	2022
IV.	**Belanja Transfer**	**Rp154.621.155.794,00**	**Rp144.766.444.630,00**

Jumlah sebesar Rp154.621.155.794,00 merupakan realisasi transfer kepada Desa TA.2023 dari anggaran sebesar Rp154.817.772.370,00 atau 99,87% dan tidak mencapai target anggaran sebesar Rp196.616.576,00 atau 0,13% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Transfer	2023	2022
Bagi Hasil	**Rp1.789.251.994,00**	**Rp1.429.878.630,00**

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan TA.2023 sebesar Rp1.789.251.994,00 atau 90,10% dari target anggaran sebesar Rp1.985.868.570,00 yang terdiri dari :

1). Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.144.499.136,00.

2). Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp644.752.858,00.

2. Transfer	2023	2022
Bantuan Keuangan	**Rp152.831.903.800,00**	**Rp143.336.566.000,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA.2023 sebesar Rp152.831.903.800,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp152.831.903.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer belanja bantuan keuangan kepada desa TA.2022 sebesar Rp143.336.566.000,00 maka realisasi TA.2023 terjadi kenaikan sebesar Rp9.495.337.800,00 atau 6,62%.

Transfer bantuan keuangan kepada desa yang diperuntukkan guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai wujud pemenuhan hak desa direalisasikan sebesar Rp152.831.903.800,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp152.831.903.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA.2023

NO	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
I	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**			
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	44.436.013.800,00	44.436.013.800,00	0,00
2	Alokasi Dana Operasional Desa Persiapan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
3	Bantuan untuk penyeberangan menggunakan perahu bagi murid dari Desa Landu yang bersekolah di Pulau Rote	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4	Bantuan Keuangan Kepada Dusun Airani Desa Tenalai Kec. Landu Leko	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	107.810.890.000,00	107.810.890.000,00	0,00
	Jumlah	**152.831.903.800,00**	**152.831.903.800,00**	**0,00**

a) Alokasi Dana Desa (ADD) direalisasikan sebesar Rp44.436.013.800,00 dari anggaran sebesar Rp44.436.013.800,00 atau 100%. ADD diperuntukkan bagi 112 (seratus dua belas) Desa yang tersebar di Kabupaten Rote Ndao yang dialokasikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 49/KEP/HK/2023 Tentang Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao TA. 2023;

b) Alokasi Dana Operasional Desa Persiapan direalisasikan sebesar Rp550.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 170/KEP/HK/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Operasional untuk 22 (Dua Puluh Dua) Desa Persiapan di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 Tanggal 27 Juni 2023;

c) Dana Desa (DD) Transfer APBN direalisasikan sebesar Rp107.810.890,00 dari anggaran sebesar Rp107.810.890,00. Dana Desa (DD) diperuntukkan bagi 112 (seratus dua belas) desa yang tersebar di Kabupaten Rote Ndao yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

d) Bantuan Keuangan kepada Desa Landu Kecamatan Rote Barat Daya direalisasikan sebesar Rp25.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 atau 100%. Bantuan untuk penyeberangan menggunakan perahu bagi murid dari Desa Landu yang bersekolah di Pulau Rote sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 251/KEP/HK/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;

e) Bantuan Keuangan kepada Dusun Airani Desa Tenalai Kecamatan Landu Leko direalisasikan sebesar Rp10.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 atau 100%. Bantuan untuk penyeberangan murid sekolah Dusun Airani Desa Tenalai Kecamatan Landu Leko sesuai Keputusan Bupati Nomor 251/KEP/HK/2023 Tanggal 30 Oktober 2023.

5.1.3. Surplus/Defisit

Surplus /Defisit	2023	2022
	Rp39.774.135.759,86	**Rp(12.733.889.659,10)**

Dari total realisasi Pendapatan Daerah TA.2023 sebesar Rp895.421.393.437,59 dan realisasi Belanja Daerah TA.2023 sebesar Rp855.647.257.677,73 diperoleh Surplus Anggaran sebesar Rp39.774.135.759,86 atau 240,02% dari total anggaran defisit sebesar Rp16.570.835.342,00.

5.1.4. Pembiayaan

I. Penerimaan Pembiayaan	2023	2022
	Rp27.317.749.314,49	**Rp50.304.725.000,85**

Jumlah penerimaan pembiayaan TA.2023 sebesar Rp27.317.749.314,49 atau 100,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.070.835.342,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp50.304.725.000,85, maka realisasi TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.986.975.686,36 atau 45,70%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan TA.2023 dan realisasi TA.2022 terdiri dari :

Tabel 5.32
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA.2023		%	TA.2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	27.070.835.342,00	27.070.835.341,75	100,00	50.207.842.591,10
Koreksi Saldo awal	0,00	246.913.972,74	0,00	96.882.409,75
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.070.835.342,00**	**27.317.749.314,49**	**100,91**	**50.304.725.000,85**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp27.317.749.314,49 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA.2023 sebesar Rp27.070.835.341,75 dan koreksi saldo awal sebesar Rp246.913.972,74.

II.	Pengeluaran Pembiayaan	2023	2022
		Rp10.500.000.000,00	**Rp10.500.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA.2023 sebesar atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000. Realisasi tersebut diperuntukkan bagi Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) TA.2023 yang terdiri dari:

1.	PT. BPD NTT sebesar	Rp10.000.000.000,00
2.	PDAM Rote Ndao sebesar	Rp500.000.000,00
	Jumlah	**Rp10.500.000.000,00**

III.	Pembiayaan Netto	2023	2022
		Rp16.817.749.314,49	**Rp39.804.725.000,85**

Pembiayaan Netto per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp16.817.749.314,49 atau 101,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp16.570.835.342,00.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2023	2022
	Rp56.591.885.074,35	**Rp27.070.835.341,75**

Jumlah sebesar Rp56.591.885.074,35 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA.2023 dari anggaran SILPA yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Tabel 5.33
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Surplus/(Defisit)	39.774.135.759,86	-12.733.889.659,10
Pembiayaan Netto	16.817.749.314,49	39.804.725.000,85
SILPA	56.591.885.074,35	27.070.835.341,75

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.591.885.074,35 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.070.835.341,75.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal tahun 2023 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp27.070.835.341,75**.**

5.2.2 Penerimaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp27.317.749.314,49**.**

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp56.591.885.074,35 dapat diuraikan sebagai berikut :

➢ Surplus / Defisit Anggaran	Rp39.774.135.759,86
➢ Pembiayaan Netto	Rp16.817.749.314,49
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	**Rp56.591.885.074,35**

5.2.4 Koreksi Kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya

Koreksi Kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp246.913.972,74 terdiri dari:

- Koreksi bertambah sisa kas pada Sekretariat Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.568.269,22;
- Koreksi bertambah sisa kas belanja hibah pada Dekranasda Tahun 2020 sebesar Rp275.000.000,00;
- Koreksi bertambah Saldo awal Dana BOS sebesar Rp5.359.146,00;
- Koreksi berkurang atas pengakuan biaya administrasi sisa Dana BOS dan FKTP sebesar Rp(237.470,00).

5.2.5 Lain-lain.

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.3.1 ASET

	31–12–2023	31–12–2022
ASET	**Rp1.770.413.506.901,88**	**Rp1.648.173.920.004,72**

Jumlah aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.770.413.506.901,88 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp80.241.370.371,36, investasi jangka panjang sebesar Rp91.499.961.235,00, aset tetap sebesar Rp1.544.695.918.035,29 dan aset lainnya sebesar Rp53.976.257.260,23.

I. Aset Lancar

	31–12–2023	31–12–2022
Aset Lancar	**Rp80.241.370.371,36**	**Rp57.921.619.012,45**

Aset lancar sebesar Rp80.241.370.371,36 adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

	31–12–2023	31–12–2022
1) Kas di Kas Daerah	**Rp52.933.505.110,96**	**Rp26.313.711.797,24**

Saldo kas di kas daerah terdiri dari:

a.	Kas pada Rekening kas daerah	Rp52.437.140.418,96
b.	Kas dalam perjalanan	Rp110.150.592,00
c.	Kas di rekening Dekranasda	Rp386.214.100,00
d.	Kas di kas daerah (a+b+c)	Rp52.933.505.110,96

Rincian kas di kas daerah per 31 desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.34
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023
dan per 31 Desember 2022

No	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah Rek.No.014.01.04,000002-8	28.110.150.831,97	11.222.139.074,97
2	Rekening PAD Rek.No.014.01.04,000003-6	16.807.630.881,55	13.190.815.109,27
3	Rekening BNI 46 Rek. No. 0505283100	1.682.154.411,00	147.848.337,00
4	Rekening BRI cabang Rote Ndao Rek. No.361801038117538	318.118.188,00	317.876.828,00
5	Rekening BRI Unit Rote Ndao Rek. No.361801000565301	5.517.499.101,00	1.435.032.448,00
6	Rekening Operasional Penerimaan Daerah Rek. No.2506882071	1.587.005,44	
	Total Kas di Kas Daerah	**52.437.140.418,96**	**26.313.711.797,24**

Kas dalam perjalanan sebesar Rp110.150.592,00 merupakan pendapatan pajak daerah yang telah disetorkan ke Bank pada tanggal 29 desember 2023 namun dipindahbukukan ke kas daerah pada tanggal 2 januari 2024. Kas pada rekening dekranasda sebesar Rp386.214.100,00 merupakan setoran Kembali sisa belanja dana hibah Dekranasda TA.2020 dan TA.2023.

Penempatan uang daerah pada Bank NTT, Bank BRI dan BNI sesuai Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 124/KEP/HK/2023 tentang Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Perangkat Daerah, Rekening Bantuan Operasio~~e~~nal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Rekening Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Rekening Titipan Gaji Perangkat Daerah TA. 2023.

Mutasi kas di kas daerah selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.35
Mutasi Kas 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

No	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	**SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023**	**26.313.711.797,24**
2	**PENERIMAAN**	
	Penerimaan dari setoran sisa UYHD di Bendahara Pengeluaran	836.170.588,00
	Penerimaan dari setoran sisa TUP TA.2022	2.406.357.916,00
	Penerimaan dari Pengurangan belanja	33.221.958,00
	Penerimaan berupa Pendapatan Daerah	736.700.025.198,72
	Penerimaan dari potongan Pajak secara langsung oleh BUD	0,00
	Koreksi Bank salah setor PDAM	470.500,00
	Koreksi Bank (Kurang bayar ADD 2023 dari rek BRI 301)	8.928.928,00
	Koreksi Bank (lebih bayar ADD)	1.000.000,00
	Koreksi Bank (BOS dan FKTP)	86.284.295,00
	JUMLAH PENERIMAAN	**740.072.459.383,72**
3	**PENGELUARAN**	
	Pembayaran Uang Persediaan	4.255.000.000,00
	Pembayaran Ganti Uang Persediaan	39.935.890.856,00
	Pembayaran Tambahan Uang Pesediaan	15.947.203.922,00
	Pembayaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	653.806.949.820,00
	Pembayaran pajak Pihak ketiga yang dipotong langsung oleh BUD	870.420,00
	Koreksi Bank (kurang bayar ADD 2022)	3.010.480,00
	Koreksi Bank (biaya administrasi)	105.264,00
	JUMLAH PENGELUARAN	**713.949.030.762,00**
4	**Kenaikan/Penurunan (2-3)**	**26.123.428.621,72**
5	**Saldo Akhir (1 + 4)**	**52.437.140.418,96**

2) Kas di Bendahara	**31–12–2023**	**31–12–2022**
Penerimaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

3) Kas di Bendahara	**31–12–2023**	**31–12–2022**
Pengeluaran	**Rp299.382.885,49**	**Rp44.285.491,00**

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp299.382.885,49 merupakan sisa kas tunai uang persediaan sebesar Rp70.935.000,00,

tambahan uang persediaan sebesar Rp175.236.500,00, sisa kas tunai penggunaan dana hibah sebesar Rp50.429.364,00, Pengembalian Belanja sebesar Rp1.213.752,27, dan Koreksi SiLPA Tahun sebelumnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.568.269,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Sisa kas berupa Uang Persediaan yang belum disetor TA.2023

NO	UNIT ORGANISASI	SISA KAS	TANGGAL SETOR
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	53.310.000,00	-
2	Kecamatan Rote Timur	17.625.000,00	3 Januari 2024
	JUMLAH	**70.935.000,00**	

Tabel 5.37
Sisa kas berupa Pengembalian Belanja Hibah TA. 2023

NO	UNIT ORGANISASI	SISA KAS	TANGGAL SETOR
1	Badan/Lembaga/Organisasi KONI	23.313.364,00	27 Februari 2024
2	Badan/Lembaga/Organisasi KORMI	21.176.000,00	28 Februari 2024
3	Badan/Lembaga/Organisasi Praja Muda Karana Kwartir	5.940.000,00	27 Februari 2024
	JUMLAH	**50.429.364,00**	

Tabel 5.38
Sisa kas berupa Pengembalian Belanja Barang dan Jasa TA. 2023

NO	UNIT ORGANISASI	SISA KAS	TANGGAL SETOR
1	Kecamatan Landu Leko	629.500,00	4 Maret 2024
2	Dinas Kesehatan	584.252,27	19 Februari 2024
	JUMLAH	**1.213.752,27**	

Selain saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp299.382.885,49 tersebut, terdapat sisa kas berupa UP maupun TU yang belum di pertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp418.789.823,00. Terhadap sisa Kas tersebut maka dengan merujuk pada ketentuan Buletin Teknis Nomor: 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/ Daerah maka telah disajikan pada asset lainnya.

	31–12–2023	31–12–2022
4) Kas di Bendahara FKTP	**Rp2.903.224.016,00**	**Rp452.339.235,00**

Saldo Kas pada Bendahara Kapitasi FKTP sebesar Rp2.903.224.016,00 berasal dari mutasi TA.2023 sebagai berikut:

a) Sisa Kas pada Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional :

(1) Saldo Awal Kapitasi pada FKTP	Rp452.339.235,00
(2) Penerimaan Kapitasi pada FKTP	Rp7.157.724.227,00
(3) Belanja sesuai SP2B	Rp6.203.117.091,00
Sisa kas pada Bendahara Kapitasi (1+2-3)	**Rp1.406.946.371,00**

Rincian sisa kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39
Sisa Kas pada Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

No	Nama FKTP	Saldo Awal	Penerimaan	Belanja/ SP2B	Sisa kas	
					Tunai	Bank
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Eahun	26.734.725,00	637.830.324,00	624.037.890,00	0,00	40.527.159,00
2	Puskesmas Sotimori	30.679.100,00	299.758.060,00	252.753.750,00	0,00	77.683.410,00
3	Puskesmas Korbafo	79.053.350,00	423.468.385,00	302.926.457,00	0,00	199.595.278,00
4	Puskesmas Sonimanu	57.542.872,00	276.809.041,00	224.935.817,00	0,00	109.416.096,00
5	Puskesmas Feapopi	3.578.646,00	406.916.669,00	345.976.802,00	0,00	64.518.513,00
6	Puskesmas Ba'a	106.181.917,00	1.472.306.264,00	1.250.833.970,00	0,00	327.654.211,00
7	Puskesmas Oele	49.128.120,00	406.461.378,00	298.148.819,00	0,00	157.440.679,00
8	Puskesmas Busalangga	53.169.065,00	734.393.379,00	567.956.041,00	0,00	219.606.403,00
9	Puskesmas Oelaba	80,00	562.034.115,00	562.034.115,00	0,00	80,00
10	Puskesmas Batutua	622.275,00	1.145.012.659,00	1.116.788.680,00	0,00	28.846.254,00
11	Puskesmas Delha	44.896.000,00	558.907.384,00	442.751.500,00	0,00	161.051.884,00
12	Puskesmas Ndao	753.085,00	233.826.569,00	213.973.250,00	0,00	20.606.404,00
	Jumlah	**452.339.235,00**	**7.157.724.227,00**	**6.203.117.091,00**	**0,00**	**1.406.946.371,00**

b) Sisa Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) :

(1)	Saldo Awal Kapitasi pada FKTP	Rp0,00
(2)	Penerimaan Kapitasi pada FKTP	Rp10.861.463.200,00
(3)	Belanja sesuai SP2B	Rp9.365.185.555,00
	Sisa kas pada Bendahara Kapitasi (1+2-3)	**1.496.277.645,00**

Rincian sisa kas pada bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Sisa Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan

No	Nama FKTP	Penerimaan	Belanja/ SP2B	Sisa kas	
				Tunai	Bank
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Eahun	1.046.020.500,00	945.038.437,00	0,00	100.982.063,00
2	Puskesmas Sotimori	681.685.200,00	350.089.150,00	0,00	331.596.050,00
3	Puskesmas Korbafo	675.653.300,00	556.391.780,00	0,00	119.261.520,00
4	Puskesmas Sonimanu	483.073.500,00	271.853.608,00	0,00	211.219.892,00
5	Puskesmas Feapopi	607.973.800,00	485.492.317,00	0,00	122.481.483,00
6	Puskesmas Ba'a	1.708.590.800,00	1.679.569.423,00	0,00	29.021.377,00
7	Puskesmas Oele	574.858.200,00	461.788.500,00	0,00	113.069.700,00
8	Puskesmas Busalangga	1.042.152.300,00	1.042.008.418,00	0,00	143.882,00
9	Puskesmas Oelaba	1.267.907.200,00	1.177.406.454,00	0,00	90.500.746,00
10	Puskesmas Batutua	1.761.954.600,00	1.490.202.968,00	0,00	271.751.632,00
11	Puskesmas Delha	666.864.100,00	633.298.200,00	0,00	33.565.900,00
12	Puskesmas Ndao	344.729.700,00	272.046.300,00	0,00	72.683.400,00
	Jumlah	**10.861.463.200,00**	**9.365.185.555,00**	**0,00**	**1.496.277.645,00**

5)	**Kas di Bendahara BOS**	**31–12–2023**	**31–12–2022**
		Rp29.782.696,20	**Rp71.125.380,76**

Saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.782.696,20 terdiri dari sisa kas pada bendahara BOS SD sebesar Rp22.302.338,93, pada bendahara BOS SMP sebesar

Rp5.926.685,00 dan sisa kas pada satuan Pendidikan PAUD Negeri sebesar Rp1.553.672,27. dengan rincian sebagai berikut:

Sisa kas dari bendahara BOS SD untuk 148 Sekolah Dasar Negeri:

1)	Saldo awal	Rp62.727.930,16
2)	Koreksi Saldo Awal	Rp3.494.121,00
3)	Penerimaan BOS TA.2023	Rp18.149.157.103,17
4)	Jumlah (1+2+3)	Rp18.215.379.154,33
5)	Realisasi Belanja	Rp18.193.076.815,40
	Sisa kas TA.2023 (4-5)	**Rp22.302.338,93**

Sisa kas per masing-masing sekolah dasar negeri dapat dilihat pada lampiran 2

Sisa kas dari bendahara BOS SMP untuk 43 SMP Negeri:

1)	Saldo awal	Rp8.397.450,60
2)	Koreksi Saldo Awal	Rp1.865.025,00
3)	Penerimaan BOS TA.2023	Rp11.531.553.410,00
4)	Jumlah (1+2+3)	Rp11.541.815.885,60
5)	Realisasi Belanja	Rp11.535.889.200,60
	Sisa kas TA.2023 (4 - 5)	**Rp5.926.685,00**

Sisa kas per masing-masing sekolah menengah pertama negeri dapat dilihat pada lampiran 2

Sisa kas dari bendahara Pendidikan PAUD Negeri untuk 122 PAUD Negeri:

1)	Saldo awal	Rp1.553.672,27
2)	Penerimaan BOS TA.2023	Rp3.083.935.000,00
3)	Jumlah (1+2)	Rp3.085.488.672,27
4)	Realisasi Belanja	Rp3.083.935.000,00
	Sisa kas TA.2023 (3 - 4)	**Rp1.553.672,27**

Sisa kas per masing-masing sekolah menengah pertama negeri dapat dilihat pada lampiran 2

6) Kas Lainnya	31–12–2023	31–12–2022
	Rp55.254.692,13	**Rp7.672.345.259,75**

Saldo kas lainnya sebesar Rp55.254.692,13 per 31 Desember 2023 merupakan sisa kas pajak restoran pada 3 OPD yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.494.706,70, utang PFK sebesar Rp38.654.721,43. dan Koreksi Kesalahan Pencatatan bank atas Biaya administrasi pada rekening Operasional sebesar Rp105.264,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Sisa kas berupa pajak restoran yang belum disetor TA.2023

NO	UNIT ORGANISASI	SISA KAS	TANGGAL SETOR
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.948.000,00	11 Januari 2024
2	Dinas Sosial	643.200,00	31 Januari 2024
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.903.506,70	24 April dan 13 Mei 2024
	JUMLAH	**16.494.706,70**	

Tabel 5.42
Sisa kas bendahara pengeluaran berupa utang PFK per Perangkat Daerah

No	Unit Organisasi	PPN	PPh	IWP	Jumlah	TANGGAL SETOR
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.412.162,00	1.117.978,00	0,00	2.530.140,00	10 Januari 2024
2	Dinas Sosial	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	31 Januari 2024
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	25.599.021,00	25.599.021,00	11 Januari 2024
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.831.950,00	4.626.110,43	0,00	10.458.060,43	14 Mei 2024
	Jumlah	**7.244.112,00**	**5.811.588,43**	**25.599.021,00**	**38.654.721,43**	

7) Piutang Pendapatan	31–12–2023	31–12–2022
	Rp13.393.498.310,87	**Rp13.116.810.502,39**

Piutang Pendapatan sebesar Rp13.393.498.310,87 merupakan piutang atas tunggakan pajak dan retribusi pada TA.2023 yang terdiri atas :

Tabel 5.43
Piutang Pendapatan

NO	Nama Subjek Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Piutang Pajak	5.403.549.254,11	4.888.463.444,11
2	Piutang Retribusi	2.672.817.450,00	787.634.950,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.217.150.924,00	6.770.805.602,00
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	99.980.682,76	669.906.506,28
	Jumlah	**13.393.498.310,87**	**13.116.810.502,39**

a. Piutang	**31–12–2023**	**31–12–2022**
Pajak	**Rp5.403.549.254,11**	**Rp4.888.463.444,11**

Piutang pajak sebesar Rp5.403.549.254,11 merupakan piutang pada TA. 2023 yang terdiri atas :

Tabel 5.44
Piutang Pajak

NO	Nama Subjek Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Piutang Pajak Hotel	17.038.051,00	13.792.500,00
2	Piutang Pajak Restoran	107.582.714,00	92.023.400,00
3	Piutang Pajak Hiburan	3.815.000,00	3.815.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	46.840.500,00	45.740.500,00
5	Piutang Pajak mineral bukan logam dan bantuan	1.033.642.259,93	970.244.759,93
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	3.903.866.012,18	3.759.218.284,18
7	Piutang BPHTB	3.629.000,00	3.629.000,00
8	Pajak Penerangan Jalan	287.135.717,00	0,00
	Jumlah	**5.403.549.254,11**	**4.888.463.444,11**

Penetapan piutang pajak didasarkan pada opname fisik atas Surat Ketetapan Pajak Daerah pada TA.2023 yang belum dilunasi. Rincian piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Piutang pajak hotel TA.2023 sebesar Rp17.038.051,00 terdiri dari:

Tabel 5.45
Piutang Pajak Hotel

NO	Nama Subjek Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Piutang Pajak Hotel Bintang 3	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Piutang Pajak Hotel Melati 3	10.655.551,00	7.410.000,00
3	Piutang Pajak Hotel Melati 1	1.432.500,00	1.432.500,00
4	Piutang Pajak Rumah Kos	3.950.000,00	3.950.000,00
	Jumlah	**17.038.051,00**	**13.792.500,00**

(1) Piutang Pajak hotel bintang 3 Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000,00 merupakan piutang pajak Hotel Nemberala tahun 2013 yang sampai dengan TA. 2020 belum disetorkan dan tidak ada peningkatan SKP-D terbit TA.2023;

(2) Piutang Pajak hotel melati 3 sebesar Rp10.655.551,00 berasal dari mutasi berkurang terhadap saldo awal selama TA.2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46
Piutang Pajak Hotel Melati 3

NO	Nama Subjek Pajak	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	Hotel Ricky	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00
2	Hotel Tiberias	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
3	Hotel Grace	3.622.500,00	0,00	0,00	3.622.500,00
4	Loedi Bungalow	0	3.245.551,00	0	3.245.551,00
	JUMLAH	**7.410.000,00**	**3.245.551,00**	**0,00**	**10.655.551,00**

(3) Piutang Pajak hotel melati 1 TA.2023 sebesar Rp1.432.500,00 berasal dari mutasi berkurang terhadap saldo awal selama TA.2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Piutang Pajak Hotel Melati 1

NO	Nama Subjek Pajak	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	Hotel Kezia	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2	Hotel Tirosa I	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Hotel Tirosa II	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
4	Penginapan Freas	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
JUMLAH		**1.432.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432.500,00**

(4) Piutang pajak rumah kos sebesar Rp3.950.000,00 merupakan piutang pajak yang sampai dengan TA.2023 belum disetorkan oleh wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Piutang Pajak Rumah Kos

No	Nama Subjek Pajak	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	Bambang Riyanto	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
2	Burhan Abd Billah II	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Marthen Lussie	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00
4	Yusten Hilly	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5	Mami Bambang	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Jumlah		**3.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950.000,00**

(b) Piutang pajak restoran sebesar Rp107.582.714,00 merupakan nilai penetapan piutang TA.2023 berdasarkan hasil opname perangkat daerah terutang;

Tabel 5.49
Piutang Pajak Restoran

No	Piutang Pajak Restoran	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	TA. 2012	14.667.200,00	0,00	0,00	14.667.200,00
2	TA. 2013	17.735.900,00	0,00	0,00	17.735.900,00
3	TA. 2014	26.477.000,00	0,00	0,00	26.477.000,00
4	TA. 2015	25.640.100,00	0,00	0,00	25.640.100,00
5	TA. 2016	7.503.200,00	0,00	0,00	7.503.200,00
6	TA. 2023	0,00	15.559.314,00	0,00	15.559.314,00
Jumlah		**92.023.400,00**	**15.559.314,00**	**0,00**	**107.582.714,00**

(c) Piutang pajak hiburan sebesar Rp3.815.000,00 merupakan objek pajak hiburan TV Kabel TA.2013 yang belum dilunasi sampai dengan TA.2023;

Tabel 5.50
Piutang Pajak Hiburan

No	Piutang Pajak Hiburan	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	TA. 2013	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
2	TA. 2015	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Jumlah		**3.815.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.815.000,00**

(d) Piutang pajak reklame sebesar Rp46.840.500,00 merupakan nilai penetapan terutang sampai dengan TA 2023 berdasarkan hasil opname perangkat daerah terutang. Piutang pajak reklame berasal dari saldo awal sebesar Rp45.740.500,00, mutasi bertambah sebesar Rp2.475000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.655.000,00;

Tabel 5.51
Piutang Pajak Reklame

No	Piutang Pajak Reklame	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	TA. 2013	5.485.000,00	0,00	0,00	5.485.000,00
2	TA. 2014	4.195.000,00	0,00	0,00	4.195.000,00
3	TA. 2015	9.810.000,00	0,00	0,00	9.810.000,00
4	TA. 2016	10.107.500,00	0,00	0,00	10.107.500,00
5	TA. 2017	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
6	TA. 2019	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
7	TA. 2020	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
8	TA. 2021	4.555.000,00	0,00	0,00	4.555.000,00
9	TA. 2022	9.185.000,00	0,00	1.655.000,00	7.530.000,00
10	TA. 2023	0,00	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
Jumlah		**45.740.500,00**	**2.755.000,00**	**1.655.000,00**	**46.840.500,00**

(e) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.033.642.259,93 terdiri dari:

Tabel 5.52
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	Tahun Pajak	Saldo awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	2010	228.358.098,37	0,00	0,00	228.358.098,37
2	2011	17.357.329,91	0,00	0,00	17.357.329,91
3	2012	16.360.007,70	0,00	0,00	16.360.007,70
4	2013	6.188.121,48	0,00	0,00	6.188.121,48
5	2014	628.364.694,47	0,00	0,00	628.364.694,47
6	2015	18.167.832,15	0,00	0,00	18.167.832,15
7	2016	55.448.675,85	0,00	0,00	55.448.675,85
8	2023	0,00	63.397.500,00	0,00	63.397.500,00
JUMLAH		**970.244.759,93**	**63.397.500,00**	**0,00**	**1.033.642.259,93**

(1) Terhadap piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat pergerakan mutasi penyetoran di TA.2023;

(2) Terhadap piutang pajak galian gol C tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2008 telah diklasifikasikan sebagai piutang kadaluarsa karena bersifat macet tercatat pada akun aset lain-lain.

(f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.903.866.012,18 merupakan nilai penetapan berdasarkan perangkat daerah TA.2023 yang belum di lunasi sampai dengan 31 Desember 2023, mutasi peningkatan sebesar Rp285.377.530,00 dan mutasi penurunan sebesar Rp140.729.802,00 dengan saldo awal sebesar Rp3.759.218.284,18 sehingga saldo akhir TA. 2023 sebesar Rp3.903.866.012,18 terdiri dari :

1. Piutang PBB-P2 yang dialihkan oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP NTT, KPP Pratama Kupang terdiri dari:

Tabel 5.53
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

No	Piutang Pajak PBB-P2	Nilai Piutang Netto yang dialihkan (Rp)	Saldo Awal 2023 (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	TA. 2009-2012	1.445.306.943,00	1.361.715.667,00	28.558.929,00	1.333.156.738,00
2	TA. 2013	223.464.022,00	211.420.981,00	7531907,00	203.889.074,00
Jumlah		**1.668.770.965,00**	**1.573.136.648,00**	**36.090.836,00**	**1.537.045.812,00**

Terhadap saldo piutang pajak eks Dirjen Pajak sebesar Rp1.668.770.965,00 tersebut diatas tidak dapat dirinci per wajib pajak sehingga tidak diketahui krediturnya. Sesuai mekanisme penagihan PBB oleh Pemerintah Pusat C.Q. Dirjen Pajak, saldo piutang PBB timbul karena belum ada kiter penerimaan yang diterima KPPN dari Bank NTT, sedangkan pihak Bank NTT tidak dapat memotong kiter penerimaan karena penyetoran pajak oleh desa/kelurahan bersifat kolektif tanpa menjelaskan nama wajib pajak PBB. Dengan demikian saldo tersebut sangat diragukan kebenarannya karena sangat mungkin sudah terbayar tetapi kiter penerimaan tidak terkirim ke KPPN.

2. Piutang PBB-P2 sejak dialihkan kepada Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 s/d 2023 sebesar Rp3.903.866.012,18.

Tabel 5.54
Piutang PBB-P2

NO	Objek Pajak	Jumlah Penetapan 2023 (Rp)	Jumlah Realisasi 2023 (Rp)	Jumlah Piutang 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5=3-4*
1	Kecamatan Lobalain	738.788.331,00	610.781.731,00	128.006.600,00
2	Kecamatan Rote Barat Laut	143.575.939,00	137.098.987,00	6.476.952,00
3	Kecamatan Rote Barat	354.000.515,00	317.349.884,00	36.650.631,00
4	Kecamatan Rote Barat Daya	229.089.812,00	209.141.612,00	19.948.200,00
5	Kecamatan Rote Tengah	234.489.194,00	185.870.144,00	48.619.050,00
6	Kecamatan Rote Selatan	106.059.051,00	103.992.207,00	2.066.844,00
7	Kecamatan Pantai Baru	262.059.791,00	252.329.009,00	9.730.782,00
8	Kecamatan Rote Timur	231.351.689,00	208.426.859,00	22.924.830,00
9	Kecamatan Landu Leko	91.370.316,00	80.416.675,00	10.953.641,00
10	Kecamatan Ndao Nuse	37.832.606,00	37.832.606,00	0,00
11	Kecamatan Loaholu	54.562.493,00	54.562.493,00	0,00
	Jumlah	**2.483.179.737,00**	**2.197.802.207,00**	**285.377.530,00**

Jumlah Realisasi TA.2023 sebesar Rp2.197.802.207,00 tidak termasuk pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran PPB-P2 sebesar Rp43.799.294,00.

(g) Piutang BPHTB sebesar Rp3.629.000,00 merupakan nilai penetapan berdasarkan perangkat daerah TA.2014 yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

(h) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp287.135.717,00 merupakan pengakuan atas masa pajak bulan Desember yang dibayarkan pada tahun 2024.

b. Piutang	31–12–2023	31–12–2022
Retribusi	**Rp2.672.817.450,00**	**Rp787.634.950,00**

Jumlah saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.672.817.450,00 merupakan kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari:

Tabel 5.55
Piutang Retibusi

NO	Nama Subjek Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.550.000,00	133.550.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	81.299.250,00	73.937.250,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.455.968.200,00	580.147.700,00
	Jumlah	**2.672.817.450,00**	**787.634.950,00**

Rincian lebih lanjut atas piutang tersebut diatas sebagai berikut:

(a) Piutang atas pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp135.550.000,00 berupa sewa alat berat TA. 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 dan 2023 merupakan penetapan piutang yang didasarkan pada perikatan kontrak atau perjanjian kerjasama dalam hal penggunaan dan pemakaian barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	Nama Debitur	Jenis BMD	Tahun	Per 31-12-2023 (Rp)	Per 31-12-2022 (Rp)
	I. Piutang Retribuisi Pemakaian Alat Berat (Dinas Pekerjaan Umum)				
1	CV. Bagus	Whellloader	2013	750.000,00	750.000,00
2	CV. Bagus	Vibrator roler	2013	6.000.000,00	6.000.000,00
3	PT.Karya Sepakat Kita	Excavator	2013	17.500.000,00	17.500.000,00
4	CV. Via Dola Rosa	Three Whell Roller	2014	9.450.000,00	9.450.000,00
5	CV. Perkasa	Excavator	2016	46.000.000,00	46.000.000,00
6	Thom Dhuge	WheelLoader	2016	1.500.000,00	1.500.000,00

NO	Nama Debitur	Jenis BMD	Tahun	Per 31-12-2023 (Rp)	Per 31-12-2022 (Rp)
7	Zinsedorf Y. Adu	Tronton	2016	3.200.000,00	3.200.000,00
8	CV. Perkasa	Tronton	2016	4.000.000,00	4.000.000,00
9	Orios Ballo	HIDRAULIC BREAKER	2016	3.900.000,00	3.900.000,00
10	CV. Antahira	Wheel loader	2017	3.750.000,00	3.750.000,00
11	CV. Cahaya Mulia	Excavator	2018	12.300.000,00	12.300.000,00
12	Heri Amalo	Excavator	2020	14.000.000,00	14.000.000,00
13	Andre Elim	Excavator	2020	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Marthe L. Saek	Excavator	2020	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Heri Amalo	Tronton	2020	1.600.000,00	1.600.000,00
16	Heri Amalo	Tronton	2020	1.600.000,00	1.600.000,00
17	Andre Elim	Tronton	2020	1.600.000,00	1.600.000,00
18	Eben Dami	Tronton	2020	1.200.000,00	1.200.000,00
19	Eben Dami	Tronton	2020	1.200.000,00	1.200.000,00
20	Steven Ch Foeh,ST	Excavator	2021	0,00	0,00
21	Steven Ch Foeh,ST	Excavator	2021	0,00	0,00
22	Steven Ch Foeh,ST	Excavator	2021	0,00	0,00
23	Anis Timu	Excavator	2021	0,00	0,00
24	Anis Timu	Excavator	2021	0,00	0,00
25	Anis Timu	Excavator	2021	0,00	0,00
26	Anis Timu	Loader	2021	0,00	0,00
27	Benyamin Ndu Ufi	Buldozer	2021	0,00	0,00
28	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
29	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
30	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
31	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
32	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
33	Steven Ch Foeh	Tronton	2021	0,00	0,00
34	Anis Timu	Tronton	2021	0,00	0,00
35	Anis Timu	Tronton	2021	0,00	0,00
36	Anis Timu	Tronton	2021	0,00	0,00
37	Matias Siokain	Excavator	2023	2.000.000,00	0,00
	Jumlah			**135.550.000,00**	**133.550.000,00**

(b) Piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp81.299.250,00 ditetapkan berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik SKRD terutang TA.2023. Daftar rincian mutasi piutang retribusi pelayanan pasar sebagai berikut :

Tabel 5.57
Ringkasan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

URAIAN		Per 31-12-2022 (Rp)	Mutasi bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	Per 31-12-2023 (Rp)
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar					
I. Kecamatan Lobalain					
1. Kontrak Swadaya	Pasar Kuli	2.290.500,00	0,00	0,00	2.290.500,00
2. Kontrak Swadaya	Pasar Metina	20.520.000,00	23.544.000,00	9.720.000,00	34.344.000,00
3. Kontrak Swadaya	Pasar Kuliner Lapangan Bola Kaki Ba'a	14.580.000,00	4.860.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00
4. Kontrak Swadaya	Pasar Tutukarlain	15.228.000,00	486.000,00	8.748.000,00	6.966.000,00
II. Kecamatan Rote Barat Laut					
5. Kontrak Swadaya	Pasar Busalangga	1.296.000,00	3.600.000,00	0,00	4.896.000,00
6. Kontrak Swadaya	Pasar Oelua	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00
III. Kecamatan Rote Barat					
7. Kontrak Swadaya	Pasar Sedeoen	81.000,00	324.000,00	0,00	405.000,00
IV. Kecamatan Rote Barat Daya					
8. Kontrak Swadaya	Pasar Tudameda	1.541.250,00	486.000,00	0,00	2.027.250,00
9. Kontrak Swadaya	Pasar Oeseli	0,00	0	0	0,00
V. Kecamatan Rote Tengah					
10. Kontrak Swadaya	Pasar Ufalen	1.617.750,00	0,00	0,00	1.617.750,00
VI. Kecamatan Rote Selatan					
11. Kontrak Swadaya	Pasar Oele	6.336.000,00	648.000,00	0,00	6.984.000,00
VII. Kecamatan Pantai Baru					
12. Kontrak Swadaya	Pasar Olafulihaa	2.772.000,00	1.620.000,00	1.800.000,00	2.592.000,00
VIII. Kecamatan Rote Timur					
13. Kontrak Swadaya	Pasar Lalao	7.614.000,00	1.782.000,00	0,00	9.396.000,00
Jumlah		**73.937.250,00**	**37.350.000,00**	**29.988.000,00**	**81.299.250,00**

(c) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.455.968.200,00 merupakan Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Klaim BPJS yang diajukan tahun 2023 dan 2022 namun terlambat dibayar di tahun 2023.

c.	Piutang Lain-lain PAD yg Sah	31–12–2023	31–12–2022
		Rp99.980.682,76	**Rp669.906.506,28**

Piutang Lain-lain PAD yg Sah sebesar Rp99.980.682,76 terdiri dari:

- Pengakuan Remunerasi Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.557,76;
- Jurnal pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas kontribusi pemakaian kekayaan Daerah PT Boa Development tahun 2023 yang belum dibayar sebesar Rp99.721.125,00.

d.	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	31–12–2023	31–12–2022
		Rp5.217.150.924,00	**Rp6.770.805.602,00**

Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp5.217.150.924,00 merupakan piutang bagi hasil pajak provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900/73/BKUD4/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan Bermotor sebesar Rp1.871.126.631,00;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.029.763.032;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.314.087.346,00; dan
4. Pajak Air Permukaan sebesar Rp2.173.915,00.

8) Piutang	31–12–2023	31–12–2022
Lainnya	Rp2.610.378.275,00	Rp2.610.378.275,00

Saldo sebesar Rp2.610.378.275,00 merupakan saldo piutang lain-lain yang diakui per-31 Desember 2023. Rincian piutang lain-lain TA.2023 dan TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Piutang Lain-Lain TA.2023 dan TA.2022

No	Uraian	Tahun	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat Dewan "Piutang dana Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD TA 2006	2006	1.542.240.000,00	1.542.240.000,00
2	Sekretariat Dewan "Piutang Dana Operasional DPRD TA 2006	2006	312.480.000,00	312.480.000,00
3	Dinas PPKAD "Sewa Gedung Eks Kantor Dinas Kelautan perikanan	2010	4.500.000,00	4.500.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum "PT. Lince Romauli Raya	2010	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Denda Keterlambatan Pekerjaan TA.2007,2008 dan 2011	2007 s/d 2011	18.343.900,00	18.343.900,00
6	Dinas Kesehatan " Jaminan Pelaksanaan TA.2010 Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Sepeda Motor, CV.Bayu Permai	2010	28.778.750,00	28.778.750,00
7	Badan Lingkungan Hidup "Jaminan Pelaksanaan (CV.Jati Diri Perkasa)	2011	18.350.000,00	18.350.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan "Denda Keterlambatan Pekerjaan (PT.Rimba Mas)	2011	182.612.250,00	182.612.250,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan"Denda Keterlambatan Pekerjaan (CV. Jati Diri Perkasa)	2011	56.233.625,00	56.233.625,00
10	PPKD "Sisa kas di bendahara pengeluaran TA.2009	2012	109.515.500,00	109.515.500,00
11	Dinas PPKAD /Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan	2012	10.575.225,00	10.575.225,00
12	Bagian Umum Sekretariat Daerah/Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan	2012	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan/CV. GFP Mandiri, Piutang sewa sarana mobilitas darat kendaraan roda enam	2012	43.625.000,00	43.625.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok Sehati, Kel. Daudolu, Kel Semangat Baru dan Ka.Hore Piutang Kapal Purseine	2012	214.502.800,00	214.502.800,00
15	Dinas PU, Denda Keterlambatan Pekerjaan CV.Elsahani, CV. Pulau Selatan dan CV. Berkat Mandiri	2014	67.621.225,00	67.621.225,00
	Jumlah		**2.610.378.275,00**	**2.610.378.275,00**

Dari rincian saldo piutang lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Piutang Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD TA. 2006 sebesar Rp1.542.240.000,00 adalah pengakuan atas dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) TA. 2006 pada para

anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao masa jabatan periode 2004-2009;

(2) Piutang dana operasional DPRD TA. 2006 sebesar Rp312.480.000,00 adalah pengakuan atas dana operasional TA.2006 pada para anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao masa jabatan periode 2004-2009;

(3) Piutang atas Sewa Gedung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengakuan atas Sewa Gedung Eks kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Tahun Anggaran 2010 yang belum dilunasi sebesar Rp4.500.000,00;

(4) Piutang PT.Lince Romauli Raya sebesar Rp1.000.000,00 adalah Pengakuan tahun 2010 atas kurang bayar uang muka 20% pekerjaan pembangunan embung Modooen yang kurang dipotong.

(5) Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp18.343.900,00 merupakan Pengakuan atas denda keterlambatan pekerjaan tahun anggaran 2007 sampai dengan TA.2011, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Piutang Denda Keterlambatan pada Perangkat Daerah Dinas PKO

Nama Debitur	Tahun	31/12/2020	31/12/2021
		(Rp)	(Rp)
1. CV. Himalaya (pembangunan ruang kelas SMP Oelasin)	2007	2.066.000,00	2.066.000,00
2. CV.Sardy Indah (Pemb SD.Kecil Sunsa)	2007	1.262.400,00	1.262.400,00
3. CV. Sutami Putra (Rehabilitasi SMK Lembang)	2008	2.803.500,00	2.803.500,00
4. CV.Titisan (Pengadaan Meubeler Sekolah)	2008	4.862.000,00	4.862.000,00
5. CV. Karya Anak Tani	2008	3.350.000,00	3.350.000,00
6. CV. Rezky pemb SMPN2 Rotim	2011	4.000.000,00	4.000.000,00
Jumlah		**18.343.900,00**	**18.343.900,00**

(6) Piutang PT. Bayu Permai atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp28.778.750,00 tahun anggaran 2010;

(7) Piutang CV. Jati Diri Perkasa atas denda ketelambatan pekerjaan sebesar Rp18.350.000,00 tahun anggaran 2011;

(8) Piutang PT. Rimba Mas atas denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp182.612.250,00 adalah pengakuan atas denda keterlambatan maksimal atas pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA.2011 pada perangkat daerah Dinas Kelautan Perikanan berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Propinsi NTT TA.2013;

(9) Piutang CV. Jati Diri Perkasa atas denda ketelambatan pekerjaan sebesar Rp56.233.625,00 tahun anggaran 2011;

(10) Sisa kas di bendahara pengeluaran PPKD TA.2012 sebesar Rp109.515.500,00 merupakan sisa UYHD yang belum disetor ke kas daerah dan oleh bendahara PPKD TA.2009 telah ditandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak untuk menyetorkan ke kas daerah;

(11) Piutang kelebihan pembayaran gaji pokok dan tunjangan jabatan pada Dinas PPKAD atas nama Jonathan Ufi,S.Sos merupakan kelebihan pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 821.2/1265/63.O/BKD/2015 tentang pemberhentian dari jabatan negeri sebesar Rp10.575.225,00 T.A 2012;

(12) Piutang CV.GFP Mandiri merupakan piutang pada Dinas Perhubungan dan Informatika atas sewa mobilitas darat kendaraan roda enam (Truck) untuk mengangkut penduduk wajib E-KTP dalam rangka pembuatan E-KTP secara masal di Kabupaten Rote Ndao sesuai SPK Nomor: DPKI/551/184/VII/2015 sebesar Rp43.625.000,00 T.A 2012;

(13) Piutang Kapal Purseine merupakan piutang pada kelompok Daudolu, kelompok Sehati, kelompok semangat baru dan Ka.Hore, masing-masing kelompok menerima 1 unit kapal Purseine 10 GT sebesar Rp214.502.800,00 pada tahun anggaran 2012, saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp214.502.800,00;

(14) Piutang denda keterlambatan pekerjaan rehab jaringan irigasi kuli CV.Elsahani selama 37 hari sebesar Rp67.621.225,00 pada Tahun Anggaran 2013;

9)	**Penyisihan**	**31–12–2023**	**31–12–2022**
	Piutang	**Rp6.819.185.449,69**	**Rp6.482.010.013,84**

Penyisihan piutang TA. 2023 sebesar Rp6.819.185.449,69 dan TA. 2022 sebesar Rp6.482.010.013,84 atau mengalami peningkatan sebesar Rp337.175.435,85. Peningkatan penyisihan piutang tersebut jika dibandingan dengan beban penyisihan piutang TA. 2023 sebesar Rp414.885.514,70 maka terdapat perbedaan sebesar Rp77.710.078,85 perbedaan tersebut berasal dari:

1) Pemulihan atas penyisihan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp47.120.543,85 dan pajak reklame sebesar Rp82.750,00 yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya namun dilakukan penyetoran pada tahun 2023,
2) Pemulihan atas penyisihan piutang retribusi daerah berupa retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp29.007.385,01 dan Retribusi Pelayanan Pasar-Los sebesar Rp32.400,00 serta pelayanan Retrubusi Pasar-Kios sebesar Rp1.467.000,00 yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya namun dilakukan penyetoran pada tahun 2023.

Penyisihan piutang TA. 2023 sebesar Rp6.819.185.449,69 terdiri atas :

(1)	Penyisihan Piutang Pendapatan:	
	- Penyisihan Piutang Pajak	Rp4.029.327.446,81
	- Penyisihan Piutang Retribusi	Rp179.466.750,00
	- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp12.977,88
	Jumlah	**Rp4.208.807.174,69**
(2)	Penyisihan Piutang Lainnya	Rp2.610.378.275,00
	Jumlah penyisihan piutang (1 + 2)	**Rp6.819.185.449,69**

1. Penyisihan Piutang Pendapatan

a. Penyisihan Piutang Pajak

Penetapan penyisihan piutang pajak dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 sebesar Rp4.029.327.446,81. Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 5.60
Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Umur piutang				Saldo akhir(Rp)
		< 1 TAHUN (Lancar)	1 - 2 TAHUN (Kurang Lancar)	2-4 TAHUN diragukan	> 4 TAHUN Macet	
		5%	10%	50%	100%	
1	Pajak Mineral Bukan Logam	3.169.875,00	0,00	0,00	970.244.759,93	973.414.634,93
2	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	13.792.500,00	13.792.500,00
3	Pajak Rumah Makan	777.965,70	0,00	0,00	92.023.400,00	92.801.365,70
4	Pajak Reklame	137.750,00	1.208.500,00	937.500,00	30.125.500,00	32.409.250,00
5	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	14.268.876,50	31.170.824,00	442.754.246,50	2.421.271.749,18	2.909.465.696,18
7	BPHTB	0,00	0,00	0,00	3.629.000,00	3.629.000,00
JUMLAH		**18.354.467,20**	**32.379.324,00**	**443.691.746,50**	**3.534.901.909,11**	**4.029.327.446,81**

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan piutang retribusi dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang. Penyisihan Piutang retribusi tahun 2023 sebesar Rp179.466.750,00. Rincian penyisihan piutang pajak sebagai berikut:

Tabel 5.61
Penyisihan Piutang Retribusi

URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH
	< 3 Bulan (Lancar)	3 s/d 6 Bulan (Kurang Lancar)	> 6 bulan (diragukan)	> 1 TAHUN Macet	
Retirbusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pelayanan Pasar					
a. Pemakaian Alat Berat	100.000,00	0,00	0,00	133.550.000,00	133.650.000,00
b. Retirbusi Pelayanan Pasar	1.867.500,00	0,00	0,00	43.949.250,00	45.816.750,00
Jumlah Penyisihan	**1.967.500,00**	**0,00**	**0,00**	**177.499.250,00**	**179.466.750,00**

c. Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp12.977,88.

2. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp2.610.378.275,00 merupakan penyisihan atas keseluruhan nilai Piutang Lainnya sesuai kebijakan akuntansi penyisihan piutang untuk piutang lain-lain yang telah berumur lebih dari 4 Tahun. Daftar umur piutang yang telah disisihkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.62
Daftar Umur Piutang Lainnya

No	Debitur	Thn Timbul	Nilai Piutang per 31 Desember 2023	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH
				< 1 TAHUN (Lancar)	1 - 2 TAHUN (Kurang Lancar)	2-4 TAHUN diragukan	> 4 TAHUN Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Piutang dana Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD TA 2006	2006	1.542.240.000,00	-	-	-	1.542.240.000,00	1.542.240.000,00
2	Piutang Dana Operasional DPRD TA 2006	2006	312.480.000,00				312.480.000,00	312.480.000,00
3	Piutang Sewa Gedung; Sewa Gedung Eks Kantor Dinas Kelautan dan perikanan	2010	4.500.000,00				4.500.000,00	4.500.000,00
4	* PT. Lince Romauli Raya, Pekerjaan Pembangunan Embung Maduoen. Uang Muka yang kurang dipotong saat pencairan termin I Rp.46,595.509, - dikurangi pajak atas uang muka sebesar Rp.19.393.918, -	2010	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
5	2. Penambahan Ruang Kelas SMP Oelasin (CV.Himalaya)	2007	2.066.000,00				2.066.000,00	2.066.000,00
6	3. Pemb. SD Kecil Sunsa (CV.Sardy Indah)	2007	1.262.400,00				1.262.400,00	1.262.400,00
7	2. Rehabilitasi SMK Lembang	2008	2.803.500,00				2.803.500,00	2.803.500,00

No	Debitur	Thn Timbul	Nilai Piutang per 31 Desember 2023	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH
				< 1 TAHUN (Lancar)	1 - 2 TAHUN (Kurang Lancar)	2-4 TAHUN diragukan	> 4 TAHUN Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(CV.Sutami Putra Jaya)							
8	3. Pengadaan Mebeler Sekolah (CV.Titisan)	2008	4.862.000,00				4.862.000,00	4.862.000,00
9	4. Pembangunan Perpustakaan SMAN 1 Rote Selatan (cv.Karya Anak Tani)	2008	3.350.000,00				3.350.000,00	3.350.000,00
10	1. CV. Rezky Pek.Pembangunan RKB SMPN.2.Rote Timur (43 hari)	2011	4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00
11	Denda Keterlambatan TA.2010 an.CV.Bayu Permai	2010	28.778.750,00				28.778.750,00	28.778.750,00
12	Sita Jaminan Pelaksanaan, CV.Jati Diri Perkasa,	2011	18.350.000,00				18.350.000,00	18.350.000,00
13	Denda Keterlambatan Pekerjaan (PT.Rimba Mas Indah	2011	182.612.250,00				182.612.250,00	182.612.250,00
14	Denda Keterlambatan Pekerjaan (CV.Jati diri perkasa)	2011	56.233.625,00				56.233.625,00	56.233.625,00
15	sisa kas di bendahara pengeluaran TA.2009	2012	109.515.500,00				109.515.500,00	109.515.500,00
16	Kelebihan Pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (Nathan Ufi,S.Sos)	2012	10.575.225,00				10.575.225,00	10.575.225,00
17	Piutang Sewa Kendaraan Roda enam (truck) oleh CV.GFP Mandiri sesuai perjanijian sewa no DPKI/551/184/ VII/2012 dengan nilai sewa	2012	43.625.000,00				43.625.000,00	43.625.000,00

No	Debitur	Thn Timbul	Nilai Piutang per 31 Desember 2023	PENYISIHAN PIUTANG				JUMLAH
				< 1 TAHUN (Lancar)	1 - 2 TAHUN (Kurang Lancar)	2-4 TAHUN diragukan	> 4 TAHUN Macet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rp.175.000.000 dan telah disetor ke Kabid Perhbungan Darat dinas Perhubungan pada TA.2012 sebesar Rp.60.000.000 namun belum disetor ke kasda sehingga sisa piutang CV.GFP Mandiri sebesar Rp.115.000.000							
18	Piutang Kapal Purseine, oleh kelompok Sehati, Daudolu, Semangat Baru dan Ka.Hore	2012	214.502.800,00				214.502.800,00	214.502.800,00
19	CV. Pulau Selatan, denda keterlambatan pekerjaan peningkatan ruas jalan Ingguinak-Oeina (Lapen) selama 45 Hari	2013	43.595.325,00				43.595.325,00	43.595.325,00
20	CV.Berkat Mandiri, denda keterlambatan pekerjaan Rehab Embung Danokoli selama 45 Hari	2013	17.700.750,00				17.700.750,00	17.700.750,00
21	CV.Elshani, denda keterlambatan pekerjaan rehab jaringan irigasi kuli selama 37 hari	2013	6.325.150,00				6.325.150,00	6.325.150,00
	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG		**2.610.378.275,00**	**-**	**-**	**-**	**2.610.378.275,00**	**2.610.378.275,00**

10) Persediaan	31-12-2023	31-12-2022
	Rp14.835.529.834,40	**Rp14.122.633.085,15**

Jumlah sebesar Rp14.835.529.834,40 merupakan nilai persediaan yang terdapat pada perangkat daerah per 31 Desember 2023 yang berasal dari belanja APBD maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk pelayanan masyarakat, operasional pemerintah maupun untuk diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dinilai dengan metode biaya perolehan persediaan yang terakhir (First In First Out=FIFO).

berdasarkan laporan stock opname persediaan barang per 31 Desember 2023.

Tabel 5.63
Persediaan Perjenis Barang

No	Uraian	Nilai Persediaan TA.2023	Nilai Persediaan TA.2022
1	Obat-obatan, Bahan Kimia Dan Bahan Habis Pakai/Alat Kesehatan	13.575.121.854,40	12.892.734.225,15
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	284.617.500,00	400.272.500,00
3	Alat Kebersihan, Alat Listrik, Bahan Material	54.579.550,00	93.365.000,00
4	Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.803.320,00	4.800.000,00
5	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	127.901.960,00	234.667.000,00
6	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	39.240.000,00	0,00
7	Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat	300.000.000,00	60.510.000,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	443.265.650,00	436.284.360,00
	Jumlah	**14.835.529.834,40**	**14.122.633.085,15**

a) Persediaan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan bahan habis pakai sebesar Rp13.575.121.854,40 terdiri dari:
   (1) Dinas Kesehatan, persediaan berupa obat-obatan, vaksin dan barang habis pakai pada gudang farmasi sebesar Rp9.674.539.094,49;
   (2) Puskesmas dan puskesmas pembantu, persediaan berupa obat-obatan, vaksin dan barang habis pakai sebesar Rp1.069.824.788,73;

(3) Rumah Sakit Umum Daerah, persediaan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan kimia sebesar Rp2.314.370.617,18. Selain nilai persediaan tersebut terdapat persediaan barang yang belum memiliki nilai yang merupakan bantuan dan hibah berasal dari organisasi, perorangan, partai yang diserahkan ke RSUD tanpa harga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Persediaan Barang Yang Belum Memiliki Nilai

No	Bantuan	Nama Obat / Barang	Satuan	Jumlah	Nilai
1	Bantuan RSUD Ba'a	Masker N95	pcs	510	0,00
2	Bantuan RSUD Ba'a	Masker Surgical	pcs	1.950	0,00
3	Bantuan khusus Covid	Cover All reuse	Buah	25	0,00
4	Bantuan khusus Covid	Handscoon Luar	Pasang	32	0,00
5	Bantuan khusus Covid	Jas Hujan/Mantel	Buah	20	0,00
6	DINKESKAB	Jas Hujan/mantel	Psg	40	0,00
7	DINKESKAB	Kaca Mata Googe	Pcs	50	0,00
8	DINKESKAB	Plastik Mayat	buah	4	0,00
9	DINDKES PROV	Cover All	Buah	2.163	0,00
10	DINDKES PROV	Cover All set with Sepatu Boot (Sepatu Boot)	Pasang	59	0,00
11	DINDKES PROV	Sepatu Boots	Pasang	48	0,00
12	DINDKES PROV	Visor Kuning	Buah	37	0,00
13	Hibah	Cover All reuse	Buah	38	0,00
14	Hibah	Kacamata google	Buah	31	0,00
15	Hibah	Mantel/Jas Hujan	Buah	58	0,00
16	Hibah	Masker Kain	Buah	571	0,00
17	Hibah	Shoes T/Alas kaki	Pasang	221	0,00
Total				**5.857**	**0,00**

(4) DP3AP2KB, persediaan berupa alat kesehatan kontrasepsi (ALKON) dan NON ALKON sebesar Rp516.387.354,00;

b) Persediaan alat tulis kantor pada perangkat daerah sebesar Rp284.617.500,00 berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp16.410.000,00, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp263.814.000,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp353.500,00, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp1.405.000,00 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.635.000,00;

c) Persediaan alat kebersihan, alat listrik dan bahan material sebesar Rp54.579.550,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;

d) Persediaan bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp10.803.320,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
e) Persediaan suku cadang kendaraan bermotor sebesar Rp127.901.960,00 pada Dinas Pertanian;
f) Persediaan logistik dan bahan makanan pokok sebesar Rp39.240.000,00 berupa persediaan bahan makanan pokok untuk pelayanan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah;
g) Persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp300.000.000,00 merupakan persediaan barang yang berasal dari belanja persediaan untuk Dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyaraka. Persediaaan tersebut merupakan persediaan peralatan dan mesin berupa Mesin pompa air 2 Dim sebnayak 40 unit yang yang bersumber dari dana DAU yang akan diserahkan kepada masyarakat;
h) Persediaan Blanko cetak sebesar Rp443.265.650,00 merupakan persediaan blanko cetak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp150.000.000,00 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp293.265.650,00.

Persediaan Per Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2022 pada lampiran 3

II. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31-12-2023	31-12-2022
	Rp91.499.961.235,00	**Rp80.763.885.136,00**

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.499.961.235,00 berasal dari investasi jangka panjang non-permanen sebesar Rp0,00 dan investasi jangka panjang permanen sebesar Rp91.499.961.235,00.

1) Investasi Jangka Panjang Non-permanen	31-12-2023	31-12-2022
	Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non-permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

a. Dana Bergulir	31-12-2023	31-12-2022
	Rp5.683.814.012,00	Rp5.683.814.012,00

Jumlah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.683.814.012,00 merupakan total dana yang digulirkan kepada masyarakat individu ataupun kelompok yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah melalui Perangkat Daerah teknis, baik dalam bentuk kas tunai maupun ternak yang digulirkan. Rincian mutasi pos investasi non permanen per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Ringkasan Dana Bergulir Per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2023	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DP3AP2KB	469.850.053,00	0,00	0,00	469.850.053,00
2	DPMD	465.268.838,00	0,00	0,00	465.268.838,00
3	Dinas Perikanan	746.870.688,00	0,00	0,00	746.870.688,00
4	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	3.777.561.424,00	0,00	0,00	3.777.561.424,00
5	Dinas Tansnaker	224.263.009,00	0,00	0,00	224.263.009,00
Jumlah		**5.683.814.012,00**	**0,00**	**0,00**	**5.683.814.012,00**

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 379/KEP/HK/2012, Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor11/KEP/HK/2013 dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 472/KEP/HK/2013 tentang Penghapusan Pinjaman Daerah yang bersumber dari dana bergulir Kabupaten Rote Ndao. Penetapan penghapusan piutang ini dilakukan secara bersyarat yang berklasifikasi penerima dana bergulir meninggal dunia, alamat tidak ditemukan lagi dan/ atau usaha yang tidak berjalan lagi, serta ternak yang telah mati, namun atas Surat Keputusan Bupati tersebut belum dilakukan mutasi berkurang atas saldo neraca.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara penghapusan piutang negara atau daerah maka Pejabat pengolala keuagan Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat permohonan pengajuan penghapusan Nomor 900/159.a/BKA3.3 dengan nilai piutang sebesar Rp2.086.276.402,30 yang merupakan piutang dana bergulir Tahun 2017-2022 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Bali dan Nusa Tenggara.

b. Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih	31-12-2023	31-12-2022
	Rp(5.683.814.012,00)	**Rp(5.683.814.012,00)**

Jumlah per 31 Desember 2023 sebesar Rp(5.683.814.012,00) merupakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih pada 5 PD teknis karena telah melebihi 4 (empat) tahun. Rincian mutasi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Penyisihan Dana Bergulir

No	Perangkat Daerah	31/12/2023	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya				Saldo akhir
		(Rp)	<1TH	1-2 TH	2-4 TH	> 4 TH	(Rp)
1	DP3AP2KB	469.850.053,00	0,00	0,00	0,00	469.850.053,00	469.850.053,00
2	DPMD	465.268.838,00	0,00	0,00	0,00	465.268.838,00	465.268.838,00
3	Dinas Perikanan	746.870.688,00	0,00	0,00	0,00	746.870.688,00	746.870.688,00
4	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	3.777.561.424,00	0,00	0,00	0,00	3.777.561.424,00	3.777.561.424,00
5	Dinas Tansnaker	224.263.009,00	0,00	0,00	0,00	224.263.009,00	224.263.009,00
Jumlah		**5.683.814.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.683.814.012,00**	**5.683.814.012,00**

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31-12-2023	31-12-2022
	Rp91.499.961.235,00	**Rp80.763.885.136,00**

Jumlah sebesar Rp91.499.961.235,00 merupakan nilai Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per

31 Desember 2023 pada PT. BPD NTT, PDAM Kabupaten Rote Ndao dan PD Ita Esa.

Metode penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai investasi pada PT.BPD NTT menggunakan metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan terhadap nilai investasi sedangkan untuk investasi pada PD. Ita Esa dan PDAM Rote Ndao menggunakan metode penilaian equitas dimana nilai penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi. Rincian nilai investasi permanen TA.2023 dan TA.2022 sebagai berikut:

Tabel 5.67
Nilai Investasi Permanen TA.2023 dan TA.2022

Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)	31 Desember 2023 (Rp)	Kepemilikan (%)	31 Desember 2022 (Rp)
PT BPD NTT	3,07	80.272.610.000,00	3,07	70.272.610.000,00
PD Ita Esa	100	769.174.335,00	100	769.174.335,00
PDAM Kab Rote Ndao	100	10.458.176.900,00	100	9.722.100.801,00
Total		**91.499.961.235,00**		**80.763.885.136,00**

a) Penyertaan modal pada PT. BPD NTT sebesar Rp80.272.610.000,00 merupakan nilai perolehan (*cost*) atas saham PT. BPD NTT yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Peningkatan nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 dari saldo akhir per 31 Desember 2022 berasal dari:

Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	Rp70.272.610.000,00
Nilai Penyertaan modal dalam bentuk kas TA.2023	Rp10.000.000.000,00
Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	**Rp80.272.610.000,00**

Mutasi penambahan nilai investasi berupa Penyertaan Modal TA.2023 pada Perseroan Terbatas BPD NTT sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD dan Perseroan Terbatas Bank NTT.

b) Nilai investasi berupa penyertaan modal PD. Ita Esa merupakan kepemilikan atas keseluruhan nilai ekuitas. Saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 pada PD. Ita Esa dengan mengacu pada laporan keuangan PD. Ita Esa *unaudited* per 31 Desember 2018 dengan nilai investasi sebesar Rp769.174.335,00. Nilai investasi tersebut tidak berubah disebabkan Perusahaan Daerah tidak melaksanakan aktivitas operasionalnya sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini. Sesuai rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka untuk dilakukan proses penilaian kembali kelayakan usaha PD. Ita Esa maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Akuntan Publik "Wartono dan rekan" melakukan Kerjasama untuk melakukan kajian dan sesuai Laporan Hasil Kajian Akademis Kelayakan Operasional PD. Ita Esa Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai tujuan pendirian disarankan agar:

1. Melikuidasi Perusahaan Daerah Ita Esa, dengan mengajukan Peraturan Daerah untuk dibahas Bersama DPRD Kabupaten Rote Ndao;
2. Setelah terbit Perda Pembubaran/Likuidasi, membentuk Tim Likuidator dengan tugas-tugas :
   a. Menyelesaikan kewajiban-kewajiban Perusahaan, baik kepada pegawai berupa utang gaji, para kreditur/supplier, maupun instansi pajak terkait kewajiban pajak terutang.
   b. Menyiapkan laporan keuangan penutupan dan meminta auditor eksternal untuk melakukan audit sebagai dokumen pendukung likuidasi, setelah terbit Keputusan Pembubaran/Likuidasi.
   c. Menyerahkan sisa aset dan/atau kewajiban kepada pemilik cq. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Sesuai Laporan Kajian Akademis maka nilai ekuitas PD. Ita Esa sebesar Rp769.174.335,00 namun nilai tersebut tidak dapat diyakini karena belum dilakukan audit oleh auditor independent.

c) Nilai investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum TA.2023 berdasarkan laporan keuangan *Audited* atas laporan perubahan ekuitas PDAM Kabupaten Rote Ndao TA. 2023 sebesar Rp10.458.176.900,00.

Ringkasan nilai perolehan investasi permanen pada PDAM Rote Ndao sampai dengan TA.2023 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Nilai Perolehan Investasi Permanen PDAM

	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	Penyertaan Modal Pemerintah YBD Statusnya	Hibah	Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo Tanggal 1 Januari 2022	**16.162.688.740,00**	**6.674.904.000,00**	**100.238.957,00**	**(12.842.206.375,00)**	**10.095.625.322,00**
Koreksi Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	(137.159.944,00)	(137.159.944,00)
Tambahan Penyertaan Modal	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	(736.364.577,00)	(736.364.577,00)
Saldo Tanggal 31 Desember 2022	**16.662.688.740,00**	**6.674.904.000,00**	**100.238.957,00**	**(13.715.730.896,00)**	**9.722.100.801,00**
Tambahan Penyertaan Modal	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Koreksi Saldo Defisit	0,00	0,00	0,00	245.275.094,00	245.275.094,00
Rugi Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	(9.198.995,00)	(9.198.995,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2023	**17.162.688.740,00**	**6.674.904.000,00**	**100.238.957,00**	**(13.479.654.797,00)**	**10.458.176.900,00**

Peningkatan nilai investasi permanen pada PDAM Kab. Rote Ndao sebesar Rp736.076.099,00 berasal dari penambahan investasi berupa kas sebesar Rp500.000.000,00, koreksi saldo awal yang menambah ekuitas Rp245.275.094,00 dikurangi pengurang ekuitas dari rugi perusahaan TA.2023 sesuai Laporan Keuangan Audited PDAM TA.2023 sebesar Rp9.198.995,00.

III. Aset Tetap

Aset Tetap	31 - 12–2023	31 - 12–2022
	Rp1.544.695.918.035,29	**Rp1.455.142.456.250,96**

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.544.686.118.035,29 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.455.142.456.250,96 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69
Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	161.762.034.526,12	0,00	187.159.203,00	161.574.875.323,12
2	Peralatan dan Mesin	357.932.771.679,51	35.780.115.366,84	8.965.440.330,00	384.747.446.716,35

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	576.431.058.768,85	57.166.471.052,63	4.281.905.804,00	629.315.624.017,48
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.214.859.410.160,40	112.673.396.366,48	0,00	1.327.532.806.526,88
5	Aset tetap lainnya	31.883.468.184,00	327.193.866,00	23.500.000,00	32.187.162.050,00
6	Kontruksi dalam pengerjaan	126.500.000,00	3.905.432.984,60	28.500.000,00	4.003.432.984,60
7	Akumulasi Penyusutan	(887.852.787.067,92)	(116.865.568.227,68)	10.052.925.712,46	(994.665.429.583,14)
	Jumlah	**1.455.142.456.250,96**	**92,987,041,408.89**	**3.433.579.624,54**	**1.544.695.918.035,29**

Mutasi bertambah aset tetap diperoleh dari belanja APBD TA.2023, Hibah Kementrian Kesehatan Tahun 2023, Koreksi atas Perolehan Aset Tetap dari belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022, Hibah Aset Tetap dari PT. Astra Tahun 2021 serta perolehan lainnya yang sah sedangkan mutasi berkurang aset tetap diperoleh dari penghapusan atas sebagian bidang tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Pusat, penghapusan atas aset tetap yang dijual, mati dan aset tetap yang dibongkar karena diatasnya lokasi yang sama dibangun bangunan baru serta penghapusan aset tetap yang telah dimusnahkan pada tahun 2021. Selain mutasi aset tetap sebagaimana dimaksud terdapat juga mutasi pengalihan status pengguna BMD yang merupakan bagian dari manajemen pengelolaan barang milik daerah yang tidak menambah atau mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penjelasan lebih lanjut atas aset tetap per objek sebagai berikut:

	31 - 12–2023	31 - 12–2022
1) Tanah	**Rp161.574.875.323,12**	**Rp161.762.034.526,12**

a. Jumlah bidang tanah yang digunakan secara aktif oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 sebanyak 852 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp161.574.875.323,12. penurunan nilai aset tetap sebesar Rp187.159.203,00 jika dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.762.034.526,12 berasal dari penghapusan sebagian bidang tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Pusat.

Objek tanah yang dihibahkan TA.2023 terdiri dari:

Tabel 5.70
Hibah Tanah

No	Uraian Tanah	Lokasi	Penerima Hibah	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Terminal Laut	Desa Batutua Kec. RBD	Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia	10.300	150.461.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor	Desa Lekunik Kompleks Perkantoran Bumi Tiilangga Permai	Kementrian Kelautan dan Perikanan	750	36.698.203,00
Jumlah				**11.050**	**187.159.203,00**

Total bidang tanah yang telah disertifikasi sejumlah 210 bidang tanah dari total bidang tanah 852 bidang tanah atau 642 bidang tanah yang belum bersertifikat. Selain 852 bidang tanah tersebut diatas terdapat juga 1 (satu) bidang tanah bersertifikat yang tercatat sebagai aset kemitraan berupa bangun guna serah dengan nilai aset tanah Rp90.000.000,00 sehingga total bidang tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sejumlah 853 bidang tanah.

2) Peralatan dan Mesin	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
	Rp384.747.446.716,35	**Rp357.932.771.679,51**

Jumlah sebesar Rp384.747.446.716,35 merupakan nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp357.932.771.679,51.

Mutasi nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a)	Saldo awal	Rp357.932.771.679,51
b)	Mutasi bertambah nilai aset tetap	Rp35.780.115.366,84
c)	Mutasi berkurang aset tetap	Rp8.965.440.330,00
	Jumlah saldo akhir (a + b - c)	Rp384.747.446.716,35

Mutasi Tambah Nilai Peralatan dan Mesin

Mutasi tambah nilai peralatan dan mesin sebesar Rp35.780.115.366,84 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.71
Mutasi Tambah Nilai Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kapitalisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023	27.912.232.281,84
2	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	788.111.000,00
3	Reklasifikasi dari belanja modal gedung bangunan	1.294.624.450,00
4	Reklasifikasi dari belanja modal tetap lainnya	93.931.048,00
5	Koreksi Saldo Awal dari Belanja Barang dan Jasa TA.2022	229.594.000,00
6	Koreksi Saldo Awal dari Perolehan Hibah TA. 2021	3.148.017.992,00
7.	Hibah TA.2023	2.313.604.595,00
	Jumlah Mutasi Tambah	**35.780.115.366,84**

a) Realisasi Belanja Modal TA. 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2022 direalisasikan sebesar Rp28.662.841.889,00 namun tidak seluruhnya diatribusikan kedalam perolehan aset tetap peralatan dan mesin karena tidak memenuhi klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin. Rincian klasifikasi belanja modal peralatan mesin yang menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin dan tidak dapat dirinci sebagai berikut:

- Kapitalisasi dari Realisasi Belanja Modal Rp27.912.232.281,84
- Koreksi Belanja Modal Tidak di Kapitalisasi Rp587.292.500,00
- Koreksi Belanja Modal Sesuai LHP BPK Rp123.790.107,16
- Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ Rp9.990.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Rp29.537.000,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan ke perolehan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp788.111.000,00 terdiri dari belanja barang dan jasa BOS pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp38.750.000,00 dan belanja barang dan jasa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp749.361.000,00.

c) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke mutasi bertambah Peralatan dan mesin sebesar Rp1.462.065.600,00 namun tidak semua belanja modal tersebut diatribusikan ke perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin dimana terdapat nilai sebesar Rp167.441.150,00 yang tercatat

ekstracomptable jadi total nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang dikapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.294.624.450,00.

d) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang diatribusikan ke perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp93.931.048,00 berasal dari belanja BOS pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

e) Koreksi saldo awal dari perolehan aset tetap peralatan dan mesin TA. 2022

Koreksi saldo awal dari perolehan aset tetap peralatan dan mesin berasal dari belanja barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan atas 3 unit Kantor BPP Dinas Pertanian TA.2022 yang diatribusikan ke perolehan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp229.594.000,00.

f) Koreksi saldo awal dari perolehan hibah TA. 2021

Perolehan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah TA.2021 sebesar Rp3.148.017.992,00 merupakan hibah PT Astra Internasional Tbk sesuai piagam serah terima tanggal 29 November 2021 pada 8 (delapan) unit sekolah di wilayah Kecamatan Rote Barat.

g) Hibah Tahun 2023

Perolehan Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah TA.2023 sebesar Rp2.313.604.595,00 merupakan hibah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berupa Peralatan Medis sesuai Berita Acara Serah Terima Kementrian Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.

Mutasi Kurang Nilai Peralatan dan Mesin

Mutasi kurang nilai peralatan dan mesin sebesar Rp8.965.440.330,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.72
Mutasi Kurang Nilai Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengahapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin penjualan	8.765.486.130,00
2	Koreksi saldo awal dari Penghapusan Aset tetap Peralatan dan Mesin Penghapusan TA.2021	199.954.200,00
Jumlah Mutasi Kurang		**8.965.440.330,00**

a) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Penjualan

Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.765.486.130,00 merupakan penghapusan atas 191 unit kendaraan bermotor yang terjual melalui mekanisme lelang 190 unit dan penjualan langsung 1 (satu) unit kepada mantan pejabat negara dengan rincian penghapusan sebagai berikut:

- Penghapusan sesuai SK Sekretaris Daerah nomor 028/430.b/BKA 5.2 Tanggal 15 Mei 2023 atas 113 unit Kendaraan bermotor dengan nilai tercatat Rp4.781.265.750,00. Jumlah total kendaraan terjual dan dihapuskan sesuai SK Sekretaris Daerah nomor 028/430.b/BKA 5.2 Tanggal 15 Mei 2023 sejumlah 143 unit yang terdiri dari 113 unit sebesar Rp4.781.265.750,00 tercatat pada aset tetap dan 30 unit sebesar Rp1.053.097.700,00 tercatat pada aset lain-lain;
- Penghapusan sesuai SK Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1355/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 atas 77 unit Kendaraan bermotor dengan nilai tercatat Rp3.580.768.430,00. Jumlah kendaraan yang terjual dan dihapuskan sesuai SK Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1355/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 sejumlah 101 unit terdiri dari 77 unit sebesar Rp3.580.768.430,00 tercatat pada aset tetap dan 24 unit sebesar Rp1.715.370.420,00 tercatat pada aset lain-lain;
- Penghapusan sesuai SK Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1354/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 atas 1 (satu) unit Kendaraan bermotor yang dijual kepada matan pejabat negara dengan nilai tercatat Rp403.451.950,00.

b) Koreksi saldo awal penghapusan Tahun 2021

Koreksi saldo awal penghapusan tahun 2021 merupakan penghapusan atas aset tetap peralatan dan mesin yang telah dimusnahkan sesuai surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 028/166.b/BKA.5.2 tanggal 25 Februari 2021 atas 34 unit peralatan dan mesin sebesar Rp199.954.200,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Jumlah yang dihapuskan sesuai surat keputusan sekretaris daerah nomor 028/166.b/BKA.5.2 tanggal 25 Februari 2021 sejumlah 81 unit dengan total nilai Rp259.636.450,00 terdiri dari 34 unit sebesar Rp199.954.200,00 tercatat pada aset tetap, 14 unit sebesar Rp50.920.350,00 tercatat pada aset lain-lain dan 33 unit sebesar Rp8.761.900,00 tercatat ekstrakomptable.

Rekapan Muasi Belanja modal Peralatan dan mesin per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 4

3) Gedung dan Bangunan	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
	Rp629.315.624.017,48	**Rp576.431.058.768,85**

Jumlah sebesar Rp Rp629.315.624.017,48 merupakan nilai perolehan aset gedung dan bangunan yang digunakan secara aktif oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 dan per 31 desember 2022 sebesar Rp576.431.058.768,85.

Mutasi nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a) Saldo awal	Rp576.431.058.768,85
b) Mutasi bertambah nilai aset tetap	Rp57.166.471.052,63
c) Mutasi berkurang aset tetap	Rp4.281.905.804,00
Jumlah saldo akhir (a + b - c)	Rp629.315.624.017,48

Mutasi Tambah Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Mutasi tambah nilai gedung dan bangunan sebesar Rp57.166.471.052,63 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.73
Mutasi Tambah Nilai Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kapitalisasi dari Ralisasi Belanja Modal TA. 2023	34.197.799.109,63
2	Reklasifikasi dari KDP	28,500,000,00
3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Gedung)	999.796.000,00
4	Koreksi Saldo Awal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa TA.2022	1.537.453.000,00
5	Koreksi Saldo Awal dari Perolehan Hibah TA. 2021	20.202.922.943,00
6	Koreksi Saldo Awal dari Perolehan Hibah CSR PT.BPD TA. 2021	200.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**57.166.471.052,63**

a) Kapitalisasi dari Realisai Belanja Modal TA. 2023

Perolehan aset tetap peralatan dan mesin dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2023 sebesar Rp41.754.600.518,00 merupakan nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang diatribusikan kepada perolehan aset tetap gedung dan bangunan. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA.2023 tidak seluruhnya diatribusikan kedalam perolehan asset tetap gedung dan bangunan karena tidak memenuhi klasifikasi asset tetap gedung dan bangunan dan proses pembangunan yang belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut:

i. Kapitalisasi dari Realisasi Belanja Modal Rp34.197.799.109,63
ii. Koreksi Belanja Modal Tidak di Kapitalisasi Rp11.085.000,00
iii. Reklas ke Kontruksi dalam Pengerjaan Rp3.768.978.950,00
iv. Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp1.462.065.600,00
v. Reklas ke Aset Tetap JIJ Rp 2.040.684.380,00
vi. Koreksi Temuan Kekurangan Fisik Pekerjaan Rp273.987.478,37
vii. Kapitalisasi dari Realisasi Belanja Modal Rp34.197.799.109,63

b) Reklasifikasi dari KDP

Reklasifikasi dari nilai kontruksi dalam pengerjaan kepada nilai perolehan fisik sebesar Rp28.500.000,00 merupakan nilai perencanaan pembangunan 8 unit lopo yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2023.

c) Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung

Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan yang diatribusikan kepada nilai awal gedung dan bangunan sebesar Rp999.796.000,00 merupakan belanja pemeliharaan 6 unit kantor penyuluh KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 yang menambah luasan gedung dan masa manfaat gedung.

d) Koreksi saldo awal menambah nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA.2022

Koreksi saldo awal menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari belanja barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor BPP Dinas Pertanian TA.2022 yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan baru sejumlah 3 unit gedung dan bangunan kantor Balai Penyuluh Pertanian sebesar Rp1.537.453.000,00.

e) Koreksi Saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan Hibah TA.2021

Perolehan Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah TA.2021 sebesar Rp20.202.922.943,00 merupakan hibah PT Astra Internasional Tbk sesuai piagam serah terima tanggal 29 November 2021 pada 8 (delapan) unit sekolah di wilayah Kecamatan Rote Barat.

f) Koreksi Saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perolehan Hibah CSR PT BPD NTT TA.2021

Perolehan Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah CSR PT BPD NTT TA.2021 sebesar Rp200.000.000,00 berupa lapangan bola voli dan tribun.

Mutasi Kurang Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Mutasi berkurang nilai perolehan gedung dan bangunan sejumlah Rp4.281.905.804,00 berasal dari penghapusan gedung dan bangunan

yang dibongkar karena diatas lokasi yang sama dibangun bangunan baru terdiri dari:

i. Penghapusan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1357/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 atas 10 (sepuluh) unit Gedung dan Bangunan Sekolah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dengan nilai tercatat Rp2.403.288.279,00;
ii. Penghapusan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1356/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 atas 8 (delapan) Unit Gedung dan Bangunan Balai Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dengan nilai tercatat Rp1.702.502.025,00;
iii. Penghapusan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/940/BKA2023 Tanggal 21 September 2023 atas 2 (dua) unit Gedung dan Bangunan Puskesmas Pembantu Oelunggu dan Puskesmas Pembantu Hundihopo dengan nilai tercatat Rp142.090.000,00;
iv. Penghapusan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/855.a/BKA2023 Tanggal 25 Agustus 2023 atas 1(satu) unit Gedung dan Bangunan Lopo Dinas Pariwisata dengan nilai tercatat Rp34.025.500,00

Total penghapusan sesuai surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/855.a/BKA2023 Tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah 5 (lima) unit gedung dan bangunan lopo dengan total nilai Rp470.591.500,00 yang terdiri dari 1 (satu) unit gedung Rp34.025.500,00 tercatat pada aset tetap dan 4 (empat) unit gedung Rp436.566.00000 tercatat pada aset lain-lain.

Rekapan Mutasi Aset Gedung dan bangunan per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 5

		31 - 12–2023	31 - 12–2022
4)	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**Rp1.327.532.806.526,88**	**Rp1.214.859.410.160,40**

Jumlah sebesar Rp1.327.532.806.526,88 merupakan seluruh nilai perolehan aset jalan irigasi dan jaringan yang digunakan secara

aktif oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.214.859.410.160,40.

Mutasi nilai perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a)	Saldo awal	Rp1.214.859.410.160,40
b)	Mutasi bertambah nilai aset tetap	Rp112.673.396.366,48
	Jumlah saldo akhir (a + b)	Rp1.327.532.806.526,88

Mutasi Tambah Perolehan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

Mutasi tambah nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp112.673.396.366,48 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.74
Mutasi Tambah Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kapitalisasi dari Realisasi Belanja Modal JIJ TA. 2023	110.338.962.986,48
2	Kapitalisasi dari Belanja Modal Peralatan Mesin	9.990.000,00
3	Kapitalisasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.911.443.380,00
4	Kapitalisasi dari belanja tak terduga	413.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		**Rp112.673.396.366,48**

a) Kapitalisasi dari Realisai Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA.2023 direalisasikan sebesar Rp110.801.545.523,00 namun tidak seluruhnya diatribusikan kedalam perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan karena terdapat kekurangan fisik pekerjaan sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT sebesar Rp462.582.536,52 jadi total belanja modal yang dikapitalisasi ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp110.338.962.986,48.

b) Kapitalisasi dari Realisai Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA.2023 yang diatribusikan kedalam perolehan aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan berupa pemasangan instalasi perpipaan sejumlah Rp9.990.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

c) Kapitalisasi dari Realisai Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal Gedung Bangunan TA.2023 yang diatribusikan kedalam perolehan aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan berupa 37 unit instalasi PLTS lampu jalan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.911.443.380,00.

d) Kapitalisasi dari Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga TA.2023 yang diatribusikan kedalam perolehan aset tetap Jalan Irigasi dan jaringan berupa pekerjaan rehabilitasi embung lekobatu dan bendung lekadik sebesar Rp413.000.000,00.

Rekapan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 6

5) Aset Tetap Lainnya	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
	Rp32.187.162.050,00	**Rp31.883.468.184,00**

Jumlah sebesar Rp32.187.162.050,00 merupakan nilai perolehan aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.666.102.726,00.

Mutasi nilai perolehan aset tetap lainnya TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a) Saldo awal	Rp31.883.468.184,00
b) Mutasi Bertambah	Rp327.193.866,00
c) Mutasi Berkurang	Rp23.500.000,00
d) Jumlah saldo akhir (a + b - c)	Rp32.187.162.050,00

Lebih lanjut mutasi aset tetap lainnya tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Mutasi bertambah aset tetap lainnya tahun 2023 sebesar Rp327.193.866,00 terdiri dari:

(1). Kapitalisasi dari belanja modal aset tetap lainnya TA. 2023	Rp297.656.866,00
(2). Reklasifikasi dari belanja modal peralatan mesin	Rp29.537.000,00
Kapitalisasi dari belanja modal	Rp327.193.866,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA.2023 sebesar Rp1.481.156.278,00 namun tidak seluruhnya diatribusikan ke perolehan aset tetap lainnya karena tidak memenuhi klasifikasi aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah yang diatribusikan ke perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp297.656.866,00;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp93.931.048,00;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi klasfikasi sebagai Aset Tetap berupa buku digital dimana Pemda hanya memiliki hak akses dengan nilai sebesar Rp10.250.000,00;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang diklasifikasikan sebagai ekstrakomtable sebesar Rp1.079.318.364,00.

b) Mutasi berkurang aset tetap lainnya

Mutasi berkurang aset tetap lainnya sebesar Rp23.500.000,00 merupakan penghapusan atas 2 ekor ternak yang mati sesuuai surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 028/598/BKA5.2 tanggal 26 Juni 2023.

Rekapan Mutasi Aset Tetap Lainnya per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 7

6)	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**31-12–2023**	**31-12–2022**
		Rp4.003.432.984,60	**Rp126.500.000,00**

Jumlah sebesar Rp4.003.432.984,60 merupakan nilai realisasi belanja modal yang belum menghasilkan aset tetap yang dapat digunakan sesuai peruntukkannya sampai dengan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp126.500.000,00.

Mutasi nilai perolehan Kontruksi dalam Pengerjaan TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a)	Saldo awal	Rp126.500.000,00
b)	Mutasi Bertambah Nilai KDP	Rp3.905.432.984,60
c)	Mutasi Berkurang KDP	Rp28.500.000,00
d)	Jumlah saldo akhir (a + b - c)	Rp4.003.432.984,60

Peningkatan perolehan aset tetap kontruksi dalam pengerjaan sejumlah Rp3.905.432.984,60 berasal dari pekerjaan pembangunan 6 (enam) unit gedung sekolah yang sampai dengan per 31 Desember 2023 belum selesai dikerjakan. Rincian kontruksi dalam pengerjaan sebagai berikut:

1. KDP Kontruksi Pembangunan Pasar Tutukarlain Tahun 2019 sebesar Rp70.000.000,00 masih dalam bentuk dokumen perencanaan;
2. KDP konstruksi DAS Baadale sebesar Rp28.000.000,00 Tahun 2020 yang masih dalam bentuk dokumen perencanaan dan belum dilanjutkan pekerjaan pembangunan fisik tembok penahan tebing;
3. KDP 2 (dua) unit Gedung SDN Sonimanu per 31 Desember 2023 dengan presentase fisik 80,51% sebesar Rp1.129.279.228,58.

   Pekerjaan rehabilitasi berat gedung SDN Sonimanu dilaksanakan oleh CV. Teguh Karya sesuai Kontrak nomor 425/254.a/PKO 5 tanggal 22 September 2023.

   (a) Nilai kontrak Rp1.388.500.000,00
   (b) Realisasi Kontrak 80% Rp1.110.800.000,00

(c)	Sisa Nilai Kontrak	Rp277.700.000,00
(d)	Utang Belanja 0,51%	Rp 7.081.350,00
(e)	Nilai belanja Pendukung	Rp18.034.000,00
(f)	Kekurangan volume hasil pemeriksaan BPK RI NTT TA 2023	Rp6.636.121,42
(g)	Nilai KDP (b)+(d)+(e)–(f)	Rp1.129.279.228,58

4. KDP 1 (satu) unit Gedung Ruang Kelas SDN Tuabuna per 31 Desember 2023 dengan presentase fisik 92,37% dan nilai KDP Rp1.301.377.415,92. Pekerjaan rehabilitasi berat gedung SDN Tuabuna dilaksanakan oleh CV. Yevalmax Kalvari sesuai Kontrak nomor 423/248.a/PKO 5 tanggal 13 September 2023;

(a)	Nilai kontrak	Rp1.410.000.000,00
(b)	Realisasi Kontrak 90%	Rp1.260.000.000,00
(c)	Sisa Nilai Kontrak	Rp140.000.000,00
(d)	Utang Belanja 2,37%	Rp33.180.000,00
(e)	Nilai belanja Pendukung	Rp18.184.000,00
(f)	Kekurangan volume hasil pemeriksaan BPK RI NTT TA 2023	Rp9.986.584,08
(g)	Nilai KDP (b)+(d)+(e)–(f)	Rp1.301.377.415,92

5. KDP 1 (satu) unit Gedung Ruang Kelas SDN Oelua per 31 Desember 2023 dengan presentase fisik 90,39% dan nilai KDP Rp595.300.210,10. Pekerjaan rehabilitasi berat gedung SDN Oelua dilaksanakan oleh CV. Uma Purung sesuai Kontrak nomor 425/249.a/PKO 5 tanggal 13 September 2023:

(a)	Nilai kontrak	Rp649.259.000,00
(b)	Realisasi Kontrak 80%	Rp519.407.200,00
(c)	Sisa Nilai Kontrak	Rp129.851.800,00
(d)	Utang Belanaja 10,39%	Rp67.458.010,10
(e)	Nilai belanja Pendukung	Rp8.435.000,00
(f)	Nilai KDP (b) + (d) + (e)	Rp595.300.210,10

6. KDP 1 (satu) unit Gedung Ruang Kelas SDN Nuse per 31 Desember 2023 dengan presentase fisik 56,53% dan nilai KDP Rp356,321,000.00. Pekerjaan rehabilitasi berat gedung SDN Nuse dilaksanakan oleh CV. Guwen sesuai Kontrak nomor 423/250.a/PKO 5 tanggal 13 September 2023:

(a)	Nilai kontrak	Rp649.259.000,00
(b)	Realisasi Kontrak 50%	Rp519.407.200,00
(c)	Sisa Nilai Kontrak	Rp129.851.800,00
(d)	Utang Belanja 6,53%	Rp45.357.380,00
(e)	Nilai belanja Pendukung	Rp9.021.000,00
(f)	Nilai KDP (b) + (d) + (e)	Rp401.678.380,00

7. KDP 1 (satu) unit Gedung Laboratorium SMP N 2 Rote Selatan per 31 Desember 2023 dengan presentase fisik 75% dan nilai KDP Rp477,797,750.00. Pekerjaan rehabilitasi berat gedung SMPN2 Rote Selatan dilaksanakan oleh CV. Giant Konstruksi sesuai Kontrak nomor 425/169.a/ PKO 5 tanggal 14 Juli 2023.

(a)	Nilai kontrak	Rp597.605.000,00
(b)	Realisasi Kontrak 75%	Rp448.203.750,00
(c)	Sisa Nilai Kontrak	Rp149.401.250,00
(d)	Nilai belanja Pendukung	Rp29.594.000,00
(e)	Nilai KDP (b) + (d)	Rp477.797.750,00

Mutasi berkurang aset tetap kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp28.500.000 merupakan nilai perencanaan Bangunan dan gedung lopo tempat pariwisata laut mati sebesar Rp28.500.000,00 Tahun 2020 yang telah dikapitalisasi ke Perolehan Fisik 8 Unit Gedung Lopo perolehan tahun 2023.

7)	**Akumulasi Penyusutan**	**31- 12 – 2023** **Rp(994.665.429.583,13)**	**31 - 12–2022** **Rp(887.852.787.067,92)**

Jumlah sebesar Rp(994.665.429.583,13) merupakan nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(887.852.787.067,92).

Mutasi nilai akumulasi penyusutan TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

a)	Saldo awal	Rp(887.852.787.067,92)
b)	Koreksi Saldo Awal	Rp(9.394.621.335,62)
c)	Mutasi tambah beban Ak penyusutan	Rp(107.470.946.892,06)
d)	Mutasi kurang nilai Ak. penyusutan	Rp(10.052.925.712,46)
	Saldo Akhir Nilai (a + b + c - d)	Rp(994.665.429.583,14)

Tabel 5.75
Akumulasi Penyusutan

No	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(288.198.256.963,19)	(252.445.276.983,17)
2	Gedung dan Bangunan	(111.400.948.793,37)	(100.074.218.879,11)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(595.043.963.160,58)	(535.326.206.539,64)
4	Aset Tetap Lainnya	(22.260.666,00)	(7.084.666,00)
Jumlah		**(994.665.429.583,14)**	**(887.852.787.067,92)**

Mutasi tambah nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp(116.865.568.227,68) terdiri dari:

(a) Koreksi saldo awal sebesar Rp(9.394.621.335,62) merupakan koreksi atas perhitungan akumulasi penyusutan pada SIMDA BMD dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(8.501.950.928,09) karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya;
- Koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(466.189.880,19) karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya;
- Koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(8.500.000,00) yang berasal dari hibah dan perolehan lainnya yang sah yang baru dicatat pada TA.2023;
- Koreksi tambah saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp(417.980.527,34) karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya.

(b) Mutasi tambah beban akumulasi penyusutan TA.2023 Rp(107.470.946.892,06) merupakan penurunan nilai ekonomis aset tetap TA.2023.

Mutasi kurang nilai akumulasi penyusutan sejumlah Rp(10.052.925.712,46) terdiri dari:

1) penghapusan akumulasi penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin yang dihapuskan karena penjualan senilai Rp(8.765.486.130,00);
2) penghapusan akumulasi penyusutan atas aset tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan karena pemusnahan pada TA.2021 senilai Rp(199.954.200,00);
3) penghapusan akumulasi penyusutan atas aset tetap gedung dan bangunan yang dihapuskan karena pembongkaran senilai Rp(1.087.485.382,46).

Aset tetap dan penyusutan menurut jenis aset tetap TA, 2023 dapat dilihat pada lampiran 8

IV. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31- 12 – 2023	31 - 12–2022
	Rp53.976.257.260,23	**Rp54.345.959.605,31**

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.976.257.260,23 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp54.345.959.605,31 terdiri atas:

Tabel 5.76
Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud	800.770.000,00	0,00	0,00	800.770.000,00
3	Akumulasi Amortisasi	(704.770.000,00)	0,00	32.000.000,00	(736.770.000,00)
4	Aset Lain-lain	68.227.637.749,39	1.701.843.945,05	4.326.161.521,00	65.603.320.173,44
5	Akumulasi Penyusutan	(14.067.678.144,08)	3.358.670.180,40	1.072.054.949,53	(11.781.062.913,21)
	Jumlah	**54.345.959.605,31**	**5.060.514.125,45**	**5.430.216.470,53**	**53.976.257.260,23**

1)	**Kemitraan dengan pihak ketiga**	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
		Rp90.000.000,00	**Rp90.000.000,00**

Aset kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp90.000.000,00 merupakan bentuk kerjasama sesuai perjanjian kerja sama nomor HK 50 Tahun 2011 dan Nomor 03/BOA/PK/XI/2011 Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Resort Pantai Boa di Kecamatan Rote barat dan adendum I (Pertama) nomor HK 16 Tahun 2015 tentang perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan resort pantai Boa di Kecamatan Rote Barat

Bentuk kerja sama berupa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak ketiga PT.Boa Development dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak ketiga dalam jangka waktu 30 tahun.

Nilai aset kemitraan ditetapkan sebesar nilai perolehan aset tanah Boa. Secara ringkas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan PT Bo'a Development sesuai adendum I (Pertama) nomor HK 16 Tahun 2015 sebagai berikut:

1.	Bentuk Kerjasama	:	Kerjasama Kemitraan
2.	Pihak Ketiga	:	PT. Boa Development
3.	Jangka Waktu Kerjasama	:	30 Tahun
4.	Aset Kerjasama	:	Tanah Bersertifikat Hak Pakai Nomor 12 (55.125 M^2)
5.	Lokasi	:	Pantai Wisata Bo'a Kecamatan Rote Barat
6.	Kontribusi Pihak II	:	
	10 Tahun Pertama	:	2% dari NJOP ditambah harga berlaku dibagi 2 dikali luas tanah = Rp99.721.125 per tahun
	10 Tahun Kedua	:	3% dari NJOP ditambah harga berlaku dibagi 2 dikali luas tanah = Rp149.581.687,00 per tahun

10 Tahun Ketiga	:	5% dari NJOP ditambah harga berlaku dibagi 2 dikali luas tanah = Rp249.302.812,00 per tahun

Dari nilai investasi telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berupa Pendapatan asli daerah sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp797.769.000,00.

	31-12–2023	31-12–2022
2) Aset tak berwujud	**Rp800.770.000,00**	**Rp800.770.000,00**

Jumlah sebesar Rp800.770.000,00 merupakan nilai perolehan aset tak berwujud berupa piranti lunak/software. Nilai perolehan aset lain-lain berupa software terdiri dari:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB/SISMIOP dengan nilai perolehan Rp291.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah sebagai aplikasi penatausahaan dan pengelolaan PBB;
2. Aplikasi sistem perijinan satu atap dengan nilai perolehan sebesar Rp151.000.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit/SIMRS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp198.770.000,00 merupakan nilai perolehan SIMRS dan belanja pendukung sebagai aplikasi penatausahaan dan pengelolaan pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Aplikasi *V-TAX* dengan nilai perolehan sebesar Rp160.000.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

	31-12–2023	31-12–2022
3) Akumulasi Amortisasi	**Rp(736.770.000,00)**	**Rp(704.770.000,00)**

Akumulasi Amortisasi TA.2023 sebesar Rp(736.770.000,00) merupakan penurunan nilai ekonomis aset tak berwujud jika dibandingkan

akumulasi amortisasi TA.2022 sebesar Rp(704.770.000,00) maka terdapat kenaikan penurunan nilai ekonomis sebesar Rp32.000.000,00.

4) Aset Lain – Lain	31-12–2023	31-12–2022
	Rp65.603.320.173,44	**Rp68.227.637.749,39**

Jumlah sebesar Rp65.603.320.173,44 merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.77
Aset Lain-Lain

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah	Berkurang	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Galian Gol C	190.168.191,80	0,00	0,00	190.168.191,80
2	Piutang Retribusi	64.850.000,00	0,00	0,00	64.850.000,00
3	Verifikasi Bagian keuangan atas pelampauan pagu belanja perangkat daerah	148.040.309,54	0,00	0,00	148.040.309,54
4	Investasi Non Permanen dana bergulir investasi ternak	8.158.612.925,00	0,00	0,00	8.158.612.925,00
5	Aset Tetap yang tidak digunakan/Rusak berat	35.036.972.887,00	0,00	3.255.954.470,00	31.781.018.417,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran bukti SPJ yang belum sahkan	154.648.189,00	0,00	0,00	154.648.189,00
7	Aset Tetap Lainnya dalam proses Hibah	14.353.504.513,00	0,00	0,00	14.353.504.513,00
8	Nilai rehab aset tetap pemerintah pusat	2.395.841.108,05	0,00	0,00	2.395.841.108,05
9	Kas di bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan pada Dinas Kesehatan	675.000.000,00	0,00	0,00	675.000.000,00
10	Aset lain-lain dalam proses hibah pada Sekolah-Sekolah Swasta	5.979.792.575,00	0,00	0,00	5.979.792.575,00
11	Pendapatan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum dicairkan TA 2022	1.070.207.051,00	422.694.000,00	1.070.207.051,00	422.694.000,00
12	Aset Lain-Lain Lainnya	0,00	1.279.149.945,05	0,00	1.279.149.945,05
	Jumlah	**68.227.637.749,39**	**1.701.843.945,05**	**4.326.161.521,00**	**65.603.320.173,44**

Mutasi Aset aset lain-lain Per Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran 9

1) Aset lain-lain berupa piutang pajak galian Gol.C merupakan piutang pajak galian golongan C tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 yang telah kedaluwarsa, saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp190.168.191,80;
2) Aset lain-lain berupa piutang retribusi merupakan saldo piutang retribusi penggantian biaya administrasi tahun 2007 atas 46 rekanan/pihak ketiga, saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.850.000,00;
3) Aset lain-lain berupa verifikasi keuangan atas pelampauan pagu belanja perangkat daerah sebesar Rp148.040.309,54 merupakan hasil verifikasi atas kelebihan realisasi belanja dari pagu anggaran pada TA.2008. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan SK Bupati Nomor 380/Kep/HK/2012 tentang penghapusan piutang tertentu yang tidak mungkin lagi ditagih atas verifikasi bagian keuangan atas pelampauan pagu belanja perangkat daerah sebesar Rp148.040.309,54 namun belum dimutasikan dari neraca, atas proses penyelesaian piutang tersebut telah dilimpahkan ke KPKNL;
4) Aset lain-lain berupa Investasi Non Permanen dana bergulir investasi ternak sebesar Rp8.158.612.925,00 merupakan bantuan ternak kepada masyarakat dari tahun 2003 sampai 2009 namun dalam perkembangannnya pengawasan terhadap kegiatan tersebut tidak memadai sehingga tidak dapat dilakukan penagihan;
5) Aset lain-lain berupa Aset tetap yang tidak digunakan/ rusak berat**,** saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.781.018.417,00 merupakan nilai perolehan aset tetap yang tidak digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah karena hilang, tidak ditemukan atau rusak berat. Jika dibandingkan dengan saldo awal terdapat mutasi berkurang yang berasal dari penghapusan aset lain-lain sebesar Rp3.255.954.470,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Penghapusan aset lain-lain yang dijual pada TA.2023 berupa kendaraan bermotor sejumlah Rp2.768.468.120,00 sesuai

SK Sekretaris Daerah nomor 028/430.b/BKA 5.2 Tanggal 15 Mei 2023 atas 30 unit kendaraan bermotor sebesar Rp1.053.097.700,00 dan SK Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/1355/BKA2023 Tanggal 29 Desember 2023 24 unit sebesar Rp1.715.370.420,00;

- Penghapusan atas aset lain-lain berupa Gedung dan Bangunan Lopo kondisi rusak berat pada Dinas Pariwisata yang dibongkar sehubungan dengan dilokasi yang sama dilakukan pembangunan gedung baru sebesar Rp436,566,000.00 sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah nomor 000.2.3.2/855.a/BKA2023 Tanggal 25 Agustus 2023;
- Koreksi saldo awal atas penghapusan atas aset lain-lain berupa peralatan dan mesin yang telah dimusnahkan pada TA.2021 sebesar Rp50.920.350,00 sesuai surat keputusan sekretaris daerah nomor 028/166.b/BKA.5.2 tanggal 25 Februari 2021 sejumlah 14 unit peralatan dan mesin sebesar Rp50.920.350,00.

6) Aset lain-lain berupa sisa kas dibendahara pengeluaran yang belum disahkan sebesar Rp154.648.189,00, merupakan sisa kas pada bendahara pengeluaran TA.2004 berupa bukti SPJ yang belum disahkan pada perangkat daerah dinas PPO sebesar Rp145.783.858,00 dan sisa kas TA.2005 dan TA.2006 pada Bendahara *Eks* Dinas Pertambangan dan Energi karena perbedaan pencatatan penutupan kas oleh inspektorat dan pencatatan pada Bagian Keuangan sebesar Rp8.864.331,00;
7) Aset lain-lain dalam proses hibah sebesar Rp14.353.504.513,00 terdiri dari:
   a) Aset lain-lain berupa Aset Tetap yang digunakan oleh sekolah swasta dan dalam proses hibah sebesar Rp9.068.794.446,00 dengan rincian :

(1)	Peralatan dan mesin	Rp310.090.095,00
(2)	Gedung dan Bangunan	Rp8.452.327.691,00
(3)	Aset tetap lainnya	Rp306.376.660,00

b) Aset lain-lain berupa aset tetap yang digunakan oleh pemerintah Provinsi dan dalam proses hibah sebesar Rp4.936.010.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Peralatan dan mesin Rp549.929.000,00
- Gedung dan Bangunan Rp4.201.273.067,00
- Jalan Irigasi dan Jaringan Rp184.808.000,00
- **Jumlah** **Rp4.936.010.067,00**

c) Aset lain-lain berupa aset tetap dalam proses hibah kepada BUMD PDAM Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2021 senilai Rp348.700.000,00 berupa satu unit pompa untuk Mata Air Oemau dan Mata Air Tilonasi masing-masing senilai Rp174.350.000,00.

8) Aset lain-lain berupa Nilai belanja rehabilitasi atas aset tetap jalan milik pemerintah Pusat sebesar Rp2.395.841.108,05;
9) Aset lain-lain berupa Kas pada bendahara pengeluaran merupakan kekurangan kas pada Dinas Kesehatan senilai Rp675.000.000,00;
10) Aset lain-lain dalam proses hibah pada Sekolah-Sekolah Swasta sebesar Rp5.979.792.575,00.;
11) Aset Lain-lain berupa Pengakuan Pendapatan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum dicairkan TA 2023 sebesar Rp422.694.000,00.
12) Aset lain-lain lainnya sebesar Rp1.279.149.945,05 merupakan Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT berupa:
    a. Temuan Kekurangan fisik 9 paket pekerjaan bangunan dan gedung TA.2023 sebesar Rp273.987.478,37;
    b. Temuan Kekurangan fisik 5 paket pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan TA.2023 sebesar Rp321.591.545,53;
    c. Kelebihan Pembayaran Ongkos Kirim pada Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehata pada Dinas

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp264.781.098,15;

d. Sisa kas di bendahara pengeluaran dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa sisa kas belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp418.789.823,00.

	31-12–2023	31-12–2022
5) Akumulasi Penyusutan	**Rp(11.781.062.913,21)**	**Rp(14.067.678.144,08)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp(11.781.062.913,21). Mutasi nilai akumulasi penyusutan TA.2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.78
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan/Rusak berat	376.931.215,00	0,00	0,00	17.000.000,00	359.931.215,00
2	Aset Tetap Lainnya dalam proses Hibah	10.912.227.718,63	(6.291.427.871,43)	332.052.415,16	0,00	4.952.852.262,36
3	Nilai rehab aset tetap pemerintah pusat	499.133.564,18	239.584.110,80	239.584.110,81	0,00	978.301.785,79
4	Aset lain-lain dalam proses hibah pada Sekolah-Sekolah Swasta	2.279.385.646,27	2.710.173.580,23	500.418.423,56	0,00	5.489.977.650,06
	Jumlah	**14.067.678.144,08**	**(3.341.670.180,40)**	**1.072.054.949,53**	**17.000.000,00**	**11.781.062.913,21**

Terhadap nilai akumulasi penyususstan TA.2022 sebesar Rp14.067.678.144,08 terdapat perbedaaan sebesar Rp3.341.670.180,40 yang disebabkan karena terjadi perbedaan perhitungan saldo awal peyusutan TA. 2022 yang belum disajikan dalam LKPD TA.2022 sehingga dilakukan koreksi saldo awal dalam penyajian nilai akumulasi penysutan aset lainya TA.2023 menjadi sebesar Rp10.726.007.963,68.

Mutasi bertambah sebesar Rp1.072.054.949,53 berasal dari perhitungan beban akumulasi penyusutan tahun 2023, mutasi berkurang sebesar Rp17.000.000,00 berasal dari pengapusan atas akumulasi penyusutan aset lain-lain yang telah dijual.

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban	31-12–2023	31-12–2022
Jangka Pendek	**Rp2.742.106.939,70**	**Rp10.078.188.892,33**

Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp2.742.106.939,70 merupakan kewajiban lancar yang diselesaikan dalam periode 1 tahun kedepan, terdiri atas:

a)	Utang PFK	Rp48.054.149,43
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp107.066.666,67
c)	Utang Belanja	Rp186.986.123,60
d)	Utang Jangka Pendek lainnya	Rp2.400.000.000,00
	Jumlah (a + b + c + d)	**Rp2.742.106.939,70**

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31-12–2023	31-12–2022
	Rp48.054.149,43	**Rp7.482.971.822,00**

Jumlah Utang PFK TA.2023 sebesar Rp48.054.149,43 merupakan pengakuan atas utang PFK ke kas negara yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran, berupa PPN, PPh namun sampai dengan per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79
Utang PFK Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan BUD

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.458.060,43	13.897.062,00
2	Badan Keuangan dan Aset	9.399.428,00	3.880.720,00
3	Bagian Administrasi Pemerintahan dann Kesra	0,00	75.000,00
4	Kecamatan Rote Barat Laut	0,00	119.040,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	7.465.000.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
5	Bagian Perekonomian, Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	2.530.140,00	0,00
6	Bagian Perpustakaan Dan Kearsipan	67.500,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	25.599.021,00	0,00
Total Utang PFK Perangkat Daerah		**48.054.149,43**	**7.482.971.822,00**

Terhadap saldo utang PFK yang berada di kas bendahara pengeluaran seluruhnya telah disetorkan ke kas Daerah Tahun 2024.

2) Utang Bunga	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak tedapat Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

3) Bagian Lancar Utang	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
Jangka Panjang	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

4) Pendapatan	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
Diterima Dimuka	**Rp107.066.666,67**	**Rp148.433.333,33**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.066.666,67 merupakan pengakuan atas penerimaan yang sudah masuk ke kas daerah, namun jasa belum diakui sebagai pendapatan karena beban periode akuntansi berupa estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao terkait dengan sewa gedung pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Pendapatan diterima dimuka

No	Pihak III	Pendapatan Hak s/d 2023 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka(Rp)
1	PT. BPD NTT	24.000.000,00	0,00
2	PT. BPD NTT	15.000.000,00	25.000.000,00
3	Prof. Dr.Adrianus Mooy (Kuasa Pengurusyayasan Pendidikan Pelita Harapan)	20.000.000,00	30.000.000,00
4	Susanti Mansula	916.666,67	0,00
5	Sonny Ardy Solokana	1.166.666,67	0,00
6	Muhamad Arman Tugu	1.100.000,00	0,00
7	PT. BPD NTT	4.000.000,00	2.000.000,00
8	PT. BPD NTT	2.000.000,00	0,00
9	Dominggus Edon	1.000.000,00	0,00
10	Tajudin	1.833.333,33	0,00
11	PT. Fajar Indah Pustaka	20.416.666,67	0,00
12	Pt. Fajar Indah Pustaka	2.916.666,67	32.083.333,33
13	PT. BPD NTT	500.000,00	2.500.000,00
14	PT. BPD NTT	1.333.333,33	6.666.666,67
15	Tajudin	166.666,67	1.833.333,33
16	Junini Margaretha Edon	666.666,67	333.333,33
17	Sonny Ardy Solokana	833.333,33	1.166.666,67
18	Fransina E. Mone	666.666,67	333.333,33
19	Yerry Ferison Sony Pah	666.666,67	333.333,33
20	Endang Sarlota Mehenuta	166.666,67	333.333,33
21	Nelci Aletha Tulle	800.000,00	400.000,00
22	Muhamad Arman Tugu	833.333,33	1.666.666,67
23	Ariel Johanis Nalle	41.666,67	458.333,34
24	Marthen Aris Anton Anin	41.666,67	458.333,34
25	Yupita Yuliana	250.000,00	750.000,00
26	Melkianus Bessie	250.000,00	750.000,00
	Jumlah	**101.566.666,67**	**107.066.666,67**

5) Utang Belanja	**31 - 12–2023**	**31 - 12–2022**
	Rp186.986.123,60	**Rp46.783.737,00**

Jumlah utang belanja TA.2023 sebesar Rp186.986.123,60 terdiri dari :

1. Utang belanja pegawai sebesar Rp44.541.089,00 berupa kekurangan gaji pokok PNS yang belum di realisasikan pada

TA.2023 sehubungan dengan kenaikan pangkat PNS dan harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

Tabel 5.81
Rincian Utang Belanja Pegawai

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	10.744.350,00
2	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum)	4.996.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana	8.601.510,00
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	373.578,00
5	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	795.000,00
6	Dinas Peternakan	429.612,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.110.683,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	750.800,00
9	Kecamatan Rote Barat Daya	3.538.529,00
10	Kecamatan Lobalain	1.307.343,00
11	Kecamatan Pantai Baru	4.683.684,00
12	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.210.000,00
	Jumlah	**44.541.089,00**

2. Utang belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.991.000,00 merupakan hak pegawai yang melaksanakan tugas namun belum direalisasikan karena pelaksanaan tugas melampui tahun anggaran dan baru dibebankan pada anggaran tahun 2024.
3. Utang Belanja kepada pihak ketiga merupakan hak pihak ketiga sesuai Presentase proges fisik Rp136.454.034,60 teridiri dari:
    a. Utang kepada CV. Teguh Karya atas pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SDN Sonimanu, Presentase Kemajuan Fisik yang belum dibayarkan dari nilai kontrak per 31 Desember 2023 sebesar 0,51% dengan nilai Rp445.228,58
    b. Utang kepada CV. Yevalmax Kalvari atas pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SDI Tuabuna, Presentase Kemajuan Fisik yang belum dibayarkan dari nilai kontrak per 31 Desember 2023 sebesar 2,37% dengan nilai Rp23.193.415,92
    c. Utang kepada CV. Uma Purung atas pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SDN Oelua, Presentase Kemajuan Fisik yang belum dibayarkan dari nilai

kontrak per 31 Desember 2023 sebesar 10,39% dengan nilai Rp67.458.010,10

d. Utang kepada CV. Guwen atas pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SDN Nuse, Presentase Kemajuan Fisik yang belum dibayarkan dari nilai kontrak per 31 Desember 2023 sebesar 6,53% dengan Rp45.357.380,00

6) Utang Jangka Pendek lainnya	31 - 12–2023	31 - 12–2022
	Rp2.400.000.000,00	**Rp2.400.000.000,00**

Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.400.000.000,00 merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

Kewajiban sesuai putusan pengadilan sebesar Rp2.400.000.000,00 merupakan kewajiban kepada pemilik tanah sesuai putusan pengadilan Rote Ndao nomor 46/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 21 Februari Tahun 2022 yang mengabulkan gugatan pemilik tanah dan menghukum Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk segera membayar ganti rugi tanah milik penggugat untuk kepentingan pembangunan, sarana pelayanan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp2.400.000.000,00.

Selain Utang Belanja sebagaimana tersebut diatas terdapat kewajiban daerah kepada Silvester Wanggur sebagai hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* dari PTUN Kupang Nomor 20/G/2013/PTUN-KPG yang menyatakan bahwa Pemkab Rote Ndao harus membayarkan hak gaji kepada PNS a.n. Silvester Wanggur sejak Oktober 2004 sampai dengan Januari 2009 dengan besaran nilai yang masih harus dihitung kembali.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.767.671.399.962,18. Penjelasan ekuitas dapat dilihat pada Laporan perubahan ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional selama TA.2023 yang disandingkan dengan periode TA.2022 sebagai berikut :

Tabel 5.82
Laporan Operasional

No	Laporan Operasional (LO)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan – LO	789.831.645.492,59	805.454.532.704,38
2	Beban Daerah	679.929.479.776,34	782.524.941.124,54
3	Surplus Kegiatan Non Operasional	(23.500.000,00)	(736.364.577,00)
4	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
5	Surplus/Defisit – LO (1-2+3+4)	109.878.665.716,25	22.193.227.002,84

5.4.1 Pendapatan – LO

	2023	2022
Pendapatan – LO	**Rp789.831.645.492,59**	**Rp805.454.532.704,38**

Pendapatan - LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO Kabupaten Rote Ndao adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp789.831.645.492,59 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83
Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	35.835.004.870,59	24.410.308.804,43
2	Pendapatan Transfer – LO	744.337.419.966,00	748.976.830.383,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	9.659.220.656,00	32.067.393.516,95
	Jumlah	**789.831.645.492,59**	**805.454.532.704,38**

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

	2023	2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	**Rp35.835.004.870,59**	**Rp24.410.308.804,43**

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebesar Rp35.835.004.870,59 jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah – LO Kabupaten Rote Ndao TA.2022 sebesar Rp24.410.308.804,43 maka mengalami kenaikan sebesar Rp11.424.696.066,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84
Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	16.449.285.460,70	11.391.991.656,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	9.539.426.541,66	5.482.346.141,67
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.132.456.526,00	3.920.741.531,00
4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	2.713.836.342,23	3.615.229.475,76
Jumlah		**35.835.004.870,59**	**24.410.308.804,43**

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

	2023	2022
Pendapatan Pajak – LO	**Rp16.449.285.460,70**	**Rp11.391.991.656,00**

Pendapatan Pajak Daerah – LO TA.2023 sebesar Rp16.449.285.460,70 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp11.391.991.656,00 terdapat peningkatan sebesar Rp5.057.293.804,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85
Pendapatan Pajak Daerah - LO Per 31 Desember 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih
1	Pajak Hotel	2.404.709.308,00	1.624.345.201,00	780.364.107,00
2	Pajak Restoran	2.171.621.643,70	1.563.487.745,00	608.133.898,70
3	Pajak Hiburan	172.223.270,00	14.654.000,00	157.569.270,00
4	Pajak Rekalame	70.365.080,00	115.991.350,00	(45.626.270,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	3.241.699.696,00	2.625.250.376,00	616.449.320,00
6	Pajak Parkir	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
7	Pajak Air Tanah	2.815.000,00	2.985.900,00	-170.900,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.022.960.468,00	786.335.262,00	2.236.625.206,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.483.179.737,00	2.385.986.084,00	97.193.653,00
10	BPHTB	2.874.546.258,00	2.272.955.738,00	601.590.520,00
	Jumlah	**16.449.285.460,70**	**11.391.991.656,00**	**5.057.293.804,70**

Klasifikasi pendapatan pajak daerah – LO berdasarkan perolehan sebagai berikut:

➢ Pendapatan yang diakui sebelum penerimaan kas/hak	Rp657.470.612,00
➢ Pendapatan yang diakui bersamaan penerimaan kas	Rp 15.791.814.848,70
Jumlah	Rp16.449.285.460,70

a. Pendapatan - LO yang diakui sebelum penerimaan kas berdasarkan penetapan/*official assessment* sesuai surat ketetapan pajak daerah/perangkat daerah terbit TA.2023 Rp 657.470.612,00 terdiri dari:

Pajak Hotel	Rp3.245.551,00
Pajak Restoran	Rp15.559.314,00
Pajak Reklame	Rp2.755.000,00
Pajak Penerangan Jalan	Rp287.135.717,00
Pajak Mineral Bukan Logam	Rp63.397.500,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp285.377.530,00
Jumlah	**Rp657.470.612,00**

Pendapatan-LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas Rp15.791.814.848,70 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.86
Pendapatan Pajak - LO yang Diakui Bersamaan Penerimaan Kas

No	Pendapatan Pajak Daerah – LO	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	2.401.463.757,00
2	Pajak Restoran	2.156.062.329,70
3	Pajak Hiburan	172.223.270,00
4	Pajak Rekalame	67.610.080,00
5	Pajak Penerangan Jalan	2.954.563.979,00
6	Pajak Parkir	5.165.000,00
7	Pajak Air Tanah	2.815.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.959.562.968,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.197.802.207,00
10	BPHTB	2.874.546.258,00
	Jumlah	**15.791.814.848,70**

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan	2023	2022
Retribusi – LO	**Rp9.539.426.541,66**	**Rp5.482.346.141,67**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA.2023 sebesar Rp9.539.426.541,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Pendapatan Retribusi – LO

No	Uraian	31-Desember-2023	31-Desember-2022
I	**Retribusi Jasa Umum-LO**	**8.676.300.699,99**	**4.877.024.300,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan– Puskesmas – LO	594.552.000,00	97.956.500,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah – LO	7.439.857.500,00	3.964.546.900,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis – LO	0,00	163.876.500,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	58.100.000,00	93.800.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	498.932.000,00	481.314.000,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	4.000.000,00	3.052.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	80.859.200,00	72.478.400,00
II	**Retribusi Jasa Usaha – LO**	**608.419.166,66**	**443.812.416,67**
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	278.416.666,66	290.985.416,67
9	Retribusi Terminal	0,00	200.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.500.000,00	8.800.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	207.436.500,00	26.065.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	100.585.000,00	106.515.000,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	11.161.000,00	10.197.000,00
14	Penjualan Hasil Produksi Usaha – LRA-LO	9.320.000,00	1.050.000,00
III	**Retribusi Perizinan Tertentu – LO**	**254.706.675,00**	**161.509.425,00**
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	245.156.675,00	152.109.425,00
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	9.550.000,00	8.900.000,00
17	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	500.000,00
	Jumlah (I+II+III)	**9.539.426.541,66**	**5.482.346.141,67**

Pendapatan retribusi – LO berdasarkan pengakuan perolehan sebagai berikut:

➢ Pendapatan yang diakui bersamaan penerimaan kas	Rp6.942.541.675,00
➢ Pendapatan yang diakui berdasarkan Penyesuain	Rp2.596.884.866,66
Jumlah	**Rp 9.539.426.541,66**

b) Pendapatan retribusi – LO yang diakui bersaman dengan penerimaan kas adalah pendapatan pada kas umum daerah yang menambah ekuitas.

1) Pendapatan retribusi – LRA	Rp7.612.877.375,00
2) Pendapatan retribusi–LRA yang tidak menambah ekuitas	Rp670.335.700,00
Jumlah Pendapatan Retribusi - LO	**Rp6.942.541.675,00**

Pendapatan retribusi – LRA yang tidak menambah ekuitas adalah sebesar Rp670.335.700,00 terdiri dari :

1. Penerimaan atas hak pemerintah tahun sebelumnya yang berasal dari piutang Retribusi berupa Klaim BPJS RSUD Ba'a dengan status Layak TA. 2022 yang di setor TA. 2023 sebesar Rp580.147.700,00;
2. Penerimaan atas hak pemerintah tahun sebelumnya yang berasal dari retribusi Los sebesar Rp648.000,00;
3. Penerimaan atas hak pemerintah tahun sebelumnya yang berasal dari Retribusi Kios sebesar Rp29.340.000,00;
4. Seluruh penerimaan atas hak pemerintah yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp60.200.000,00 sebelum dilakukan alokasi sesuai masa Sewa.

c) Pendapatan retribusi – LO yang diakui berdasarkan penyesuaian sebesar Rp2.596.884.866,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi berupa Klaim BPJS RSUD Ba'a dengan status Layak TA. 2022 dan 2023 yang belum diterima sebesar Rp2.429.217.200,00;

2. Retribusi berupa Klaim BPJS empat Puskesmas dengan status Layak TA. 2022 dan 2023 yang belum diterima sebesar Rp26.751.000,00;
3. Nilai Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar – Los yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp9.882.000,00;
4. Nilai Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar – Los yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp27.468.000,00;
5. Alokasi pendapatan diterima dimuka yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan menjadi hak pemerintah tahun 2023 sebesar Rp103.566.666,66;

3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan –LO	**2023**	**2022**
	Rp7.132.456.526,00	**Rp3.920.741.531,00**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO merupakan hak pemerintah daerah berupa bagian laba atas penyertaan modal pada PT.BPD NTT TA.2023 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan persentase kepemilikan saham sebesar Rp7.132.456.526,00 pengakuan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO bersamaan dengan saat kas diterima.

4) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-Lain PAD Yang Sah– LO	**2023**	**2022**
	Rp2.713.836.342,23	**Rp3.615.229.475,76**

Lain-lain PAD yang Sah – LO TA.2023 sebesar Rp2.713.836.342,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Lain –Lain PAD yang Sah – LO

No	Uraian	31-Desember-2023	31-Desember-2022
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	1.465.164.381,00	20.000.000,00
2	Hasil Bangun Guna Serah	99.721.125,00	99.721.125,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	760.753.577,42	1.422.875.565,37
4	Tuntutan ganti Kerugian Daerah /TGR	66.230.747,11	1.216.354.395,00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	154.492.233,84	399.080.167,63
6	Pendapatan Denda Pajak	43.948.494,00	308.540.577,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	16.181.896,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian	45.815.705,00	132.216.192,00
9	DBH Remunerasi	0,00	259.557,76
10	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	77.710.078,86	0,00
Jumlah		**2.713.836.342,23**	**3.615.229.475,76**

Klasifikasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO berdasarkan pengakuan perolehan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diakui bersamaan penerimaan kas Rp2.536.405.138,37
2. Pendapatan yang diakui berdasarkan penyesuaian Rp177.431.203,86

Jumlah (1 + 2) Rp2.713.836.342,23

1) Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas adalah pendapatan pada kas umum daerah yang menambah ekuitas sebagai berikut:
   a. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LRA Rp3.206.052.086,89
   b. Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah – LRA yang tidak menambah ekuitas Rp669.646.948,52

   Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LO (a - b) Rp2.536.405.138,37

2) Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO yang diakui berdasarkan penyesuaian sebesar Rp177.431.203,86 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Hasil Bangun Guna Serah sebesar Rp99.721.125,00.
   b. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO sebesar Rp77.710.078,86.

c. Pendapatan Transfer – LO

	2023	2022
Pendapatan Transfer – LO	**Rp744.337.419.966,00**	**Rp748.976.830.383,00**

Pendapatan transfer – LO Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebesar Rp744.337.419.966,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp748.976.830.383,00, maka TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.639.410.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.89
Pendapatan Transfer – LO

No	Pendapatan Transfer – LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	707.709.580.198,00	624.689.184.091,00
	1) Bagi Hasil Pajak	5.992.526.716,00	11.640.276.132,00
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	438.961.153.000,00	419.857.979.000,00
	3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	262.755.900.482,00	193.190.928.959,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	16.751.396.000,00	4.837.632.000,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	16.751.396.000,00	4.837.632.000,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	16.751.396.000,00	4.837.632.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	19.876.443.768,00	18.706.814.292,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	19.876.443.768,00	18.706.814.292,00
4	Bantuan Keuangan	0,00	100.743.200.000,00
	1) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	883.200.000,00
	2) Dana Siap Pakai Stimulan Dana Seroja	0,00	99.860.000.000,00
	Jumlah	**744.337.419.966,00**	**748.976.830.383,00**

Pendapatan Transfer - LO diakui bersamaan pada saat diterima di kas umum daerah atau tidak didasarkan pada penetapan alokasi oleh Pemerintah Pusat.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp854.349.477.695,00 maka terdapat selisih sebesar Rp110.012.057.729,00. Selisih tersebut berupa pendapatan LO yang bersamaan penerimaan kas yang menambah ekuitas sebesar Rp5.639.862.159,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang belum dicairkan TA.2023 sebesar Rp422.711.235,00;
b. Penyesuaian atas piutang pendapatan TA. 2023 sebesar Rp5.217.150.924,00.

Pendapatan transfer yang diakui berdasarkan penyesuaian yang tidak menambah ekuitas sebesar Rp115.651.919.888,00

a. Pendapatan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum dicairkan TA 2022 sebesar Rp1.070.207.051,00;
b. Dana Desa yang tidak merupakan kegiatan operasional pemerintah Daerah Rp107.810.890.000,00;
c. Pendapatn Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp6.770.822.837,00

d. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Lain-lain	2023	2022
Pendapatan yang Sah – LO	**Rp9.659.220.656,00**	**Rp32.067.393.516,95**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebesar Rp9.659.220.656,00 jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA.2022 sebesar Rp32.067.393.516,95 maka TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.408.172.860,95. Penurunan signifikan tersebut karena perbedaan pengakuan pendapatan dana BOS yang pada

tahun sebelumnya diakui sebagai sub akun Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO. Pada TA 2023 Pendapatan dan BOS diklasifikasikan sebagai Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp7.186.330.104,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.472.890.552,00 yang merupakan penerimaan hibah dari kementerian kesehatan berdasarkan ND Tortama Nomor: 176/ND/XIX/02/2024 tentang penyampaian data hibah/dropping alat kesehatan kementerian Kesehatan.

	2023	2022
a) Sumbangan Pihak ketiga/sejenisnya – LO	**Rp28.605.877,00**	**Rp20.628.091,95**

Sumbangan Pihak ketiga/sejenisnya – LO TA.2023 sebesar Rp28.605.877,00 berupa pengakuan pendapatan atas penyetoran pihak ketiga/sejenisnya ke kas daerah yang tidak dapat terindentifikasi sumber dan jenis pendapatan sebesar Rp25.935.371,00 dan kelebihan penyetoran sisa TU Dinas Kesehatan sebesar Rp2.670.506,00.

	2023	2022
b) Pendapatan Hibah – LO	**Rp2.472.890.552,00**	**Rp26.975.575.692,00**

Pendapatan Hibah – LO TA.2023 sebesar Rp2.472.890.552,00 merupakan penerimaan hibah dari kementerian kesehatan berdasarkan ND Tortama Nomor: 176/ND/XIX/02/2024 tentang penyampaian data hibah/dropping alat kesehatan kementerian kesehatan kepada Pemerintah daerah Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Pendapatan Hibah – LO

No	Jenis Barang	No BAST	Tanggal BAST	Nilai
1	USG TAHAP 1	BJ.01.04/PPK4.1/204/2023	21-Aug-23	1.566.225.188,00
2	PULSE OXYMETER	BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023	19-Dec-23	51.000.000,00
3	ANTOPOMETRI THP2	BJ.01.04/PPK4.1/1037/2023	21-Dec-23	598.390.267,00
4	Buku KIA Kecil	KN.01.05/BIII.1/3051/2023	15-Dec-23	2.113.300,00
5	Taburia	BJ.01.04/PPK4.1/736/2023	16-Nov-23	65.520.000,00
6	SHK BHMP	BJ.01.04/PPK4.2/686/2023	19-Dec-23	8.640.000,00
7	PMT Bumil	BJ.01.04/PPK4.2/111/2023	31-May-23	14.676.480,00
8	PMT Balita	BJ.01.04/PPK4.2/110/2023	31-May-23	67.580.291,00
9	04.04 Vaccine Refrigerator Vesforst 404 VLS 404 AC JICA 2023	2023-JAN/09Q SJ	2023-01-09	97.989.140,00
10	Paket OAT ANAK	-	-	755.886,00
Jumlah				**2.472.890.552,00**

	2023	2022
c) Pendapatan Lainnya - LO	**Rp7.157.724.227,00**	**Rp5.071.189.733,00**

Pendapatan Lainnya – LO sebesar Rp7.157.724.227,00 merupakan pengesahan pendapatan Dana Kapitasi JKN TA. 2023 sebesar Rp7.157.724.227,00 dan TA. 2022 sebesar Rp5.071.189.733,00.

5.4.2 Beban Daerah

	2023	2022
Beban Daerah – LO	**Rp679.929.479.776,34**	**Rp782.524.941.124,54**

Jumlah beban daerah-LO TA.2023 sebesar Rp679.929.479.776,34 terdiri dari beban operasi sebesar Rp633.119.213.982,33 dan beban transfer sebesar Rp46.810.265.794,00. Jika dibandingkan dengan beban daerah TA.2022 Rp782.524.941.124,54 mengalami penurunan sebesar Rp102.595.461.348,20.

I. Beban Operasi

Beban Operasi	2023	2022
– LO	**Rp633.119.213.982,33**	**Rp736.336.548.494,54**

Jumlah beban operasi TA.2023 sebesar Rp633.119.213.982,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91
Beban Operasi

No	Beban Operasi	31-Desember-23 (Rp)	31-Desember-22 (Rp)
1	Beban Pegawai	290.634.216.438,00	286.220.013.860,00
2	Beban Persediaan	96.170.646.798,77	55.330.894.329,60
3	Beban Jasa	65.831.520.167,73	74.729.762.389,00
4	Beban Pemeliharaan	1.676.524.645,00	4.930.750.606,00
5	Beban Perjalanan Dinas	33.268.477.002,00	41.527.753.723,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	412.560.000,00	-
7	Beban Hibah	22.946.739.628,00	73.384.396.334,86
8	Beban Bantuan Sosial	4.839.783.896,00	101.522.500.000,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	108.575.001.841,59	93.280.614.649,76
10	Beban Penyisihan Piutang	414.885.514,70	153.662.094,78
11	Beban Lain-lain	8.348.858.050,54	5.256.200.507,54
	Jumlah	**633.119.213.982,33**	**736.336.548.494,54**

Dari rincian beban operasi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai – LO	2023	2022
	Rp290.634.216.438,00	**Rp286.220.013.860,00**

Beban Pegawai-LO TA.2023 sebesar Rp290.634.216.438,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp286.220.013.860,00 maka TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.414.202.578,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92
Beban Pegawai

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desmber 2022
Beban Pegawai	**290.634.216.438,00**	**286.220.013.860,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	216.003.342.472,00	202.294.281.334,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.226.828.840,00	31.823.512.632,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.707.998.275,00	42.339.942.653,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.120.199.199,00	9.186.245.463,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.967.652,00	165.151.778,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00

Rincian beban pegawai per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 10

Beban pegawai-LO TA.2023 sebesar Rp290.634.216.438,00 merupakan beban yang diakui sesuai realisasi pegawai-LRA sebesar Rp290.635.690.990,00 dan Beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sebesar Rp42.715.242,00 dan realisasi belanja atas kewajiban TA.2023 yang telah diakui sebagai beban pegawai-LO tahun anggaran sebelumnya berupa pelunasan utang kekurangan gaji pokok kenaikan pangkat PNS sebesar Rp44.189.794,00.

Beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban sebesar Rp42.715.242,00 merupakan utang belanja kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS sebesar Rp41.947.146,00 dan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp768.096,00.

Beban yang diakui sebagai penyesuaian merupakan pelunasan utang belanja pegawai atas kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNS TA.2023 sebesar Rp44.189.794,00 yang telah diakui sebagai beban pada tahun anggaran sebelumnya berupa utang gaji pokok dan tunjangan TA.2022.

2) Beban Persediaan

	2023	2022
Beban Persediaan – LO	**Rp96.170.646.798,77**	**Rp55.330.894.329,60**

Beban persediaan TA.2023 sebesar Rp96.170.646.798,77. Jika dibandingkan TA.2022 sebesar Rp55.330.894.329,60 maka mengalami peningkatan sebesar Rp 40.839.752.469,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Beban Persediaan

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Beban Persediaan :	**96.170.646.798,77**	**55.330.894.329,60**
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	175.397.600,00	339.093.550,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	119.021.000,00	80.445.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.308.894.235,00	4.311.421.815,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	4.494.199.200,00	4.635.999.600,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.273.775.000,00	350.861.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	52.500.000,00	1.169.400.000,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	89.509.000,00	287.685.415,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.544.652.760,00	443.423.650,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	985.810.678,00	425.189.440,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	41.445.000,00	68.625.200,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.650.000,00	15.785.450,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.460.047.416,00	2.770.563.081,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	35.779.500,00	43.591.300,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.409.287.127,00	3.328.419.635,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.954.000,00	185.740.900,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	15.347.700,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.427.000,00	170.426.884,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.860.000,00	380.306.026,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	224.641.035,00	317.538.110,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	112.280.000,00	1.200.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	54.060.000,00	49.944.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	422.817.500,00	190.973.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.854.493.782,00	400.665.170,00
24	Beban Obat-Obatan	2.953.108.648,47	2.026.402.413,00
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.324.888.089,30	3.819.237.399,22
26	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.563.198.240,00	0,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	0,00	9.768.000,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	65.475.000,00	182.359.000,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	121.899.930,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.889.028.072,00	5.472.518.452,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.419.449.200,00	1.376.069.487,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	26.700.000,00	366.300.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.642.509.158,00	903.772.475,33
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	25.650.000,00	0,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	422.251.640,00	970.567.064,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	108.780.000,00
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	12.000.000,00	235.902.750,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.183.770.000,00	0,00
39	Beban Pakaian Siaga	0,00	3.050.000,00
40	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	145.315.885,00
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	37.750.000,00
42	Beban Pakaian Olahraga	31.100.000,00	38.121.000,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	199.460.000,00	114.485.400,00
44	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.047.000,00	480.000,00
45	Beban Barang dan Jasa BOS	22.390.979.847,00	19.415.469.148,05
46	Beban Alat Kesehatan	158.530.071,00	0,00

Rincian beban persediaan per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 11

Beban persediaan–LO TA.2023 sebesar Rp96.170.646.798,77 merupakan beban yang diakui sesuai belanja persediaan-LRA sebesar Rp74.192.311.107,00, maka terdapat selisih sebesar Rp21.978.335.691,77 yang

merupakan beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/ penurunan manfaat ekonomi sebesar Rp38.995.473.242,64 dan belanja yang tidak berpengaruh terhadap konsumsi aset/penurunan manfaat ekonomi sebesar Rp16.942.533.383,87.

Beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi belanja persediaan sebesar Rp38.920.869.075,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan bangunan yang tidak diklasifikasi menghasilkan aset tetap sebesar Rp11.085.000,00;
2. Persediaan Akhir Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp4.800.000,00;
3. Reklasifikasi Belanja Tidak terduga sesuai Jenis Beban sebesar Rp81.135.000,00;
4. Persediaan Akhir Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp234.667.000,00;
5. Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp400.272.500,00;
6. Persediaan Akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp429.351.350,00.
7. Koreksi atas Belanja Modal Aset Tetap lainnya yang tidak menghasilkan Aset (Aritmatik) sebesar Rp10.250.000,00.
8. Koreksi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak Diklasifikasikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp538.500,00.
9. Koreksi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak Diklasifikasikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp5.550.000,00.
10. Persediaan Akhir Alat Kebersihan, Alat Listrik, Bahan Material sebesar Rp93.365.000,00.

11. Persediaan Akhir Obat-obatan, Bahan Kimia Dan Bahan Habis Pakai/Alat Kesehatan sebesar Rp14.959.049.807,64.
12. Persediaan Akhir Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat sebesar Rp60.510.000,00.
13. Reklasifikasi Belanja Tidak terduga sesuai Jenis Beban sebesar Rp42.035.000,00.
14. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Persediaan sebesar Rp22.429.054.724,00.
15. Penyesuaian Belanja Barang Jasa BOS sebesar Rp675.123,00.
16. Pengakuan beban atas penerimaan hibah alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp158.530.071,00.

Belanja yang tidak berpengaruh terhadap konsumsi aset/penurunan manfaat ekonomi atau potensi belanja persediaan sebesar Rp16.942.533.383,87 dengan rincian sebagai berikut:

1. Persediaan akhir Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp10.803.320,00;
2. Persediaan akhir Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp127.901.960,00;
3. Persediaan akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp284.617.500,00;
4. Persediaan akhir Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp443.265.650,00;
5. Persediaan akhir Alat Kebersihan, Alat Listrik, Bahan Material sebesar Rp54.579.550,00;
6. Penyesuaian Beban Alat Tulis Kantor pada Kantor Kecamatan Landuleko sebesar Rp324.500,00.
7. Persediaan akhir Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp15.643.050.903,87;
8. Persediaan akhir Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat sebesar Rp300.000.000,00;

9. Persediaan akhir Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp39.240.000,00;
10. Belanja barang dan jasa BOS yang menghasilkan aset tetap sebesar Rp38.750.000,00;

3) Beban Jasa

Beban Jasa–LO	2023	2022
	Rp66.244.080.167,73	**Rp74.729.762.389,00**

Beban jasa TA.2023 sebesar Rp66.244.080.167,73 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp74.729.762.389,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp 8.485.682.221,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94
Beban Jasa

No	Uraian	31-Desember-23 (Rp)	31-Desember-22 (Rp)
	Beban Jasa :	**66.244.080.167,73**	**74.729.762.389,00**
1	Belanja Jasa Kantor	56.348.874.985,73	60.115.482.237,00
2	Belanja Iuran jaminan/Asuransi	4.870.670.832,00	4.159.467.550,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	420.818.700,00	433.701.780,00
4	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	31.891.900,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	598.072.000,00	344.780.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.344.521.650,00	2.238.103.722,00
7	Belanja Jasa Konsultansi non konstruksi	28.390.000,00	606.320.450,00
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	825.000.000,00	685.000.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.386.672.000,00	6.115.014.750,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.500.000,00	0,00
11	Beban Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat	412.560.000,00	0,00

Rincian beban jasa per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 12

Beban Jasa–LO TA.2023 sebesar Rp66.244.080.167,73 merupakan beban yang diakui sesuai realisasi belanja jasa-LRA sebesar Rp65.823.020.167,73 terdapat selisih sebesar Rp421.060.000,00 yang merupakan reklasifikasi belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp412.560.000,00 dan beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban/terjadinya

konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi persediaan sebesar Rp8.500.000,00.

4) Beban Pemeliharaan

Beban	2023	2022
Pemeliharaan–LO	**Rp1.676.524.645,00**	**Rp4.930.750.606,00**

Beban Pemeliharaan TA.2023 sebesar Rp1.676.524.645,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp4.930.750.606,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp3.254.225.961,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.95
Beban Pemeliharaan

No	Uraian	31-Desember-23 (Rp)	31- Desember -22 (Rp)
	Beban Pemeliharaan :	**1.676.524.645,00**	**4.930.750.606,00**
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	23.750.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	476.269.437,00	1.582.427.406,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	703.005.408,00	2.499.046.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Iragasi dan Jaringan	497.249.800,00	825.527.200,00

Beban Pemeliharaan–LO TA.2023 sebesar Rp1.676.524.645,00. Jika dibandingkan dengan beban yang diakui sesuai belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp3.425.681.645,00 terdapat selisih sebesar Rp1.749.157.000,00 yang merupakan kapitalisasi belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan yang menghasilan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp749.361.000,00;
2. Belanja pemliharaan gedung dan bangunan yang menghasilan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp999.796.000,00.

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban	2023	2022
Perjalanan Dinas – LO	**Rp33.268.477.002,00**	**Rp41.527.753.723,00**

Beban Perjalanan Dinas-LO TA.2023 sebesar Rp33.268.477.002,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp41.527.753.723,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp8.259.276.721,00.

Beban Perjalanan Dinas–LO TA.2023 sebesar Rp33.268.477.002,00 merupakan beban yang diakui sesuai belanja perjalanan dinas-LRA sebesar Rp33.262.486.002,00 dan pengakuan atas beban utang belanja perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.991.000,00.

Rincian beban perjalanan dinas per perangkat daerah dapat dilihat pada lampiran 14

6) Beban Hibah

Beban	2023	2022
Hibah – LO	**Rp22.946.739.628,00**	**Rp73.384.396.334,86**

Beban hibah-LO TA.2023 sebesar Rp22.946.739.628,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp73.384.396.334,86 maka mengalami penurunan sebesar Rp50.437.656.706,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96
Beban Hibah

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.945.162.000,00	293.439.415,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.603.260.739,00	6.701.700.000,00
Beban Hibah Dana BOS	2.849.363.100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	548.953.789,00	548.953.789,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	3.330.205.000,00
Reklasiifikasi Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	42.618.339.201,00
Reklasifikasi Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	296.984.000,00
Beban hibah Aset lainnya	0,00	19.594.774.929,86
Jumlah	**22.946.739.628,00**	**73.384.396.334,86**

Beban Hibah–LO TA.2023 sebesar Rp22.946.739.628,00 merupakan beban yang diakui sesuai Belanja Hibah-LRA sebesar Rp22.759.580.425,00 beban yang diakui sehubungan timbulnya kewajiban/terjadinya konsumsi aset/terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi hibah sebesar Rp187.159.203,00 merupakan beban atas pengakuan hibah aset tetap tanah kepada Kementerian Perhubungan.

7) Beban Bantuan Sosial

Beban	2023	2022
Bantuan Sosial – LO	**Rp 4.839.783.896,00**	**Rp101.522.500.000,00**

Beban bantuan sosial - LO TA.2023 sebesar Rp4.839.783.896,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp101.522.500.000,00 maka TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp96.682.716.104,00.

Tabel 5.97
Beban Bantuan Sosial

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	5.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	350.000.000,00	834.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	99.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	600.000.000,00	478.000.000,00
Reklasifikasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	246.000.000,00
Dana Siap Pakai Stimulan Dana Seroja	0,00	99.860.000.000,00
Beban Beasiswa	3.853.783.896,00	0,00
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	36.000.000,00	0,00
Jumlah	**4.839.783.896,00**	**101.522.500.000,00**

Beban Bantuan Sosial–LO TA.2023 sebesar Rp4.839.783.896,00. Jika dibandingalan realsiasi Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp600.000.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.239.783.896,00 yang merupakan reklasifikasi belanja lainnya yang bersifat bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja beasiswa sebesar Rp3.853.783.896,00;
2. Belanja penanganan dampak sosial kemasyrakatan sebesar Rp36.000.000,00;
3. Belanja tidak terduga untuk penanganan bencana sebesar Rp350.000.000.00,00.

8) Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2023	2022
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	**Rp108.575.001.841,59**	**Rp93.280.614.649.,76**

Beban penyusutan dan amortisasi TA.2023 sebesar Rp108.575.001.841,59 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp93.280.614.649,76 maka terjadi peningkatan sebesar Rp15.294.387.191,83. Beban Penyusutan dan

amortisasi diakui pada saat terjadinya penurun nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu terdiri dari:

Tabel 5.98
Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Jenis Beban Penysutan dan Amortisasi	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	36.216.469.381,93	28.524.698.867,91
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	11.939.525.416,53	10.754.533.655,52
3	Beban Penyusutan Aset Tetap JIJ	59.299.776.093,60	53.962.782.460,33
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	15.176.000,00	6.599.666,00
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	32.000.000,00	32.000.000,00
6	Beban Penyusutan Aset lain-lain	1.072.054.949,53	0,00
	Jumlah	**108.575.001.841,59**	**93.280.614.649,76**

9) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan	2023	2022
Piutang – LO	**Rp414.885.514,70**	**Rp153.662.094,78**

Beban penyisihan piutang TA.2023 sebesar Rp414.885.514,70 dan TA. 2022 sebesar Rp 153.649.116,90 maka TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 261.223.419,92, maka rincian penyisihan piutang terdiri dari:

Tabel 5.99
Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban Penyisihan Piutang	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.169.875,00	0,00
2	Pajak Restoran	777.965,70	0,00
3	Pajak Reklame	1.528.250,00	771.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	403.337.924,00	119.468.831,90
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Alat	100.000,00	4.401.900,00
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	5.971.500,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	29.007.385,00
	Jumlah	**414.885.514,70**	**153.649.116,90**

10) Beban Lain-lain

	2023	2022
Beban Lain-lain	**Rp8.348.858.050,55**	**Rp5.256.200.507,54**

Beban Lain-lain TA.2023 sebesar Rp8.348.858.050,55 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp5.256.200.507,54 maka TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.092.657.543,01. Rincian beban lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.100
Beban Lain –Lain

No	Beban Lain-lain	12/31/2023 (Rp)	12/31/2022 (Rp)
1	Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin yang tercatat ekstrakompitable	581.204.000,00	22.244.000,00
2	Reklasifikasi belanja modal lainnya ke aset peralatan dan mesin tercatat ekstrakompitable	167.441.150,00	0,00
3	Beban atas penghapusan aset tetap peralatan dan mesin	0,00	80.648.798,17
4	Reklasifikasi belanja modal gedung dan bangunan yang tercatat ekstrakompitable	0,00	12.240.000,00
5	Beban penghapusan aset lain-lain- aset rusak berat	3.188.034.120,00	4.119.651.680,20
6	Beban penghapusan aset tetap gedung dan bangunan	3.194.420.421,55	354.240.239,17
7	Koreksi belanja modal aset tetap lainnya	0,00	667.175.790,00
8	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan bangunan ke Aset Tetap JIJ tercatat Ekstrakompitabel	129.241.000,00	0,00
9	Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tercatat Ekstrakompitable	1.079.318.364,00	0,00
10	Penurunan Nilai Investasi karena rugi tahun berjalan BUMD (PDAM)	9.198.995,00	
Jumlah		**8.348.858.050,55**	**5.256.200.507,54**

II. Beban Transfer

	2023	2022
Beban Transfer–LO	**Rp46.810.265.794,00**	**Rp46.188.392.630,00**

Jumlah beban transfer TA.2023 sebesar Rp46.810.265.794,00 jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp46.188.392.630,00, maka TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp621.873.164,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Beban Transfer

No	Beban Transfer	31-Desember-23 (Rp)	31- Desember -22 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil	1.789.251.994,00	1.429.878.630,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	45.021.013.800,00	44.758.514.000,00
	Jumlah	**46.810.265.794,00**	**46.188.392.630,00**

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional	2023	2022
	Rp (23.500.000,00)	**Rp(736.364.577,00)**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA.2023 sebesar Rp(23.500.000,00) merupakan kerugian yang timbul dari penghapusan Aset Tetap Lainnya berupa Ternak pada Dinas Peternakan karena mati. Sedangkan, Defisit Non Operasional senilai Rp(736.364.577,00) berasal dari rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao.

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	2023	2022
	Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat pendapatan maupun beban dari Pos Luar Biasa TA.2023 dan TA.2022.

5.4.5 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO	2023	2022
	Rp109,878,665,716.25	**Rp22.193.227.002,84**

Surplus/Defisit – LO TA.2023 sebesar Rp109,878,665,716.25 Jika dibandingkan dengan TA.2022 sebesar Rp22.193.227.002,84 maka TA.2023 mengalami peningkatan sebesar Rp87.685.438.713,41.

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode akuntansi yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

5.5.1 Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan per 31 Desember 2022.

	2023	2022
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**Rp893.956.229.056,59**	**Rp800.695.726.668,95**

Jumlah sebesar Rp893.956.229.056,59 merupakan jumlah arus kas masuk dari seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.102
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	15.934.199.650,70	11.165.927.823,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.612.877.375,00	5.486.843.025,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.132.456.526,00	3.920.741.531,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.740.887.705,89	3.615.969.918,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak	6.640.039.767,00	10.570.069.081,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	438.961.153.000,00	419.857.979.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	159.090.994.820,00	138.234.076.845,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	103.664.905.662,00	54.956.852.114,00
9	Pendapatan Hibah	28.605.877,00	20628091,95
10	Dana Penyesuaian	0,00	0,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.430.098.446,00	16.520.989.815,00
12	Pendapatan Lain-lain	0,00	26.975.575.692,00
13	Bantuan Keuangan	0,00	883.200.000,00
14	Penerimaan Dana Insentif Daerah	16.751.396.000,00	4.837.632.000,00
15	Penerimaan Dana Desa	107.810.890.000,00	98.578.052.000,00
16	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.157.724.227,00	5.071.189.733,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**893.956.229.056,59**	**800.695.726.668,95**

Terhadap Arus Kas masuk yang disajikan dalam Laporan Arus Kas dan Pendapatan sesuai Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan sebesar Rp1.465.164.381,00. Rincian arus kas masuk Laporan Arus kas dan Pendapatan Daerah sesuai Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.103
Penerimaan Laporan Arus Kas dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	LAK	LRA	SELISIH
1	Penerimaan Pajak Daerah	15.934.199.650,70	15.934.199.650,70	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.612.877.375,00	7.612.877.375,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.132.456.526,00	7.132.456.526,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	1.740.887.705,89	3.206.052.086,89	(1.465.164.381,00)
5	Dana Bagi Hasil Pajak	6.640.039.767,00	6.640.039.767,00	0,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	438.961.153.000,00	438.961.153.000,00	0,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	159.090.994.820,00	159.090.994.820,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	103.664.905.662,00	103.664.905.662,00	0,00
9	Penerimaan Hibah	28.605.877,00	28.605.877,00	0,00
10	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21.430.098.446,00	21.430.098.446,00	0,00
12	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00
13	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
14	Penerimaan Dana Insentif Daerah	16.751.396.000,00	16.751.396.000,00	0,00
15	Penrimaan Dana Desa	107.810.890.000,00	107.810.890.000,00	0,00
16	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.157.724.227,00	7.157.724.227,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**893.956.229.056,59**	**895.421.393.437,59**	**(1.465.164.381,00)**

2)	**Arus Kas**	**2023**	**2022**
	Keluar dari Aktivitas Operasi	**Rp672.947.113.469,73**	**Rp657.193.182.844,05**

Jumlah sebesar Rp672.947.113.469,73 merupakan jumlah arus kas keluar untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	290.635.690.990,00	286.229.161.198,00
2	Belanja Barang	203.443.748.164,73	216.805.591.727,05
3	Belanja Hibah	22.759.580.425,00	7.450.653.789,00
4	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	1.416.500.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.789.251.994,00	1.429.878.630,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	152.831.903.800,00	143.336.566.000,00
7	Belanja Tak Terduga	886.938.096,00	524.831.500,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**672.947.113.469,73**	**657.193.182.844,05**

Terhadap Arus Kas Keluar yang disajikan pada Laporan Arus kas dan Belanja Daerah sesuai laporan realisasi anggaran tidak terdapat perbedaan. Arus Kas Keluar yang disajikan pada Laporan Arus Kas dan Belanja Daerah sesuai laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.105
Perbedaan Pengeluaran Laporan Arus Kas dan Belanja Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Pegawai	290.635.690.990,00	290.635.690.990,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	203.443.748.164,73	203.443.748.164,73	0,00
3	Belanja Hibah	22.759.580.425,00	22.759.580.425,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.789.251.994,00	1.789.251.994,00	0,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	152.831.903.800,00	152.831.903.800,00	0,00
7	Belanja Tidak Terduga	886.938.096,00	886.938.096,00	0,00
Jumlah		**672.947.113.469,73**	**672.947.113.469,73**	**0,00**

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**2023**	**2022**
	Rp221.009.115.586,86	**Rp143.502.543.824,90**

Jumlah sebesar Rp221.009.115.586,86 merupakan selisih arus masuk kas sebesar Rp893.956.229.056,59 dan arus keluar kas sebesar Rp672.947.113.469,73 dari aktivitas operasi TA.2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari operasional pemerintah cukup

untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah Daerah pada TA. 2023.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas inventasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari :

	2023	2022
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**Rp1.465.164.381,00**	**Rp0,00**

Arus kas masuk dari aktivitas Investasi TA.2023 sebesar Rp1.465.164.381,00 berasal dari Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.000.000,00 dan Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp1.430.164.381,00.

	2023	2022
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	**Rp193.200.144.208,00**	**Rp166.736.433.484,00**

Arus Kas Keluar sebesar Rp193.200.144.208,00 merupakan jumlah arus kas keluar untuk membiayai seluruh aktivitas investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

NO	Urain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022(Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.662.841.889,00	31.035.410.792,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	41.754.600.518,00	28.309.558.041,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.801.545.523,00	95.939.001.903,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.481.156.278,00	952.462.748,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	Jumlah	**193.200.144.208,00**	**166.736.433.484,00**

Terhadap arus kas keluar aktivitas investasi dan belanja modal dan penyertaan modal yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat perbedaan. Arus kas keluar aktivitas investasi dan belanja modal dan penyertaan modal yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.107
Pengeluaran Laporan Arus Kas dengan Belanja Modal Laporan Realisasi Anggaran

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.662.841.889,00	28.662.841.889,00	0,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	41.754.600.518,00	41.754.600.518,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.801.545.523,00	110.801.545.523,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.481.156.278,00	1.481.156.278,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	0,00
	Jumlah	**193.200.144.208,00**	**193.200.144.208,00**	**0,00**

	2023	2022
1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**Rp(191.734.979.827,00)**	**Rp(166.736.433.484,00)**

Arus kas bersih aktivitas investasi sebesar minus Rp(191.734.979.827,00) merupakan selisih arus kas masuk aktivitas Investasi sebesar Rp1.465.164.381,00 dan arus kas keluar aktivitas investasi sebesar Rp193.200.144.208,00.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

	2023	2022
1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Jumlah arus kas masuk TA. 2023 sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	2023	2022
	Rp0,00	**Rp0,00**

Jumlah arus kas keluar aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 disebabkan karena tidak terdapat arus kas keluar untuk membiayai pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023.

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2023	2022
	Rp0,00	**Rp,00**

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan selisih arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan dan arus kas keluar sebesar Rp0,00 dari aktivitas pendanaan TA.2023.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam realisasi APBD TA 2023, terdiri dari :

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	2023	2022
	Rp48.054.149,43	**Rp14.091.102,00**

Jumlah sebesar Rp48.054.149,43 merupakan jumlah arus kas masuk yang berasal dari aktivitas transitoris TA.2023 dan arus kas masuk TA.2022 sebesar Rp14.091.102,00.

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	2023	2022
	Rp7.482.971.822,00	**Rp4.114.952,00**

Jumlah sebesar Rp7.482.971.822,00 merupakan jumlah arus kas keluar untuk membiayai pengeluaran dari aktivitas transitoris yang terdiri dari :

Tabel 5.108
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	7.482.971.822,00	4.084.952,00
2	Koreksi Kesalahan Pencatatan Bank	0,00	30.000,00
	Jumlah	**7.482.971.822,00**	**4.114.952,00**

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao TA.2023 sebesar Rp7.482.971.822,00, pembayaran potongan fihak ketiga yang berasal dari sisa kas pada bendahara pengeluaran TA.2023.

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**2023**	**2022**
	Rp(7.434.917.672,57)	**Rp9.976.150,00**

Jumlah sebesar Rp(7.434.917.672,57) merupakan selisih arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas Transitoris TA.2023.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	**2023**	**2022**
	Rp21.839.218.087,29	**Rp(23.223.913.509,10)**

Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode TA.2023 sebesar Rp21.839.218.087,29 merupakan akumulasi dari arus kas bersih dengan rincian sebagai berikut :

1.	Arus bersih dari aktivitas Operasi	Rp221.009.115.586,86
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp(191.734.979.827,00)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp(7.434.917.672,57)
	Kenaikan Bersih Kas selama Periode (1+2+3)	**Rp21.839.218.087,29**

5.5.6 Saldo Awal Kas

2023	2022
Rp35.228.807.163,75	**Rp50.887.437.783,10**

Saldo Awal kas pada TA.2023 sebesar Rp35.228.807.163,75 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA. 2022 yang dapat digunakan dalam melaksanakan aktifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

5.5.7 Koreksi Kas Tahun Sebelumnya

2023	2022
Rp(428.086.027,26)	**Rp96.912.409,75**

Koreksi kas tahun sebelumnya sebesar Rp(428.086.027,26) merupakan koreksi sisa kas TA. 2023 yang terdiri dari :

1.	Koreksi Saldo SILPA Tahun sebelumnya	Rp276.187.489,64
2.	Koreksi Saldo BOS Tahun sebelumnya	Rp5.359.146,00
3.	Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas Daerah	Rp143.309,58
4.	Koreksi Atas Sisa Dana BOP PAUD/TK Tahun sebelumnya	Rp(34.775.972,48)
5.	Koreksi Saldo Awal	Rp(675.000.000,00)
	Jumlah	**Rp(428.086.027,26)**

5.5.8 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

2023	2022
Rp0,00	**Rp7.468.370.480,00**

Saldo Kas lainnya di bendahara (selain BUD) pada TA. 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

2023	2022
Rp56.639.939.223,78	**Rp35.228.807.163,75**

Saldo akhir kas TA. 2023 sebesar Rp56.639.939.223,78 Jika dibandingkan dengan Kas dan setara kas pada Neraca TA. 2023 sebesar

Rp56.221.149.400,78 maka terdapat perbedaan sebesar Rp418.789.823,00 yang merupakan reklasifikasi sisa kas bendahara pengeluaran ke Aset Lainnya atas ketekoran Kas Tahun 2023 dari hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao.

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/(dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.638.095.731.112,39 berasal dari ekuitas akhir TA.2022.

5.6.2 Surplus/ Defisit Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp109.878.665.716,25.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp19.697.003.133,54 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	**19.697.003.133,54**
Koreksi saldo awal Kas di Kas Daerah	276.330.799,22
Koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS	5.359.146,00
Koreksi saldo awal Kas di Bendahara PAUD	(34.775.972,48)
Koreksi Nilai Aset Tetap	25.317.987.935,00
Koreksi Nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.052.951.155,22)
Koreksi Nilai Persediaan awal	(9.302.362,98)
Koreksi Nilai Investasi Permanen	245.275.094,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(50.920.350,00)

Lebih lanjut penjelasan atas dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah ekuitas Saldo Awal Kas Daerah sebesar Rp276.330.799,22 terdiri dari :
   - Koreksi berkurang Silpa TA. 2022 sebesar Rp237.470,00;
   - Koreksi saldo awal kas sebesar Rp1.568.269,22 merupakan koreksi bertambah nilai ekuitas atas sisa kas pada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah;
   - Koreksi bertambah ekuitas atas sisa kas bendahara Dekranasda sebesar Rp275.000.000,00 yang merupakan sisa atas bantuan hibah TA.2020.
2. Koreksi bertambah ekuitas saldo awal dana BOS sebesar Rp5.359.146,00 merupakan sisa kas dana BOS yang masih berada pada rekening Bendahara BOS;
3. Koreksi berkurang nilai ekuitas saldo awal dana BOP PAUD sebesar Rp34.775.972,48 merupakan koreksi atas sisa dana BOP PAUD/TK Swasta tahun 2022 yang diakui sebagai Kas Lainnya;
4. Koreksi ekuitas Nilai Aset Tetap sebesar Rp25.317.987.935,00 terdiri dari :
   - Koreksi bertambah nilai ekuitas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp229.594.000,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa pemeliharaan Gedung dan bangunan yang dikapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin;
   - Koreksi bertambah nilai ekuitas atas peralatan dan mesin sebesar Rp3.148.017.992,00 yang bersumber dari hibah PT. Asta Internaisonal Tbk tahun 2021;
   - Koreksi bertambah nilai ekuitas atas aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp20.202.922.943,00 berasal dari hibah PT Astra Internasional Tbk TA.2021;
   - Koreksi Berkurang nilai ekuitas atas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp199.954.200,00 merupakan pengapusan atas aset tetap peralatan dan mesin yang telah dimusnahkan sesuai surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 028/166.b/BKA.5.2 tanggal 25 Februari 2021 atas 34 unit peralatan dan mesin;

- Koreksi bertambah nilai ekuitas atas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp199.954.200,00;
- Koreksi bertambah nilai ekuitas atas aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp1.537.453.000,00 merupakan perolehan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari belanja barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan TA.2022;
- Koreksi bertambah nilai ekuitas atas nilai aset tetap Gedung dan banngunan sebesar Rp200.000.000,00 yang berasal dari hibah dari CSR Bank NTT tahun 2021.

5. Koreksi berkurang nilai ekuitas atas saldo awal aset lainnya berupa aset lain-lain rusak berat karena telah dimusnahkan sebesar Rp50.920.350,00;
6. Koreksi berkurang ekuitas atas nilai akumulasi penyusutan Aset tetap sebesar Rp6.052.951.155,22 terdiri dari :
   - Koreksi berkurang ekuitas atas nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.501.950.928,09;
   - Koreksi berkurang ekuitas atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp466.189.880,20;
   - Koreksi berkurang ekuitas atas nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp435.930.600,00;
   - Koreksi bertambah nilai ekuitas atas nilai saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesarRp17.950.072,67;
   - Koreksi bertambah nilai ekuitas atas koreksi saldo awal aset lain-lain sebesar Rp3.341.670.180,40;
   - Koreksi berkurang nilai ekuitas atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari CSR Bank NTT sebesar Rp8.500.000,00;
7. Koreksi berkurang nilai ekuitas atas saldo awal pesediaan sebesar Rp9.302.362,98 yang terdiri dari kesalahan pecatatan saldo awal persediaan sebesar Rp9.680.305,98 dan penilaian ulang persediaan

yang bersumber dari Hibah tahun sebelumnya sebesar Rp377.943,00;

8. Koreksi bertambah ekuitas atas perhitungan ulang saldo investasi permanen jangka Panjang berdasarkan Laporan Keuangan Audited PDAM Rote Ndao sebesar Rp245.275.094,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.767.671.399.962,18 jika dibandingkan dengan ekuitas akhir pada Neraca sebesar Rp1.767.671.399.962,18 maka tidak terdapat perbedaan.

B. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG BELUM DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Kejadian setelah tanggal neraca

Terhadap sisa kas di Bendahara Pengeluran sebagaimana diungkapkan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 sejumlah Rp299.382.885,49, telah ditindaklanjuti oleh bendahara pengeluaran dengan melakukan penyetoran ke kas daerah per bulan Maret Tahun 2024 sejumlah Rp101.624.246,49. Terhadap Sisa Kas pada sebesar Rp418.789.823,00 merupakan sisa kas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disajikan pada Aset Lain-lain sesuai informasi ketekoran Kas dalam LHP Inspektorat dengan merujuk pada ketentuan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa Kas Uang persediaan sebesar Rp49.930.000,00;
2. Sisa Kas Tambahan Uang persediaan sebesar Rp368.859.823,00.

Selain sisa kas di Bendahara Pengeluaran terdapat Sisa kas di rekening giro Dinas Kesehatan sejumlah Rp1.288.476.675,00 yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang berasal dari 19 (Sembilan belas) transaksi belanja melalui mekanisme SP2D-LS per tanggal 29 Desember 2023 yang disetorkan oleh Bank NTT ke rekening giro Dinas Kesehatan setelah tutup buku TA. 2023. Pembayaran kepada rekening penerima SP2D LS dilakukan secara manual oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 5 dan 8 Januari 2024.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Sumber Daya Manusia/ Pegawai

Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap merupakan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan proses pelayanan kemasyarakatan, administrasi Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.Pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

1. Pegawai Tetap / Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao maka dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan pelantikan Pejabat untuk menduduki Jabatan Struktural pada tahun 2023 sebanyak 3 kali sesuai dengan Keputusan Bupati Rote Ndao .

   1) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/60/BKPP 2.2 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao , Tanggal 17 April 2023 sebanyak 38 Orang Pejabat;

      Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/61/BKPP 2.2 tentang Pengangkatan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao , Tanggal 17 April 2023 sebanyak 1 Orang Pejabat;

   2) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/275/BKPP 2.2 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Tanggal 22 Juni 2023 sebanyak 5 Orang Pejabat;

   3) Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : KEP.821/749/BKPP 2.2 tentang Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Tanggal 17 Oktober 2023 sebanyak 34 Orang Pejabat.

Jumlah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kondisi Desember 2022 berjumlah 3.052 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.500 orang dan perempuan berjumlah 1.553 orang, Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kondisi Desember 2023 berjumlah 835 orang yang terdiri dari laki-laki 289 orang dan perempuan berjumlah 546 orang dan perbandingan dengan kondisi Desember 2022 berjumlah 3.170 orang yang terdiri dari laki laki berjumlah 1.575 orang dan perempuan berjumlah 1.595 orang, dengan perubahan mutasi kepegawaian sebagai berikut :

a. Mutasi Masuk

   Jumlah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dimutasi masuk pada tahun 2023 sebanyak 2 orang.

b. Mutasi Keluar / Pindah

   Jumlah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang dimutasi keluar/pindah pada tahun 2023 sebanyak 17 orang.

c. Pensiun

   Jumlah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang memasuki masa pensiun tahun 2023 sebanyak 80 orang.

d. Meninggal

   Jumlah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang meninggal pada Tahun 2022 sebanyak 10 orang.

Berikut rincian jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dan jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao:

Tabel 6.1
Data Pegawai Tetap/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Fungsional	Staf	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
Golongan IV/b	0	12	21	0	0	183	6	1	1	224
Golongan IV/a	0	5	79	0	0	136	13	11	1	245
Jumlah Golongan IV	**0**	**32**	**100**	**0**	**0**	**319**	**19**	**12**	**2**	**484**
Golongan III/d	0	0	48	75	0	315	90	116	29	673
Golongan III/c	0	0	5	48	0	177	59	59	43	391
Golongan III/b	0	0	0	33	0	142	142	6	205	528

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Fungsional	Staf	
Golongan III/a	0	0	0	2	0	91	56	6	286	441
Jumlah Golongan III	**0**	**0**	**53**	**158**	**0**	**725**	**347**	**187**	**563**	**2.033**
Golongan II/d	0	0	0	0	0	19	139	0	48	206
Golongan II/c	0	0	0	0	0	7	92	10	161	270
Golongan II/b	0	0	0	0	0	2	2	2	38	44
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Jumlah Golongan II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**233**	**12**	**260**	**533**
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	2
TOTAL	**0**	**32**	**153**	**158**	**0**	**1.072**	**599**	**211**	**827**	**3.052**

Tabel 6.2
Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

NO	Nama Perangkat Daerah	Pendidikan				Golongan				
		D-3	S-1	SLTA	Jumlah	X	IX	VII	V	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	152	54	0	206	35	19	152	0	206
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	614	0	614	0	614	0	0	614
3	Dinas Pertanian	2	5	3	10	0	5	2	3	10
4	Dinas Peternakan	0	3	0	3	3	0	0	0	3
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	2	0	2	0	2	0	0	2
JUMLAH TOTAL		**154**	**678**	**3**	**835**	**38**	**640**	**154**	**3**	**835**

6.2 Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Kontrak

Pengangkatan tenaga kontrak didasarkan pada surat Keputusan Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

a) Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 117/KEP/HK/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 Berjumlah 656 orang;

b) Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 132/KEP/HK/2023, tanggal 29 April 2023 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tambahan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 berjumlah 3 orang;

c) Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 248/KEP/HK/2023, tanggal 27 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 berjumlah 881 orang;

Pembayaran honorarium tenaga kontrak daerah dibebankan kepada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2023 melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada Pada Masing – masing Perangkat Daerah di Kabupaten Rote Ndao dengan besaran honorarium adalah Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan dan dibayarkan terhitung mulai tenaga kontrak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan secara lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sesuai amanat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .

Dari tampilan lembar muka laporan keuangan per 31 Desember 2023 masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran senilai Rp56.591.885.074,35 yang dapat dialokasikan untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kiranya apa yang disajikan dalam CaLK Tahun Anggaran 2023 akan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan sekaligus sebagai bentuk koreksi silang antara lembaran muka dari keenam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dengan CaLK. Demi penyempurnaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di periode-periode yang akan datang, Pemerintah sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif.

Teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua.

Baa, 27 Mei 2024
PJ. BUPATI ROTE NDAO

ODERMAKS SOMBU

Lampiran 1

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
A	**Belanja PD**	**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**65.999.507.051,27**	**92,84**	**813.429.616.328,05**
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	266.411.146.228,00	246.583.877.752,00	19.827.268.476,00	92,56	224.899.579.677,05
2	Dinas Kesehatan	159.601.093.935,00	127.710.812.590,73	31.890.281.344,27	80,02	118.541.458.868,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	118.446.682.164,00	117.618.015.889,00	828.666.275,00	99,30	95.139.038.858,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	8.650.648.700,00	8.428.494.243,00	222.154.457,00	97,43	14.502.597.189,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.538.869.278,00	3.502.307.372,00	36.561.906,00	98,97	4.074.547.970,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.791.573.992,00	1.768.779.356,00	22.794.636,00	98,73	3.444.962.436,00
7	Dinas Sosial	2.260.219.850,00	2.195.094.726,00	65.125.124,00	97,12	3.958.245.723,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.077.061.700,00	10.628.227.116,00	3.448.834.584,00	75,50	7.635.927.365,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.208.044.600,00	2.165.907.856,00	42.136.744,00	98,09	2.545.180.797,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.509.535.000,00	2.489.312.324,00	20.222.676,00	99,19	2.988.358.150,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.756.990.650,00	2.695.362.849,00	61.627.801,00	97,76	4.469.044.321,00
12	Dinas Perhubungan	4.141.113.000,00	4.125.866.228,00	15.246.772,00	99,63	2.947.347.038,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	2.351.643.315,00	2.317.727.584,00	33.915.731,00	98,56	2.991.250.263,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	7.599.217.166,00	6.657.981.504,00	941.235.662,00	87,61	5.202.364.646,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	2.556.594.336,00	2.524.619.826,00	31.974.510,00	98,75	2.624.304.162,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.354.556.925,00	5.272.966.140,00	81.590.785,00	98,48	4.306.607.751,00
17	Dinas Perikanan	8.869.060.508,00	8.680.869.687,00	188.190.821,00	97,88	6.471.610.505,00
18	Dinas Pertanian	20.057.177.179,00	19.869.260.466,00	187.916.713,00	99,06	18.859.879.078,00
19	Dinas Peternakan	13.000.854.000,00	12.950.450.976,00	50.403.024,00	99,61	10.091.344.857,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.394.571.148,00	2.330.284.139,00	64.287.009,00	97,32	6.624.460.272,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	17.548.017.801,00	17.392.318.588,00	155.699.213,00	99,11	21.464.933.165,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.579.912.000,00	2.571.301.050,00	8.610.950,00	99,67	8.657.834.290,00
24	Bagian Hukum	306.125.900,00	304.105.900,00	2.020.000,00	99,34	784.623.115,00
25	Bagian Organisasi	339.060.000,00	279.251.050,00	59.808.950,00	82,36	676.059.988,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	709.910.000,00	709.154.830,00	755.170,00	99,89	997.192.506,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	822.860.000,00	822.859.444,00	556,00	100,00	1.060.591.061,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.553.536.804,00	1.522.284.465,00	31.252.339,00	97,99	1.842.648.789,00
29	Sekretariat DPRD	23.726.553.971,00	23.559.188.179,00	167.365.792,00	99,29	25.556.085.388,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	5.506.112.333,00	5.405.360.975,00	100.751.358,00	98,17	4.926.730.656,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	173.485.446.996,00	169.944.443.999,00	3.541.002.997,00	97,96	159.796.730.124,00
32	Badan Pendapatan	4.515.488.144,00	4.431.829.495,00	83.658.649,00	98,15	4.859.353.754,00
33	Sekretariat Korpri	657.353.000,00	643.944.981,00	13.408.019,00	97,96	950.852.883,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	3.988.646.130,00	3.548.202.179,00	440.443.951,00	88,96	6.441.017.809,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
35	Inspektorat	3.331.409.000,00	3.279.969.450,00	51.439.550,00	98,46	4.040.174.046,00
36	Kecamatan Lobalain	3.057.096.590,00	3.009.395.250,00	47.701.340,00	98,44	3.505.817.810,00
37	Kantor Kelurahan Metina	310.692.000,00	310.581.000,00	111.000,00	99,96	810.055.415,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	308.515.000,00	308.515.000,00	0,00	100,00	806.327.000,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	356.761.500,00	356.642.100,00	119.400,00	99,97	807.849.160,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	2.098.158.968,00	2.036.419.472,00	61.739.496,00	97,06	2.246.421.586,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	307.112.800,00	307.112.800,00	0,00	100,00	811.727.000,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	1.304.689.734,00	1.275.121.625,00	29.568.109,00	97,73	1.755.906.470,00
43	Kecamatan Rote Barat	1.499.945.730,00	1.474.648.010,00	25.297.720,00	98,31	1.848.090.556,00
44	Kecamatan Rote Selatan	1.305.257.000,00	1.287.921.681,00	17.335.319,00	98,67	1.714.007.416,00
45	Kecamatan Rote Tengah	1.802.885.000,00	1.772.313.340,00	30.571.660,00	98,30	2.179.192.838,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	327.560.000,00	327.560.000,00	0,00	100,00	808.127.000,00
47	Kecamatan Pantai Baru	1.883.316.996,00	1.854.290.175,00	29.026.821,00	98,46	2.283.988.219,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	280.940.000,00	280.940.000,00	0,00	100,00	811.688.300,00
49	Kecamatan Rote Timur	1.294.369.000,00	1.277.401.542,00	16.967.458,00	98,69	1.775.190.814,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	298.960.000,00	298.960.000,00	0,00	100,00	811.656.600,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	660.208.936,00	640.401.266,00	19.807.670,00	97,00	1.150.420.673,00
52	Kecamatan Landu Leko	823.621.921,00	804.688.366,00	18.933.555,00	97,70	1.105.550.191,00
53	Kecamatan Loaholu	1.348.592.001,00	1.302.094.865,00	46.497.136,00	96,55	1.712.865.182,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.730.995.800,00	11.791.817.977,00	2.939.177.823,00	80,05	2.111.796.598,00
	Jumlah	**921.646.764.729,00**	**855.647.257.677,73**	**65.999.507.051,27**	**92,84**	**813.429.616.328,05**

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Lampiran 2

Tabel Rincian Sisa Kas Dana BOS dan PAUD Per 31 Desember 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TK Negeri Pembina Lobalain	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	TK Negeri Pembina Rote Timur	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	TK Satap Nggodimeda	26.783,00	(26.783,00)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	TK Imanuel Oelolot	132.802,00	(132.802,00)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	TK Negeri Fafalu	16.833,00	(16.833,00)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	TK Onatali	127.992,00	(127.992,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7	TK Tefila	98.344,00	(98.344,00)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
8	TK Dharma Wanita Busalangga	121.641,00	(121.641,00)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	TK Ebenhaezer Oetutulu	298.923,00	(298.923,00)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	TK Kristen Touiu	109.934,00	(109.934,00)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
11	TK Laheroi Lekona	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	TK Prama Asih Tunganamo	1.818,00	(1.818,00)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
13	TK Satap Oenggae	0,00		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
14	TK Eklesia Oehandi	135.628,00	(135.628,00)	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15	TK Petra Lidamanu	752,00	(752,00)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
16	TK Kristen Namolilo	195.976,00	(195.976,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
17	TK Dharma Wanita Baa	21.439,00	(21.439,00)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
18	TK Kristen Mokdale	237.688,00	(237.688,00)	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
19	TK Kristen Efata	393.682,00	(393.682,00)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
20	TK Kristoforus	8.778,00	(8.778,00)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
21	TK Tongkat Harun Baa	50.548,00	(50.548,00)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
22	TK Filadelfia	83.342,00	(83.342,00)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
23	TK Patricia	32.379,00	(32.379,00)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
24	TK Kefas Lekik	26.931,00	(26.931,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	TK Paulus Busalangga	165.639,00	(165.639,00)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	TK Tunas Mekar	589.484,00	(589.484,00)	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
27	TK Kristen Solofide Boa	528.635,00	(528.635,00)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	TK Puspita Hailean	154.782,00	(154.782,00)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
29	TK Sumber Air Hidup	103.466,00	(103.466,00)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	TK Kristen Talita Kumi	300.815,00	(300.815,00)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	TK Kristen Ebenhaezer Sedeoen	76.580,00	(76.580,00)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	TK Lentera Harapan	27.454,00	(27.454,00)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
33	TK Kristen Agape	57.741,00	(57.741,00)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
34	TK Imanuel Ndao	27.693,00	(27.693,00)	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
35	TK Kristen Lelakapa Meoain	194.301,00	(194.301,00)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
36	TK Kristen Anugerah Oenggaut	162.756,00	(162.756,00)	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
37	TK Tongka Harun Tesabela	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
38	TK Maranatha Daeloni	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
39	TK Lutukona	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
40	PAUD Beni Bangsa	34.797,00	(34.797,00)	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	0,00
41	PAUD Betania Tunganamo	0,00	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00
42	PAUD Imanuel	0,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
43	PAUD Imanuel Dupemok	5.574,00	(5.574,00)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44	PAUD Permata Keoen	526,00	(526,00)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00
45	PAUD Tunas Karang Daudolu	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00
46	PAUD Kasih Bunda	331.168,00	(331.168,00)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
47	PAUD Iha Sanoro	3.497,00	(3.497,00)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
48	PAUD Pasir Putih	3.183,00	(3.183,00)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
49	PAUD Filadelfia Busalaten	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
50	PAUD Filadelfia Lidabesi	26.264,00	(26.264,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
51	PAUD Mutiara Kasih	4.500.000,00	(4.500.000,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
52	PAUD Aisyah Nurul Ilmi	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
53	PAUD Efata Manuoen	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
54	PAUD Ebenhaezer Mundek	2,00	(2,00)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
55	PAUD Pelangi Kasih	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
56	PAUD Hausela	12.055,00	(12.055,00)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
57	PAUD Anugerah	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
58	PAUD Ester	85.596,00	(85.596,00)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
59	PAUD Tunas Isai	4.224,00	(4.224,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	PAUD Yosafary	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
61	PAUD Maranatha Laki	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
62	PAUD Imanuel Oebitina	171.472,00	(171.472,00)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
63	PAUD Deta Manu Manggis	93.171,00	(93.171,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
64	PAUD Al Fakir Papela	48.511,00	(48.511,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
65	PAUD Imanuel Oeina	50.974,00	(50.974,00)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
66	PAUD Siloam Umakapa	208.149,00	(208.149,00)	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
67	PAUD Ora Et Labora	9.431,00	(9.431,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
68	PAUD Tunas Baru	56.821,00	(56.821,00)	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
69	PAUD Adek	48.761,00	(48.761,00)	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
70	PAUD Fajar Baru	75.728,00	(75.728,00)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
71	PAUD Tesatein Balaoly	53.567,00	(53.567,00)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
72	PAUD Eunike	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00
73	PAUD Petrus Sua	3.098,00	(3.098,00)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
74	PAUD Syalom Kandale	383.435,00	(383.435,00)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75	PAUD Tunas Harapan	62.461,00	(62.461,00)	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
76	PAUD Kasih Ibu	85.285,00	(85.285,00)	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
77	PAUD Pelita Usu	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
78	PAUD Fajar Modolok	3.861,00	(3.861,00)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
79	PAUD Eagle	19.727,00	(19.727,00)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
80	PAUD El Shadday	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
81	PAUD Mbali Lendeiki	101.384,00	(101.384,00)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
82	PAUD El Shaday Nasedanon	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
83	PAUD Imanuel Koli	11.168,00	(11.168,00)	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
84	PAUD Irene	6.042,00	(6.042,00)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
85	PAUD Ita Esa	34.981,00	(34.981,00)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
86	PAUD Kasih Kolobolon	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
87	PAUD Galilea Faa	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
88	PAUD Kalvari Nunuoe	101.824,00	(101.824,00)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
89	PAUD Grasia Lekik	3.405,00	(3.405,00)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
90	PAUD Kairos	21.336,00	(21.336,00)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
91	PAUD Imanuel Ndau	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
92	PAUD Shekinah	142.479,00	(142.479,00)	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
93	PAUD Bogenvil	18.779,00	(18.779,00)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
94	PAUD Namahena	22.302,00	(22.302,00)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
95	PAUD Kasih Sanggaoen	260.024,00	(260.024,00)	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
96	PAUD Kefas Denelain	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
97	PAUD Ebenhaezer Rarano	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
98	PAUD Nerwastu	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
99	PAUD Imanuel Eahun	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
100	PAUD Efata Batulilo	51.739,00	(51.739,00)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
101	PAUD Mercy Rote	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
102	PAUD Imanuel Oelunggu	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
103	PAUD Kristen Shalom Modopeda	0,00	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
104	PAUD Maryuma Oendule	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
105	PAUD Betlehem	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
106	PAUD Zaitun	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
107	PAUD Desa Oetutulu	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
108	PAUD Laheroi Oedai	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
109	PAUD Aletheia Maryuma	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
110	PAUD Imanuel Puan	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
111	PAUD Ebenhaeser Boni	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
112	PAUD Generasi Baru	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
113	PAUD Flamboyan	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
114	PAUD Kefas Oetefu	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
115	PAUD Alethei Bethesda	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
116	TPA PKK Kabupaten Rote Ndao	13.765.000,00	(13.765.000,00)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
117	SKB Kabupaten Rote Ndao	1.553.672,27	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	1.553.672,27	1.553.672,27	0,00
118	TK Almuhajirin	50.598,00	(50.598,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
119	TK Fando	79.333,00	(79.333,00)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
120	TK Talenta Batula	252.660,00	(252.660,00)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
121	TK Imanuel Olafulihaa	173.173,00	(173.173,00)	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00
122	TK Kristen Tesabela	139.787,00	(139.787,00)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
123	TK Silo Seda	12.632,00	(12.632,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	TK Laheroi Nggelak	131.802,00	(131.802,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	TK Kristen Metina	88.411,00	(88.411,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	TK Oeteas	39.694,00	(39.694,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	TK Bait El Netenaen	26.405,00	(26.405,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TK Dharma Wanita Batutua	56.824,00	(56.824,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	TK Bougenfil	107.111,00	(107.111,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	TK Gosyen Oenitas	7.677.000,00	(7.677.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
131	PKBM Zaitun	19.886,83	(19.886,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PKBM Ita Esa	487.295,92	(487.295,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	PKBM Oenggae Belajar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	UPTD SKB Kab.Rote Ndao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PAUD	**36.329.645,02**	**(34.775.972,75)**	**1.042.800.000,00**	**1.042.800.000,00**	**1.553.672,27**	**1.553.672,27**	**0,00**
1	SD INPRES ADUOEN	0,00	0,00	300.800.000,00	300.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	SD INPRES ANDA IKO	0,00	0,00	159.740.000,00	159.740.000,00	0,00	0,00	0,00
3	SD INPRES BALAOLY	0,00	0,00	137.240.000,00	137.240.000,00	0,00	0,00	0,00
4	SD INPRES BANDU	25.000,00	0,00	112.775.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	SD INPRES BATUIDU	0,00	0,00	135.360.000,00	135.360.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SD INPRES BATULA	0,00	0,00	96.820.000,00	96.820.000,00	0,00	0,00	0,00
7	SD INPRES BATULAI	0,00	0,00	68.620.000,00	68.620.000,00	0,00	0,00	0,00
8	SD INPRES BO A	0,00	0,00	145.700.000,00	145.700.000,00	0,00	0,00	0,00
9	SD INPRES DANOLON	0,00	0,00	102.460.000,00	102.460.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SD INPRES DERANITAN	0,00	870.123,00	119.380.000,00	120.250.123,00	0,00	0,00	0,00
11	SD INPRES DETEASA	24.000,00	0,00	59.220.000,00	59.244.000,00	0,00	0,00	0,00
12	SD INPRES EDALODE	0,00	0,00	110.920.000,00	110.920.000,00	0,00	0,00	0,00
13	SD INPRES HOLOTULA	0,00	0,00	202.100.000,00	202.100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SD INPRES KEKASELE	0,00	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00
15	SD INPRES LAKI	0,00	0,00	124.080.000,00	124.080.000,00	0,00	0,00	0,00
16	SD INPRES LALAO	3.600.000,00	0,00	157.140.000,00	160.740.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SD INPRES LANDEOE	0,00	0,00	195.520.000,00	195.520.000,00	0,00	0,00	0,00
18	SD INPRES LEKIK	0,00	0,00	121.260.000,00	121.260.000,00	0,00	0,00	0,00
19	SD INPRES LELEBE	200,00	0,00	66.739.800,00	65.990.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
20	SD INPRES LIDAMANU	0,00	51.000,00	212.440.000,00	212.440.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
21	SD INPRES MAEOE	0,00	0,00	67.680.000,00	67.680.000,00	0,00	0,00	0,00
22	SD INPRES MEDI	0,00	0,00	108.100.000,00	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
23	SD INPRES MOKLAIN	0,00	0,00	62.350.200,00	62.350.200,00	0,00	0,00	0,00
24	SD INPRES MUNDEK	0,00	0,00	157.920.000,00	157.920.000,00	0,00	0,00	0,00
25	SD INPRES NDUDALE	0,00	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	SD INPRES NGGAELAI	0,00	1.000.000,00	156.920.000,00	156.920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
27	SD INPRES NGGODIMEDA	0,00	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00
28	SD INPRES OEBATU	3.600,00	0,00	187.056.400,00	187.060.000,00	0,00	0,00	0,00
29	SD INPRES OEHANDI	0,00	0,00	251.920.000,00	251.920.000,00	0,00	0,00	0,00
30	SD INPRES OEHENAK	0,00	0,00	155.040.000,00	155.040.000,00	0,00	0,00	0,00
31	SD INPRES OEHU	0,00	0,00	105.220.000,00	105.220.000,00	0,00	0,00	0,00
32	SD INPRES OELE	0,00	0,00	190.820.000,00	190.820.000,00	0,00	0,00	0,00
33	SD INPRES OEOKO	49.992,49	0,00	158.860.000,00	158.909.992,40	0,09	0,00	0,00
34	SD INPRES OLALAIN	0,00	0,00	68.620.000,00	68.620.000,00	0,00	0,00	0,00
35	SD INPRES ONATALI	0,00	0,00	109.980.000,00	109.980.000,00	0,00	0,00	0,00
36	SD INPRES PILASUE	0,00	0,00	100.580.000,00	100.580.000,00	0,00	0,00	0,00
37	SD INPRES POKODANON		100.000,00	70.400.000,00	70.300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
38	SD INPRES RARANO	0,00	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	0,00	0,00
39	SD INPRES RINALOLON	0,00	0,00	105.280.000,00	105.280.000,00	0,00	0,00	0,00
40	SD INPRES SANGGAOEN	1.990.000,00	0,00	156.810.000,00	158.800.000,00	0,00	0,00	0,00
41	SD INPRES SEDEOEN	0,00	0,00	173.840.000,00	173.840.000,00	0,00	0,00	0,00
42	SD INPRES TASILO	0,00	0,00	54.520.000,00	54.520.000,00	0,00	0,00	0,00
43	SD INPRES TOUIU	0,00	0,00	109.980.000,00	109.980.000,00	0,00	0,00	0,00
44	SD INPRES TUABUNA	737,67	0,00	134.420.000,00	133.930.000,00	490.737,67	490.000,00	737,67
45	SD INPRES TUDAMEDA	0,00	1.459.998,00	189.880.000,00	189.880.000,00	1.459.998,00	1.459.998,00	0,00
46	SD INPRES TUNGANAMO	0,00	0,00	202.100.000,00	202.100.000,00	0,00	0,00	0,00
47	SD INPRES UFALEN	0,00	0,00	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	0,00
48	SDN DAEPAPAN	0,00	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00
49	SDN DEAOEN	0,00	0,00	71.440.000,00	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
50	SD NEGERI BATUTUA	0,00	0,00	202.100.000,00	202.100.000,00	0,00	0,00	0,00
51	SD NEGERI DAIAMA	0,00	0,00	156.040.000,00	156.040.000,00	0,00	0,00	0,00
52	SD NEGERI DAILAFA	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	SD NEGERI DALEBANE	0,00	0,00	102.460.000,00	102.460.000,00	0,00	0,00	0,00
54	SD NEGERI DANOHEO	0,00	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00	0,00
55	SD NEGERI EAHUN	0,00	0,00	156.980.000,00	156.980.000,00	0,00	0,00	0,00
56	SD NEGERI HAILEAN	86.000,00	0,00	223.660.000,00	223.746.000,00	0,00	0,00	0,00
57	SD NEGERI HOLOMANU	0,00	0,00	81.780.000,00	81.780.000,00	0,00	0,00	0,00
58	SD NEGERI HUNDIHUK	0,00	0,00	151.340.000,00	151.340.000,00	0,00	0,00	0,00
59	SD NEGERI HURULAI	0,00	0,00	194.613.991,55	194.580.000,00	33.991,55	0,00	33.991,55
60	SD NEGERI INAOE	0,00	0,00	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00	0,00	0,00
61	SD NEGERI INGGU LINO	0,00	0,00	103.400.000,00	103.400.000,00	0,00	0,00	0,00
62	SD NEGERI KAPADANON	0,00	0,00	58.280.000,00	58.280.000,00	0,00	0,00	0,00
63	SD NEGERI KEOEN	0,00	0,00	167.260.000,00	167.260.000,00	0,00	0,00	0,00
64	SD NEGERI KIMADALE	0,00	0,00	87.420.000,00	87.420.000,00	0,00	0,00	0,00
65	SD NEGERI KULI	0,00	0,00	134.420.000,00	134.420.000,00	0,00	0,00	0,00
66	SD NEGERI LALUKOEN	0,00	0,00	154.160.000,00	147.320.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00
67	SD NEGERI LANDU	0,00	0,00	80.840.000,00	80.840.000,00	0,00	0,00	0,00
68	SD NEGERI LEKIK	0,00	0,00	120.260.000,00	120.260.000,00	0,00	0,00	0,00
69	SD NEGERI LELA	0,00	0,00	89.300.000,00	89.300.000,00	0,00	0,00	0,00
70	SD NEGERI LELILO	0,00	0,00	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00	0,00	0,00
71	SD NEGERI LIDOR	0,00	0,00	67.680.000,00	67.680.000,00	0,00	0,00	0,00
72	SD NEGERI LONGGO KOLI	0,00	0,00	135.360.000,00	135.360.000,00	0,00	0,00	0,00
73	SD NEGERI LOTELUTUN	0,00	0,00	111.860.000,00	111.860.000,00	0,00	0,00	0,00
74	SD NEGERI MOLADALE	0,00	0,00	91.180.000,00	91.180.000,00	0,00	0,00	0,00
75	SD NEGERI NDUADI	0,00	0,00	85.480.000,00	85.480.000,00	0,00	0,00	0,00
76	SD NEGERI NITANGGOEN	0,00	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
77	SD NEGERI NULAINA	0,00	13.000,00	75.200.000,00	75.200.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
78	SD NEGERI NUSE	0,00	0,00	59.220.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	0,00
79	SD NEGERI OEBAFOK	0,00	0,00	69.560.000,00	69.560.000,00	0,00	0,00	0,00
80	SD NEGERI OEBOLE	0,00	0,00	113.740.000,00	113.740.000,00	0,00	0,00	0,00
81	SD NEGERI OEFOE	0,00	0,00	57.340.000,00	57.340.000,00	0,00	0,00	0,00
82	SD NEGERI OELASIN	0,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00
83	SD NEGERI OELEDO	0,00	0,00	92.120.000,00	92.120.000,00	0,00	0,00	0,00
84	SD NEGERI OELUA	0,00	0,00	125.960.000,00	125.960.000,00	0,00	0,00	0,00
85	SD NEGERI OEMILAL	0,00	0,00	84.600.000,00	82.377.500,00	2.222.500,00	2.222.500,00	0,00
86	SD NEGERI OENGGAE	282.000,00	0,00	137.240.000,00	137.240.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00
87	SD NEGERI OENGGAUT	0,00	0,00	140.060.000,00	140.060.000,00	0,00	0,00	0,00
88	SD NEGERI OENITAS	300.000,00	0,00	81.480.000,00	81.780.000,00	0,00	0,00	0,00
89	SD NEGERI OESELI	53.178.100,00	0,00	137.240.000,00	190.418.100,00	0,00	0,00	0,00
90	SD NEGERI OETEAS	0,00	0,00	144.760.000,00	144.760.000,00	0,00	0,00	0,00
91	SD NEGERI OLAFULIHAA	0,00	0,00	175.720.000,00	175.720.000,00	0,00	0,00	0,00
92	SD NEGERI OLY	0,00	0,00	105.280.000,00	105.280.000,00	0,00	0,00	0,00
93	SD NEGERI PANAMAMEN	0,00	0,00	73.320.000,00	73.320.000,00	0,00	0,00	0,00
94	SD NEGERI PAPELA	0,00	0,00	321.420.000,00	321.420.000,00	0,00	0,00	0,00
95	SD NEGERI SONIMANU	0,00	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00
96	SD NEGERI SOTIMORI	0,00	0,00	110.920.000,00	107.182.300,00	3.737.700,00	3.737.700,00	0,00
97	SD NEGERI SUNSHA	0,00	0,00	163.560.000,00	163.560.000,00	0,00	0,00	0,00
98	SD NEGERI TELUNULU	0,00	0,00	91.180.000,00	91.180.000,00	0,00	0,00	0,00
99	SD NEGERI TEMAS	0,00	0,00	162.620.000,00	162.620.000,00	0,00	0,00	0,00
100	SD NEGERI TESABELA	0,00	0,00	119.380.000,00	119.380.000,00	0,00	0,00	0,00
101	SD NEGERI TOLAMA	0,00	0,00	115.620.000,00	115.620.000,00	0,00	0,00	0,00
102	SD NEGERI UFA	0,00	0,00	56.340.000,00	56.340.000,00	0,00	0,00	0,00
103	SDN FEAMA	0,00	0,00	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
104	SDN MANGGIS	0,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00
105	SDN NDAU	0,00	0,00	99.640.000,00	99.640.000,00	0,00	0,00	0,00
106	SDN NGAEK	0,00	0,00	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	0,00
107	SDN PA AL	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00
108	SDN SORUKH	0,00	0,00	85.552.011,62	85.540.000,00	12.011,62	0,00	12.011,62
109	SDN TUABOLOK	0,00	0,00	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	0,00
110	SEKOLAH DASAR NEGERI MBADOKAI	0,00	0,00	132.540.000,00	132.540.000,00	0,00	0,00	0,00
111	UPTD SD INPRES 2 BAA	0,00	0,00	296.920.000,00	296.920.000,00	0,00	0,00	0,00
112	UPTD SD INPRES 3 BAA	0,00	0,00	246.160.000,00	246.160.000,00	0,00	0,00	0,00
113	UPTD SD INPRES BUSALANGGA	0,00	0,00	299.960.000,00	299.960.000,00	0,00	0,00	0,00
114	UPTD SD INPRES MBIU	0,00	0,00	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00	0,00	0,00
115	UPTD SD INPRES MOKDALE	2.400.300,00	0,00	475.119.700,00	477.520.000,00	0,00	0,00	0,00
116	UPTD SD NEGERI 1 BAA	0,00	0,00	277.180.000,00	274.643.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00	0,00
117	UPTD SD NEGERI BAUBAFAN	217.000,00	0,00	119.320.000,00	119.537.000,00	0,00	0,00	0,00
118	UPTD SD NEGERI BOKEAMA	50.000,00	0,00	106.160.000,00	106.210.000,00	0,00	0,00	0,00
119	UPTD SD NEGERI FOLAOEN	0,00	0,00	94.880.000,00	94.880.000,00	0,00	0,00	0,00
120	UPTD SD NEGERI NAUHADEOEN	0,00	0,00	160.620.000,00	160.620.000,00	0,00	0,00	0,00
121	UPTD SD NEGERI NITANALAIN	521.000,00	0,00	132.540.000,00	132.545.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00
122	UPTD SD NEGERI OESOSOLE	0,00	0,00	45.060.000,00	45.060.000,00	0,00	0,00	0,00
123	UPTD SDN OENO	0,00	0,00	156.920.000,00	156.920.000,00	0,00	0,00	0,00
124	SD EAGLE SCHOOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SD GMIT BAUDALE	0,00	0,00	36.660.000,00	36.660.000,00	0,00	0,00	0,00
126	SD GMIT HUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SD GMIT INGGUINAK	0,00	0,00	148.520.000,00	148.520.000,00	0,00	0,00	0,00
128	SD GMIT INGUFAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SD GMIT KAKAEK	0,00	0,00	114.560.000,00	114.560.000,00	0,00	0,00	0,00
130	SD GMIT KARAFAO	0,00	0,00	73.260.000,00	71.183.100,00	2.076.900,00	2.076.900,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
131	SD GMIT MAKU	0,00	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00
132	SD GMIT MBUEAIN	0,00	0,00	163.560.000,00	163.560.000,00	0,00	0,00	0,00
133	SD GMIT NETENAEN	0,00	0,00	72.380.000,00	71.840.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
134	SD GMIT NOANDALE	0,00	0,00	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	0,00	0,00
135	SD GMIT OEBELA	0,00	0,00	190.820.000,00	190.820.000,00	0,00	0,00	0,00
136	SD GMIT OEKUPI	0,00	0,00	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	0,00
137	SD GMIT OELOLOT	0,00	0,00	165.860.000,00	166.320.000,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00
138	SD GMIT OELUNGGU	0,00	0,00	91.180.000,00	91.180.000,00	0,00	0,00	0,00
139	SD GMIT OEMAULAIN	0,00	0,00	83.660.000,00	83.660.000,00	0,00	0,00	0,00
140	SD GMIT OESAMBOKA	0,00	0,00	182.360.000,00	182.360.000,00	0,00	0,00	0,00
141	SD GMIT OETUTULU	0,00	0,00	137.240.000,00	137.240.000,00	0,00	0,00	0,00
142	SD GMIT OEULU	0,00	0,00	78.960.000,00	78.960.000,00	0,00	0,00	0,00
143	SD GMIT SOKA	0,00	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00
144	SD KATHOLIK ST KRISTOFORUS	0,00	0,00	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00	0,00
145	SDK TONGKAT HARUN TESABELA	0,00	0,00	82.660.000,00	82.660.000,00	0,00	0,00	0,00
146	SD. LENTERA HARAPAN	0,00	0,00	102.460.000,00	102.460.000,00	0,00	0,00	0,00
147	SDS TEFILA	0,00	0,00	101.520.000,00	101.520.000,00	0,00	0,00	0,00
148	SD TONGKAT HARUN	0,00	0,00	134.420.000,00	134.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SD	**62.727.930,16**	**3.494.121,00**	**18.149.157.103,17**	**18.193.076.815,40**	**22.302.338,93**	**21.457.598,00**	**844.740,84**
1	SD-SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI	0,00	0,00	190.240.000,00	190.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2	SD - SMP SATAP DAILAFA	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	SMPN 3 ROTE BARAT LAUT	9.000,60	0,00	331.760.000,00	331.769.000,60	0,00	0,00	0,00
4	SMPN 3 ROTE TIMUR	0,00	0,00	327.120.000,00	327.120.000,00	0,00	0,00	0,00
5	SMPN 4 ROTE BARAT DAYA	0,00	0,00	465.160.000,00	465.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	SMPN 5 LOBALAIN	0,00	0,00	186.760.000,00	186.760.000,00	0,00	0,00	0,00
7	SMP NEGERI 1 LANDU LEKO	0,00	0,00	192.560.000,00	192.560.000,00	0,00	0,00	0,00
8	SMP NEGERI 1 NDAO NUSE	0,00	0,00	165.880.000,00	165.880.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
9	SMP NEGERI 1 PANTAI BARU	0,00	0,00	508.080.000,00	508.080.000,00	0,00	0,00	0,00
10	SMP NEGERI 1 ROTE BARAT	0,00	0,00	284.200.000,00	284.200.000,00	0,00	0,00	0,00
11	SMP NEGERI 1 ROTE BARAT DAYA	7.690.000,00	0,00	405.470.000,00	409.360.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
12	SMP NEGERI 1 ROTE BARAT LAUT	0,00	0,00	461.680.000,00	461.680.000,00	0,00	0,00	0,00
13	SMP NEGERI 1 ROTE TENGAH	0,00	0,00	278.400.000,00	278.400.000,00	0,00	0,00	0,00
14	SMP NEGERI 1 ROTE TIMUR	0,00	1.425.500,00	501.120.000,00	501.120.000,00	1.425.500,00	1.425.500,00	0,00
15	SMP NEGERI 2 LOBALAIN	0,00	0,00	831.720.000,00	831.720.000,00	0,00		0,00
16	SMP NEGERI 2 PANTAI BARU	0,00	0,00	198.360.000,00	198.360.000,00	0,00		0,00
17	SMP NEGERI 2 ROTE BARAT DAYA	280.000,00	439.525,00	368.880.000,00	369.160.000,00	439.525,00	439.525,00	0,00
18	SMP NEGERI 2 ROTE BARAT LAUT	327.850,00	0,00	570.392.150,00	570.720.000,00	0,00	0,00	0,00
19	SMP NEGERI 2 ROTE SELATAN	0,00	0,00	194.880.000,00	194.880.000,00	0,00	0,00	0,00
20	SMP NEGERI 2 ROTE TENGAH	0,00	0,00	119.480.000,00	119.480.000,00	0,00	0,00	0,00
21	SMP NEGERI 2 ROTE TIMUR	0,00	0,00	207.840.000,00	207.840.000,00	0,00	0,00	0,00
22	SMP NEGERI 3 LOBALAIN	40.100,00	0,00	308.519.900,00	308.560.000,00	0,00	0,00	0,00
23	SMP NEGERI 3 PANTAI BARU	0,00	0,00	204.160.000,00	204.160.000,00	0,00	0,00	0,00
24	SMP NEGERI 3 ROTE BARAT	0,00	0,00	183.480.000,00	183.480.000,00	0,00	0,00	0,00
25	SMP NEGERI 3 ROTE BARAT DAYA	0,00	0,00	263.581.360,00	263.320.000,00	261.360,00	261.360,00	0,00
26	SMP NEGERI 4 LOBALAIN	0,00	0,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	0,00	0,00
27	SMP NEGERI 4 ROTE BARAT LAUT	50.000,00	0,00	316.630.000,00	316.680.000,00	0,00	0,00	0,00
28	SMP NEGERI SATAP DAIAMA	0,00	0,00	160.280.000,00	160.280.000,00	0,00	0,00	0,00
29	SMP NEGERI SATAP FOLAOEN	0,00	0,00	71.920.000,00	71.920.000,00	0,00	0,00	0,00
30	SMP NEGERI SATAP LANDU	0,00	0,00	73.080.000,00	73.080.000,00	0,00	0,00	0,00
31	SMP NEGERI SATAP OEHU	0,00	0,00	153.320.000,00	153.320.000,00	0,00	0,00	0,00
32	SMPN SATAP BOA	0,00	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33	SMPN SATAP MEDI	0,00	0,00	111.360.000,00	111.360.000,00	0,00	0,00	0,00
34	SMPN SATAP OEOKO	0,00	0,00	287.680.000,00	287.679.700,00	300,00	300,00	0,00
35	SMPN SATAP PANAMAMEN	0,00	0,00	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL (Rp)	KOREKSI (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SALDO AKHIR TUNAI (Rp)	SALDO AKHIR BANK (Rp)
36	SMPN SATAP TOLAMA	0,00	0,00	154.280.000,00	154.280.000,00	0,00	0,00	0,00
37	UPTD SMP NEGERI 1 LOBALAIN	0,00	0,00	450.280.000,00	450.280.000,00	0,00	0,00	0,00
38	UPTD SMP NEGERI 1 ROTE SELATAN	500,00	0,00	448.160.000,00	448.160.500,00	0,00	0,00	0,00
39	UPTD SMP NEGERI 2 ROTE BARAT	0,00	0,00	393.640.000,00	393.640.000,00	0,00	0,00	0,00
40	UPTD SMP NEGERI SATAP DERANITAN	0,00	0,00	301.800.000,00	301.800.000,00	0,00	0,00	0,00
41	SMP KATOLIK MOTHER IGNACIA	0,00	0,00	183.480.000,00	183.480.000,00	0,00	0,00	0,00
42	SMP SWASTA ITA ESA	0,00	0,00	111.560.000,00	111.560.000,00	0,00	0,00	0,00
43	SMP TONGKAT HARUN	0,00	0,00	115.240.000,00	115.240.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SMP		**8.397.450,60**	**1.865.025,00**	**11.531.553.410,00**	**11.535.889.200,60**	**5.926.685,00**	**5.926.685,00**	**0,00**
JUMLAH PAUD,SD dan SMP		**107.455.025,78**	**(29.416.826,75)**	**30.723.510.513,17**	**30.771.766.016,00**	**29.782.696,20**	**28.937.955,27**	**844.740,84**

Lampiran 3

Tabel Nilai Persediaan 2023 dan 2022 Per Perangkat Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Dinas Kesehatan	10.744.363.883,22	10.060.683.033,51
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.435.403.487,18	2.618.879.440,66
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.635.000,00	3.175.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Perempuan dan Keluarga Berencana	516.387.354,00	318.170.455,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	263.814.000,00	521.587.000,00
6	Dinas Pertanian	577.901.960,00	234.667.000,00
7	Bagian Umum	0,00	60.510.000,00
8	Sekretariat Dewan	353.500,00	578.500,00
9	Badan Keuangan dan Aset	0,00	44.400.000,00
10	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.405.000,00	951.000,00
11	Badan Pendapatan	293.265.650,00	249.351.350,00
JUMLAH		**14.835.529.834,40**	**14.112.952.779,17**

Lampiran 4

Tabel Rekapan Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	81.079.474.633,00	7.960.072.541,00	99.300.000,00	88.940.247.174,00
2	Dinas Kesehatan	153.272.996.330,80	22.953.604.085,84	1.298.336.250,00	174.928.264.166,64
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.631.128.582,00	0,00	0,00	13.631.128.582,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	5.174.825.883,00	731.180.000,00	161.500.000,00	5.744.505.883,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.269.201.458,00	0,00	1.137.420.000,00	1.131.781.458,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.470.802.697,00	17.500.000,00	0,00	4.488.302.697,00
7	Dinas Sosial	1.010.798.725,00	0,00	0,00	1.010.798.725,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.070.851.191,00	983.973.700,00	1.281.165.030,00	8.773.659.861,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.191.665.050,00	0,00	0,00	1.191.665.050,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.839.087.475,00	45.000.000,00	129.167.500,00	2.754.919.975,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.175.137.665,00	51.985.740,00	0,00	1.227.123.405,00
12	Dinas Perhubungan	11.350.664.267,00	223.054.000,00	1.915.550.000,00	9.658.168.267,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	1.504.717.500,00	0,00	0,00	1.504.717.500,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	3.516.339.550,00	18.050.000,00	80.570.000,00	3.453.819.550,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	923.369.216,00	0,00	8.500.000,00	914.869.216,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	943.318.700,00	71.091.000,00	16.000.000,00	998.409.700,00
17	Dinas Perikanan	3.633.560.815,00	0,00	17.100.000,00	3.616.460.815,00
18	Dinas Pertanian	6.064.650.691,00	1.051.781.850,00	528.320.000,00	6.588.112.541,00
19	Dinas Peternakan	1.505.937.240,00	1.230.380.800,00	0,00	2.736.318.040,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.247.947.450,00	0,00	0,00	1.247.947.450,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	28.091.891.773,46	267.732.550,00	1.664.959.750,00	26.694.664.573,46
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	734.426.900,00	10.000.000,00	0,00	744.426.900,00
24	Bagian Hukum	260.950.900,00	0,00	8.500.000,00	252.450.900,00
25	Bagian Organisasi	167.381.490,00	0,00	0,00	167.381.490,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	1.133.441.650,00	0,00	0,00	1.133.441.650,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	358.444.800,00	0,00	0,00	358.444.800,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	884.478.148,00	11.500.000,00	82.000.000,00	813.978.148,00

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022	Bertambah	Berkurang	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
29	Sekretariat DPRD	3.750.763.017,00	0,00	22.500.000,00	3.728.263.017,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	2.346.428.440,00	75.480.000,00	9.000.000,00	2.412.908.440,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	3.306.245.898,00	40.000.000,00	0,00	3.346.245.898,00
32	Badan Pendapatan	1.867.317.606,00	13.610.000,00	42.921.800,00	1.838.005.806,00
33	Sekretariat Korpri	181.668.100,00	3.000.000,00	17.215.000,00	167.453.100,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	748.929.200,00	0,00	17.500.000,00	731.429.200,00
35	Inspektorat	796.378.293,00	15.115.500,00	43.277.000,00	768.216.793,00
36	Kecamatan Lobalain	712.657.448,57	0,00	273.534.500,00	439.122.948,57
37	Kantor Kelurahan Metina	34.864.000,00	5.550.000,00	0,00	40.414.000,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	35.883.500,00	0,00	0,00	35.883.500,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	78.646.500,00	0,00	0,00	78.646.500,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	526.456.248,20	0,00	34.534.500,00	491.921.748,20
41	Kantor Kelurahan Busalangga	68.749.800,00	0,00	0,00	68.749.800,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	612.390.910,00	0,00	0,00	612.390.910,00
43	Kecamatan Rote Barat	473.078.961,00	0,00	0,00	473.078.961,00
44	Kecamatan Rote Selatan	535.858.341,00	0,00	0,00	535.858.341,00
45	Kecamatan Rote Tengah	592.048.432,00	0,00	0,00	592.048.432,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	331.403.300,00	0,00	0,00	331.403.300,00
47	Kecamatan Pantai Baru	725.701.037,48	0,00	42.034.500,00	683.666.537,48
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	50.737.500,00	0,00	0,00	50.737.500,00
49	Kecamatan Rote Timur	563.355.482,00	0,00	0,00	563.355.482,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	186.089.600,00	0,00	0,00	186.089.600,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	635.075.700,00	0,00	0,00	635.075.700,00
52	Kecamatan Landu Leko	444.149.550,00	453.600,00	34.534.500,00	410.068.650,00
53	Kecamatan Loaholu	149.287.450,00	0,00	0,00	149.287.450,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	671.116.585,00	0,00	0,00	671.116.585,00
	Jumlah	**357.932.771.679,51**	**35.780.115.366,84**	**8.965.440.330,00**	**384.747.446.716,35**

Lampiran 5

Tabel Rekapan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	216.043.358.384,72	37.231.109.569,64	2.403.288.279,00	250.871.179.675,36
2	Dinas Kesehatan	177.909.418.168,43	11.033.159.577,79	142.090.000,00	188.800.487.746,22
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23.603.683.717,00	0,00	0,00	23.603.683.717,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	13.470.041.319,59	0,00	0,00	13.470.041.319,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	185.922.500,00	0,00	0,00	185.922.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.848.044.300,00	999.796.000,00	0,00	3.847.840.300,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.998.671.625,00	524.500.000,00	0,00	4.523.171.625,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	804.287.041,14	0,00	0,00	804.287.041,14
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.169.158.342,36	0,00	0,00	1.169.158.342,36
12	Dinas Perhubungan	4.253.681.907,82	0,00	0,00	4.253.681.907,82
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	23.764.649.398,00	1.187.667.919,50	0,00	24.952.317.317,50
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	646.203.489,62	0,00	0,00	646.203.489,62
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	9.876.749.041,89	993.197.209,70	34.025.500,00	10.835.920.751,59
17	Dinas Perikanan	2.686.602.207,20	0,00	0,00	2.686.602.207,20
18	Dinas Pertanian	2.134.746.529,53	4.645.528.000,00	0,00	6.780.274.529,53
19	Dinas Peternakan	4.292.967.258,61	20.000.000,00	0,00	4.312.967.258,61
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	4.274.070.058,94	0,00	1.702.502.025,00	2.571.568.033,94
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	38.701.524.403,00	331.512.776,00	0,00	39.033.037.179,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.718.001.093,00	0,00	0,00	10.718.001.093,00
24	Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat DPRD	6.770.919.639,00	0,00	0,00	6.770.919.639,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.248.700.000,00	0,00	0,00	1.248.700.000,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
32	Badan Pendapatan	11.903.507.915,00	0,00	0,00	11.903.507.915,00
33	Sekretariat Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	563.231.125,00	0,00	0,00	563.231.125,00
36	Kecamatan Lobalain	1.329.920.000,00	0,00	0,00	1.329.920.000,00
37	Kantor Kelurahan Metina	90.639.950,00	0,00	0,00	90.639.950,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	105.730.000,00	0,00	0,00	105.730.000,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	2.400.171.541,53	0,00	0,00	2.400.171.541,53
41	Kantor Kelurahan Busalangga	342.380.000,00	0,00	0,00	342.380.000,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	1.346.754.000,00	0,00	0,00	1.346.754.000,00
43	Kecamatan Rote Barat	1.165.862.458,47	0,00	0,00	1.165.862.458,47
44	Kecamatan Rote Selatan	948.000.000,00	0,00	0,00	948.000.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	1.417.250.000,00	0,00	0,00	1.417.250.000,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	127.307.000,00	0,00	0,00	127.307.000,00
47	Kecamatan Pantai Baru	451.131.000,00	0,00	0,00	451.131.000,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	265.363.000,00	0,00	0,00	265.363.000,00
49	Kecamatan Rote Timur	235.904.000,00	0,00	0,00	235.904.000,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	297.235.272,00	0,00	0,00	297.235.272,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	1.747.109.000,00	0,00	0,00	1.747.109.000,00
52	Kecamatan Landu Leko	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kecamatan Loaholu	1.652.289.082,00	0,00	0,00	1.652.289.082,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	639.873.000,00	0,00	0,00	639.873.000,00
	Jumlah	**576.431.058.768,85**	**57.166.471.052,63**	**4.281.905.804,00**	**629.315.624.017,48**

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Lampiran 6

Tabel Rekapan Mutasi AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	205.227.600,00	0,00	0,00	205.227.600,00
2	Dinas Kesehatan	17.291.173.815,15	2.931.829.009,01	0,00	20.223.002.824,16
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.082.432.129.152,25	107.718.868.477,47	0,00	1.190.150.997.629,72
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	37.895.239.057,00	0,00	0,00	37.895.239.057,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.401.049,00	0,00	0,00	5.401.049,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	22.841.985.935,00	1.911.443.380,00	0,00	24.753.429.315,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	109.148.419,00	0,00	0,00	109.148.419,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.500.634.900,00	101.265.500,00	0,00	3.601.900.400,00
17	Dinas Perikanan	465.860.000,00	0,00	0,00	465.860.000,00
18	Dinas Pertanian	33.349.579.153,00	0,00	0,00	33.349.579.153,00
19	Dinas Peternakan	386.375.000,00	0,00	0,00	386.375.000,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	8.544.960.500,00	0,00	0,00	8.544.960.500,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	2.812.198.890,00	9.990.000,00	0,00	2.822.188.890,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	166.452.500,00	0,00	0,00	166.452.500,00
24	Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Perangkat Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	48.750.000,00	0,00	0,00	48.750.000,00
29	Sekretariat DPRD	40.841.400,00	0,00	0,00	40.841.400,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pendapatan	104.600.000,00	0,00	0,00	104.600.000,00
33	Sekretariat Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Lobalain	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
37	Kantor Kelurahan Metina	407.492.948,00	0,00	0,00	407.492.948,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	468.645.580,00	0,00	0,00	468.645.580,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	519.393.380,00	0,00	0,00	519.393.380,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	673.715.100,00	0,00	0,00	673.715.100,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Rote Barat	13.476.000,00	0,00	0,00	13.476.000,00
44	Kecamatan Rote Selatan	53.700.000,00	0,00	0,00	53.700.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	668.440.000,00	0,00	0,00	668.440.000,00
47	Kecamatan Pantai Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	1.202.681.282,00	0,00	0,00	1.202.681.282,00
49	Kecamatan Rote Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	542.947.500,00	0,00	0,00	542.947.500,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	2.062.000,00	0,00	0,00	2.062.000,00
52	Kecamatan Landu Leko	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
53	Kecamatan Loaholu	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.799.000,00	0,00	0,00	23.799.000,00
Jumlah		**1.214.859.410.160,40**	**112.673.396.366,48**	**0,00**	**1.327.532.806.526,88**

Lampiran 7

Tabel Rekapan Mutasi Aset tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	29.726.306.576,00	306.725.252,00	0,00	30.033.031.828,00
2	Dinas Kesehatan	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	647.685.000,00	0,00	0,00	647.685.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.420.000,00	0,00	0,00	215.420.000,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	475.210.950,00	0,00	0,00	475.210.950,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12	Dinas Perhubungan	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	68.250.000,00	0,00	0,00	68.250.000,00
17	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Pertanian	9.987.500,00	0,00	0,00	9.987.500,00
19	Dinas Peternakan	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	32.717.615,00	0,00	0,00	32.717.615,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bagian Hukum	8.923.500,00	0,00	0,00	8.923.500,00
25	Bagian Organisasi	115.972.400,00	0,00	0,00	115.972.400,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	509.573.843,00	20.468.614,00	0,00	530.042.457,00
29	Sekretariat DPRD	8.106.800,00	0,00	0,00	8.106.800,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	7.331.000,00	0,00	0,00	7.331.000,00

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
31	Badan Keuangan Dan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Sekretariat Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Inspektorat	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
36	Kecamatan Lobalain	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Kelurahan Metina	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Rote Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Rote Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Rote Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Pantai Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Rote Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Landu Leko	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kecamatan Loaholu	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**31.883.468.184,00**	**327.193.866,00**	**23.500.000,00**	**32.187.162.050,00**

Lampiran 8

Tabel Rekapan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap Tahun 2023

No.	URAIAN ASET TETAP	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN SESUAI LKPD 2022	KOREKSI SALDO AWAL	MUTASI BERTAMBAH	PENGHAPUSAN	AKUMULASI UNAUDITED SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Peralatan dan Mesin	252.445.276.983,17	8.501.950.928,09	36.216.469.381,92	8.965.440.330,00	288.198.256.963,19
3	Gedung dan Bangunan	100.074.218.879,11	474.689.880,19	11.965.011.328,26	1.112.971.294,19	111.400.948.793,37
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	535.326.206.539,64	-17.950.072,67	59.735.706.693,60	0,00	595.043.963.160,58
5	Aset Tetap Lainnya	7.084.666,00	0,00	15.176.000,00	0,00	22.260.666,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**887.852.787.067,93**	**8.958.690.735,62**	**107.932.363.403,79**	**10.078.411.624,19**	**994.665.429.583,14**

Lampiran 9

Tabel Rekapan Mutasi Aset Lain-lain Per Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	15.875.161.767,00	0,00	85.000.000,00	15.790.161.767,00
2	Dinas Kesehatan	6.441.526.930,00	406.871.098,15	1.543.245.920,00	5.305.152.108,15
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.744.541.108,05	321.591.545,53	0,00	3.066.132.653,58
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	12.071.548.545,00	0,00	405.669.000,00	11.665.879.545,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	251.404.000,00	0,00	10.104.000,00	241.300.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	441.238.500,00	0,00	0,00	441.238.500,00
7	Dinas Sosial	32.395.000,00	0,00	0,00	32.395.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	84.983.750,00	468.789.823,00	50.920.350,00	502.853.223,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.044.189.000,00	0,00	0,00	1.044.189.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	513.839.700,00	0,00	432.899.700,00	80.940.000,00
12	Dinas Perhubungan	4.534.000,00	0,00	0,00	4.534.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	236.642.000,00	97.871.978,37	154.812.000,00	179.701.978,37
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	817.884.652,00	34.025.500,00	444.566.000,00	407.344.152,00
17	Dinas Perikanan	2.099.689.625,00	0,00	79.262.500,00	2.020.427.125,00
18	Dinas Pertanian	12.031.697.049,00	0,00	37.000.000,00	11.994.697.049,00
19	Dinas Peternakan	856.441.215,00	0,00	0,00	856.441.215,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	100.436.000,00	0,00	33.250.000,00	67.186.000,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	171.012.005,00	0,00	0,00	171.012.005,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	177.574.599,00	0,00	0,00	177.574.599,00
24	Bagian Hukum	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00	0,00
25	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	1.802.926.800,00	0,00	0,00	1.802.926.800,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.873.996,00	0,00	0,00	4.873.996,00
29	Sekretariat DPRD	17.618.900,00	0,00	0,00	17.618.900,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	-	0,00	0,00	0,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	9.500.542.616,54	0,00	647.513.051,00	8.853.029.565,54
32	Badan Pendapatan	480.585.191,80	0,00	0,00	480.585.191,80
33	Sekretariat Korpri	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00

No	Perangkat Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
35	Inspektorat	22.426.000,00	0,00	0,00	22.426.000,00
36	Kecamatan Lobalain	21.320.800,00	0,00	0,00	21.320.800,00
37	Kantor Kelurahan Metina	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	135.260.000,00	0,00	0,00	135.260.000,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	99.030.000,00	0,00	0,00	99.030.000,00
43	Kecamatan Rote Barat	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
44	Kecamatan Rote Selatan	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	59.331.000,00	0,00	0,00	59.331.000,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Pantai Baru	8.500.000,00	0,00	5.000.000,00	3.500.000,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Rote Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Landu Leko	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Kecamatan Loaholu	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.420.000,00	0,00	0,00	24.420.000,00
	Jumlah	**68.227.637.749,39**	**1.329.149.945,05**	**3.953.467.521,00**	**65.603.320.173,44**

Lampiran 10

Tabel Rekapan Beban Pegawai Per Perangkat Daerah

No	Unit Kerja	Belanja LRA (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Beban Pegawai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (3+4-5)*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	156.503.686.553,00	0,00	0,00	156.503.686.553,00
2	Dinas Kesehatan	42.664.778.562,00	20.736.350,00	4.996.000,00	42.680.518.912,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.853.248.906,00	0,00	0,00	2.853.248.906,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	2.128.574.623,00	0,00	0,00	2.128.574.623,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.709.491.372,00	0,00	0,00	1.709.491.372,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	803.055.556,00	8.601.510,00	4.562.460,00	807.094.606,00
7	Dinas Sosial	1.625.231.946,00	0,00	964.001,00	1.624.267.945,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.787.062.411,00	0,00	0,00	1.787.062.411,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.523.333.251,00	0,00	0,00	1.523.333.251,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.562.205.923,00	795.000,00	0,00	1.563.000.923,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.793.436.309,00	1.110.683,00	0,00	1.794.546.992,00
12	Dinas Perhubungan	1.502.105.212,00	0,00	2.862.225,00	1.499.242.987,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	1.811.186.734,00	0,00	418.605,00	1.810.768.129,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	2.198.606.854,00	0,00	1.058.409,00	2.197.548.445,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	1.667.018.313,00	0,00	0,00	1.667.018.313,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	1.769.257.278,00	373.578,00	0,00	1.769.630.856,00
17	Dinas Perikanan	1.338.042.717,00	0,00	0,00	1.338.042.717,00
18	Dinas Pertanian	5.776.600.066,00	0,00	17.906.230,00	5.758.693.836,00
19	Dinas Peternakan	3.552.939.176,00	429.612,00	1.133.790,00	3.552.234.998,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.499.379.013,00	0,00	1.122.900,00	1.498.256.113,00
21	Sekretariat Daerah				0,00
22	Bagian Umum	5.904.599.576,00	0,00	0,00	5.904.599.576,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	54.340.000,00	0,00	0,00	54.340.000,00
24	Bagian Hukum	41.040.000,00	0,00	0,00	41.040.000,00
25	Bagian Organisasi	37.060.000,00	0,00	0,00	37.060.000,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	39.960.000,00	0,00	0,00	39.960.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	351.660.000,00	0,00	0,00	351.660.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.134.988.925,00	0,00	1.387.953,00	1.133.600.972,00
29	Sekretariat DPRD	11.786.703.549,00	768.096,00	0,00	11.787.471.645,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	2.016.699.025,00	750.800,00	904.335,00	2.016.545.490,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	9.470.308.409,00	0,00	4.217.352,00	9.466.091.057,00
32	Badan Pendapatan	3.592.612.589,00	0,00	1.856.652,00	3.590.755.937,00
33	Sekretariat Korpri	500.484.006,00	0,00	0,00	500.484.006,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	1.512.375.579,00	0,00	864.524,00	1.511.511.055,00
35	Inspektorat	2.579.501.932,00	0,00	2.676.515,00	2.576.825.417,00
36	Kecamatan Lobalain	2.774.760.340,00	1.307.343,00	1.187.700,00	2.774.879.983,00
37	Kantor Kelurahan Metina	23.910.000,00	0,00	0,00	23.910.000,00

No	Unit Kerja	Belanja LRA (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Beban Pegawai (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (3+4-5)*
38	Kantor Kelurahan Namodale	32.160.000,00	0,00	0,00	32.160.000,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	32.160.000,00	0,00	0,00	32.160.000,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	1.842.741.822,00	0,00	0,00	1.842.741.822,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	32.160.000,00	0,00	0,00	32.160.000,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	1.075.286.625,00	944.586,00	0,00	1.076.231.211,00
43	Kecamatan Rote Barat	1.274.719.610,00	0,00	0,00	1.274.719.610,00
44	Kecamatan Rote Selatan	1.093.160.681,00	0,00	0,00	1.093.160.681,00
45	Kecamatan Rote Tengah	1.571.350.720,00	0,00	1.066.143,00	1.570.284.577,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	32.160.000,00	0,00	0,00	32.160.000,00
47	Kecamatan Pantai Baru	1.658.651.275,00	4.683.684,00	0,00	1.663.334.959,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
49	Kecamatan Rote Timur	1.082.196.542,00	0,00	0,00	1.082.196.542,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	25.560.000,00	0,00	0,00	25.560.000,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	446.801.266,00	0,00	0,00	446.801.266,00
52	Kecamatan Landu Leko	591.300.866,00	0,00	0,00	591.300.866,00
53	Kecamatan Loaholu	1.108.419.865,00	0,00	0,00	1.108.419.865,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	824.057.013,00	7.210.000,00	0,00	831.267.013,00
	Jumlah	**290.635.690.990,00**	**47.711.242,00**	**49.185.794,00**	**290.634.216.438,00**

Lampiran 11

Tabel Beban Persediaan

No	Unit Kerja	Belanja Persediaan LRA (Rp)	Persediaan Tahun 2022 (Rp)	Koreksi belanja Modal (Rp)	Penerimaan Hibah	Persediaan Akhir 2023 (Rp)	Beban Persediaan (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (3+4+5+6-7)*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	9.377.069.700,00	22.429.729.847,00	10.250.000,00	0,00	0,00	31.817.049.547,00
2	Dinas Kesehatan	13.868.498.043,00	12.679.562.474,17	9.239.996,00	158.530.071,00	13.179.767.370,40	13.536.063.213,77
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.463.365.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.365.421,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	2.132.150.600,00	3.175.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.132.690.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.381.526.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.526.200,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	404.507.600,00	123.170.000,00	0,00	0,00	0,00	527.677.600,00
7	Dinas Sosial	122.698.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.698.950,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	2.305.264.600,00	318.170.455,00	17.173.500,00	0,00	516.387.354,00	2.124.221.201,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	352.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.989.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	284.194.000,00	521.587.000,00	0,00	0,00	413.814.000,00	391.967.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	251.892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.892.500,00
12	Dinas Perhubungan	131.575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.575.800,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	102.754.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.754.200,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.069.340.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.340.950,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	218.422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.422.900,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	581.135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.135.100,00
17	Dinas Perikanan	6.323.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.445.300,00
18	Dinas Pertanian	8.569.461.200,00	234.667.000,00	0,00	0,00	427.901.960,00	8.376.226.240,00
19	Dinas Peternakan	6.562.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.777.000,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	207.295.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.295.215,00
21	Sekretariat Daerah				0,00		0,00
22	Bagian Umum	5.958.479.110,00	60.510.000,00	0,00	0,00	0,00	6.018.989.110,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	283.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.970.000,00
24	Bagian Hukum	100.475.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.475.900,00
25	Bagian Organisasi	93.631.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.631.800,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	86.663.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.663.900,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	51.069.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.069.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	63.514.900,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	80.964.900,00
29	Sekretariat DPRD	6.477.936.575,00	578.500,00	0,00	0,00	353.500,00	6.478.161.575,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	473.476.890,00	951.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	473.022.890,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	610.047.205,00	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	654.447.205,00
32	Badan Pendapatan	243.793.781,00	249.351.350,00	0,00	0,00	293.265.650,00	199.879.481,00
33	Sekretariat Korpri	37.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870.000,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	188.253.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.253.900,00
35	Inspektorat	85.503.300,00	538.500,00	0,00	0,00	0,00	86.041.800,00
36	Kecamatan Lobalain	86.358.000,00	9.435.000,00	0,00	0,00	0,00	95.793.000,00
37	Kantor Kelurahan Metina	87.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.335.000,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	98.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.542.000,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	103.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.210.000,00

No	Unit Kerja	Belanja Persediaan LRA (Rp)	Persediaan Tahun 2022 (Rp)	Koreksi belanja Modal (Rp)	Penerimaan Hibah	Persediaan Akhir 2023 (Rp)	Beban Persediaan (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (3+4+5+6-7)*
40	Kecamatan Rote Barat Laut	92.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.413.000,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	105.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.806.600,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	93.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.660.000,00
43	Kecamatan Rote Barat	63.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.698.400,00
44	Kecamatan Rote Selatan	85.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.461.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	59.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.760.000,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	134.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.540.000,00
47	Kecamatan Pantai Baru	85.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685.000,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	108.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.930.000,00
49	Kecamatan Rote Timur	74.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.281.000,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	103.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.350.000,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	50.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310.000,00
52	Kecamatan Landu Leko	71.859.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.859.400,00
53	Kecamatan Loaholu	52.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592.000,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	94.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.865.000,00
	Jumlah	**74.117.706.940,00**	**36.693.276.126,17**	**36.663.496,00**	**158.530.071,00**	**14.835.529.834,40**	**96.170.646.798,77**

Lampiran 12

Tabel Beban Jasa

No	Unit Kerja	Belanja Jasa LRA (Rp)	Dedet	Kredit	Beban Jasa (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (3+4-5)*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	12.468.662.675,00	383.010.000,00	0,00	12.851.672.675,00
2	Dinas Kesehatan	25.998.520.237,00	0,00	584.252,27	25.997.935.984,73
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.522.470.873,00	0,00	0,00	2.522.470.873,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	2.781.770.861,00	0,00	0,00	2.781.770.861,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.897.000,00	0,00	0,00	14.897.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	377.143.200,00	0,00	0,00	377.143.200,00
7	Dinas Sosial	314.181.830,00	0,00	0,00	314.181.830,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.182.214.238,00	4.200.000,00	164.995.000,00	4.021.419.238,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	44.197.605,00	0,00	0,00	44.197.605,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	75.653.901,00	0,00	0,00	75.653.901,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	199.684.800,00	5.000.000,00	0,00	204.684.800,00
12	Dinas Perhubungan	80.349.836,00	0,00	0,00	80.349.836,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	240.672.650,00	0,00	0,00	240.672.650,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	717.252.850,00	0,00	0,00	717.252.850,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	139.943.613,00	0,00	0,00	139.943.613,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	923.226.662,00	17.800.000,00	0,00	941.026.662,00
17	Dinas Perikanan	410.640.700,00	0,00	0,00	410.640.700,00
18	Dinas Pertanian	347.166.100,00	0,00	0,00	347.166.100,00
19	Dinas Peternakan	1.209.468.000,00	0,00	0,00	1.209.468.000,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	276.007.911,00	0,00	0,00	276.007.911,00
21	Sekretariat Daerah				0,00
22	Bagian Umum	3.134.399.552,00	0,00	0,00	3.134.399.552,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	387.014.300,00	0,00	0,00	387.014.300,00
24	Bagian Hukum	27.960.000,00	0,00	0,00	27.960.000,00
25	Bagian Organisasi	44.180.750,00	0,00	0,00	44.180.750,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	353.716.180,00	0,00	0,00	353.716.180,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	291.760.000,00	0,00	0,00	291.760.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	71.758.831,00	2.550.000,00	0,00	74.308.831,00
29	Sekretariat DPRD	1.227.527.200,00	0,00	0,00	1.227.527.200,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.419.335.510,00	0,00	0,00	1.419.335.510,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	2.717.959.558,00	0,00	0,00	2.717.959.558,00
32	Badan Pendapatan	287.708.289,00	0,00	0,00	287.708.289,00
33	Sekretariat Korpri	31.490.975,00	0,00	0,00	31.490.975,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	1.252.004.150,00	0,00	0,00	1.252.004.150,00
35	Inspektorat	38.898.028,00	0,00	0,00	38.898.028,00
36	Kecamatan Lobalain	6.134.910,00	0,00	0,00	6.134.910,00
37	Kantor Kelurahan Metina	132.271.000,00	0,00	0,00	132.271.000,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	128.275.000,00	0,00	0,00	128.275.000,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	157.582.100,00	0,00	0,00	157.582.100,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	16.142.650,00	0,00	0,00	16.142.650,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	135.846.200,00	0,00	0,00	135.846.200,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	12.335.000,00	0,00	0,00	12.335.000,00
43	Kecamatan Rote Barat	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
44	Kecamatan Rote Selatan	7.661.000,00	0,00	0,00	7.661.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	18.862.620,00	0,00	0,00	18.862.620,00
46	Kantor Kelurahan Onatali	111.900.000,00	0,00	0,00	111.900.000,00

47	Kecamatan Pantai Baru	13.308.900,00	0,00	0,00	13.308.900,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	93.180.000,00	0,00	0,00	93.180.000,00
49	Kecamatan Rote Timur	167.504.800,00	0,00	0,00	167.504.800,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
52	Kecamatan Landu Leko	37.207.000,00	0,00	0,00	37.207.000,00
53	Kecamatan Loaholu	44.073.000,00	0,00	0,00	44.073.000,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	288.721.175,00	0,00	0,00	288.721.175,00
	Jumlah	**65.997.099.420,00**	**412.560.000,00**	**165.579.252,27**	**66.244.080.167,73**

Lampiran 13

Tabel Beban Perjalanan Dinas

No	Unit Kerja	Belanja LRA Perjalanan Dinas (Rp)	Atribusi Belanja Barang dan Jasa 2023 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5 (3-4)*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga	2.576.005.425,00	0,00	2.576.005.425,00
2	Dinas Kesehatan	9.732.711.746,00	(5.991.000,00)	9.738.702.746,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	574.673.090,00	0,00	574.673.090,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan Dan Lingkungan Hidup	645.818.159,00	0,00	645.818.159,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	295.814.800,00	0,00	295.814.800,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	159.523.000,00	0,00	159.523.000,00
7	Dinas Sosial	132.532.000,00	0,00	132.532.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	473.060.500,00	14.496.000,00	458.564.500,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	244.288.000,00	0,00	244.288.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	495.108.500,00	0,00	495.108.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	390.546.500,00	0,00	390.546.500,00
12	Dinas Perhubungan	166.370.000,00	0,00	166.370.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian	163.114.000,00	0,00	163.114.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	995.462.950,00	0,00	995.462.950,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	499.235.000,00	0,00	499.235.000,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	708.679.600,00	0,00	708.679.600,00
17	Dinas Perikanan	351.390.970,00	0,00	351.390.970,00
18	Dinas Pertanian	486.058.100,00	0,00	486.058.100,00
19	Dinas Peternakan	356.486.000,00	0,00	356.486.000,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	345.702.000,00	0,00	345.702.000,00
21	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
22	Bagian Umum	1.912.531.800,00	0,00	1.912.531.800,00
23	Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	545.719.750,00	0,00	545.719.750,00
24	Bagian Hukum	134.630.000,00	0,00	134.630.000,00
25	Bagian Organisasi	101.488.500,00	0,00	101.488.500,00
26	Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	225.414.750,00	0,00	225.414.750,00
27	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	125.810.444,00	0,00	125.810.444,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	191.682.000,00	0,00	191.682.000,00
29	Sekretariat DPRD	4.047.362.855,00	0,00	4.047.362.855,00
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	1.414.769.550,00	0,00	1.414.769.550,00
31	Badan Keuangan Dan Aset	1.559.857.437,00	0,00	1.559.857.437,00
32	Badan Pendapatan	294.104.836,00	0,00	294.104.836,00
33	Sekretariat Korpri	69.600.000,00	0,00	69.600.000,00
34	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	588.468.550,00	0,00	588.468.550,00
35	Inspektorat	559.662.190,00	0,00	559.662.190,00
36	Kecamatan Lobalain	142.142.000,00	0,00	142.142.000,00
37	Kantor Kelurahan Metina	57.630.000,00	0,00	57.630.000,00
38	Kantor Kelurahan Namodale	48.960.000,00	0,00	48.960.000,00
39	Kantor Kelurahan Mokdale	58.140.000,00	0,00	58.140.000,00
40	Kecamatan Rote Barat Laut	84.762.000,00	0,00	84.762.000,00
41	Kantor Kelurahan Busalangga	33.660.000,00	0,00	33.660.000,00
42	Kecamatan Rote Barat Daya	93.840.000,00	0,00	93.840.000,00
43	Kecamatan Rote Barat	126.210.000,00	0,00	126.210.000,00
44	Kecamatan Rote Selatan	99.450.000,00	0,00	99.450.000,00
45	Kecamatan Rote Tengah	119.540.000,00	0,00	119.540.000,00

46	Kantor Kelurahan Onatali	48.960.000,00	0,00	48.960.000,00
	Kecamatan Pantai Baru	94.450.000,00	0,00	94.450.000,00
48	Kantor Kelurahan Olafulihaa	56.270.000,00	0,00	56.270.000,00
49	Kecamatan Rote Timur	88.484.000,00	0,00	88.484.000,00
50	Kantor Kelurahan Londalusi	34.850.000,00	0,00	34.850.000,00
51	Kecamatan Ndao Nuse	137.190.000,00	0,00	137.190.000,00
52	Kecamatan Landu Leko	104.497.000,00	305.000,00	104.192.000,00
53	Kecamatan Loaholu	97.010.000,00	0,00	97.010.000,00
54	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	187.559.000,00	0,00	187.559.000,00
	Jumlah	**33.277.287.002,00**	**0,00**	**33.268.477.002,00**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN DAERAH *"ITA ESA"*

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

PERUSAHAAN DAERAH "*ITA ESA*"
KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN	
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
- Neraca	1
- Laporan Laba/Rugi	2
- Laporan Perubahan Ekuitas	3
- Laporan Arus Kas	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN POKOK	7 - 17

Lampiran I : Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2018

Lampiran II : Daftar Aset tetap dan Penyusutannya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PERUSAHAAN DAERAH "*ITA ESA*"
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai, Jl. Lekunik – Ba'a

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH " *ITA ESA*" KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN BUKU 2018

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
Jabatan : Plt. Direktur
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga, Permai, Jl. Lekunik – Ba'a

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Daerah " Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao tahun buku 2018.
2. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah " Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao tahun buku 2018 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Semua informasi dalam Laopran Keuangan Perusahaan Daerah "Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah " Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas pengendalian intern Perusahaan Daerah " Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ba'a, 31 Desember 2018

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PD. ITA ESA

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
Plt. Direktur

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
PD. ITA ESA

LAPORAN KEUANGAN POKOK

PERUSAHAAN DAERAH "ITA ESA"
KABUPATEN ROTE NDAO
N E R A C A
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (Unaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
ASET		
ASET LANCAR		
- Kas dan Setara Kas	985.548.020	1.081.439.453
- Piutang Usaha Dagang	-	-
dikurangi :		
Cadangan Penyisihan Piutang Usaha	-	-
Jumlah Piutang Usaha Netto		
- Piutang Pegawai	500.000	500.000
- Piutang Lainnya	65.130.000	65.130.000
- Persediaan	17.952.500	17.952.500
Jumlah Aset Lancar	**1.069.130.520**	**1.165.021.953**
ASET TETAP		
- Tanah	-	-
- Bagunan Gedung	-	-
- Peralatan dan Perlengkapan	-	-
- Kendaraan	443.400.000	443.400.000
- Inventaris Kantor	81.391.500	81.391.500
Nilai Perolehan Aset Tetap	524.791.500	524.791.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(521.541.429)	(519.916.429)
Nilai Buku Aset Tetap	3.250.071	4.875.071
ASET LAIN-LAIN		
- Sisa kas di kantor		
- Biaya Perijinan Joint Bersama	-	-
- Piutang Lain-lain	-	-
dikurangi :		
Amortisasi Piutang Lain-lain		
Nilai Buku Piutang Lain-lain		
Jumlah Aset Lain-lain	-	-
JUMLAH ASET	**1.072.380.591**	**1.169.897.024**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
- Hutang Usaha		
- Hutang Non Usaha	136.575.000	136.575.000
- Hutang Pajak	7.200.000	7.200.000
- Biaya Yang Masih Harus di Bayar	66.000.000	66.000.000
- Hutang Lain-lain	93.431.256	93.431.256
Jumlah Kewajiban Jangka pendek	**303.206.256**	**303.206.256**
EKUITAS		
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	3.900.000.000	3.900.000.000
- Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya	-	-
- Laba/(Rugi) Ditahan	(3.033.309.232)	(2.952.784.232)
- Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	(97.516.433)	(80.525.000)
Jumlah Ekuitas	**769.174.335**	**866.690.768**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.072.380.591**	**1.169.897.024**
	-	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PERUSAHAAN DAERAH "ITA ESA"
KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN LABA/RUGI
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017 (Diaudit)
PENDAPATAN USAHA		
- Pendapatan Usaha Agen Pupuk		
- Pendapatan Usaha Kendaraan Umum (Bus)		
- Pendapatan Usaha Sewa Alat Berat		
Pendapatan Usaha Halal Lainnya		
Jumlah Pendapatan		
HARGA POKOK PENJUALAN		
- HARGA POKOK PENJUALAN	-	-
Jumlah Beban Operasional		-
LABA (RUGI) KOTOR	-	-
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		
- Beban Pegawai	33.750.000	49.110.000
- Beban BBM	-	5.400.000
- Beban Air, Listrik dan telepon	-	-
- Beban Pemeliharaan	-	1.565.000
- Beban Kantor Penyusunan laporan keuangan dan Audit	50.000.000	2.867.500
- Beban Umum Lainnya		7.200.000
- Beban Penyusunan laporan keuangan dan Audit		-
- Beban Badan Pengawas	12.757.500	12.757.500
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.625.000	1.625.000
	98.132.500	80.525.000
BEBAN PROMOSI PENJUALAN	-	-
Jumlah Beban Adm. Umum dan Penjualan	98.132.500	80.525.000
LABA (RUGI) OPERASIONAL	(98.132.500)	(80.525.000)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
- Jasa Giro	616.067	
- Beban Lain-lain		
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	616.067	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(97.516.433)	(80.525.000)
PPH BADAN		
LABA (RUGI) SETELAH PPH BADAN	(97.516.433)	(80.525.000)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PERUSAHAAN DAERAH "ITA ESA"
KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	Penyertaan Pemerintah Kabupaten	Pemupukan Modal	Laba/(Rugi) sd. Tahun Lalu	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2016	3.400.000.000	-	(2.926.384.232)	(26.400.000)	447.215.768
Koreksi laba/(rugi) tahun lalu	-	-	-	-	-
Mutasi Tahun 2017					-
Laba/(rugi) tahun 2017	-	-		(80.525.000)	(80.525.000)
Penambahan Modal	500.000.000				500.000.000
Cadangan Dana	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2017	3.900.000.000	-	(2.926.384.232)	(106.925.000)	866.690.768
Koreksi laba/(rugi) tahun lalu					-
Mutasi Tahun 2018 :					-
Laba/(rugi) tahun 2018				(97.516.433)	(97.516.433)
Penambahan Modal					-
Cadangan Dana					-
Saldo per 31 Desember 2018	3.900.000.000	-	(2.926.384.232)	(204.441.433)	769.174.335

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PERUSAHAAN DAERAH "ITA ESA"
KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017 (Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih Setelah Pajak	(97.516.433)	(80.525.000)
Penyesuaian untuk :	-	-
- Penyusutan Aset Tetap	1.625.000,00	1.625.000
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
- Penyisihan Piutang	-	-
;- Koreksi saldo Laba (Rugi) ditahan	-	(600.000)
Laba Bersih sebelum perubahan modal kerja	(95.891.433)	(79.500.000)
Penurunan (Peningkatan) modal kerja selain kas :	-	-
- Penurunan (Peningkatan) piutang usaha dagang		
- Penurunan (Peningkatan) piutang usaha pemberian pinjaman		
- Penurunan (Peningkatan) piutang pegawai	-	
- Penurunan (Peningkatan) uang muka pembelian	-	
- Penurunan (Peningkatan) persediaan	-	
- Peningkatan (penurunan) hutang pajak		7.200.000
- Penurunan (Peningkatan) biaya YMH dibayar		13.200.000
Arus kas dari aktivitas operasi	-	20.400.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pengadaan aset tetap	-	(6.500.000)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	-	(6.500.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Penyertaan pemerintah daerah	-	500.000.000
- Penghapusan aset tetap karena rusak/musnah	-	-
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	-	500.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN BERSIH KAS)	(95.891.433)	434.400.000
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	1.081.439.453	1.081.439.453
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	985.548.020	1.515.839.453
Terdiri dari :		
- Kas tunai	646.435.720	646.435.720
- Bank	339.112.300	435.003.733
SALDO KAS DAN SETARA KAS	985.548.020	1.081.439.453

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN POKOK

PERUSAHAAN DAERAH "*ITA ESA*"
KABUPATEN ROTE NDAO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan Dalam Rupiah)

1. UMUM

1.1 Dasar Pendirian

Perusahaan Daerah (PD) "Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 18 Mei 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Itas Esa Kabupaten Rote Ndao, melanjutkan usaha Perusahaan Daerah Ita Esa yang sebelumnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2004 Tanggal 16 Juni 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ita Esa Kabupaten Rote Ndao.

Kepemilikan perusahaan 100% oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Perusahaan mulai lagi beroperasi pada akhir tahun 2017 setelah sekitar lima tahun tidak melaksanakan kegiatan operasonal, yaitu setelah disuntik lagi dengan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2017.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tujuan pendirian perusahaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2013 adalah melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan peningkatan PAD.

Tugas pokok perusahaan adalah :

a. Membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di segala sektor demi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan PAD dari sumber-sumber bukan pajak dalam bentuk kontribusi bagi APBD Kabupaten Rote Ndao.

Perusahaan menjalankan berbagai usaha, antara lain adalah :

a. Usaha di sektor industry;
b. Usaha di sektor pemasaran atau pergudangan; dan
c. Usaha jasa angkutan dan konstruksi.

Pada saat ini unit usaha terdaftar adalah agen pupuk, pengoperasian bus dan usaha persewaan alat berat. Kantor pusat PD "Ita Esa", beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai, Lekunik, Ba'a, Kabupaten Rote Ndao. Disamping itu, perusahaan lokasi kantor lama di Jl. Raya Ba'a - Busalangga, Ba'a.

1.3 Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi dan tata kerja PD "Ita Esa", Kabupaten Rote Ndao mengacu pada Perda Nomor 35 Tahun 2004, sebagai berikut :

a. Badan Pengawas

Susunan Badan Pengawas PD "Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao tahun 2018 dibentuk dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 445/KEP/HK/2017 tanggal 23 Desember 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Tim
1	Daniel W. Nalle, S.PT	Kepala Badan Keuangan	Ketua
2	Herman Ndun,SE	Kacab Bank BRI Ba'a	Sekretaris
3	Sonny H. Sereh, SE	Kacab Bank NTT Ba'a	Anggota

b. Direktur

Direktur PD "Ita Esa" dijabat sementara (Plt) oleh Pius Mali, S,IP, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 314/KEP/HK/2017 tanggal 8 Juli 2017, untuk masa jabatan tiga bulan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Nomor : 405/KEP/HK/2017 tanggal 6 November 2017 untuk masa 3 bulan sampai dengan 8 Januari 2018, kemudian diperpanjang dengan surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 9.a/KEP/KEP/HK/2018 tanggal 6 Januari 2018 untuk masa 3 bulan sampai dengan 8 April 2018, kemudian diperpanjang dengann surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 226.a/KEP/HK/2018 tanggal 5 April 2018 untuk masa 3 bulan sampai dengan 8 Juli 2018, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 424/KEP/HK/2018 tanggal 1 Desember 2018 untuk masa 3 bulan sampai dengan 1 Maret 2019 an. Arkalaus H. Lenggu, S.Pd. M.Si

Tugas Plt Direktur adalah :

1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD "Ita Esa"
2) Memberikan pertimbangan dan saran kepada daerah, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PD "Ita Esa", antara lain :
   a. Menyelesaikan administrasi umum dan keuangan;
   b. Menyusun program kerja;
   c. Rencana ikatan hokum dengan pihak lain;
   d. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas;
   e. Menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

c. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia PD "Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2018 berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :

No	Uraian	Status			Jumlah
		PNS Diperbantukan	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	
1	Direktur (Plt)	1	-	-	1
2	Kepala Bagian	2	-	-	2
3	Staf	2	-	-	2
	Jumlah	5	-	-	5

Plt Direktur dirangkap oleh Inspektur Kabupaten Rote Ndao, dan PNS diperbantukan adalah PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Berasarkan tingkat pendidikan pegawai, terdiri dari :

No	Uraian	Status			Jumlah
		PNS	Tetap	Kontrak	
1	Sarjana S1	1	-	-	1
2	Sarjana Muda/D3	-	-	-	-
3	SLTA	4	-	-	4
	Jumlah	5	-	-	5

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PD "Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao yang penting adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PD "Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao disusun menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dasar penyusunan Laporan Keuangan menggunakan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

c. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari uang tunai di kas kecil (petty cash) dan saldo rekening tabungan (giro) bank yang siap setiap saat digunakan, dan tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan perusahaan. Setara kas meliputi deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan, dan tidak dijaminkan atas hutang.

d. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat dan disajikan berdasarkan besarnya piutang yang benar-benar dapat ditagih. Perusahaan belum menghitung cadangan penyisihan atas piutang tak tertagih karena belum ada ketentuan tertulis mengenai besaran cadangan yang harus dibentuk, namun berdasarkan hasil penelaahan terhadap tingkat kolektibilitas masing-masing debitur, debitur dengan umur piutang paling rendah 1 (satu) tahun dicadangkan penyisihan kerugiannya.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode pertama, keluar pertama (FIFO).

Persediaan dikelompokkan de dalam dua kategori, yaitu persediaan barang dagangan dan persediaan barang cetakan/ATK. Persediaan diukur pada harga perolehannya, yang meliputi seluruh pembelian dan harga yang dapat dibebankan secara langsung serta beban lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Pencatatan terhadap kedua jenis persediaan menggunakan "Physical Inventory Method".

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak, usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "Kerugian Penurunan Nilai Persediaan".

f. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar beban perolehan termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai asset tetap tersebut siap digunakan.

Aset tetap disusutkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 96/KMK.03/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Prosentase
- Kelompok 1	25%
- Kelompok 2	12,50%
- Kelompok 3	6,25%
- Kelompok 4	5%
- Bangunan Permanen	5%
- Bangunan Semi Permanen	10%

Pada setiap tanggal pelaporan, terhadap asset tetap dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai asset. Aset tetap yang mengalami penurunan nilai diestimasi sesuai dengan nilai wajar dikurangi dengan beban untuk menjual aset tersebut. Penilaian aset bisa secara individu tetapi dalam kondisi tertentu harus diestimasi untuk kelompok aset.

Penurunan nilai aset diakui sebagai beban laba rugi tahun berjalan dan dicatat dalam pos Beban Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dalam penyelesaian harus dilaporkan terpisah dari aset tetap yang beroperasi, dan Rote Ndao dapat disusutkan sampai aset tersebut dinyatakan beroperasi komersil.

Entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat :

a. Dilepas; atau
b. Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspetasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut disusutkan secara penuh.

g. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud dapt diakui hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan dating dari aset tersebut.
2) Beban perolehan aset atau nilai aset dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur sebesar beban perolehannya, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta beban lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Aset tak berwujud diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya. Umur manfaat aset tak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hokum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika kontraktual atau hokum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbaharui, maka umur manfaatnya termasuk periode yang diperbaharui hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak tersebut yang dilakukan tanpa beban yang signifikan.

Aset tak berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfaatnya dianggap 10 (sepuluh) tahun.

h. Hutang/Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya.

Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Kewajiban bunga atas kewajiban jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang, dicatat dalam perkiraan "Kewajiban Bunga Masa Tenggang".

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan usaha dan jasa layanan diakui pada saat hasil penjualan jasa dapat diestimasi dengan handal. Pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima (cash basis) atau hak menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa diserahkan (accrual basis).

Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis).

j. Kelangsungan Hidup Perusahaan

Laporan keuangan disusun dengan anggapan perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (going concern). Tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

3. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. Kas dan Setara Kas

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2018 sebagai berikut :

	Per 31 -12 - 2018	Per 31 - 12 - 2017
- Kas Kantor	Rp. 646.435.720,00	Rp. 646.435.720,00
- Giro Bank NTT Cab Ba'a No. Rek. 014.01.09.000003-2 an. PD "Ita Esa"	Rp. 339.112.300,00	Rp. 435.003.733,00
Jumlah	Rp. 985.548.020,00	Rp. 1.081.439.453,00

Saldo kas kantor sebesar Rp. 646.435.720,00 adalah saldo bawaan neraca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Tidak ada serah terima kas antara pejabat/pemegang kas lama kepada pejabat/pemegang kas baru.

Sesuai berita acara pemeriksaan kas per 31 Desember 2018, saldo kas kantor nihil (lihat lampiran I/1-2).

Saldo rekening giro pada Bank NTT Cabang Ba'a nomor rekening 014.01.09.000003-2 atas nama PD "Ita Esa", telah sesuai dengan saldo rekening Koran bank sejumlah Rp. 339.112.300,00

b. Piutang Pegawai

Saldo piutang pegawai per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 adalah saldo bawaan neraca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Saldo piutang pegawai tersebut tidak dapat dirinci debiturnya.

c. Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 65.130.000,00 adalah saldo bawaan neraca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Saldo piutang pegawai tersebut tidak dapat dirinci debiturnya.

d. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 17.952.500,00 adalah nilai persediaan pupuk bawaan neraca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Tidak ada serah terima persediaan antara pejabat/pengurus barang lama kepada pejabat/pengurus barang baru.

Sesuai berita acara opname persediaan per 31 Desember 2018, saldo persediaan nihil (lihat lampiran II/1-1).

e. Aset Tetap

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Per 31-12-2017 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan (Rp)	Per 31-12-2018 (Rp)
Nilai Perolehan :			
- Tanah	0,00	0,00	0,00
- Bangunan/Gedung	0,00	0,00	0,00
- Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
- Kendaraan/Alat Angkut	443.400.000,00	0,00	443.400.000,00
- Inventaris/Perabot	81.391.500,00	0,00	81.391.500,00
Jumlah Nilai Perolehan	524.791.500,00	0,00	524.791.500,00
Akumulasi Penyusutan			
- Bangunan/Gedung	0,00	0,00	0,00
- Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
- Kendaraan/Alat Angkut	443.400.000,00	0,00	443.400.000,00
- Inventaris/Perabot	76.516.435,00	1.625.000,00	78.141.435,00
Jumlah Ak. Penyusutan	519.916.435,00	1.625.000,00	521.541.435,00
Nilai Buku	**72,00**		**3.250.071,00**

Penambahan aset tetap dalam tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 Beberapa jenis aset tetap mengalami kerusakan berat karena tidak terawat sejak tahun 2012 akibat kevakuman kegiatan.

Rincian per jenis aset tetap dan penyusutannya, lihat lampiran III/1-1.

f. Hutang Non Usaha

Saldo hutang non usaha per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 136.575.000,00 adalah saldo bawaan nereca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Saldo hutang non usaha tersebut tidak dapat dirinci krediturnya.

g. Hutang Pajak

Saldo hutang pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.200.000,00 merupakan denda keterlambatan penyampaian SPT Masa tahun 2015 yang disampaikan fiskus melalui Surat Tagihan Pajak, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
- Denda SPT Masa PPN	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
- Denda SPT Masa PPh Psl 21	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
- Jumlah	Rp. 7.200.000,00	Rp. 7.200.000,00

h. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo, biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 66.000.000,00 dan Rp. 52.800.000,00 adalah saldo hutang gaji (sebesar gaji pokok) kepada pegawai tetap (organic) atas nama Yulius Silas Lapenangga sejak Januari 2013.

i. Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp. 93.431.256,00 adalah saldo bawaan neraca per 31 Desember 2012 yang penyusunannya diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT.

Saldo hutang lain-lain tersebut tidak dapat dirinci krediturnya.

j. Penyertaan Pemerintah Kabupaten

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada PD. "Ita Esa" yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Per 31-12-2018

1) Penyertaan berupa uang :

- s/d tahun 2012	Rp. 3.000.000.000,00
- Tahun 2017	Rp. 500.000.000,00
- Tahun 2018	Rp. 0,00
Sub Jumlah	Rp. 3.500.000.000,00

2). Penyertaan berupa barang :

- s/d tahun 2012	Rp. 400.000.000,00
Jumlah	Rp. 3.900.000.000,00

k. Laba/(Rugi) Ditahan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba ditahan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp. 3.033.309.232,00) dan (Rp. 2.952.784.232,00).

l. Saldo Laba Tahun Berjalan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba tahun berjalan 2018 dan 2017, masing-masing sebesar (Rp. 97.516.433,00) dan (Rp. 80.525.000,00).

d. PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI)

a. Pendapatan

1). Pendapatan usaha agen pupuk

Perusahaan memiliki unit usaha menjadi agen penjualan pupuk sekaligus penggangkutan pupuk dari gudang ke lini III kekelompok tani, namun usaha ini sejak tahun 2012 tidak aktif.

Pada tahun 2018 tidak ada hasil penjualan.

2). Pendapatan usaha pengoperasian bus

Perusahaan memiliki 2 (dua) unit mobil bus merek Mitsubishi yang dikelola sebagai alat angkutan umum, namun usaha ini sejak tahun 2012 tidak aktif.

Pada tahun 2018 tidak ada usaha angkutan umum yang disebabkan karena kondisi alat angkutan yang telah rusak berat.

3). Pendapatan usaha sewa alat berat

Perusahaan memiliki beberapa unit alat berat antara lain berupa buldozer, Vibrator dan loader, namun usaha ini sejak tahun 2012 tidak aktif karena peralatan alat berat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Beban Pegawai

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai tahun 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2018	Tahun 2017
- Gaji PNS diperbantukan	Rp. 33.750.000,00	Rp. 35.910.000,00
- Gaji Pegawai Tetap	Rp. 0,00	Rp. 13.200.000,00
	Rp. 33.750.000,00	Rp. 49.110.000,00

c. Beban Bahan Bakar Minyak

Beban Bahan Bakar Minyak Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 5.400.000,00

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.565.000,00 jumlah tersebut merupakan beban pembuatan papan nama kantor yang baru di kompleks perkantoran bumi Ti'i Langga Permai

e. Beban Kantor

Beban Kantor Tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 jumlah tersebut merupakan beban Penyusunan Laporan Keuangan dan Audit

f. Beban umum lainnya

Jumlah tersebut merupakan beban denda atas kelalaian menyampaikan SPT masa PPN dan PPH pasal 21 tahun 2015 sesuai surat tagihan pajak, yang belum disetor perusahaan ke kas Negara per 31 Desember 2018, dengan rincian :

	Tahun 2018	Tahun 2017
- Denda SPT masa PPN	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00
- Denda SPT masa PPh Psl 21	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
Jumlah	Rp. 7.200.000,00	Rp. 7.200.000,00

g. Beban Badan Pengawas

Jumlah tersebut merupakan beban gaji Badan Pengawas tahun 2018 yaitu sebesar Rp.12.757.500,00 dan tahun 2017 sebesar Rp.12.757.500,00

LAMPIRAN I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PERUSAHAAN DAERAH *"ITA ESA"*
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai, Jl. Lekunik – Ba'a

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Posisi PER 31 DESEMBER 2018

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Perusahaan Daeraha " Ita Esa" Kabupaten Rote Ndao, kami :

Nama : Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Jabatan : Plt. Direktur PD. " Ita Esa"

Dalam jabatan tersebut, telah melakukan pemeriksaan Kas Perusahaan Daerah " Ita Esa", yang dikuasai oleh :

Nama : Fillo N. Ngge'o

Jabatan : Bendahara/Pemegang Kas

Yang sesuai dengan jabatannya ditunjuk sebagai Bendahara/Pemegang Kas pada Perusahaan Daerah " Ita Esa", dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah uang tunai (uang kertas, logam dan kas/bon) (lihat lampiran)	Rp.	0,00
- Jumlah uang menurut administrasi / Buku Kas Umum	Rp.	0,00
- Selisih	Rp.	0,00

Selisih disebabkan : .....

Demikian Berita Acara Opname Kas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ba'a, 31 Desember 2018

Bendahara/Pemegang Kas

Fillo N. Ngge'o

Plt. Direktur

PEMERINTAH DAERAH PD. ITA ESA KABUPATEN ROTE NDAO

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Lampiran

Berita Acara Pemeriksaan Kas

RINCIAN UANG KAS DAN SURAT BERHARGA

1.	Uang Kertas			
	Seri Rp 100.000,00	10 lembar	Rp	0,00
	Seri Rp 50.000,00	20 lembar	Rp	0,00
	Seri Rp 20.000,00	1 lembar	Rp	0,00
	Seri Rp 10.000,00	2 lembar	Rp	0,00
	Seri Rp 5.000,00	...	Rp	0,00
	Seri Rp 2.000,00	...	Rp	0,00
	Seri Rp 1.000,00	...	Rp	0,00
	Seri Rp 500,00	...	Rp	0,00
2.	Uang Logam			
	Seri Rp 1.000,00	...	Rp	0,00
	Seri Rp 500,00	...	Rp	0,00
3.	Surat Berharga			
	Surat Berharga/meterai	...	Rp	0,00
4.	Kas Bon			
	Kas Bon/Bukti Pengeluaran	...	Rp	0,00
	Jumlah		Rp	0,00

Ba'a, 31 Desember 2018

Bendahara/Pemegang Kas

Fillo N. Ngge'o

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN ROTE NDAO

Laporan Auditor Independen
Dan
Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2023

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN ROTE NDAO

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Modal	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 14

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Jln. Namodale Telp/Fax. (0380) 871265 Ba'a
Email : pdamrotendao05@gmail.com
TIRTA DHARMA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ROTE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIDIK P. B. MESSAKH, ST
Alamat Kantor	: Jalan Christian Nehemia Dillak, SH
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote;
2. Laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rote, 28 Maret 2024

METERAI TEMPEL
88236AKX710478496

DIDIK P. B. MESSAKH, ST
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00067/3.0410/AU.2/03/1624-2/1/III/2024

Yth,
Dewan Pengawas dan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk kemungkinan dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian

Terdapat aset tetap berasal dari Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah II Nusa Tenggara Timur, yang sudah dimanfaatkan sejak tahun 2020 tetapi belum dicatat. Demikian pula perolehan aset tetap tanah yang sudah ada pelepasan hak di 21 lokasi sumber air, namun belum dicatat dalam laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo & Rekan

00067

Danang Rahmat Surono, CPA
No. Reg. Izin AP. 1624

28 Maret 2024

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ROTE NDAO
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2b,3	612.909.411	514.569.142
Piutang Usaha - Bersih	2c,4	1.623.724.812	1.065.596.645
Piutang Lain-Lain	5	415.382.159	407.695.159
Persediaan	2d,6	262.225.380	235.776.400
Jumlah Aset Lancar		**2.914.241.762**	**2.223.637.346**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	2e,7	7.985.900.872	8.198.984.764
Aset Lain-Lain - Bersih	2f,8	2.706.571.260	2.710.571.258
Jumlah Aset Tidak Lancar		**10.692.472.132**	**10.909.556.022**
JUMLAH ASET		**13.606.713.894**	**13.133.193.368**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Lain-Lain	2h,9	58.393.156	58.393.156
Utang Pajak	2h,11	160.277.284	160.277.284
Beban Masih Harus Dibayar	10	4.740.725	60.077.913
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**223.411.165**	**278.748.353**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Imbalan Kerja Karyawan	2g,12	2.925.125.829	3.132.344.214
JUMLAH KEWAJIBAN		**3.148.536.994**	**3.411.092.567**
EKUITAS			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	13	17.162.688.740	16.662.688.740
Bantuan Pemda Kabupaten YBD Statusnya	14	6.674.904.000	6.674.904.000
Modal Donasi	15	100.238.957	100.238.957
Defisit	16	(13.479.654.797)	(13.715.730.896)
JUMLAH EKUITAS		**10.458.176.900**	**9.722.100.801**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**13.606.713.894**	**13.133.193.368**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN	2j,18	6.094.196.480	4.954.944.919
BEBAN USAHA	2j,19	(6.157.241.149)	(5.710.544.499)
RUGI KOTOR		**(63.044.669)**	**(755.599.580)**
Pendapatan Non-Operasional	2j,20	54.457.200	19.973.334
Beban Non-Operasional	2j,21	(611.526)	(738.331)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		**(9.198.995)**	**(736.364.577)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		**(9.198.995)**	**(736.364.577)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	Penyertaan Modal Pemerintah YBD Statusnya	Hibah	Defisit	Jumlah Ekuitas
Saldo Tanggal 1 Januari 2022	**16.162.688.740**	**6.674.904.000**	**100.238.957**	**(12.842.206.375)**	**10.095.625.322**
Koreksi Tahun Lalu	-	-	-	(137.159.944)	(137.159.944)
Tambahan Penyertaan Modal	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(736.364.577)	(736.364.577)
Saldo Tanggal 31 Desember 2022	**16.662.688.740**	**6.674.904.000**	**100.238.957**	**(13.715.730.896)**	**9.722.100.801**
Tambahan Penyertaan Modal	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Koreksi Saldo Defisit	-	-	-	245.275.094	245.275.094
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(9.198.995)	(9.198.995)
Saldo Tanggal 31 Desember 2023	**17.162.688.740**	**6.674.904.000**	**100.238.957**	**(13.479.654.797)**	**10.458.176.900**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	2023	2022
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		
Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan	(9.198.995)	(736.364.577)
Koreksi Tahun Lalu		
Penyesuaian Untuk:		
Beban Penyusutan Aset Tetap	701.081.512	685.922.192
Penyisihan Piutang Usaha	201.348.883	296.613.013
Koreksi Rugi Tahun Lalu	245.275.094	(137.159.944)
Laba Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi	1.138.506.494	109.010.684
Penurunan (Kenaikan) Dalam Aset dan Kewajiban Operasi:		
Piutang Usaha	(759.477.050)	182.315.500
Piutang Lain-lain	(7.687.000)	(199.241.126)
Persediaan	(26.448.980)	(147.100.400)
Aset Lain-lain	3.999.998	-
Utang Usaha	(53.652.431)	-
Beban masih Harus Dibayar	(1.684.757)	(183.913.255)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(207.218.385)	478.296.348
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	**86.337.889**	**239.367.751**
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(487.997.620)	(445.075.699)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000	500.000.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	**98.340.269**	**294.292.052**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	**514.569.142**	**220.277.090**
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**612.909.411**	**514.569.142**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN ROTE NDAO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

1. U M U M

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 6 Mei 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, yang merupakan pemisahan dari PDAM Kabupaten Kupang. Pemisahan PDAM Kabupaten Rote Ndao dari PDAM Kabupaten Kupang seiring dengan pembentukan Kabupaten baru Rote Ndao berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184) Peraturan Daerah tentang Pendirian PDAM Kabupaten Rote Ndao telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 27 Mei Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 024, dijabarkan dalam peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2013 tentang pendirian perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao.

Tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Struktur Organisasi dan Personalia.

Struktur organisasi dan uraian tugas Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

a. Bupati, selaku Penanggung jawab Perusahaan;
b. Dewan Pengawas;
c. Manajemen terdiri dari:
   - Direktur
   - Kepala Bagian Umum dan Keuangan
   - Kepala Bagian Teknik
   - Kepala Unit Pelayanan Teknis IKK

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rote Ndao ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 2.6/KEP/HK/2020 tanggal 7 Januari 2020 untuk masa jabatan 2020 - 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Leksi N. Feoh, S.T
Sekretaris	:	Dra. Endang Pristiwati, M.Si
Anggota	:	Daud Ayub Mandala, S.E

Direktur

Direktur perusahaan dijabat oleh Didik Paulus Benyamin Messakh, S.T yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 382/KEP/HK/2020 tanggal 17 Oktober 2020

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia PDAM Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 berjumlah 72 orang, terdiri 1 Direktur, 54 pegawai tetap dan 17 pegawai tidak tetap. Tahun sebelumnya jumlah pegawai 72 orang, dengan mutasi keluar atau pensiun 2 orang pegawai tetap dan mutasi masuk 2 orang pegawai tidak tetap.

1. U M U M (lanjutan)

Sumber Daya Manusia (lanjutan)

Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari Sarjana Lengkap (S1) 5 Orang, Diploma (D3) 2 Orang, SLTA 65

Aktivitas Pengendalian Internal

Secara umum aktivitas pengendalian internal atas administrasi keuangan dilaksanakan secara manual, berdasarkan *system single entry* mengandalkan daftar-daftar dan laporan bulanan.

Perusahaan dalam meningkatkan aktivitas pengendalian internal melalui kerjasama dengan PT Bima Sakti Altera, Bali menyediakan aplikasi komputer, namun masih terbatas pada 4 dari 14 modul ideal, yaitu :

- Pembacaan meter, menggunakan kamera *Handphone*;
- *Billing*, terbatas mutasi piutang air tahun 2022;
- Loket, dan;
- Perencanaan dan distribusi (Subbag dan Hublang)
- Bagian Keuangan
- Gudang
- Personalia dan Umum

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PDAM Kabupaten Rote Ndao untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disusun oleh manajemen berdasarkan pada beberapa kebijakan akuntansi yang penting adalah:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali atas persediaan yang terjadi penurunan nilai karena rusak atau usang, dinyatakan sebesar nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan atau menjual.

Laporan keuangan disusun menggunakan metode akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, dan dibulatkan ke atas menjadi rupiah penuh.

b. Kas dan Bank

Kas terdiri dari uang tunai di kas kecil (*petty cash*) dan saldo rekening tabungan (giro) bank yang siap setiap saat digunakan, dan tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan Perusahaan. Setara Kas meliputi deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan, dan tidak dijaminkan atas hutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat dan disajikan berdasarkan besarnya piutang yang benar-benar dapat ditagih. Perusahaan menetapkan penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan dan kolektibilitas masing-masing piutang pada setiap akhir periode. Sejak Tahun 2021, Perusahaan menerapkan Perhitungan Penyisihan Piutang mengacu ketentuan Kepmenotda Nomor 8 Tahun 2000, dengan tarif sebagai berikut:

Umur Piutang	Tarif Penyisihan
1 - 3 bulan	0%
3 - 6 bulan	30%
6 - 12 bulan	50%
12 - 24 bulan	75%
Diatas 24 bulan	100%

Sebelumnya Perusahaan menghitung Piutang Air Berdasarkan Metode efektifitas penagihan rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir.

d. Persediaan

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehannya, penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat penurunan nilai persediaan. Besarnya penyisihan penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

e. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus secara tahunan dimulai sejak tahun pengadaan, dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perpajakan, sebagai berikut:

	Masa Manfaat	Tarif
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%
Bangunan Non Permanen	10 Tahun	10%
Instalasi Sumber dan Pengolahan Air	20 Tahun	5%
Instalasi Pompa	20 Tahun	5%
Instalasi Transmisi dan Distribusi	20 Tahun	5%
Kendaraan	8 Tahun	12,5%
Perlatan dan Perlengkapan	4 Tahun	25%
Inventaris dan Perabot Kantor	4 Tahun	25%

Masa Manfaat Ekonimis, Nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku Prospektif.

f. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud dapat diakui hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa yang akan datang dari aset tersebut;
2. Beban perolehan aset atau nilai aset dapat diukur dengan andal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Aset dapat diidentifikasi sebagai aset tak berwujud jika:

1. Dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
2. Muncul dari hak kontraktual atau hukum lainnya.

Aset tak berwujud diukur sebesar beban perolehannya, yang meliputi harga beli, bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta beban lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam rangka mempersiapkan aset sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen.

Aset tak berwujud diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya. Umur manfaat aset tak berwujud yang berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode ekspektasi penggunaan aset tersebut. Jika kontraktual atau hukum lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbaharui, maka umur manfaatnya termasuk periode yang diperbaharui hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan hak tersebut yang dilakukan oleh perusahaan tanpa beban yang signifikan.

Aset tak berwujud yang tidak dapat diestimasi umur manfaatnya, maka umur manfatnya dianggap 10 (sepuluh) tahun.

g. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja adalah semua bentuk kewajiban yang diberikan oleh Perusahaan sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh dewan pengawas, direksi, dan pegawai. Seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada Perusahaan selama periode pelaporan, diakui dan dicatat sebagai beban.

Imbalan pasca kerja yang diterapkan oleh Perusahaan dikategorikan menjadi:

1. Program Iuran Pasti, diberlakukan kepada pegawai dan direksi, adalah program imbalan pasca kerja dimana PDAM membayar iuran tetap kepada entitas terpisah (perusahaan asuransi atau pengelola dana pensiun), dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran tambahan, sehingga jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayarkan PDAM ditambah hasil investasi iuran tersebut.
2. Program Imbalan Pasti, diberlakukan kepada direksi dan pegawai, adalah program imbalan pasca kerja dimana PDAM menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja atau mantan pekerja, dan risiko aktuarial dan risiko investasi secara substantif berada pada PDAM. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui selama periode berjalan dalam laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Hutang atau Kewajiban

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya.
Kewajiban jangka panjang diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Kewajiban bunga atas kewajiban jangka panjang yang timbul selama masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang, dicatat dalam perkiraan "Kewajiban Bunga Masa Tenggang".
Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya. Kewajiban jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang.

i. Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

Kewajiban diestimasi diakui di dalam neraca sebagai kewajiban dan sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Apabila kemungkinan terjadi, perusahaan akan diisyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada masa yang akan datang dengan jumlah kewajiban yang dapat diestimasi secara handal.

Termasuk didalam kewajiban diestimasi adalah pembayaran pesangon, uang penghargaan, jasa pengabdian, dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada karyawan dan direksi pada saat yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa jabatannya.

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak dapat diakui karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut:

1. Kemungkinan (lebih mungkin dibanding tidak mungkin) terjadi bahwa perusahaan akan disyaratkan untuk mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.
2. Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan handal.

PDAM Kabupaten Rote Ndao tidak mengakui kewajiban kontijensi sebagai kewajiban.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

1. Pendapatan Usaha diakui pada saat produk (air dan non air) telah diterima pembeli atau pelanggan.
2. Beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

3. BANK

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Kas		
Kas Besar	36.970.580	-
Bank		
Bank NTT Ba'a		
No. Rek. 014 01-09-000002-1	482.603.081	466.158.360
Bank BTN Ba'a		
No. Rek. 014 01-09-000004-4	93.335.750	48.410.782
Sub Jumlah	575.938.831	514.569.142
Jumlah	**612.909.411**	**514.569.142**

4. PIUTANG USAHA

Merupakan saldo piutang rekening air per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang Rekening Air	4.024.137.469	3.264.660.419
Piutang non-Air	192.947.837	192.947.837
Jumlah	4.217.085.306	3.457.608.256
Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang	(2.593.360.494)	(2.392.011.611)
Bersih	**1.623.724.812**	**1.065.596.645**

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah Penyisihan Piutang Usaha tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya Piutang usaha dikemudian hari.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Merupakan saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Yahya B. F. Sodak	106.264.000	106.264.000
Aplonia Luruk	59.688.826	62.088.826
Vinsensius. P. Kahan	41.485.000	41.485.000
Rudi Indratno	37.518.937	37.518.937
Matius Lende	30.790.000	32.590.000
Ari H. Djonu	29.960.000	30.210.000
Sitti Nuraini	22.360.000	22.360.000
Marselina A. Bullu	21.031.000	-
Ridwaan Meno	19.931.510	21.611.510
Adam Lani	10.700.000	10.700.000
Apelheid Da Silva	8.990.000	8.990.000
Yopi N. Ndun	6.645.000	8.445.000
Aplonia Luruk	5.956.286	7.156.286
Armindo A.Tuile	3.832.600	3.832.600
Adriei O. Lav	3.339.160	3.339.160
Leni Th. Nggebu	3.140.000	4.940.000

5. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

	2023	2022
Willy Bernadus	2.720.000	2.720.000
Ervin B.Dethan	800.000	2.000.000
Suhadi Taha	-	504.000
Abdulah Syukur	-	500.000
Melsiani. A. Panie	-	160.000
Abrianus Kabelen	-	280.000
Piutang Lain-lain	**415.382.159**	**407.695.319**

Administrasi piutang pegawai lemah, terdapat penerimaan cicilan piutang beberapa pegawai namun tidak dicatat timbulnya piutang sehingga tidak diketahui saldonya. Hal ini terjadi karena disamping petugas yang seringkali diganti, terdapat perangkapan fungsi pemotongan gaji, penyetoran dan pencatatan dalam satu tangan sehingga melemahkan pengendalian internal Perusahaan.

6. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Bahan Instalasi	240.516.580	235.776.000
Bahan Operasi Lainnya	21.708.800	-
Jumlah	**262.225.380**	**235.776.000**

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai persediaan yang disajikan di atas tidak melebihi nilai jual atau realisasi bersihnya. Oleh sebab itu, manajemen tidak membentuk penyisihan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan terhadap nilai realisasi bersihnya. Manajemen tidak membentuk penyisihan atas penurunan nilai maupun keusangan persediaan mengingat semua persediaan dapat digunakan.

7. ASET TETAP

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
Harga Perolehan:		
Tanah	9.000.000	9.000.000
Instalasi Sumber Air	569.923.700	568.423.700
Instalasi Tranmisi dan Distribusi	13.143.071.956	12.740.491.836
Perlengkapan atau Peralatan	111.125.185	111.125.185
Kendaraan	311.229.000	311.229.000
Inventaris atau Perabot Kantor	608.763.650	524.846.150
Jumlah Nilah Perolehan Aset Tetap	14.753.113.491	14.265.115.871
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.767.212.619)	(6.066.131.107)
Nilai Buku	**7.985.900.872**	**8.198.984.764**

8. ASET LAIN-LAIN

Jumlah aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Aset Tetap Rusak atau Tidak Berfungsi		
Harga Perolehan	3.251.078.000	3.251.078.000
Akumulasi Penurunan Nilai	(3.251.077.999)	(3.251.077.999)
Sub-jumlah	1	1
Investasi Imbalan Pasti Dana Pensiun pada Dapenmapamsi	2.706.571.258	2.698.571.257
Business Plan 2021 – 2026		
Harga Perolehan	20.000.000	20.000.000
Akumulasi Amortisasi	(19.999.999)	(8.000.000)
Sub-jumlah	1	12.000.000
Jumlah	**2.706.571.260**	**2.710.571.258**

Investasi Imbalan Pasti Dana Pensiun merupakan kekayaan jangka panjang atas penyertaan pegawai perusahaan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Perpamsi pusat.

Melalui program ini, pegawai peserta pada usia pensiun mendapatkan imbalan pasti (hak pensiun) sesuai perhitungan aktuaria. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 2.706.571.258 dan Rp 2.698.571.257.

9. UTANG LAIN-LAIN

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 akun ini merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 58.393.156 dan Rp 58.393.156.

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 akun ini merupakan gaji karyawan dan direktur masing-masing sebesar Rp 4.740.725 dan Rp 60.077.913

11. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
PPh Pasal 21	28.457.736	28.457.736
PPh Pasal 4 (2)	131.819.548	131.819.548
Jumlah	**160.277.284**	**160.277.284**

Manajemen tidak lagi melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu menyetor ke kas Negara PPH Final setiap bulan sebesar 1% dari Peredaran Bruto, dengan pertimbangan perusahaan dari tahun ke tahun terus merugi. Alasan ini dikarenakan Perusahaan bukan badan usaha komersil murni melainkan membawa misi sosial pelayanan air kepada Masyarakat. Disamping itu, posisi Perusahaan berkategori "berpenghasilan kecil".

12. IMBALAN PASCA KERJA

Jumlah sebesar Rp 2.925.125.829, merupakan kewajiban jangka panjang investasi dana pensiun pegawai kepada Dapenmapamsi dalam program kerja imbalan pasti bagi 60 (enam puluh) pegawai PDAM Kabupaten Rote Ndao yang pada saat ini terdaftar, berdasarkan laporan No 1027/DP.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dari Perpamsi Pusat serta penjumlahan dari Total Pembayaran Iuran Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

13. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada PDAM Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 17.162.688.740 dan Rp 16.762.927.697.

Penyertaan ini dalam bentuk uang dan barang. Perusahaan belum dapat menyajikan rincian Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal tersebut dari Tahun ke Tahun.

14. PENYERTAAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA

Saldo Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 6.674.904.000 dan Rp 6.674.904.000 merupakan penerimaan aset dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang belum di perda-kan sebagai penyertaan modal. Pos ini menampung untuk sementara pembiayaan pemerintah baik daerah sebagai pemilik Perusahaan maupun pemerintah pusat, sambil menunggu terbitnya peraturan daerah penyertaan modal.

15. MODAL HIBAH

Jumlah modal donasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 100.238.957 merupakan bantuan aset tetap dari pihak lain diluar pemilik Perusahaan.

16. DEFISIT

Jumlah tersebut merupakan defisit per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.479.654.797 dan Rp 13.715.730.896, dengan rincian sebagai berikut:

Defisit per 31 Desember 2022	(13.715.730.896)
Koreksi Saldo Awal Defisit	245.275.094
Laba periode 31 Desember 2023	(9.198.995)
Defisit per 31 Desember 2023	**(13.479.654.797)**

17. RUGI TAHUN BERJALAN

Jumlah tersebut merupakan saldo rugi tahun berjalan per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 9.198.995 dan Rp 736.364.577.

18. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Penjualan Air	5.808.497.480	4.853.324.919
Penjualan non-Air	285.699.000	101.620.000
Jumlah	**6.094.196.480**	**4.954.944.919**

19. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Beban umum dan administrasi	3.144.104.419	3.077.312.956
Beban sumber	1.714.736.685	1.365.223.972
Beban transmisi dan distribusi	1.280.152.962	1.268.007.571
Jumlah	**6.138.994.066**	**5.710.544.499**

20. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Pendapatan Lainnya	37.624.501	-
Pendapatan Potongan Absensi	15.390.000	18.705.000
Jasa Giro	1.442.699	1.268.334
Jumlah	**54.457.200**	**19.973.334**

21. BEBAN LAIN-LAIN

Jumlah tersebut merupakan beban administrasi bank dan potongan PPh atas jasa giro per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp 611.526 dan Rp 738.331.

22. PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 19 Maret 2024.